

ABDURRAHMAN WAHID

ISLAMKU ISLAM ANDA ISLAM KITA

Agama Masyarakat Negara Demokrasi

ABDURRAHMAN WAHID

ISLAMKU ISLAM ANDA ISLAM KITA

AGAMA MASYARAKAT NEGARA DEMOKRASI

PENYUNTING DAN KATA PENGANTAR:
DR. M. SYAFI'I ANWAR

PENYELARAS AKHIR:
AHMAD SUAEDY, RUMADI, GAMAL RERDHI

DESAIN COVER: M.NOVI, WIDHI CAHYA
LAY-OUT: HANUNG SETO, M. ISNAINI "AMAX'S"

EDISI DIGITAL

REDESAIN COVER DAN LAY-OUT: PRIYANTO
REDAKSI: ANICK HT



JAKARTA 2011



PENGANTAR REDAKSI

(Edisi Cetak)

Bahwa "Tuhan tidak perlu dibela", itu sudah dinyatakan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam suatu tulisannya yang kemudian menjadi judul salah satu buku kumpulan karangannya yang diterbitkan beberapa tahun lalu. Tapi, bagaimana dengan umat-Nya atau manusia pada umumnya?

"Merekalah yang sebenarnya justru perlu dibela" ketika mereka menuai ancaman atau mengalami ketertindasan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Konsekuensi dari pembelaan, adalah kritik, dan terkadang terpaksa harus mengecam, jika sudah melewati ambang toleransi. "Pembelaan", itulah kata kunci dalam esai-esai kumpulan tulisan Abdurrahman Wahid kali ini. Maka, bisa dikatakan, esai-esai ini berangkat dari perspektif korban, dalam hampir semua kasus yang dibahas.

Wahid tidak pandang bulu, tidak membedakan agama, etnis, warna kulit, posisi sosial, agama apapun untuk melakukannya. Bahkan, Wahid tidak ragu untuk mengorbankan *image* sendiri—sesuatu yang seringkali menjadi barang mahal bagi mereka yang merasa sebagai politisi terkemuka— untuk membela korban yang memang perlu dibela. Maka orang sering terkecoh bahwa seolah Wahid sedang mencari muka ketika harus mengorbankan dirinya sendiri. Munculnya tuduhan sebagai ketua ketoprak, klenik, neo-PKI, dibaptis masuk Kristen, kafir, murtad, agen Zionis Yahudi dan sebagainya, tidak akan menjadi beban bagi dirinya ketika harus membela korban.

Bahkan jika dia sendiri yang jadi korban, tidak akan ragu juga untuk memperjuangkannya, seperti kasus diskriminasi yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam

pemilihan presiden 2004. Hanya untuk tidak meloloskan dia menjadi calon presiden, KPU merekayasa sebuah aturan yang aneh *bin* diskriminatif dengan melanggar UUD 45 dan perundangan-undangan yang ada, yang di masa depan yang panjang, mungkin baru akan terasa bahwa hal itu akan menjadi problem besar bangsa Indonesia untuk menegakkan demokrasi dan kedaulatan hukum. Meskipun ia selama ini selalu menjadi pembela orang lain, ia tidak ambil pusing -ketika dirinya menjadi korban, tak ada yang membantu atau membelanya.

Wahid dalam esai-esainya ini melakukan pembelaan mulai dari Inul Daratista yang dikeroyok oleh para seniman terkemuka di Jakarta dengan alasan agama, Ulil Abshar Abdalla aktivis Islam Liberal yang divonis hukuman mati juga dengan alasan agama Islam oleh para ulama terkemuka, Abu Bakar Ba'asyir yang menjadi tertuduh secara semena sebagai dalang teroris sebelum proses hukum, sampai ancaman untuk menutup pesantren Al-Mukmin di Ngruki, Solo, tempat Ba'asyir mengajar oleh Polisi, karena dianggap sarang teroris.

Wahid juga melakukan pembelaan terhadap rakyat Irak dan Saddam Hussein dalam berhadapan dengan kejahatann Presiden Amerika Serikat George W. Bush Jr., rakyat Palestina yang terus menerus menjadi bulan-bulanan Israel, serta rakyat tertindas di negara-negara berkembang atas dominasi kapitalis dunia dalam globalisasi. Dan tentu saja, rakyat kecil yang menjadi korban kebijakan pemerintah sendiri. Mereka adalah rakyat Aceh yang terpaksa memilih bergabung dengan GAM, sebagian rakyat Papua yang terpaksa bergabung dengan OPM, serta rakyat Ambon yang menjadi korban rekayasa kekerasan. Begitu juga pemeluk agama minoritas, selalu menjadi subjek pembelaannya.

Satu hal yang dihindari Wahid -yang memproklamirkan diri sebagai pengikut setia Mahatma Gandhi- adalah kekerasan, termasuk yang dilakukan dari pihak korban. Hanya kalau orang Islam diusir dari rumahnya yang sah dengan semena-mena, kata Wahid menurut hukum Islam, mereka baru boleh melakukan kekerasan.

Di samping itu, Wahid juga menghindari satu sudut pandang saja dalam melihat banyak hal, termasuk agama. Judul utama buku ini memperlihatkan bahwa pluralitas diutamakan termasuk dalam melihat Islam: "Islam ku, Islam Anda, Islam Kita". Tak ada satu Islam, Islam adalah multi wajah, wajah manusiawi.

Pluralitas dalam melihat Islam dan kehidupan, dengan bersandar pada etika dan spiritualitas, itulah yang diusulkan Wahid, termasuk untuk mengelola dunia yang terus bergerak ke arah globalisasi ini: untuk perdamaian abadi dan saling menghormati antar bangsa dan antar manusia.

The Wahid Institute dengan senang hati mempersembahkan esai-esai ini yang ditulis Wahid pasca lengser dari kursi kepresidenan. Wahid Institute berhutang budi kepada banyak pihak, terutama kepada harian dan majalah yang tulisan-tulisannya dimuat dalam kumpulan ini; juga kepada mereka yang secara tekun mencatat, menyimpan dan memperbaiki jika perlu, atas semua naskah ini. Juga kepada Abdurrahman Wahid sendiri yang dengan rela memberikan naskah ini untuk diterbitkan. Terakhir rasa terima kasih yang besar disampaikan kepada Dr. M. Syafi'i Anwar Direktur ICIP (*International Center for Islam and Pluralism*), yang dalam kesibukannya menyelesaikan disertasi doktornya, masih menyempatkan diri untuk membaca, menseleksi dan memberikan saran perbaikan serta mensistematisasi dan memberi kata pengantar buku ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu per satu. Kami hanya bisa mengucapkan semoga amal ibadah bapak ibu sekalian diterima oleh Allah Swt. Amiiin.

Selamat membaca,

Jakarta, Maret 2005

THE WAHID Institute



ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA

MEMBINGKAI POTRET PEMIKIRAN POLITIK KH ABDURRAHMAN WAHID

OLEH M. SYAFI'I ANWAR

Pada mulanya adalah sebuah pertemuan. Tepatnya pertemuan antara saya dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tanggal 11 Oktober 2001 di rumahnya, di kawasan Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu itu saya menemuinya untuk keperluan wawancara dalam rangka penulisan disertasi yang sedang saya tulis pada Departement of Indonesian Studies, University of Melbourne, Australia. Hari masih pagi, kira-kira pukul 8 ketika saya datang ke rumah Gus Dur. Tapi sepagi itu deretan orang yang antri untuk bertemu Gus Dur sudah cukup panjang. Gus Dur baru selesai mandi pagi ketika saya datang. Segera saja Mas Munib, ajudan Gus Dur memberitahukan bahwa saya sudah datang. Begitu diberitahu saya sudah datang, Gus Dur segera bertanya "Mana Mas Syafi'i?." Segera saya pun menghampiri dan menyalaminya. "Wawancaranya di mobil saja, ya Mas ...sambil jalan-jalan ...," ujarnya dengan rileks.

Tentu saja saya agak sedikit terkejut dengan tawaran mantan presiden RI ke-empat ini, meskipun senang juga karena Gus Dur bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukannya melayani ummat. Bagi seorang mantan wartawan seperti saya, tak ada masalah di mana pun tempat wawancara. Yang penting adalah kesediaan narasumber untuk diwawancara. Namun yang sedikit agak merisaukan saya justru pergi ke luar naik mobil dengan Gus Dur itu. Saya khawatir, orang-orang yang ingin bertemu dan sudah cukup lama menunggu itu akan kecewa karena mereka mengira Gus Dur akan pergi, sementara mereka sudah cukup lama menunggu. "Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah cukup lama menunggu itu. Nanti mereka kecewa karena mengira Gus Dur akan pergi. Wawancara di sini juga nggak apa-apa," kata saya. "Ah, *ndak* ada masalah. Mereka *kan* bisa menunggu, Munib sudah memberi tahu mereka, dan mereka maklum. Lagi pula Anda *kan* datang dari Australia dan waktu Anda di sini tidak banyak," kata Gus Dur. Akhirnya saya pun tak dapat menolak ajakannya. Bersama sopirnya, kami berdua berkeliling naik mobil, berputar-putar di kawasan Ciganjur dan Pasar Minggu.

Selama hampir satu jam sopir membawa kami berputar-putar di kawasan tersebut, sementara saya sibuk merekam dan mencatat hasil wawancara. Kadang-kadang kami berdua tertawa tergelak-gelak, terutama kalau Gus Dur membuat *joke-joke* yang segar tentang berbagai soal politik mutakhir. Gus Dur menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan, disertai dengan argumen-argumen yang kaya wawasan, bahkan dengan banyak kutipan ayat-ayat suci al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi landasan jawabannya. Ketika sopir menghentikan mobil di rumah Gus Dur, wawancara pun belum selesai dan dilanjutkan kembali di rumah. Tapi saya segera membatasi diri untuk tidak berlama-lama lagi karena mempertimbangkan banyaknya orang yang sudah antri. Sewaktu hendak pulang, Gus Dur berkata: "Mas, saya ingin mempercayakan kepada *sampeyan* untuk mengedit dan memberi pengantar untuk kumpulan artikel saya. Ini kumpulan

artikel saya era pasca lengser. Anda kan wartawan, jadi bisa menggunting-gunting kumpulan tulisan itu."

Sejenak saya tertegun dengan permintaan dan ungkapan Gus Dur itu. Bagaimana pun saya merasa *surprise* dengan apa yang diungkapkan Gus Dur. Bukan apa-apa, di satu sisi saya merasa mendapat kehormatan dengan kepercayaan itu. Tapi di sisi lain, saya merasa bahwa tugas mengedit dan memberi pengantar untuk buku kumpulan tulisan Gus Dur juga bukan pekerjaan sederhana. Masalahnya bukan saja karena waktu saya yang terbatas, tapi juga karena saya merasa bukan tokoh yang pas untuk mengedit dan memberi pengantar untuk tokoh sekaliber Gus Dur. Meskipun sebagai mantan wartawan mungkin saya banyak memperoleh informasi tentang sepak terjang seorang Gus Dur, baik sebagai tokoh nasional maupun *news maker*, tetapi itu tidak berarti saya paham dengan apa yang dilakukan. Apalagi pernyataan dan tindakan Gus Dur terkadang *nyleneh* dan kontroversial, bahkan tidak jarang menimbulkan polemik dan perdebatan antara mereka yang setuju dan tidak. Jangankan saya yang berlatar belakang Muhammadiyah, bahkan di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sendiri pun, pikiran dan sepak terjang Gus Dur tak selamanya bisa dipahami kalangan nahdliyin.

Terus terang pada awalnya saya khawatir, jangan-jangan *editing* dan kata pengantar yang akan saya lakukan nanti justru tidak berhasil memotret jalan pikiran yang sebenarnya atau otentisitas dari latar belakang ucapan dan tindakannya. Apalagi bagi sebagian besar warga nahdliyin, Gus Dur adalah figur yang dihormati, betapapun *nyleneh* dan kontroversialnya ucapan dan tindakannya. Bukan saja karena ia adalah cucu pendiri NU Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, tapi juga karena Gus Dur adalah ulama-intelektual NU terkemuka dan berwawasan kosmopolitan. Seorang tokoh yang berhasil membawa NU menembus dan membebaskan batas-batas orientasi, visi, dan wawasan tradisionalisme NU untuk masuk ke wacana modern, liberal, dan kosmopolitan sambil tetap menjaga kelestarian tradisi klasik Islam. Melalui Gus Dur, NU sebagai organisasi

Islam tradisional yang telah "mendunia" dan diperhitungkan dunia luar.[1]

Namun demikian, sebagai orang Muhammadiyah dan juga mantan wartawan, saya barangkali termasuk orang yang percaya bahwa Gus Dur adalah Gus Dur. Ia memang dilahirkan oleh sejarah sebagai tokoh terkemuka, tetapi ia bukan seorang wali atau figur yang *can do no wrong*. Ia tetap manusia biasa yang punya kekuatan dan kelemahan, dan tentu saja ia bisa salah dalam berfikir atau bertindak. Sekalipun kita mungkin tidak setuju terhadap gagasan dan sepak terjangnya, tetapi kita tetap harus *fair* untuk menilai kontribusinya dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Bagi saya, Gus Dur bersama-sama dengan intekletual Muslim lainnya telah memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia.[2]

Karena itu ketika dia menawari untuk mengedit dan memberi kata pengantar kumpulan tulisannya untuk dijadikan buku, secara spontan saya menerimanya. Pada saat itu saya cuma berkeyakinan bahwa kepercayaan dari seorang Gus Dur kepada saya tentu dengan pertimbangan tersendiri. Menariknya, ketika tawaran Gus Dur itu saya diskusikan dengan teman-teman, mereka dengan segera menganjurkan agar tawaran itu saya terima. Salah satu di antara sahabat saya yang memberikan dorongan agar saya mengerjakan pekerjaan editing dan memberi kata pengantar untuk kumpulan tulisan ini adalah Dr. Haidar Bagir, MA intelektual muda Muslim alumnus Universitas Harvard, yang

---

[1] Lihat Greg Barton dan Greg Fealy, eds., Nahdlatul Ulama, Tradisional Islam and Modernity in Indonesia, Clayton, Victoria: Monash Asia Institute, 1966; Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, terj. Jakarta Paramadina, 1999. Khusus tentang pemikiran dan kiprah Abdurrahman Wahid, lihat. hal.325-430 dan hal.488-501.

[2] Saya telah menulis analisis tentang pemikiran politik Nurcholish Madjid, Abdurrahmad Wahid, M. Amien Rais, A. Syafi'i Maarif, Moeslim Abdurahman, Kuntowijoyo, dan lain-lain dalam buku saya Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1995.

juga Direktur Penerbit Mizan. "Dengan mengedit dan memberikan kata pengantar yang kritis terhadap kumpulan tulisan Gus Dur, Anda bisa berperan untuk menjadi semacam "perantara" bagi simbiose intelektual di antara kalangan NU dan Muhammadiyah," ujar Haidar.

Ucapan Haidar itu mengingatkan saya pada Dr. Greg Barton, sahabat lama saya yang juga menjadi dosen di Deakin University, Australia. Dalam bukunya, Barton menyebut saya yang waktu itu menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan Berita *Ummat,* sebagai orang yang berusaha menjembatani hubungan Gus Dur dengan tokoh-tokoh modernis Muslim, terutama Amien Rais. Greg Barton mungkin sedikit berlebihan ketika menyebutkan peran saya sebagai perantara untuk menjembatani hubungan Gus Dur dengan tokoh-tokoh Islam modernis, walaupun saya bisa memahami apa yang dia maksud.[3] Yang jelas saya merasa dekat dengan siapa saja, baik dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun NU dan sejumlah cendekiawan Muslim lainnya. Karena sebagai wartawan, saya merasa nyaman dan akrab dengan berbagai tokoh dari kedua ormas terbesar di Indonesia itu, seperti Gus Dur, Mas Amien Rais, Bang Syafi'i Ma'arif, Gus Mus (KH Mustafa Bisri), Dr. Fahmi Saefuddin, M. Dawam Rahardjo, Kang Muslim Abdurrahman, dan lain-lain. Tentu saya juga merasa akrab dengan Cak Nur, Bang Hussein Umar, dan tokoh-tokoh cendekiawan lintas agama. Lepas dari perbedaan pendapat dan visi mereka dalam pergumulan ide dan percaturan politik, saya merasa merasa berhutang budi secara intelektual kepada mereka semua.

Adalah sejarahwan Prof. Dr. Taufik Abdullah yang juga memberikan dorongan positif kepada saya untuk mengedit dan memberikan kata pengantar buku Gus Dur ini. "Itu suatu kehor-

---

[3] Lihat Greg Barton, Biografi Gus Dur, Yogyakarta: LkiS, 2002, hal..313-314.

matan. Anda tak perlu ragu untuk untuk melakukannya. Saya sendiri merasa dekat dengan Gus Dur, sekalipun tidak semua pikiran dan tindakan politiknya saya setujui. Tapi kita harus jujur, jernih, dan bijak dalam menilai pikiran dan tindakan seseorang," ujarnya ketika kami bertemu di National University of Singapore, tahun 2004 yang lalu.

Dengan dorongan para sahabat dan para senior itulah, suntingan dan kata pengantar untuk kumpulan tulisan ini saya kerjakan.

Memperkuat Substansi Islam

Judul buku ini, *Islam ku, Islam Anda, Islam Kita*" diambil dari salah satu artikel yang ditulis Gus Dur. Ia dipilih karena dapat menggambarkan pengembaraan intelektual Gus Dur dari masa ke masa. Sebuah pengembaraan intelektual yang bukan saja tidak linear, tetapi juga berproses. Itu terlihat misalnya dalam pengakuan Gus Dur sendiri, yang melihat Islam sebagai agama yang tengah mengalami perubahan-perubahan besar. Diakui oleh Gus Dur bahwa di masa mudanya, di tahun-tahun 1950-an, ia mengikuti jalan pikiran Ikhwanul Muslimun, sebuah kelompok Islam "garis keras" yang pengaruhnya juga sampai ke Jombang, Jawa Timur. Bahkan Gus Dur juga ikut aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimun di kota kelahirannya itu. Lalu pada tahun 1960-an, Gus Dur tetarik untuk mendalami nasionalisme dan sosialisme Arab di Mesir dan Irak, tepatnya ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo dan Universitas Baghdad, Irak. Pengalaman menimba ilmu di kedua negara tersebut tentu berpengaruh terhadap perkembangan pemikirannya. Namun setelah kembali ke Indonesia di tahun 1970-an, Gus Dur melihat perkembangan dan dinamika baru Islam yang berbeda dengan di Timur Tengah. Ia melihat realitas bahwa Islam sebagai jalan hidup (*syari'at*) bisa belajar dan saling mengambil berbagai ideologi non-agama, bahkan juga pandangan dari agama-agama lain.

Selanjutnya Gus Dur mengatakan, pengembaraan intelektual itu menghasilkan dua hal sekaligus: pengalaman pribadinya tidak akan pernah dirasakan atau dialami oleh orang lain, sementara mungkin saja pengalaman Gus Dur punya kesamaan dengan orang lain yang punya pengembaraan sendiri. Persoalan apakah pengembaraan Gus Dur itu berakhir pada ekletisme yang berwatak kosmopolitan, sementara pengembaraan orang lain berakibat sebaliknya, tidaklah menjadi soal bagi Gus Dur. Sebab pengalaman pribadi seseorang tidak akan pernah sama dengan orang lain. Orang justru harus bangga dengan pikiran-pikirannya sendiri yang berbeda dengan orang lain.

Berangkat dengan pandangan semacam itu, Gus Dur menyimpulkan bahwa Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah Islam yang khas, yang diistilahkan sebagai "Islam ku". Tetapi Gus Dur menyatakan, "Islam ku" atau "Islamnya Gus Dur" perlu dilihat sebagai rentetan pengalaman pribadi yang perlu diketahui oleh orang lain, tetapi tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Sementara yang dimaksud dengan "Islam Anda", lebih merupakan apresiasi dan refleksi Gus Dur terhadap tradisionalisme atau ritual keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Gus Dur memberikan apresiasi terhadap kepercayaan dan tradisi keagamaan sebagai "kebenaran" yang dianut oleh komunitas masyarakat tertentu yang harus dihargai. Menurut Gus Dur, "kebenaran" semacam itu berangkat dari keyakinan, dan bukan dari pengalaman. Keberagamaan semacam itu diformulasikan oleh Gus Dur sebagai "Islam Anda" yang juga perlu dihargai. Adapun perumusan tentang "Islam Kita" lebih merupakan derivasi dari keprihatinan seseorang terhadap masa depan Islam yang didasarkan pada kepentingan bersama kaum Muslimin. Visi tentang "Islam Kita" menyangkut konsep integratif yang mencakup "Islam ku" dan "Islam Anda", dan menyangkut nasib kaum Muslimin seluruhnya. Dalam konteks ini, Gus Dur menyadari adanya kesulitan dalam merumuskan "Islam Kita". Itu karena pengalaman yang membentuk "Islam ku" berbeda bentuknya dari "Islam Anda", yang menyebabkan kesulitan tersendiri

dalam mencari formulasi atas "Islam Kita". Tetapi persoalan mendasar dalam konteks "Islam Kita" itu terletak pada adanya kecenderungan sementara kelompok orang untuk memaksakan konsep "Islam Kita" menurut tafsiran mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka ingin memaksakan kebenaran Islam menurut tafsirannya sendiri. Monopoli tafsir kebenaran Islam seperti ini, menurut Gus Dur bertentangan dengan semangat demokrasi.

Dari uraian yang secara agak panjang dipaparkan di sini, menjadi jelas kiranya bahwa perjalanan intelektual seorang Abdurrahman Wahid lebih merupakan "proses menjadi" (*process of becoming*), daripada "proses adanya" (*process of being*). Yang menarik dan hampir jarang diketahui adalah, bahwa seorang Gus Dur yang kita kenal sebagai pemikir liberal itu, di masa mudanya juga tertarik pada pemikiran Ikhwanul Muslimin yang umumnya sangat konsen dengan ideologisasi Islam. Tetapi setelah melalui pendidikan dan pengalaman pribadi, akhirnya mengantarkannya menjadi cendekiawan Muslim liberal, yang secara sadar menolak konsepsi atau gerakan yang mengusung tema-tema yang berorientasi pada ideologisasi Islam. Penjelasan ini cukup penting karena ia bisa menjadi semacam perspektif bahwa pendidikan, bacaan, dan pengalaman seseorang bisa merubah pandangan hidup dan pemikirannya. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa seseorang tidak seharusnya memonopoli atau memaksakan penafsirannya kepada orang.

Benang merah yang sangat penting dari pemikiran Gus Dur adalah penolakannya terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syari'atisasi Islam. Sebaliknya, Gus Dur melihat bahwa kejayaan Islam justru terletak pada kemampuan agama ini untuk berkembang secara kultural. Dengan kata lain, Gus Dur lebih memberikan apresiasi kepada upaya kulturalisasi (*culturalization).* Itu terlihat dengan jelas, misalnya, dari serial tulisannya yang berjudul "Islam: Ideologis Ataukah Kultural". Ketidak setujuan Gus Dur terhadap formalisasi Islam itu terlihat, misalnya terhadap tafsiran ayat Al Qur'an yang berbunyi *"udhkuluu fi al silmi kaffah",* yang seringkali ditafsirkan secara literal oleh para pen-

dukung Islam formalis. Jika kelompok Islam formalis yang menafsirkan kata "*al silmi*" dengan kata "Islami", Gus Dur menafsirkan kata tersebut dengan "perdamaian". Menurut Gus Dur, konsekuensi dari kedua penafsiran itu punya implikasi luas. Mereka yang terbiasa dengan formalisasi, akan terikat kepada upaya-upaya untuk mewujudkan "sistem Islami" secara fundamental dengan mengabaikan pluralitas masyarakat. Akibatnya, pemahaman seperti ini akan menjadikan warga negara non-Muslim menjadi warga negara kelas dua. Bagi Gus Dur, untuk menjadi Muslim yang baik, seorang Muslim kiranya perlu menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menegakkan profesionalisme, dan bersikap sabar ketika menghadapi cobaan dan ujian. Konsekuensinya, mewujudkan sistem Islami atau formalisasi tidaklah menjadi syarat bagi seseorang untuk diberi predikat sebagai muslim yang taat.

Masih dalam konteks formalisasi, Gus Dur juga menolak ideologisasi Islam. Bagi Gus Dur, ideologisasi Islam tidak sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia, yang dikenal dengan "negerinya kaum Muslim moderat". Islam di Indonesia, menurut Gus Dur, muncul dalam keseharian kultural yang tidak berbaju ideologis. Di sisi lain, Gus Dur melihat bahwa ideologisasi Islam mudah mendorong umat Islam kepada upaya-upaya politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan. Implikasi paling nyata dari ideologisasi Islam adalah upaya-upaya sejumlah kalangan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif terhadap Pancasila, serta keinginan sejumlah kelompok untuk memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta. Juga langkah-langkah sejumlah pemerintah daerah dan DPRD yang mengeluarkan peraturan daerah berdasarkan "Syari'at Islam". Menurut Gus Dur, upaya-upaya untuk "meng-Islamkan" dasar negara dan "men-syari'atkan" peraturan-peraturan daerah itu bukan saja a-historis, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengutip pendapat mantan Hakim Agung Mesir, Al-Ashmawi, upaya

syari'atisasi semacam itu menurut ilmu *fiqh* termasuk dalam *tahsil al-hasil* (melakukan hal yang tidak perlu karena sudah dilakukan).

Penolakan Gus Dur terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syari'atisasi itu mendorongnya untuk tidak menyetujui gagasan tentang negara Islam. Seperti sudah sering dinyatakannya, Gus Dur secara tegas menolak gagasan negara Islam. Sikapnya ini didasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup (*syari'at*) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Gus Dur mengklaim, sepanjang hidupnya ia telah mencari dengan sia-sia makhluk yang bernama negara Islam itu. "Sampai hari ini belum juga saya temukan. Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentang bagaimana negara dibuat dan dipertahankan". Dasar yang dipakai oleh Gus Dur ada dua. *Pertama*, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad wafat dan digantikan oleh Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dilakukan melalui *bai'at* oleh para kepala suku dan wakil-wakil kelompok ummat yang ada pada waktu itu. Sedangkan Abu bakar sebelum wafat menyatakan kepada kaum Muslimin, hendaknya Umar bin Khattab yang diangkat mengantikan posisinya. Ini berarti, sistem yang dipakai adalah penunjukkan. Sementara Umar menjelang wafatnya meminta agar penggantinya ditunjuk melalui sebuah dewan ahli yang terdiri dari tujuh orang. Lalu dipilihlah Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar. Selanjutnya, Utsman digantikan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Abu Sufyan juga telah menyiapkan anak cucunya untuk menggantikan Ali. Sistem ini kelak menjadi acuan untuk menjadikan kerajaan atau marga yang menurunkan calon-calon raja dan sultan dalam sejarah Islam.

Kedua, besarnya negara yang diidealisasikan oleh Islam, juga tak jelas ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum Muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya, negara Islam

yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*), ataukah hanya negara-kota (*city-state*).

Dari paparan tersebut di atas, cukup jelas kiranya ke arah mana alur pemikiran politik Gus Dur. Dalam konteks ini, sebagai warga Muhammadiyah yang mengamati perkembangan pemikiran politiknya, pada tahun 1995 lewat buku *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, saya mengelompokan pemikirannya ke dalam tipologi pemikiran substantif-inklusif.[4] Jika dalam aksi atau tindakan politiknya, mungkin saya bisa punya persepsi lain, dalam hal pemikiran politik saya tetap berpendapat bahwa pemikiran politik Gus Dur sampai sekarang tetap tidak berubah. Untuk itu, ada baiknya jika terlebih dahulu kita memahami paradigma pemikiran politik Islam yang berkembang di dunia kaum Muslimin. Paradigma itu adalah (1) substantif-inklusif, dan (2) legal-eksklusif.

Dalam paradigma pemikiran politik Islam yang substantif-inklusif, secara umum ditandai dengan keyakinan bahwa Islam sebagai agama tidak merumuskan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan politik. Adapun ciri-ciri yang menonjol pada pemikiran substantif-inklusif ada empat. *Pertama,* adanya kepercayaan yang tinggi bahwa Al Qur'an sebagai kitab suci berisikan aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupan manusia, tetapi tidak menyediakan detil-detil pembahasan terhadap setiap obyek permasalahan kehidupan. Argumen utama dari pendukung paradigma ini adalah, bahwa tak ada satu pun dari ayat Al Qur'an yang menekankan bahwa ummat Islam harus mendirikan negara Islam. Mereka berpendapat bahwa Al Qur'an memang memuat kandungan etika dan panduan moral untuk memimpin masyarakat politik, termasuk bagaimana menegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, demokrasi, dan lain-lain.[5]

Kedua, pendukung paradigma substantif-inklusif meyakini

---

[4] M. Syafi'i Anwar, op. cit., hal. 155-162.

bahwa missi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau negara. Tetapi seperti halnya para nabi lainnya, yakni mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebajikan. Dengan demikian missi Nabi Muhammad tidak perlu diartikan sebagai langkah untuk membangun negara atau sistem pemerintahan tertentu. Meminjam ungkapan pemikir Mesir Husain Fawzi al-Najjar, *concern* utama Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam adalah lebih tertuju pada upaya untuk mempersatukan para pemeluk Islam (*al- wihda al-ijtimai*) daripada membangun sebuah negara atau sistem pemerintahan.[6] Kenyataan kemudian terbukti bahwa sesudah Nabi Muhammad wafat, diperlukan waktu beberapa hari untuk melakukan musyawarah dan memutuskan siapa penggantinya, yang kemudian terpilih Abu Bakar. Sementara pergantian kepemimpinan para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali semuanya melalui sistem dan mekanisme yang berbeda.

Ketiga, para proponen paradigma substantif-inklusif berpendapat bahwa syari'at tidak dibatasi atau terikat oleh negara. Demikian pula syari'at tidak berkaitan dengan gagasan-gagasan spesifik yang berkaitan dengan pemerintahan atau sistem politik. Karena Islam dipandang semata-mata sebagai agama dan

---

[5] Husain Fawzi al-Najjar, al_Islam wa al-Siyasa: Bahth fi Usul al-Nazariyya al-Siyasiyya wa Nizam al-hukm fi al-Islam, Cairo: Dar al-Sha'b, 1977, hal. 74, dikutip dari Bassam Tibi, "The Idea of an Islamic State and the Call for the Implementation of the Shari'a", sebagian dimuat dalam Middle East Information Center dari The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder. Available at http://middleeastinfo.org/article4480.html, pp.1-16. Untuk pembahasan lebih mendalam soal paradigma ini, lihat misalnya, Qamaruddin Khan, Political Concepts in the Qur'an, Lahore: Islamic Book Foundation, 1982, hal..75-76; Fazlur Rahman, Islam, New York, Chicago, San Francisco: Holt, Rinehart, and Winston, 1966, hal. 101; Mohammed Arkoun, "The Concept of Authority in Islamic Thought," dalam Klauss amd Mehdi Mozaffari (eds.), Islam: State and Society, London: Curzon Press, 1988, hal. 70-71, M. Din Syamsuddin, "Islamic Political Thought and Cultural Revival in Modern Indonesia", Studia Islamika, Vol. 2, No.4, 1995, hal. 51-68.

[6] Husain Fawzi Al Najjar, op. cit.

bukannya sebuah sistem yang berkaitan dengan tertib negara, syari'at seharusnya tidak diletakkan ke dalam domain negara, tetapi tetap diletakkan dalam kerangka sistem keimanan Islam. Menurut Al Ashmawi, mantan hakim agung Mesir yang juga dikenal sebagai pemikir progressif Islam terkemuka, bahkan Al Qur'an sendiri menetapkan bahwa syari'at adalah sumber dari orientasi etika Islam dan tidak berhubungan dengan ajaran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk negara. Syari'at adalah sebuah jalan dan gerak langkah yang selalu dinamis dan membawa manusia pada tujuan –tujuan yang benar dan orientasi– orientasi etis yang mulia.[7]

Keempat, refleksi para pendukung paradigma substantif-inklusif dalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai–nilai Islam *(Islamic injuctions)* dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan, tetapi juga dalam format pemikiran dan kelembagaan politik mereka. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini cenderung untuk mengetengahkan eksistensi dan artikulasi nilai–nilai Islam yang intrinsik, dalam rangka mengembangkan wajah kultural Islam dalam masyarakat Indonesia modern. Proses kulturalisasi telah melahirkan kompetisi di antara berbagai kekuatan kultural, dan Islam hanyalah satu diantara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar supaya Islam dapat memenangkan persaingan itu, proses Islamisasi haruslah mengambil bentuk kulturalisasi dan bukannya politisasi.[8]

Sementara itu, paradigma legal-eksklusif mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. *Pertama*, paradigma legal-eksklusif dalam pemikiran politik Islam meyakini bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap,

---

[7] Al-Ashmawi, Usul al-Shari'a, Cairo: Maktabat Madbuli, 1983), hal. 53 and 93, dikutip dari Bassam Tibi, op. cit.

[8] M. Syafi'i Anwar, op. cit., hal. 144-145. Bandingkan dengan M. Din Syamsuddin, op. cit.hal. 51-68.

sebuah ideologi universal dan sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan ummat manusia. Para pendukung paradigma legal-eksklusif sepenuhnya yakin bahwa Islam adalah totalitas integratif dari "tiga d" : *din* (agama), *daulah* (negara), dan *dunya* (dunia). Konsekuensinya, seperti dikemukakan oleh Nazih Ayubi, paradigma ini didisain untuk mengaplikasikan semua aspek kehidupan, mulai dari soal *remeh temeh* masalah keluarga hingga menjangkau semua permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

Kedua, dalam realitas politik, pendukung paradigma legal-eksklusif mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk mendirikan negara Islam. Paradigma ini menghendaki agar ummat Islam selalu menjadikan kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya (*khulafa ar rasyidun*) dalam mengatur tatanan kemasyaratan, dijadikan sebagai referensi utama dan modal untuk mewujudkan "negara Islam yang ideal", dan menganjurkan penolakan sistemik terhadap konsep-konsep politik Barat. Akibatnya, paradigma ini mendorong ummat Islam untuk memperkuat identitas dan ideologi mereka sebagai "alternatif" terhadap sistem-sistem yang dipandang sebagai bertentangan dengan Islam.

Ketiga, para pendukung paradigma ini meyakini bahwa syari'at harus menjadi fundamen dan jiwa dari agama, negara, dan dunia tersebut. Syari'at dengan demikian diinterpretasikan sebagai Hukum Tuhan (*Divine Law*), dan harus dijadikan sebagai dasar dari negara dan konstitusinya, serta diformalisasikan ke dalam seluruh proses pemerintahan, dan menjadi pedoman bagi perilaku politik penguasa. Selanjutnya, paradigma ini juga menegasikan adanya kedaulatan rakyat, tetapi lebih yakin terhadap kedaulatan Tuhan, yang implementasinya harus didukung oleh syari'at. Konsekuensinya, paradigma ini menerapkan visi dan missi yang menegaskan dan mewajibkan setiap Muslim untuk menegakkan syari'at, apa pun yang akan terjadi, sebagai alternatif terhadap sistem-sistem dunia yang berlaku.

Keempat, dalam konteks politik paradigma legal-eksklusif menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan (*imagined Islam polity*); seperti mewujudkan suatu "sistem politik Islam," munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasi ketatanegaraan Islam. Dalam konteks Indonesia, pendukung paradigma legal-eksklusif sangat menekankan ideologis atau politisasi yang mengarah pada simbolisme keagamaan secara formal.

Dengan memahami kedua paradigma pemikiran politik Islam tersebut di atas, kita akan bisa memahami alasan Gus Dur menolak formalisasi, ideologisasi, dan syari'atisasi Islam tersebut di atas. Jelas kiranya bahwa sebagai pemikir Islam substantif-inklusif, kritik-kritiknya banyak diarahkan kepada pada pendukung paradigma legal-eksklusif, yang banyak dianut oleh kelompok Islam radikal, fundamentalis, maupun kelompok-kelompok revivalis lainnya. Mengenai hal ini, cukup menarik kiranya pandangan John L.Esposito, guru besar kajian agama dan hubungan internasional dari Georgetown University, Washington, tentang Gus Dur. Berikut pandangan Esposito tentang Gus Dur yang saya kutip agak panjang dari naskah aslinya, sebagai berikut:

> "Wahid believes that contemporary Muslims are at critical crossroad. Two choices or paths confront them: to pursue a traditional, static legal-formalistic Islam or to reclaim and refashion a more dynamic cosmopolitan, universal, pluralistic worldview. In contrast to many "fundamentalists" today, he rejects the nation that Islam should form the basis for the nation-state's political or legal system, a nation he characterizes as a Middle Eastern tradition, alien to Indonesia. Indonesian Muslims should apply a moderate, tolerant brand of Islam to their daily

> lives in a society where "a Muslim and a non-Muslim are the same", a state in which religion and politics are separate. Rejecting legal-formalism or fundamentalism as an aberration and a major obstacle to Islamic reform and to Islam's response to global change, Wahid has spent his life promoting the development of a multifaceted Muslim identity and a dynamic Islamic tradition capable of responding to the realities of modern life. Its cornerstones are free will and the right of all Muslims, both laity and religious scholars (*ulama*) to "perpetual reinterpretation" (*ijtihad*) of the Quran and tradition of the Prophet in light of "ever changing human stations."[9]

Pandangan Esposito itu layak untuk dipertimbangkan, karena ia muncul dari kajian akademis seorang pakar terkemuka yang dikenal punya perspektif empatik terhadap kajian Islam.

Tapi setajam apa pun kritik yang dilontarkan terhadap kelompok tersebut, Gus Dur tetap menghargai perbedaan pendapat. Hanya saja, ketika sebagain dari kelompok itu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, ia nampak tidak mau kompromi. Ia memang anti kekerasan.

HAM dan Perlunya Pembaruan *Fiqh*

Dalam melihat hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, Gus Dur mempersoalkan klaim sejumlah pemikir dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia. Ironisnya, kenyataan yang ada justru berbeda dari

---

[9] Lihat John L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, Oxford-New York: Oxford University Press, 2002, p.140.

klaim mereka. Di negeri-negeri Muslim pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia justru banyak terjadi. Jadi apa yang mereka klaim itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi, pemikiran yang tergolong berani tentang hak asasi manusia justru disuarakan oleh Gus Dur tentang ketidak sesuaian pandangan *fiqh* / hukum Islam dengan deklarasi universal hak asasi manusia. Jika deklarasi HAM mengakui kebebasan untuk berpindah agama, hukum Islam sebaliknya memberikan ancaman hukuman yang keras terhadap mereka yang berpindah agama atau murtad. Menurut hukum Islam yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian besar kaum Muslimin, orang yang murtad dapat dihukum mati. Lalu apa kata Gus Dur? "Kalau ketentuan *fiqh* seperti ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965 haruslah dihukum mati," tandasnya.

Pendapat Gus Dur di atas cukup tajam dan berani. Namun sayangnya Gus Dur kurang memberikan elaborasi yang lebih subtil tentang ketentuan *fiqh* yang dikritiknya itu. Padahal seandainya ia memberikan elaborasi lebih dalam tentang soal itu, kritiknya mungkin akan lebih mengena. Dalam konteks ini, saya teringat Ibrahim Moosa, seorang pemikir Islam progresif asal Afrika Selatan. Menurut Moosa, hukum Islam klasik memang melarang orang Islam pindah agama ke agama lain. Ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 deklarasi hak asasi manusia (HAM) universal yang menghendaki adanya suatu kebebasan berpikir, berbuat dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk mengubah agama dan kepercayaan. Padahal, ketentuan hukum Islam, perpindahan agama adalah murtad *(riddah)* dan menurut mayoritas madzhab orang yang murtad itu diancam dengan sanksi hukuman mati.[10]

Namun menurut Moosa, pandangan seperti ini berasal dari kesepakatan ulama masa pertengahan yang menganggap murtad sebagai perlawanan terhadap agama dan hukumannya

telah ditetapkan dalam hukum. Sementara para pemikir Islam progresif, termasuk Moosa tentunya, berpendapat bahwa murtad tidak berarti perlawanan terhadap agama dan sebagai sesuatu yang dapat diberi sanksi. Selanjutnya Moosa berpendapat, ketentuan tentang murtad tersebut tidaklah bersumber pada Al Qur'an, tetapi dari Hadits. Namun Moosa berpendapat bahwa Hadits tersebut dapat diragukan kesahihannya karena kemungkinan terjadi kesalahan transmisi atau pemahaman. Pada akhirnya, Moosa menyimpulkan, semangat ajaran Al Qur'an memberikan kebebasan yang luas bagi seseorang untuk memilih kepercayaannya.[11]

Contoh lain yang dikemukakan oleh Gus Dur adalah soal perbudakan (*slavery*) yang banyak menghiasi Al Qur'an dan Hadits. Sekarang, perbudakan tidak akui bangsa Muslim manapun, sehingga ia lenyap dari perbendaharaan pemikiran kaum Muslimin. Karena itu Gus Dur berpendapat, ummat Islam mau tak mau harus melakukan ijtihad untuk merubah ketentuan *fiqh* yang sudah berabad-abad diikuti itu. Dengan berpijak pada firman Allah dalam ayat suci Al Qur'an yang menyatakan, "*Kullu man 'alayha fâ nin. Wa yabqâ wajhu rabbika*" (Tiada yang tetap dalam kehidupan kecuali wajah Tuhan), Gus Dur lalu merujuk pada ketentuan *ushul fiqh* yang berbunyi, *al-hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujûdan wa 'adaman* (hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri). Apa yang dilakukan Gus Dur sebenarnya adalah sebuah usaha untuk memberikan substansiasi bagi *fiqh* itu sendiri, dengan tetap berpijak pada fundamen yang telah digariskan oleh tujuan yang termaktub dalam nilai-nilai syari'at (*maqâshid al-syarî'ah).*

---

[10] Ibrahim Moosa, Islam Progressif: Refleksi Dilematis tentang Hak Asasi Manusia, Modernitas,dan Hak-Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, (terj), Jakarta: ICIP, 2004, hal. 38.

[11] Ibid., hal. 40-41.

Apresiasi Gus Dur terhadap hak asasi manusia ternyata bukan dalam konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya Gus Dur juga menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu yang menyangkut hak asasi manusia seperti hak-hak kaum minoritas, penghormatan terhadap non-Muslim, hingga kasus-kasus yang dipandangnya sebagai "ketidakadilan" sejumlah kelompok kaum Muslimin terhadap saudara sesama Muslim lainnya. Ia, misalnya, tanpa ragu membela Ulil Abshar-Abdala, intelektual muda NU yang juga tokoh muda "Islam liberal". Seperti diketahui, sejumlah ulama atau aktifis Islam tertentu yang menilai pemikiran Ulil telah sesat dan keluar dari Islam, dan karena itu layak dihukum mati. Yang menarik, sejumlah ulama dan tokoh NU sendiri juga ada yang menilai pemikiran Ulil telah sesat. Menanggapi adanya kecaman terhadap Ulil itu, Gus Dur berprinsip bahwa perbedaan pendapat harus dihargai dan tidak seharusnya melahirkan ancaman atau kekerasan. Oleh karena itu ia mengkritik keras mereka yang dengan gampang melayangkan tuduhan-tuduhan berat kepada Ulil, dan mengatakan bahwa fatwa hukuman mati itu sama sekali tidak berdasar.

Demikian pula dalam kasus Inul Daratista. Perempuan lugu dan sederhana ini dicerca keras oleh sebagian tokoh agama, majelis ulama dan seniman karena "goyang ngebor" nya yang dianggap melanggar batas-batas kesusilaan umum. Seperti biasa, para tokoh agama dan ulama itu menggunakan justifikasi fatwa-fatwa keagamaan untuk melarang Inul tampil di depan publik. Sementara itu, seorang seniman besar semacam H. Rhoma Irama, atas nama menjaga kesucian seni dan "moralitas" seniman juga ikut menggempur Inul. Walaupun Inul membela diri dengan mengatakan bahwa "goyang ngebor" nya adalah bagian dari kreativitas dan improvisasi seni dan usaha untuk mencari sesuap nasi, para ulama, tokoh Islam, dan H. Rhoma Irama tetap tidak bisa menerima alasannya. Atas

nama agama dan moralitas seni, mereka menghangatkan opini publik yang menista si "Ratu Ngebor", Inul Daratista. Begitu gencarnya kecaman dan cercaan terhadap perempuan lugu anggota Fatayat NU yang pintar mengaji ini, sehingga hampir-hampir saja Inul putus asa dan menyerah. Dan kalau saja Inul menyerah, dapat diduga karirnya sebagai penyanyi akan tamat. Itu berarti, ia akan kehilangan nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupan keluarganya. Di tengah kontroversi itu, Gus Dur tampil melindungi dari gempuran kecaman dan panasnya opini publik yang menekan Inul. Pembelaan Gus Dur di dasarkan pada melindungi hak asasi "*wong cilik*" bernama Inul dari hegemoni elit keagamaan dan klaim atas moralitas kesenian yang agak represif. Sementara banyak tokoh agama yang tidak hirau terhadap soal atau bahkan mengambil sikap diam, Gus Dur tampil dengan pandangan yang melawan arus demi membela hak asasi Inul.

Dari pandangan dan impressinya terhadap hak asasi manusia itu, jelas Gus Dur sebagai tokoh Islam punya paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia.

Antara Demam Syari'at dan Kapitalisasi

Dalam konteks ekonomi-politik, implikasi dari penolakan Gus Dur terhadap ideologisasi, formalisasi, dan politisasi Islam sebagai syari'at (jalan atau petunjuk ummat manusia) terlihat dari ketidak setujuannya terhadap gagasan ekonomi Islam. Menurut Gus Dur, gagasan ekonomi Islam terlalu memfokuskan pada aspek-aspek normatif, dan kurang mempedulikan aplikasinya dalam praktek, yang justru diperlukan bagi implementasi nilai-nilai tersebut di masyarakat. Fokus kajian ekonomi Islam, menurut Gus Dur, lebih banyak diarahkan pada persoalan sekitar bunga bank, asuransi, dan sejenisnya. Bagi Gus Dur, prinsip "ekonomi Islam" adalah pendekatan parsial yang memanfaatkan kata Islam sebagai

predikat atau simbol saja. Padahal yang terpenting bukanlah nama atau simbol itu sendiri, tetapi substansinya. Untuk itu, tanpa ragu Gus Dur tanpa ragu mendukung "ekonomi kerakyatan" baik dalam konsepsi maupun aplikasinya. Dukungannya terhadap ekonomi kerakyatan didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori *ushul fiqh* dinamakan *al maslahah al ammah.* Kedua, mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah ditentukan format dan bentuknya. Oleh karena itu, acuan dan praktek perdagangan bebas dan efisiensi yang dibawakan oleh sistem kapitalisme tidaklah bertentangan dengan Islam, karena Islam sendiri mengajarkan *fas tabiqu al khairat* (berlomba dalam kebaikan). Bahkan dalam persaingan dan perlombaan yang sehat, akan dihasilkan kreatifitas dan efisiensi yang justru menjadi inti dari praktek ekonomi yang sehat pula. Dalam bahasa Gus Dur, ummat Islam "bisa menerima pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam orientasi dan mekanisme ekonomi kapitalistik tanpa harus memeluk kapitalisme itu sendiri". Yang ditentang oleh Islam adalah orientasi kapitalistik yang hanya mengutamakan pengusaha besar dan pemilik modal. Sebab dalam Islam yang terpenting justru kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut di atas, ia tidak setuju dengan pandangan yang menggeneralisasi bahwa setiap bunga bank sebagai riba. Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi, jika bunga bank dipungut dari upaya non-produktif, maka ia dapat dikatakan riba. Tetapi jika bunga bank tersebut merupakan bagian dari sebuah upaya produktif, maka ia bukan riba, tetapi merupakan bagian dari ongkos produksi saja. Selanjutnya, Gus Dur juga mengkritik kecenderungan yang ia namakan sebagai "demam syari'at" yang kini banyak dilakukan oleh bank-bank swasta di mana pemilik sahamnya sebagian adalah non-Muslim. Menurut Gus Dur, kecenderungan seperti itu karena

kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam. Jelas bahwa Gus Dur tidak setuju dengan langkah-langkah yang mengarah pada formalisasi syari'at Islam seperti itu.

Namun lepas dari ketidak setujuan Gus Dur kepada "demam syari'at" bank-bank swasta, perkembangan bank-bank yang memanfaatkan jasa syari'at itu menurut laporan sejumlah media massa nasional ternyata cukup bagus. Bahkan permodalan, likuiditas, dan kinerja bank-bank syari'at disebutkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk itu, tentu saja masih diperlukan data dan penelitian yang valid. Yakni penelitian yang memverifikasi apakah demam syari'at yang melanda bank-bank konvensional itu, bagian dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap implementasi syari'at, ataukah justru hal itu semacam bentuk "kapitalisasi syari'at" yang lebih didasarkan pada motif-motif ekonomi yang tunduk pada kepentingan pasar.

Islam Radikal dan Pendangkalan Agama

Dalam soal pandangan Islam terhadap kekerasan dan terorisme, sikap Gus Dur sangat jelas: mengecam keras dan mengutuk penggunaan kekerasan oleh sejumlah kelompok Islam radikal. Menurut Gus Dur, satu-satunya alasan penggunaan kekerasan yang bisa ditolerir oleh Islam adalah jika kaum Muslimin diusir dari tempat tinggal mereka (*idza ukhriju min diyarihim*). Ini pun masih diperdebatkan oleh sebagian ulama. Misalnya diperdebatkan, bolehkah kaum membunuh orang lain jika jiwanya sendiri tidak terancam. Tidak tanggung-tanggung, kecaman Gus Dur dialamatkan kepada kelompok-kelompok Islam "garis keras" yang beberapa waktu lalu sering unjuk rasa dengan membawa pedang, celurit, atau bahan peledak lain hingga mereka yang melakukan *sweeping* terhadap warga asing (terutama AS) dan kafe-kafe minuman di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.[12]

Menurut Gus Dur, lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. *Pertama,* para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena "ketertinggalan" ummat Islam terhadap kemajuan Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksesnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif materialistik dan penetrasi Barat. *Kedua*, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan ummat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-gerakan Islam radikal atau garis keras umumnya terdiri dari mereka yang belatar belakang pendidikan ilmu-ilmu eksakta dan ekonomi. Latar belakang seperti itu menyebabkan fikiran mereka penuh dengan hitungan-hitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci Al Qur'an dan Hadits dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada,

[12] Tindakan sweeping terhadap warga asing terutama dilakukan oleh FPI (Front Pembela Islam). Sementara itu, penting untuk dicatat sejak Soeharto tumbang di Indonesia hingga sekarang muncul kelompok-kelompok Islam "garis keras" semacam Lasykar Jihad, Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Ikhwanul Muslimin, Hammas, Lasykar Jundullah, dan sebagainya.Lasykar Jihad resmi membubarkan diri tahun 2002. Hingga sekarang yang nampak masih aktif dan terorganisir adalah FPI dan MMI. Buku yang cukup baik mengenai hal ini adalah Kamami Zada, Islam Radikal, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Otrmas Islam Garis Keras di Indonesia, Jakarta: Teraju, 2002.

kaidah-kaidah *ushul fiqh*, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.[13]

Pandangan Gus Dur tersebut di atas, sebenarnya tertuju kepada kelompok-kelompok yang dalam sosiologi agama bisa dikategorikan sebagai neo-fundamentalisme. Ini mengingatkan saya pada analisis Fazlur Rahman yang juga dikutip oleh Cak Nur terhadap kebangkitan neo-fundamentalis Islam. Rahman menilai, keberadaan neo-fundamentalisme Islam di berbagai negeri Muslim, sebenarnya bukanlah memberikan alternatif atau tawaran yang baik bagi masa depan Islam itu sendiri. Ini karena neo-fundamentalisme sebenarnya mengidap penyakit yang cukup berbahaya, yakni mendorong ke arah pemiskinan intelektual karena pandangan-pandangan literal dan tekstual yang tidak memberikan apresiasi terhadap kekayaan khasanah ke-Islaman klasik yang kaya dengan alternatif pemikiran. Selain itu, Rahman menilai kelompok neo-fundamentalis umumnya memiliki pemahaman yang superfisial, anti intelektual dan pemikirannya tidak bersumber dari ruh Al Qur'an dan budaya

[13] Untuk memahami gerakan Islam radikal atau fundamentalis Islam, ada sejumlah ciri penting yang melekat dalam kelmpok ini. Ciri yang tama adalah berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin yang cenderung bersifat rigit dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (kaffah). Menurut kaum Islam radikal, doktrin-doktrin yang terdapat di dalam Qur'an dan Sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan telah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi kelmpok Islam radikal fundamentalis yang penting adalah ketaatan mutlak kepada wahyu Tuhan, yang berlaku secara universal. Bagi kaum fundamentalis, iman dan ketaatan terhadap wahyu Tuhan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an dan praktek Sunnah Nabi lebih penting daripada penafsiran-penafsiran terhadap kedua sumber utama pedoman kehidupan ummat Islam itu. Kecenderungan doktriner seperti ini terutama sekali dilandasi oleh sikap untuk memahami dan mengamalkan doktrin secara murni dan totalitas.Untuk uraian yang bagus mengenai hal ini, lihat William E. Shepard, "Islam and Ideology: Towards Typology" dalam International Journal of Middle Eastern Studies, No.19, 1987. Bandingkan dengan Bruce Lawrence, Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age, New York: I.B. Tauris, 1990, hal.40.

intelektual tradisional Islam.[14] Bagaimana pun pengamatan Gus Dur dan Fazlur Rahman itu layak untuk dipertimbangkan

Pribumisasi, Bukan Arabisasi

Dalam soal Islam dan kaitannya dengan masalah sosial budaya, menarik kiranya untuk dikemukakan kritik Gus Dur terhadap gejala yang ia sebut sebagai "Arabisasi". Kecenderungan semacam itu nampak, misalnya, dengan penamaan terhadap aktivitas keagamaan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu terlihat misalnya dengan kebanggaan orang untuk menggunakan kata-kata atau kalimat bahasa Arab untuk sesuatu yang sebenar nya sudah lazim dikenal. Gus Dur menunjuk penyebutan Fakultas Keputrian dengan sebutan *kulliyatul bannat* di UIN. Juga ketidakpuasan orang awam jika tidak menggunakan kata "ahad" untuk menggantikan kata "minggu", dan sebagainya. Seolah-olah kalau tidak menggunakan kata-kata berbahasa Arab tersebut, akan menjadi "tidak Islami" atau ke-Islaman seseorang akan berkurang karenanya. Formalisasi seperti ini, menurut Gus Dur, merupakan akibat dari rasa kurang percaya diri ketika menghadapi "kemajuan Barat" yang sekuler. Maka jalan satu-satunya adalah dengan mensubordinasikan diri ke dalam konstruk Arabisasi yang diyakini sebagai langkah ke arah Islamisasi. Padahal Arabisasi bukanlah Islamisasi.

Sebenarnya kritik Gus Dur terhadap "Arabisasi" itu sudah diungkapkan pada tahun 1980-an, yakni ketika ia mengungkapkan gagasannya tentang "pribumisasi Islam". Ia meminta agar wahyu Tuhan dipahami dengan mempertimbangkan faktor–faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Sehubungan dengan hal ini, ia melansir apa yang

[14] Fazlur Rahman, "Roots of Islamic Neo-Fundamentalism", in Philip H. Stoddard, et.al., (eds), Change and the Muslim World, Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1981. pp.25-26.

disebutnya dengan "pribumisasi Islam" sebagai upaya melakukan "rekonsiliasi" Islam dengan kekuatan–kekuatan budaya setempat, agar budaya lokal itu tidak hilang. Di sini pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan, bukannya sebagai upaya menghindari polarisasi antara agama dengan budaya setempat. Pribumisasi juga bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena dalam pribumisasi Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Pribumisasi Islam juga bukan semacam "jawanisasi" atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukannya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan–kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash*, dengan tetap memberikan peranan kepada *ushul fiqh* dan *qâidah fiqh*. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama, tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam, yang lalu membentuk panteisme.[15]

Mencari Perdamaian

Masalah terakhir yang dibahas Gus Dur dalam kumpulan tulisan ini adalah Islam dan hubungannya dengan pedamaian dan masalah-masalah internasional. Dalam kumpulan tulisan ini nampak jelas sikap Gus Dur terhadap perdamaian dunia mendorong upaya-upaya ke arah perwujudan perdamaian di dunia. Tanpa ragu Gus Dur mengecam invasi AS ke Irak yang kemudian berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein. Peperangan yang tidak seimbang itu memang berhasil menumbangkan rezim diktator Saddam Hussein. Bahkan dalam

---

[15] Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, eds, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M,

perkembangannya kemudian, militer AS berhasil menangkap hidup-hidup Saddam Hussein. Ini mungkin tidak menjadi prediksi Gus Dur ketika ia menurunkan kolom-kolomnya di media massa, dan juga perhitungan para pengamat, bahwa Saddam akhirnya tertangkap dalam keadaan yang penuh dengan ironi. Tetapi masalahnya tidak akan berhenti di sana. Gus Dur pernah memperkirakan, masalah-masalah baru akan terus bermunculan, seiring dengan kondisi obyektif yang ada di Irak pasca pendudukan AS dan tentara sekutu di negeri Seribu Satu Malam itu. Dan ternyata apa yang terjadi di Irak sekarang adalah sebuah drama peperangan, pendudukan, dan perlawanan yang sepertinya tak berujung.

Ada beberapa hal lain tentang masalah internasional yang disorot oleh Gus Dur, seperti kritiknya terhadap mantan Perdana Menteri (kini Menteri Senior) Singapura Lee Kuan Yew yang dinilainya terlalu provokatif dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Lee juga dikritik oleh Gus Dur karena pandangannya yang stereotipe dan agak misleading terhadap Islam Sunni di Indonesia. Namun Gus Dur sadar pandangan Lee yang salah terhadap Islam di Indonesia itu karena kurangnya pengetahuan mantan PM Singapura itu tentang dinamika dan perkembangan Islam di Indonesia.

Memang ada masalah internasional lain yang dibahas oleh Gus Dur, tetapi dalam kumpulan tulisannya kali ini ia lebih menyorot perlunya upaya-upaya untuk mengembangkan dunia yang damai dan jika mungkin jauh dari peperangan dan kekerasan. Ia memang concern dengan perdamaian dunia, dan percaya bahwa agama maupun tokoh-tokohnya bisa berperan aktif dalam mengusahakan perdamaian dunia. Tetapi, seperti sebuah judul tulisannya dalam buku ini, "Dicari Perdamaian, Perang Yang Didapat". Ada nada getir dalam tulisannya itu. Dan seperti halnya Gus Dur, kita juga tidak tahu akan seperti apa masa depan sejarah dunia di abad ke 21 jika perang menjadi alternatif yang gampang dicetuskan, ketimbang usaha-usaha kolektif untuk mewujudkan perdamaian.

Sebuah Bingkai Pemikiran

Bagi mereka yang mengikuti secara intens pemikiran politik Gus Dur, buku ini memang belum bisa memetakan bingkai pemikirannya dengan utuh. Bisa jadi karena cakupan persoalan yang dibahas cukup luas dan beragam, sehingga agak sulit untuk menganalisis secara terstruktur dan lebih memfokus. Demikian pula bagi pembaca yang ingin mendapatkan pembahasan yang tuntas, apalagi dengan mengidealisasikan penggunaan disiplin akademis yang ketat, jelas tidak atau belum mendapatkannya di sini. Sebab buku ini adalah kumpulan kolom dan artikel yang dibatasi oleh aktualitas peristiwa, waktu penulisan, dan ketersediaan halaman media tempat Gus Dur menuliskan gagasan-gagasannya. Mudah-mudahan dengan penerbitan kumpulan tulisan ini akan memudahkan Anda memahami konstruk dan prisma pemikiran Gus Dur yang luas itu, sekalipun itu ditulis melalui kolom-kolom lepas di berbagai media.

Akhirnya dengan terus terus terang saya nyatakan bahwa sekalipun buku ini memuat pemikiran penting dan visioner, tentu tidak terlepas dari kekurangan. Lazimnya sebagai sebuah kumpulan tulisan, ada sejumlah repetisi atau pengulangan baik dalam ide maupun penyajian di sana-sini. Pengulangan itu dimungkinkan terjadi karena meskipun tema pokok atau topik yang diulas berbeda judulnya, substansi dan missi yang disampaikan kemungkinan menggunakan referensi yang sama. Sementara itu, produktivitas Gus Dur sebagai penulis prolifik ternyata sangat mencengangkan. Menurut penuturannya, dalam satu minggu ia menulis antara dua atau tiga kali, bahkan terkadang hingga empat kali, di media yang berbeda, baik nasional maupun lokal. Padahal kita tahu, meskipun sudah tidak menjabat sebagai presiden, kesibukan tokoh yang satu ini tidaklah berkurang. Ia masih sering melakukan perjalanan ke luar negeri atau berbagai kota dan pelosok tanah air, baik untuk memenuhi undangan-undangan seminar atau pertemuan

internasional, maupun untuk menjadi penceramah dalam pengajian atau melakukan kegiatan sosial-politiknya sebagai Ketua Dewan Syura PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Toh sesibuk apa pun, Gus Dur tetap meluangkan waktunya untuk menulis artikel. Sebuah kegiatan yang tidak mudah dilakukan banyak oleh orang. Sebagai intelektual dan sekaligus pemimpin serta politisi, Gus Dur sangat menyadari pengaruh dari ide-ide dan gagasan yang dituangkannya dalam bentuk tulisan. Hal lain yang tak boleh dikesampingkan adalah *leverage* atau pengaruh Gus Dur di mata warga nahdliyyin dan publik Indonesia lainnya.

Bagaimana pun, paling tidak menurut saya selaku penyunting, tulisan-tulisan Gus Dur tetap enak dibaca dan gampang dicerna. Mudah-mudahan ini bukanlah sebuah apologia karena ketidak sempurnaaan saya selaku penyunting. *Wallahu alam bi al sawab.*

Jakarta, akhir Maret 2005



Ucapan Terima Kasih

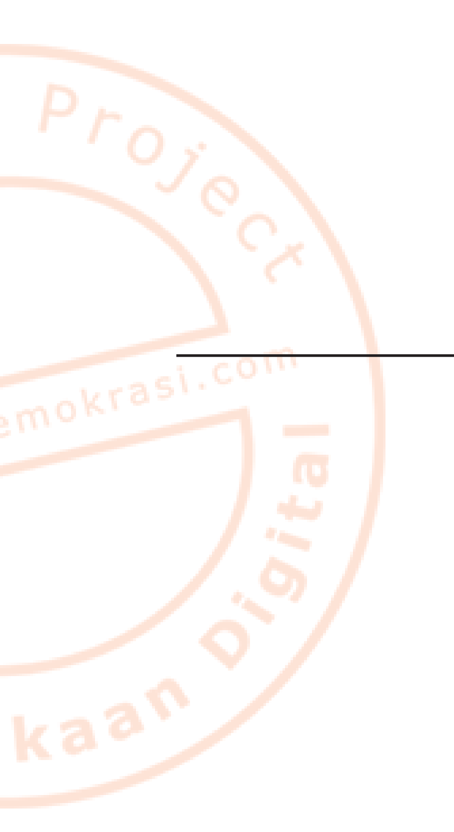
Proses penyuntingan dan penerbitan buku tak mungkin terwujud tanpa bantuan dan kerjasama dengan banyak pihak. Untuk itu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi penyunting sekaligus memberikan kata pengantar untuk buku ini. Juga kepada Mbak Sinta Nuriyah telah memungkinkan saya bisa banyak bertemu dan berbincang lama dengan Gus Dur dalam beberapa tahun terakhir ini, dalam suasana kekeluargaan bersama sahabat saya Dr. Greg Barton. Kepada Mas Munib dan Mas Sulaiman yang acapkali membantu mengatur jadwal pertemuan saya dengan Gus Dur, saya juga mengucapkan banyak terima kasih.

Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Yenni Zannuba Wahid, Mas Ahmad Suaedy, Nunik, Gamal, Rifa dan lain-lain dari The Wahid Institute atas kerjasamanya yang amat baik dalam proses penyuntingan dan penerbitan buku ini. Kesabaran dan pengertian mereka yang menggembirakan telah banyak membantu saya untuk mengerjakan penyuntingan dan penerbitan buku ini. Tanpa kerja keras mereka, penerbitan buku ini mungkin akan tertunda-tunda. Akhirnya, saya perlu berterima kasih kepada teman-teman di ICIP (*International Center for Islam and Pluralism*), yang selalu memberikan suasana nyaman dan penuh gairah dalam kerja-kerja intelektual seperti ini. Kepada Syafiq, Ebi, Nia, dan Nur, saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Juga kepada Putri dan Hadi yang telah membantu menyiapkan pekerjaan-pekerjaan teknis berkaitan dengan proses penulisan kata pengantar buku ini.

MSA
(Penyunting)



DAFTAR ISI



BAB I

ISLAM DALAM DISKURSUS IDEOLOGI KULTURAL DAN GERAKAN


Democracy
www.abad-de
Perpusta

ADAKAH SISTEM ISLAMI?

Dalam kitab suci al-Qur'ân disebutkan: "masuklah kalian ke dalam Islam (kedamaian) secara penuh" (*udkhulû fi al-silmi kâffah*) (QS al-Baqarah (2): 128). Di sinilah terletak perbedaan pendapat sangat fundamental di antara kaum muslimin. Kalau kata "*al-silmi*" diterjemahkan menjadi kata Islam, dengan sendirinya harus ada sebuah entitas Islam formal, dengan keharusan menciptakan sistem yang Islami. Sedangkan mereka yang menterjemahkan kata tersebut dengan kata sifat kedamaian, menunjuk pada sebuah entitas universal, yang tidak perlu dijabarkan oleh sebuah sistem tertentu, termasuk sistem Islami.

Bagi mereka yang terbiasa dengan formalisasi, tentu digunakan penterjemahan kata *al-silmi* itu dengan kata Islami, dan dengan demikian mereka terikat kepada sebuah sistem yang dianggap mewakili keseluruhan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah. Hal ini membawakan implikasi adanya keperluan akan sebuah sistem yang dapat mewakili keseluruhan aspirasi kaum muslimin. Karena itu, dapat dimengerti mengapa ada yang menganggap penting perwujudan "partai politik Islam" dalam kehidupan berpolitik. Tentu saja, demokrasi mengajarkan kita untuk menghormati eksistensi parpol-parpol Islam, tetapi ini tidak berarti keharusan untuk mengikuti mereka.

Di lain pihak kita juga harus menghormati hak mereka yang justru mempertanyakan kehadiran sistem Islami tersebut, yang secara otomatis akan membuat mereka yang tidak beragama Islam sebagai warga dunia yang kalah dari kaum muslimin. Ini juga berarti, bahwa dalam kerangka kenegaraan sebuah bangsa, sebuah sistem Islami otomatis membuat warga negara non-muslim berada di bawah kedudukan warga negara beragama Islam, alias menjadi warga negara kelas dua. Ini patut dipersoalkan, karena juga akan berdampak pada kaum muslimin nominal, yang tidak menjalankan ajaran Islam secara penuh. Kaum muslim seperti ini, -sering disebut muslim nominal atau abangan-, tentu akan dinilai kurang Islami jika dibandingkan dengan mereka yang menjadi anggota/warga partai/organisasi yang menjalankan ajaran Islam secara penuh, yang juga sering dikenal dengan nama "kaum santri".

*****

Apabila terdapat pendapat tentang perlunya sebuah sistem Islami, mengapa lalu ada ketentuan-ketentuan non-organisatoris yang harus diterapkan di antara kaum muslimin oleh kitab suci al-Qur'ân? Sebuah ayat menyatakan adanya lima syarat untuk dianggap sebagai "muslim yang baik", sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat di kitab suci al-Qur'ân, yaitu menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan (sanak saudara, anak yatim, kaum miskin dan sebagainya) menegakkan profesionalisme dan bersikap sabar ketika menghadapi cobaan dan kesusahan.

Kesetiaan kepada profesi itu, digambarkan oleh kitab suci al-Qur'ân dengan istilah, "mereka yang memenuhi janji yang mereka berikan" (*wa al-mufâna bi 'ahdihim idâ 'âhadû)* (QS al-Baqarah (2): 176). Adakah janji yang lebih nilainya daripada janji kepada profesi masing-masing, yang disampaikan ketika

membacakan janji prasetia pada waktu menerima sebuah jabatan?

Kalau kelima syarat di atas dilaksanakan oleh seorang muslim, tanpa menerima adanya sebuah sistem Islami, dengan sendirinya tidak diperlukan lagi sebuah kerangka sistemik menurut ajaran Islam. Dengan demikian, perwujudan sebuah sistem Islami tidak termasuk menjadi syarat bagi seseorang untuk dianggap "muslim yang taat". Ini menjadi titik sengketa yang sangat penting, karena di banyak tempat telah tumbuh paham yang tidak mementingkan arti sistem.

Maka ketika NU (Nahdlatul Ulama) menyatakan deklarasi berdirinya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), tanpa menyebutkan bahwa partai tersebut adalah partai Islam, penulis dihujani kritik tajam selama berbulan-bulan dari mereka yang menginginkan partai tersebut dinyatakan sebagai partai Islam. Ini dilakukan oleh mereka yang tidak menyadari, bahwa NU sejak semula telah menerima kehadiran upaya berbeda-beda dalam sebuah negara atau kehidupan sebuah bangsa.

Dalam Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin, muktamar harus menjawab sebuah pertanyaan: wajibkah bagi kaum muslimin mempertahankan kawasan yang waktu itu bernama Hindia Belanda (sekarang Indonesia) yang diperintah oleh orang-orang non-muslim (para kolonialis Belanda)? Jawab Muktamar saat itu; wajib. Karena di kawasan tersebut, yang di kemudian hari bernama Indonesia, ajaran Islam dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga bangsa secara bebas, dan dahulu ada kerajaan-kerajaan Islam di kawasan itu. Dengan demikian, tidak harus dibuat sistem Islam, dan dihargai perbedaan cara dan pendapat di antara kaum muslimin di kawasan tersebut.

*****

Diktum Muktamar NU di Banjarmasin tersebut, memung-

kinkan dukungan pimpinan NU kepada mendiang Presiden Soekarno dan Hatta untuk memimpin bangsa ini. Demikian pula, pembentukan badan-badan formal Islam bukanlah satu-satunya medium bagi perjuangan Islam untuk menerapkan ajaran di bumi nusantara. NU yang resminya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan bukannya lembaga politik, dapat saja menyalurkan aspirasinya tentang pelaksanaan ajaran Islam di kawasan tersebut melalui Golkar (Golongan Karya) yang bukan sebagai organisasi Islam resmi. Perbedaan jalan perjuangan antara yang menganut paham lembaga Islam sebagai sistem di satu pihak, dan mereka yang tidak ingin melaksanakan perjuangan melalui jalur-jalur resmi Islam, dihargai dan diterima oleh para pendukung Ibn Taimiyyah beberapa abad yang lalu.

Lalu, bagaimana dengan adagium yang dikenal Islam; "Tiada agama tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa pimpinan, dan tiada pimpinan tanpa ketundukan" (*lâ dîna illâ bi jamâ'ah, wa lâ jamâ'ata illâ bi imâmatin, wa lâ imâmata illâ bi-ithâ'ah*). Bukankah ini sudah menunjukkan adanya sebuah sistem, maka jawabannya bahwa tidak ada sesuatu dalam ungkapan tersebut yang menunjukkan secara spesifik adanya sebuah sistem Islami. Dengan demikian, setiap sistem diakui kebenarannya oleh ungkapan tersebut, asal ia memperjuangkan berlakunya ajaran Islam dalam kehidupan sebuah bangsa/negara.

Karena itu penulis berpendapat, dalam pandangan Islam tidak diwajibkan adanya sebuah sistem Islami, ini berarti tidak ada keharusan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Ini penting untuk diingat, karena sampai sekarang pun masih ada pihak-pihak yang ingin memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD (Undang-Undang Dasar) kita. Dengan klaim mendirikan negara untuk kepentingan Islam jelas bertentangan dengan demokrasi. Karena paham itu berintikan kedaulatan hukum di satu pihak dan perlakuan sama pada semua warga negara di hadapan Undang-Undang (UU) di pihak lain. {}

ISLAM:
PENGERTIAN SEBUAH PENAFSIRAN

Para santri yakin bahwa kekuasaan menjatuhkan azab dan memberikan pahala atas sebuah perbuatan, berada di tangan Allah Swt. Dalam hal ini, berlaku sebuah adagium yang didasarkan atas kitab suci al-Qur'ân dan Hadits Nabi Saw. Adagium itu berbunyi: "memberikan pahala dan menurunkan siksa adalah sifat Allah" *(yushîbu wa yu 'âdzibu man yasyâ).* Dalam hal ini, kendali atas keadaan sepenuhnya berada di tangan Allah Swt.

Dalam konteks ini pula, sebuah pengertian baru haruslah dipertimbangkan: sampai di manakah peranan negara dalam menjatuhkan hukuman, sebagai salah satu bentuk siksaan. Dapatkah negara atas nama Allah memberikan hukuman sebagai bagian dari siksa di dunia? Sudahkah manusia terbebas dari siksa neraka, jikalau ia telah menjalani hukuman negara? Kalau belum, berarti ada penggandaan *(dubbleleren)* antara negara sebagai wakil Allah dan kekuasaan Allah sendiri untuk menetapkan hukuman. Bukankah justru hal ini bertentangan dengan hadits Nabi Saw: " hendaknya hakim jangan menjatuhkan hukuman mati jika ia ragu-ragu, benarkah si terdakwa nyata-nyata bersalah?" Jelas dari hadits itu bahwa kekuasaan negara ada batasnya, sedangkan kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi.

Dari pengertian yang sangat sederhana ini, kita sudah dapat rnenyimpulkan bahwa sebenarnya tidak dapat sebuah

negara disebut sebagai negara Islam, tanpa kita harus memperkosa hal-hal yang menjadi kewajiban negara secara wajar. Jadi, dalam masalah azab dan pahala pun kita langsung terkait dengan masalah adakah negara agama atau tidak? Jawaban yang salah akan berakibat pada konsep yang salah pula dalam hubungan antara agama dan negara. Hal inilah yang memerlukan perenungan mendalam dari kita dalam menanggapi adanya pendapat bahwa diperlukan sebuah negara Islam, kalau diinginkan berdirinya sebuah negara teokratis bagi bangsa kita yang majemuk.

***

Memang benar, pemikiran yang mendalam tentang konsepsi yang jelas dalam hubungan antara negara dan agama harus ada, jika diinginkan keselamatan kita sebagai bangsa yang majemuk dapat dipelihara di kawasan ini. Kalau belum apa-apa kita sudah menyuarakan adanya negara Islam, tanpa adanya konsepsi yang jelas tentang hal itu sendiri, berarti telah dilakukan sebuah perbuatan yang gegabah dan *sembrono.* Bukankah sikap demikian justru harus dijauhi oleh kaum muslimin sendiri, apalagi dalam hubungan antara agama dan negara? Apalagi jika ada motif-motif lain dalam mendirikan sebuah negara agama, seperti adanya keinginan untuk berkuasa sendiri bagi partai-partai politik Islam, yang melihat bentuk kesatuan dan negara kita (NKRI) sebagai "kekalahan" dalam pertarungan politik di tingkat nasional.

Dengan demikian, gagasaan federalisme dapat saja ditanggapi sebagai aspirasi-aspirasi separatis, seolah-olah gagasan NKRI bertentangan dengan keinginan berbagai propinsi untuk lebih independen dari pemerintah pusat. Sebenarnya propinsi hanya menghendaki pengambilan keputusan tentang penerimaan dan pengeluaran uang harus lebih banyak dilakukan di daerah dari pada di pusat. Jadi dengan demikian, yang diingini adalah

fungsi federal dari pemerintahan, bukannya separatisme Indonesia untuk menjadi 7 (tujuh) negara atau republik federatif. Kalau ada orang-orang yang menghendaki Indonesia dalam bentuk federatif menjadi tujuh republik, maka pendapat itu adalah merupakan suara minoritas yang sangat kecil, yang tidak perlu mendapatkan perhatian besar.

Cara yang terbaik untuk mengetahui benar tidaknya bahwa yang menghendaki bentuk RI sebagai republik federatif, -yang bertentangan dengan gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah suara minoritas yang demikian kecil, dapat diketahui melalui pemilihan umum. Dan jika hal itu dilakukan dengan pengawasan internasional, maka akan menghasilkan mayoritas suara bagi partai-partai politik yang hanya menginginkan perampingan kekuasaan pemerintah pusat, dalam hal penunjukkan kepala daerah oleh DPRD setempat maupun penetapan anggaran penerimaan dan belanja yang berpusat pada daerah, dan bukannya pada pemerintah pusat.

***

Karena ketidakmampuan memahami hal ini, maka para eksponen konsep negara federal sebenarnya haruslah menjelaskan bahwa gagasan mereka tidak berarti menjadikan RI terkeping-keping menjadi sekian negara yang masing-masing berdaulat. Bahkan negara unitaris seperti Jepang dan Perancis-pun memberikan kedaulatan penuh kepada propinsi/negara bagian untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Bahkan kepolisiannya pun ditetapkan dan diatur oleh pemerintah daerah setempat. Jadi, independensi daerah dari pusat tidaklah berarti hilangnya kesatuan negara —yang berarti, watak negara kesatuan dapat saja menampung aspirasi-aspirasi federal. Sing-

katnya, negara federal bukanlah negara federatif.

Langkanya penjelasan seperti ini telah menerbitkan kesalahpahaman sangat besar antara partai-partai politik yang mempertahankan NKRI dan menentang negara federal di satu pihak, dan eksponen gagasan negara federal yang mencurigai NKRI. Kedua-duanya memiliki baik legitimasi maupun kepentingan masing-masing tentang konsep negara yang dikehendaki. Sangatlah tragis untuk melihat kecurigaan yang satu terhadap yang lain dalam hal ini, dan lebih-lebih untuk menyifati gagasan NKRI sebagai gagasan nasionalistik, dan gagasan negara federal sebagai sebuah pandangan Islam. Jadi, satu sama lain saling menyalahkan, padahal kedua-duanya saling menyepakati perlunya sebuah negara yang satu, dengan watak federal dalam artian independensi seperti yang dimaksudkan diatas.

Dari sinilah kita menjadi tahu, bahwa azab Tuhan diturunkan atas bangsa kita dalam bentuk hilangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai kedua hal di atas. Kita lalu curiga antara satu terhadap yang lain, dan bukankah ini yang dapat dinamai azab bagi bangsa kita? Dapat dikatakan azab, karena kelangkaan komunikasi dan sosialisasi seperti itu telah menjadikan kehidupan politik kita sebagai bangsa yang sangat labil. Tidak stabilnya sistem politik kita yang ada dewasa ini, jelas menjadi sebab utama bagi hilangnya stabilitas politik. Kehilangan stabilitas itu, membuat keadaan labil, dan itu menjadi akar dari krisis multi-dimensional yang kita alami sekarang ini. Bukankah ketidak-mampuan komunikasi dan sosialisasi politik tersebut merupakan azab dari Allah bagi bangsa kita? {}

Islam: Pokok dan Rincian

Para penganjur "negara Islam" selalu menggunakan dua buah firman Allah Swt dalam kitab suci al-Qur'ân sebagai landasan bagi pemikiran mereka. Di satu pihak, mereka selalu mengemukakan bahwa kitab suci tersebut menyatakan; "Masukilah Islam/kedamaian secara keseluruhan" (*udkhulû fî al-silmi kâffah*) (QS. al-Baqarah (2): 208), yang jelas-jelas harus ditafsirkan dengan mengambil Islam tidaklah boleh sepotong-potong belaka. Padahal, Islam juga menolak atas sikap meng-khususkan sekelompok manusia dari kelompok-kelompok lain. Ini adalah prinsip yang mulia, namun sedikit sekali yang diper-hatikan kaum muslimin. Dalam hal ini, mereka dapat dinyatakan "terkena" firman Tuhan dalam kitab suci tersebut; "Tiap kelom-pok sangat bangga dengan apa yang dimilikinya" (*kullu hizbin bimâ ladaihim farihûn*) (QS al-Mu'minûn (23): 45) dengan me-mentingkan "milik sendiri" itu, mereka melupakan firman lain: "Dan tiadalah Ku-utus Engkau Ya Muhammad, kecuali sebagai pembawa persaudaraan bagi umat manusia" (*wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lî al-'alamîn*) (QS al-Anbiyâ (21): 107).

Firman Tuhan berikut juga sering dijadikan landasan bagi gagasan negara Islam; "Hari ini telah Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian, Ku-tuntaskan bagi kalian pemberian nik-mat-Ku dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama" (*al yauma akmaltu lakum dînakum wa atmamtu 'alaikum nikmatî wa*

radhîtu lakum al-Islama dîinâ). Firman Tuhan itu diandaikan menunjuk Islam sebagai sebuah sistem hidup yang sempurna, dan itu hanya dapat terwujud dalam sebuah sistem kenegaraan yang "berbau agama". Diandaikan, tanpa negara, Islam tidak dapat diwujudkan dengan sempurna. Sebuah andaian yang justru harus kita bicarakan secara tuntas dalam tulisan ini. Kalau hal ini tidak kita lakukan, maka dasar bagi sebuah negara Islam akan goyah selamanya dan gagasan bernegara seperti itu akan kehilangan kredibilitas.

Dengan demikian, permasalahannya menjadi jelas bagi kita semua. Benarkah asumsi dasar, bahwa Islam adalah sebuah sistem hidup yang sempurna, dan harus diwujudkan dalam sebuah bentuk kenegaraan tertentu? Jika jawabannya positif, kita harus mendirikan negara Islam sebagai "perintah agama" yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pengingkaran terhadap perintah semacam itu, berarti pembangkangan yang harus dihukum dan ditindak. Sedangkan kelalaian untuk melaksanakannya merupakan pengingkaran terhadap kewajiban agama. Ini adalah konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh kaum muslimin, di manapun mereka berada. Ini termasuk dalam perintah "dan berjihadlah kalian dengan harta benda kalian dan diri/jiwa kalian" (*wa jâhidû bi amwâlikum wa anfusikum*)(QS al-Anfal(8): 72)

*****

Tentu saja, kedua firman "sistemik" di atas, tidak berdiri sendiri, sebagaimana dipahami oleh penganut paham negara Islam tersebut –yang tentunya, berhak melakukan hal itu sepenuhya. Terserah pada publik untuk menilai kelengkapan kedua pendekatan tersebut, mengartikan "perintah sistemik" Tuhan itu secara berdiri sendiri atau justru sebaliknya. Jika cara pendekatan negara Islam lebih mengutamakan kesendirian penggunaan kedua "perintah sistemik" itu, maka timbul pertanyaan; di manakah terletak kesempurnaan Islam? Karenanya, kedua "perintah

sistemik" tersebut dalam pandangan penulis artikel ini haruslah dipahami bersama-sama "perintah sistemik" lain. Hanya dengan cara demikianlah dapat dicapai pengertian yang benar-benar rasional dan utuh. Cara yang pertama, jelas hanya "mau menang-nya sendiri", berdasarkan emosi dan sama sekali tidak rasional.

"Perintah-perintah sistemik" lain yang dapat digunakan dalam hal ini berjumlah sangat banyak. Penulis hanya menggunakan dua buah saja dalam tulisan ini. Perintah "tidak ada paksaan dalam beragama, karena telah jelas mana yang lurus dan mana yang palsu" (*lâ ikrâha fî al-dîn, qad tabayyana al-rusydu min al-ghayyi*) (QS al-Baqarah (2): 256). Perintah dalam bentuk pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan lain dalam kitab suci "Bagi kalian agama kalian dan bagi-ku agama-ku (*lakum dînukum wa liyadîn*) (QS al-Kafirun (109): 6) . Jelas, kitab suci tersebut tidak menyatakan lembaga tertentu yang harus "menjamin" kelebihan agama itu atas agama lain, melainkan "diserahkan" kepada akal sehat manusia untuk "mencapai kebenaran".

Dengan demikian, "kesempurnaan sistem" Islam sebagai agama, tidak didasarkan pada kekuatan atau wewenang lembaga tertentu, melainkan pada kemampuan akal manusia untuk melakukan perbandingan sendiri-sendiri. Dalam pandangan penulis, kesadaran pluralistik seperti inilah yang harus kita pelihara dan bukannya lembaga tertentu seperti negara yang harus kita sandari. Bukankah ini sesuai dengan pernyataan Tuhan –sebagaimana yang disebutkan di atas, tentang ditutusnya Nabi kita Muhammad Saw, untuk membawakan persaudaraan di antara sesama manusia? Pengertian berangkai yang penulis ajukan ini, tentulah terkait sepenuhnya dengan pernyataan Tuhan: "Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, tiada diterima (amal)-nya dan ia akan termasuk di akhirat "kelak" sebagai orang yang merugi (*man yabtaghi ghaira al-Islâma dînan fa lan yuqbala minhu wa hua fî al-âkhirati min al-khâsirîn*)(QS Ali Imran(3):85). Pernyataan ini menunjukkan hak tiap orang untuk merasa benar, walaupun Islam meyakini kebenarannya sendiri.

Jadi, apa bedanya dengan pernyataan Konsili Vatikan II (1962-1965) di bawah Paus Yohannes XXIII; "Kami para Uskup yang berkumpul di Vatikan menghormati hak tiap orang untuk mencapai kebenaran abadi, walaupun tetap meyakini hal itu ada dalam Gereja Katolik Roma." Gereja tersebut merupakan lembaga yang sekarang tidak berfungsi penuh sebagai negara, walaupun secara protokoler memang demikian. Ini adalah proses sejarah dari masa lampau, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam peranan yang diambil Vatikan –dari sebuah negara penuh, menjadi sebuah negara-protokoler. Tentu saja, ini adalah sebuah proses sejarah yang sangat menarik, karena dalam hal ini ada Bapak Suci Sri Paus, yang oleh kaum Katolik dianggap tidak "terbantahkan" (*infallible*) sebagai pemberi tafsir dan fatwa unggul, yang tak dikenal oleh Islam.

*****

Dengan melihat kepada "kenyataan" tersebut, jelaslah bahwa ketiadaan negara tidak berarti kaum muslimin "harus" hidup secara individual (perorangan), melainkan mereka harus membuat komunitas masing-masing, dan merumuskan "kewajiban-kewajiban kolektif agama" yang mereka anut. Dengan kata lain, ber *amar ma'ruf nahi mungkar* (memerintahkan kewajiban agama dan mencegah larangannya) dilakukan secara persuasif oleh tiap warga masyarakat beragama Islam, yang merasa memiliki kemampuan. Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban perorangan (individual) dan secara bersama (kolektif). Dalam kehidupan masyarakat Islam "kenyataan" seperti inilah yang harus terus-menerus kita sadari dalam sebuah kehidupan bersama. Dengan cara inilah, kita paham ucapan Ali Bin Abi Thalib di zaman Nabi Muhammad Saw "Tiada agama tanpa kolektifitas, Tiada kolektifitas tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa pemimpin" (*lâ dîna illâ bi jamâ'atin wa lâ jamâ'ata illâ bi imâmatin wa lâ imâmata illâ bi imâmin*).

Di sinilah, letak kegunaan membagi perspektif pernyataan dan perintah agama, yang disampaikan kepada kita melalui kitab suci al-Qur'ân maupun ucapan Nabi Muhammad Saw, dalam artian perorangan dan bermasyarakat (individual ataupun kolektif). Perkembangan sejarah telah menunjukkan tidak ada sistem tunggal maupun menetap dalam Islam. Umpamanya saja, tidak ada cara untuk menetapkan pergantian pemimpin. Dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib ke para Raja setelah mereka, kemudian para Presiden hingga para Amir di masa kini, semuanya menjadi saksi bagi kelangkaaan adanya suksesi dalam Islam, walaupun harus ada suksesi sebagai tuntutan sejarah, tanpa disebut caranya.

Begitu juga, ukuran "masyarakat Islam" tidak pernah sama. Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar memimpin Madinah sebagai komunitas, Umar memimpin imperium Islam dari Persia di timur hingga Gibraltar di barat, negara-bangsa (*nation-state*) di bawah imperialisme hingga kini, dan negara kota (*city-state*) di kawasan-kawasan teluk saat ini, semuanya memiliki legitimitas yang sama dalam pandangan Islam.

Karena tanpa kesamaan dalam kedua hal di atas, yang juga diikuti oleh keragaman yang sangat tinggi dalam kalangan masyarakat-masyarakat Islam, membuat sebuah konsep negara Islam tidak dapat dibangun. Pilihannya, kita harus membangun masyarakat-masyarakat Islam –yang beraneka ragam. Ini berarti, perlunya "kajian kawasan" (*area studies*) –sebagaimana pernah penulis kemukakan kepada Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (*United Nation University*) di Tokyo dalam tahun-tahun 1980-an, di bawah Rektor Dr. Soedjatmoko. Mudah mengatakannya, sulit membuat pusat-pusat kajian seperti itu, bukan? {}

Islam dan Deskripsinya

Djamil Suherman menulis beberapa cerita pendek tentang dunia pesantren dengan tokoh utamanya Ummi Kulsum. Dijelaskannya, bagaimana di pesantren orang berbudaya tersendiri yang lepas dari budaya umum, yang ada di pedesaan kita. Termasuk di dalamnya penggambaran para santri yang mencintai buah hati mereka, tanpa boleh berhubungan sama sekali. Penggambaran itu oleh para kritikus sastra, seperti H.B. Yasin, sebagai deskripsi terbaik tentang dunia pesantren. Dengan demikian, apa yang dituliskan Djamil Suherman menentukan pandangan kita tentang para penghuni pondok pesantren dan jaringan-jaringan mereka, dengan sistem nilai yang tak kalah dahsyatnya dari sistem nilai yang ada dalam cerita-cerita silat/kungfu dari Chin Yung, yang diterjemahkan dalam bahasa kita secara terpisah oleh O.K.T atau Boe Beng Tjoe, kedua-duanya mencapai dua puluh lima judul (*per judul 20 jilid*).

"Robohnya Surau Kami", karya A.A Navis, sebaliknya menggambarkan realita kegundahan hati para pengikut tradisionalisme agama di Ranah Minang, karena tidak menemukan pemecahan rasional atas krisis multi-dimensional yang dihadapi lembaga pondok pesantren di kawasan tersebut. Nada lebih mementingkan pembaharuan dalam karya A.A. Navis ini tampak jelas, dan sesuai dengan kenyataan adanya krisis keagamaan yang mendalam di Sumatera Barat. Deskripsi situasi

itu oleh A.A. Navis, jelas menunjukkan dinamika lain dari dunianya Djamil Suherman yang terasa sangat romantis. Perbandingan kedua karya itu saja, sudah menunjukkan pentingnya arti sebuah deskripsi dalam memaparkan situasi kehidupan yang tengah digumuli.

Maka, jelaslah dari perbandingan di atas, bahwa deskripsi kehidupan beragama di sebuah masyarakat pada suatu waktu, sangatlah penting artinya bagi para pengamat. Romantisme pondok pesantren, dan kemurungan para pencari jawaban atas krisis yang berlarut-larut, menunjukkan dengan jelas besarnya perbedaan dalam kehidupan beragama yang dijalani oleh dua buah masyarakat yang berbeda. Menjadi kewajiban kitalah untuk sanggup mencari benang merah yang menghubungkan keduanya.

Dalam film "*The Singer, Not The Song*", dari tahun 50 atau 60-an, John Mills yang menjadi pendeta berusaha melakukan konversi kepada agama atas diri Dirk Bogarde yang bermain sebagai bandit yang piawai. Akhirnya, ketika Bogarde dikepung oleh aparat negara dan tertembak, di saat itulah si pendeta merangkak mendekatinya dan ikut tertembak di tembus peluru. Di saat menjelang kematian mereka, Bogarde memeluk agama Kristen, karena melihat pengorbanan jiwa Pendeta Mills yang mengorbankan jiwanya untuk mengkonversikannya. Ia menjadi Kristen sungguh-sungguh karena pengorbanan pendeta Mills dan bukan karena kebenaran yang dibawakan dan dikhotbahkan pendeta tersebut.

Jelas dari gambaran di atas, bagi seorang Bogarde yang sudah muak dengan "kebenaran ajaran agama", yang lebih berpengaruh atas perilakunya adalah pengorbanan dari "pembawa kebenaran" itu sendiri. Dengan kata lain, setiap orang melihat segala sesuatu dari sudut pandangan tertentu yang terkadang kita anggap tidak penting. Jadi, yang menjadi permasalahan bagi kita adalah pilihan-pilihan pandangan itu sendiri, yang sangat ditentukan oleh deskripsi yang dikemukakan. Jika ini kita abaikan, berarti kita melihat agama sebagai sesuatu yang tidak hidup,

melainkan kita hanya melihat sisi universal dan formal dari agama tersebut.

Karenanya, dalam kenyataan sehari-hari kita melihat pentingnya arti deskripsi yang diberikan atas sebuah "kebenaran agama". Dengan melupakan hal ini, kita lalu melakukan idealisasi atas ajaran agama, bukannya melihat agama sebagai sebuah proses yang dijalani secara berbeda-beda oleh orang-orang yang berlainan, dan dengan sendirinya membawa pemahaman yang tidak sama pula. Pendekatan idealisasi universal di atas memang sangat penting, tetapi juga sama pentingnya untuk melihat bagaimana pengertian orang tentang sebuah agama dibangun dari kenyataan-kenyataaan empirik dalam kehidupan kita.

Kedua pendapat di atas, yaitu pendekatan empirik di satu pihak dan pendekatan idealisme-universal di pihak lain, penting untuk sama-sama kita hayati dan kita pikirkan lebih jauh. Kepincangan untuk melihat sebuah agama dari pendekatan formal dan universal, akan membawakan sudut pandang ideal yang tidak memahami hakikat agama itu sendiri. Sebaliknya, hanya menekankan diri pada aspek empirik belaka dalam mengemudikan sebuah organisasi keagamaan (seperti NU dan Muhammadiyah) sama saja artinya dengan memisahkan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat.

Dewasa ini, hal itu tampak nyata dalam kehidupan dua buah organisasi keagamaan Islam terbesar di negeri kita, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kedua-duanya terjebak dalam pandangan universal yang idealistik, yaitu bagaimana sumber-sumber tekstual (*adillah naqliyyah*) membentuk hukum agama/ *fiqh* secara ideal; dan dari situlah di bangun sebuah kerangka universal tentang "kehidupan menurut ajaran Islam". Tentu ini lebih mencerminkan kepentingan kritis, yang terkadang tidak bersinggungan dengan kepentingan sebenarnya di masyarakat. Umpamanya saja, mengenai perjudian dan hiburan malam. Yang dipentingkan adalah melarang keduanya, tanpa meghilangkan sebab-sebab utama yang mendukungnya. Bagaimana judi akan

terbasmi kalau ketidakpastian hukum masih merajalela? Bukankah yang kaya dan berpunya akan memenangkan perkara hukum, dan tanpa kepastian hukum, dapatkah orang kecil melakukan usaha mencari rezeki yang halal? Dengan ketidakpastian itu, herankah kita kalau ada orang berjudi untuk mencari kekayaan dengan cepat?

Nah, di sinilah terletak arti penting deskripsi tentang Islam. Dari manakah ia harus dilihat? Dari kenyataan hidup orang Islam (berarti deskripsi empirik), ataukah dari sudut ajaran formal (berarti pendekatan ideal-formalistik) yang bersifat universal? Tergantung dari kemampuan kita menjawab hal ini dengan baik, nasib sejumlah kajian Islam di berbagai lembaga penelitian dewasa ini. {}

ISLAM DAN FORMALISME AJARANNYA

Dalam sejarah umat manusia, selalu terdapat kesenjangan antara teori dan praktek. Terkadang kesenjangan itu sangatlah besar, dan kadang kecil. Apa yang oleh paham komunisme dirumuskan dengan kata rakyat, dalam teori dimaksudkan untuk membela kepentingan orang kecil; tapi dalam praktek justru yang dibela terbanyak adalah kepentingan kaum *aparatchik*. Itupun berlaku dalam orientasi paham tersebut, yang lebih banyak membela kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam merumuskan orientasi paham ke-Islaman, agar tidak mengalami nasib seperti paham komunisme tersebut.

Orientasi paham ke-Islaman sebenarnya adalah kepentingan orang kecil dalam hampir seluruh persoalannya. Lihat saja kata "*maslahah 'ammah*", yang berarti kesejahteraan umum. Inilah seharusnya yang menjadi objek dari segala macam tindakan yang diambil pemerintah. Kata kesejahteraan umum dan/atau kemaslahatan umum itu tampak nyata dalam keseluruhan umat Islam. Yang langsung tampak, umpamanya, adalah kata kunci dalam adagium *fiqh*: "tindakan/kebijakan seorang pemimpin atas rakyat (yang dipimpin) sepenuhnya bergantung kepada kebutuhan/kesejahteraan mereka"

(*tasharruf al-imâm 'ala al-ra'iyyah manûthun bi al-mashlahah*).

Adapun yang tidak langsung mengenai kebutuhan orang banyak dapat dilihat dalam adagium lain: "menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan" (*dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalbi al-mashâlih*). Artinya, menghindari hal-hal yang merusak umat lebih diutamakan atas upaya membawakan kebaikan bagi mereka. Dengan demikian, menghindari kerusakan dianggap lebih berarti daripada mendatangkan kebaikan. Adagium inilah yang digunakan Dr. Amien Rais untuk meyakinkan penulis untuk menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia, tiga tahun lalu. Karena ia yakin bangsa ini waktu itu belum dapat menerima seorang wanita (Megawati) sebagai Presiden negara, hingga dikhawatirkan akan ada perang saudara jika hal itu terjadi.

*****

Nah, pengaturan melalui kesejahteraan/keselamatan/keutuhan sesuatu, secara langsung atau tidak langsung, menjadi pegangan gerakan-gerakan Islam di negeri kita semenjak dahulu. Contoh terbaik dalam hal ini adalah gugurnya Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*) dari Undang-Undang Dasar (UUD) kita. Para pemimpin berbagai gerakan Islam pada saat itu, tanggal 18 Agustus 1945, setuju membuang Piagam Jakarta tersebut dari UUD '45, agar bangsa kita yang heterogen dalam asal-usul mereka itu dapat bergabung ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pendapat yang dipegang oleh Ki Bagus Hadikusumo dan KHA Kahar Mudzakir dari Muhammadiyah, Abi Kusno Cokrosuyoso dari Sarekat Islam, A. Rahman Baswedan dari Partai Arab Indonesia (PAI), A. Subardjo dari Masyumi, H. Agus Salim dan A. Wahid Hasjim dari Nahdlatul Ulama (NU), itu jelas menonjolkan semangat persatuan pada tingkat paling tinggi. Bahwa para ulama fiqh (Hukum Islam) tidak menolak tindakan itu, menunjukkan dengan jelas bahwa keutuhan dan kesejahteraan umat dinilai

begitu tinggi oleh berbagai gerakan Islam.

Dengan demikian, tertolaklah anggapan bahwa Islam hanya bersandar pada formalitas belaka. Secara kultural, masuknya beberapa unsur budaya lokal ke dalam budaya Islam, atau sebaliknya, merupakan bukti kuat akan hal ini. Tari Seudati yang digambarkan dengan indahnya oleh James Siegel dalam *The Rope of God*, mengenai kesenian daerah Aceh yang bernapaskan praktek-praktek kaum sufi itu jelas menunjukkan hal itu. Demikian pula, diciptakannya tembang *Ilir-ilir* oleh Sunan Ampel, menunjukkan bagaimana terjadi saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat halus antara budaya daerah kita dan budaya agama yang dibawakan oleh Islam.

Demikian pula, bagaimana dengan mudahnya manifestasi budaya santri dalam budaya daerah yang disebut Tabot di Sumatera Barat dan Bengkulu, dengan budaya daerah setempat menjadi wahana bagi ekspresi keagamaan kaum Syi'ah di hadapan tindakan-tindakan "budaya Sunni" dalam beberapa abad terakhir ini, menunjukkan betapa besar dinamika budaya yang terjadi. Penggunaan "budaya adat" sebagai wahana apa yang tadinya dikenal sebagai budaya agama adalah sesuatu yang benar-benar hidup dalam perkembangan sejarahnya.

*****

Nah, hal inilah yang menjadi tantangan kita dewasa ini. Ayat kitab suci Al-Qur'an "dan dalam diri utusan Tuhan benar-benar telah ada contoh yang sempurna bagi orang yang mengharapkan kerelaan Allah, kebahagiaan akhirat dan senantiasa ingat akan tanda-tanda kebesaran Allah" (*laqad kâna lakum fî rasûlillâhi uswatun hasanah li man kâna yarju Allâha wa al-yauma al âkhira wa dzakara Allâha katsîra*)(QS al-Ahzâb(33):21), dapat digunakan sebagai pengingat bagi kita akan pentingnya arti pelestarian lingkungan alam dan penjagaan kepentingan kita dalam apa yang dinamakan kasus makro.

Hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi tekanan bagi gerakan-gerakan Islam dalam membangun sebuah bangsa, justru bukannya mementingkan formalisasi ajaran-ajaran agama tersebut dalam kehidupan. Karena itu, persoalan formalisasi ideologi Islam dalam kehidupan bernegara tidak menjadi kebutuhan utama. Justru penampilan dari agama tersebut harus terwujud tanpa formalisasi dirinya dalam kehidupan bernegara, seperti di negara ini. Dengan demikian, agama Islam menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam dalam kehidupan bernegara.

Dasar perjuangan seperti inilah yang sebenarnya mengilhami juga lahirnya partai-partai CDU (*Christian Democratic Union*, Uni Demokratik Kristen), di Jerman dan sejumlah negara lain. Inti dari pandangan seperti itu, terletak pada kesadaran bahwa agama harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan, daripada membuat dirinya menjadi wahana bagi formalisasi agama yang bersangkutan dalam kehidupan bernegara. Esensi inilah yang telah ditangkap dengan sangat baik oleh berbagai gerakan Islam di negara ini semenjak beberapa puluh tahun yang lalu. {}

ISLAM: PRIBADI DAN MASYARAKAT

Sejarah perkembangan Islam di manapun juga, senantiasa memperlihatkan jalinan antara dua hal, yaitu sistem individu (perorangan) dan sisi kemasyarakatan (sosial). Karenanya kedua hal itu harus dimengerti benar, kalau kita menginginkan pengetahuan akan agama tersebut. Dalam arti, benar-benar di dasarkan pada pengertian yang mendalam. Kalau hal ini telah dilaksanakan, maka akan kita lihat beberapa kemungkinan untuk pengembangan lebih jauh. Tentu saja ada yang menyanggah pendirian tersebut, dengan dalih Islam telah sempurna, dan tidak memerlukan pengembangan. Dalam hal ini pendapat tersebut perlu diuji kebenarannya, agar kita memperoleh gambaran lengkap tentang apa yang seyogyanya dilakukan, dan selayaknya tidak dilakukan. Dengan kata lain, sebenarnya kita saat ini memerlukan skala prioritas yang lebih jelas, dalam menatap masa depan.

Karena kedua faktor dari agama langit ini (individu dan sosial) memiliki kelebihan dan kekurangan, maka kita merasakan perlu adanya keseimbangan antara keduanya. Yang menambah galaunya persoalan, adalah kenyataan, bahwa kitab suci al-Qurân tidak pernah secara jelas membagi kedua masalah itu dalam kandungannya. Seluruhnya hanya bersandar pada kemampuan kita memahami kitab suci tersebut, mana yang merupakan perintah (*khittah*) untuk perorangan, dan mana yang untuk masyarakat.

Seluruhnya bergantung atas penafsiran kita. Umpamanya saja firman Tuhan yang menyatakan: "Dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal" "(*wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâ-ila lita'ârafû*)" (QS al-Hujurât (49): 13). Jelas di situ, yang dimaksudkan umat manusia secara keseluruhan, dan yang dikehendaki adalah kenyataan yang tidak tertulis: persaudaraan antara sesama manusia.

Dalam kitab suci al-Qurân terdapat sebuah ayat yang sangat penting yang berbunyi: Kalian kawinilah apa yang baik bagi kalian, daripada dua, tiga atau empat orang wanita (tetapi) jika kalian takut tidak dapat (bersikap) adil, maka hanya seorang (istri) saja "(*fa ankhû mâ thâba lakum matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ'a wa in khiftum an lâ ta'dilû fa wâhidah*)" (QS al-Nisa (4): 3). Jelas ini merupakan perkenan, bukan perintah. Karena itu, ia bersifat perorangan karena tidak dapat dilakukan generalisasi, itupun harus dirangkaikan dengan kenyataan, siapakah yang menentukan poligami itu adil? Kalau pihak lelaki, beberapa orangpun akan tetap adil, sedangkan bagi perempuan, masalah keadilan itu bersangkut paut dengan rasa keadilan secara normal, tentu lebih banyak kaum perempuan yang merasakan poligami itu tidak adil.

*****

Dengan kemampuan memilih dan membedakan mana yang bersifat individual, dari hal yang bersifat kemasyarakatan (kolektif) jelas peranan menggunakan akal dan pikiran kita menjadi sangat besar. Dalam khasanah pemikiran ini, salah satu adagium "harta warisan" yang dipakai NU sebagai patokan adalah: "memelihara apa yang baik dari masa lampau, dan menggunakan hanya yang lebih baik yang ada dalam hal yang baru (*al-muhâfadzatu'ala al-qadîmi al sâlih wa al akhdzu bi al jadîd al- aslah*).

Terkadang, sebuah kewajiban agama memiliki dua sisi itu, yaitu sisi individual dan sisi kolektif sekaligus, yang menjadikan kita sering lupa bahwa perintah agama dapat saja memiliki kedua

dimensi tersebut. Umpamanya saja, kewajiban berpuasa, yang semula diperintahkan sebagai sesuatu yang bersifat individual, perintah Allah Swt: "Di perintahkan kepada kalian untuk berpuasa, seperti juga diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian" (*kutiba'alaikum al-shiyâm kamâ kutiba 'ala ladzîna min qablikum*)(QS al-Baqarah(2):183). Perintah yang sepintas lalu bersifat individual ini pada akhirnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin, sebagai kewajiban semua orang Islam. Dengan demikian, kita harus mampu mencari yang kolektif dari sumber-sumber tertulis (*dalil al-naqli*).

Dalam perintah Nabi yang tertulis (*dalil al-naqli*) saja, yang membawakan sebuah kecenderungan baru, terkadang kita sulit untuk membedakan atau menetapkan, mana yang berwatak kolektif dan mana yang individual. Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini ucapan Nabi Muhammad Saw: "mencari ilmu (berlangsung) dari buaian hingga ke liang kubur" (*thalabu al-ilmi minal mahdi ila al-lahdi*). Memang hal itu adalah kerja terpuji, tetapi tidak jelas dalam ungkapan ini, apakah kewajiban yang timbul itu berlaku untuk perorangan seorang muslim ataukah bagi sekelompok kolektif kaum muslimin? Jika diartikan sebagai kewajiban kolektif, bagaimanakah halnya dengan mereka yang tidak bersekolah? Benarkah mereka termasuk orang-orang bersalah?

Kejelasannya tidak dapat dicapai dengan ungkapan harafiyah, karena itu tidak akan tercapai kesepakatan kaum muslimin tentang "kewajiban" bersekolah. Tapi apakah tanpa kesepakatan itu, lalu orang tidak berhak mendapat pendidikan? Dalam keadaan tiadanya kesepakatan tentang suatu hal, maka seseorang dapat saja mengikuti sebuah pendapat lain, sama seperti juga halnya orang menggangap tidak adanya sebuah keharusan tentang hal itu. Apakah sesuatu itu merupakan kewajiban universal ataukah kewajiban fakultatif? Dapat dikemukakan sebagai contoh mengenai hal ini, yaitu ucapan Nabi Muhammad Saw "mencintai tanah air adalah sebagian (pertanda) dari keimanan" (*hubbu al-wathan min al-iman*). Tidak jelas adakah "kewajiban" mencintai tanah

air menjadi tanda keimanan seseorang? Adakah ini berarti kewajiban memasuki milisi untuk mempertahankan tanah air, atau bukan? Untuk itu, diperlukan penjelasan dengan menggunakan akal, sehingga sumber tertulis (*dalil naqli*) maupun keterangan rasional (*dalil aqli*) dapat digunakan bersamaan.

Terkadang, sebuah ucapan yang secara harafiyah tidak menunjukan suatu arti khusus, dapat saja secara rasional diberi arti sendiri oleh kaum muslimin. Contohnya, adalah ucapan Nabi Muhammad Saw: "Tuntutlah ilmu pengetahuan hingga ke (tanah) Tiongkok" (*uthlub al-ilma walau fi al-shîn*). Ungkapan tersebut hanya menunjuk kepada perintah menuntut pengetahuan hingga ke tanah Cina, namun para ahli hadist memberikan arti lain lagi. Menurut mereka, yang dimaksudkan oleh ungkapan Nabi Muhammad Saw tersebut jelas-jelas menunjukan, kewajiban mempelajari ilmu pengetahuan non-agama juga. Bukankah di tanah Tiongkok waktu itu belum ada masyarakat muslim sama sekali? Bukankah ini secara teoritik, pemberian kedudukan yang sama di mata agama, antara pengetahuan agama (*Islamic studies*) dan pengetahuan non-agama? Perumusan sikap oleh para ahli agama Islam tersebut, yaitu kewajiban menuntut disiplin ilmu non-agama, memberikan kedudukan yang sama diantara keduanya.

Di lihat dari berbagai pengertian, seperti diterangkan di atas, jelaslah bahwa ribuan sumber tertulis (*dalil naqli*), baik berupa ayat-ayat Kitab Suci Al-Quran maupun ucapan Nabi Muhammad Saw, akan memiliki peluang-peluang yang sama bagi pendapat-pendapat yang saling berbeda, antara universalitas sebuah pandangan atau partikularitasnya di antara kaum muslimin sendiri. Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa perbedaan pendapat justru sangat dihargai oleh Islam, karena yang tidak diperbolehkan bukannya perbedaan pandangan, melainkan pertentangan dan perpecahan. Kitab suci kita menyatakan: "Berpeganglah kalian kepada tali Allah secara menyeluruh, dan janganlah terpecah-belah/saling bertentangan (*wa' tashimû bi habli Allâh*

jamî'an walâ tafarraqû) (QS Ali Imran (3): 103). Ini menunjukan lebih jelas, bahwa perbedaan pendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecah-belahan adalah sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbedaan, yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari pertentangan dan keterpecah-belahan, sebagai upaya kolektif dari sebuah totalitas masyarakat. Mudah untuk mengikuti ayat kitab suci tersebut, bukan? {}

Islam:
Sebuah Ajaran Kemasyarakatan

Charles Torrey menyatakan dalam disertasinya, kitab suci al-Qurân sangat menarik bila dibandingkan dengan kitab suci agama lain. Kenapa ia menyatakan demikian? Karena, seperti dikatakannya, kitab suci tersebut menggunakan peristilahan profesional untuk menyatakan hal-hal yang paling dalam dari lubuk hati manusia. Dengan demikian, al-Qurân memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada profesi yang kita anut. "Barang siapa mengikuti selain Islam sebagai agama maka amal perbuatannya tidak akan diterima (menurut Islam) dan di akhirat kelak ia akan merugi perdagangannya" (*man yabtaghi ghaira al-Islâma dînan falan yuqbala minhu wahua fî al-âkhirati min al-khâsirîn*) (QS ali-Imran (3): 47). Bukankah istilah merugi, dalam dunia perdagangan merupakan istilah profesional, dalam hal ini dipakai untuk menunjuk hal yang paling dalam di hati manusia, yaitu tidak memperoleh pahala?

Istilah-istilah lain dari dunia profesi juga dipakai dalam pengertian yang sama oleh kitab suci tersebut. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka ia akan melipat-gandakan imbalannya" (*man yuqridhillâ qardhan hasanan fayudhâ'ifahu*) (QS al-Baqarah (2): 245), jelas menunjuk kepada perolehan pahala, dan bukannya pengembalian kredit seperti di bumi. Hal inilah yang harus kita mengerti, jika diinginkan pemahaman lengkap terhadap kitab suci tersebut: kitab suci

itu bukanlah dokumen politik, melainkan sebuah penggambaran kehidupan yang lengkap, termasuk pemahaman sejarah masa lampau.

Ketika Allah berfirman: "barang siapa menginginkan panenan di akhirat kelak, akan Ku-tambahi panenannya" (*man kâna yurîdu harst al-âkhirati nazid lahu fi hartsihi*) (QS al-Syura (42): 20), yang lagi-lagi berbicara tentang pahala di akhirat bagi perbuatan kita di dunia ini. Bahwa istilah-istilah perdagangan dan pertanian digunakan untuk keinginan manusia memperoleh pahala bagi amal perbuatannya, merupakan penghargaan yang sangat tinggi atas profesi seseorang.

*****

Dalam sebuah ayat suci al-Qurân dinyatakan: "orang-orang yang berpegang pada janji mereka, di kala menyampaikan prasetia" (*wa al-mûfûna bi 'ahdihim idzâ 'âhadû*)(QS al-Baqarah(2):176) jelas menunjuk kepada profesionalisme seperti itu. Bukankah manusia paling mengutamakan janji profesi ketika mengucapkan prasetia? Dikombinasikan dengan pengamatan Torrey di atas jelaslah bahwa Islam memberikan penghargaan sangat tinggi kepada profesi. Hal inilah yang justru hilang dari kehidupan kaum muslimin dalam beberapa abad yang silam, karena memberikan tempat terlalu banyak kepada kaum penguasa, serta kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan mereka, alias pemberian perhatian terlalu besar porsinya kepada aspek politik dalam diri kehidupan bangsa-bangsa muslim.

Sebagai akibat, perhatian atas masalah-masalah profesional ternyata kurang besar, dan dengan sendirinya pemikiran ke arah itupun menjadi sangat kecil. Pada saat yang sama, bangsa-bangsa Barat telah mencurahkan perhatiannya yang sangat besar kepada masalah-masalah profesi. Dengan sendirinya, pertautan antara Islam sebagai ajaran dan profesi sebagai penerapan ajaran-ajaran tersebut, menjadi tidak bersambung satu sama lain. Ini

mengakibatkan ketertinggalan sangat besar dalam pemahaman Islam sebagai agama kehidupan di kalangan para pemeluknya. Karenanya, diperlukan sebuah keberanian moral untuk merambah jalan baru bagi sebuah penafsiran, yang tidak lain adalah sebuah pendekatan profesional.

Kita ambil sebuah firman dalam kitab suci al-Qurân: "jika kalian disapa dengan sapaan yang baik, maka sapalah dengan ungkapan yang lebih baik lagi" (*wa idzâ huyyîtum bitahiyyatin fa hayyû bi ahsana minhâ*) (QS al-Nisa (4): 85), jelas-jelas memerlukan pendekatan profesional, katakanlah bagi seorang produsen barang. Artinya, kalau barang produksi anda dipuji orang lain, maka tingkatkanlah mutu produksi barang itu sebagai jawaban atas pernyataan baik yang diucapkan. Hanya dengan cara itulah seorang muslim dapat membuat interpretasi atas perbuatan-perbuatan kita di dunia ini.

*****

Kalau hal ini kita renungkan secara mendalam, jelas bahwa Islam memperlakukan kehidupan sebagaimana mestinya. Sebuah pemahaman yang benar akan menunjuk kepada kenyataan bahwa Islam bukanlah agama politik semata. Bahkan dapat dikatakan bahwa porsi politik dalam ajaran Islam sangatlah kecil, itupun terkait langsung dengan kepentingan orang banyak, yang berarti kepentingan rakyat kebanyakan (kelas bawah di masyarakat). Kalau hal ini tidak disadari, maka politik akan menjadi panglima bagi gerakan-gerakan Islam dan terkait dengan institusi yang bernama kekuasaan.

Bukankah ini bertentangan dengan firman Allah dalam kitab suci al-Qurân: "apa yang diberikan Allah kepada utusan-Nya sebagai pungutan *fai'* dari kaum non-Muslim (sekitar Madinah), hanya bagi Allah, Utusan-Nya, sanak keluarga terdekat, anak-anak yatim, kaum miskin dan pejalan kaki untuk menuntut ilmu dan beribadat, agar supaya harta yang terkumpul tidak

hanya beredar di kalangan kaum kaya saja di lingkungan kalian" (*mâ afâ Allâhu min ahli al-Qurâ fa lillâhi wa rasûlihi wa lidzî al-qurbâ wa al-yatâmâ wa al-masâkîni wa ibni al-sabîl, kaila yakûna dûlatan baina al-aghniyâ' minkum*)(QS al-Hasyr(59):7). Bukankah Islam mementingkan fungsi pertolongan kepada kaum miskin dan menderita, dan tidak memberikan perhatian khusus tentang bentuk negara yang diinginkan?

Ini tentu berarti Islam lebih mementingkan pendekatan profesional, dan bukannya pendekatan politis dalam memandang sesuatu persoalan. Kalau saja ini dimengerti dengan baik, akan menjadi jelaslah mengapa Islam lebih mementingkan masyarakat adil dan makmur, dengan kata lain masyarakat sejahtera, yang lebih diutamakan kitab suci tersebut daripada masalah bentuk negara. Kalaulah hal ini disadari sepenuhnya oleh kaum muslimin, tentulah salah satu sumber keruwetan dalam hubungan antara sesama umat Islam dapat dihindarkan. Artinya, ketidakmampuan dalam memahami hal inilah, yang menjadi sebab kemelut luar biasa dalam lingkungan gerakan Islam dewasa ini. {}

Islam: Agama Populer Ataukah Elitis?

Pada tahun-tahun 50-an dan 60-an, di Mesir terjadi perdebatan sengit tentang bahasa dan sastra Arab, antara para eksponen modernisasi dan eksponen tradisionalisasi. Dr. Thaha Husein, salah seorang tuna netra yang pernah menjabat menteri pendidikan dan pengajaran serta pelopor modernisasi, menganggap bahasa dan sastra Arab harus mengalami modernisasi, jika diinginkan ia dapat menjadi wahana bagi perubahan-perubahan sosial di jaman modern ini. Ia menganggap bahasa dan sastra Arab yang digunakan secara klise oleh sajak-sajak puja (*al-madh*) seperti bahasa yang digunakan dalam *dzibâ'iyyah* dan *al-barzanji* sebagai dekadensi bahasa yang justru akan memperkuat tradisionalisme dan menentang pembaharuan. Dari pendapat ini dan dari tangan Dr. Thaha Husein, lahirlah para pembaharu sastra dan bahasa Arab yang kita kenal sekarang ini.

Nama-nama terkenal seperti Syauqi Dhaif dan Suhair al-Qalamawi muncul sebagai bintang-bintang gemerlap dalam perbincangan mengenai pembaharuan bahasa dan sastra Arab. Sejak masa itu, munculah madzhab baru bahasa Arab, yang dirasakan oleh mereka sebagai pendorong dinamika dan perubahan sosial. Bahasa dan sastra Arab dari masa lampau, yang lebih berbau agama dikesampingkan oleh kebangkitan kembali bahasa dan sastra Arab masa pra-Islam (*'asr al-jâhiliyah*).

Dalam pandangan ini, produk-produk dekaden harus dikesampingkan, guna memberi jalan kepada proses modernisasi bahasa dan sastra Arab. Ini merupakan reaksi terhadap paham serba agama yang merajai Timur Tengah sebelum itu. Sejalan dengan tumbuhnya nasionalisme Arab (*al-qawmiyyah al-arabiyyah*, yang kala itu menjadi pikiran dominan di kalangan para pemikir Arab. Dengan demikian, tradisionalisme yang dibawakan agama, dianggap sebagai penghalang bagi munculnya kecenderungan baru tersebut. Karena sifatnya yang intelektual, pandangan ini tidak langsung diikuti oleh rakyat kebanyakan, halnya menjadi pemikiran elitis dari kaum cendekiawan di negeri-negeri Arab selama dua puluh lima tahun.

*****

Di negeri kita, kemunculan kelompok nasionalis itu juga berkembang, namun tidak dengan sikap memandang rendah tradisionalisme yang dibawakan oleh agama. Namun ada persamaan, dengan pandangan elitis anti-tradisionalisme bahasa dan sastra Arab di kalangan bangsa-bangsa Arab, yaitu elitisme kaum cendekiawan yang tidak menyentuh pikiran-pikiran rakyat awam di negeri tersebut. Namun demikian, agama dengan tradisionalismenya tidak dipersalahkan jika menghambat kemajuan. Mungkin ini disebabkan oleh kekuatan politik organisasi tradisional agama, seperti NU. Tradisionalisme agama yang dibawakannya justru menyatu dengan kaum nasionalis, karena kedua-duanya harus berhadapan dengan modernisme non-ideologis yang datang dari Barat, dalam berbagai bentuk. Yang terpenting diantaranya adalah pragmatisme yang dibawakan oleh paham teknokrasi, yang dipermukaan berarti penyerahan diri secara total kepada sistem nilai yang dimiliki orang-orang Barat.

Modernisasi dianggap sebagai pengikisan tradisionalisme agama dan rasa kebangsaan kaum nasionalis. Tidak heran, jika yang muncul dipermukaan adalah manifestasi tradisionalisme

agama itu sendiri, digabungkan dengan semangat nasionalisme yang mengagungkan kejayaan masa lampau. Kedua kecenderungan itu menampilkan tradisionalismenya sendiri: anti-Barat, anti penuhnya rasionalisme dan penghormatan berlebihan kepada masa lampau. Kalau hal ini diingat benar, dengan sendirinya kita lalu dapat melihat kedangkalan dua pendekatan tersebut, dan ingin mengembalikan pertimbangan-pertimbangan rasio ke tempatnya semula.

Manifestasi budaya dari munculnya kembali tradisionalisme agama itu, seperti terlihat dalam blantika musik kita dewasa ini. Musik Arab tradisional dengan enam belas birama (*bahr*, pluralnya *buhur*) seperti yang ada dalam sajak-sajak Arab tradisional yang hampir seluruhnya didominasi sajak-sajak keagamaan, muncul sebagai "wakil agama" dalam blantika musik kita dewasa ini. Pembaharuan bahasa dan sastra nasional, yang dirintis Sutan Takdir Alisyahbana tidak sampai menyentuh akar tradisionalisme agama itu dan sebagai akibatnya kita melihat sebuah penampilan yang lucu: bahasa dan sastra nasional yang diperbaharui dan berwatak kontemporer dan —pada saat yang sama, menampilkan tradisionalisme agama

*****

Dengan memperhatikan kenyataan di atas, kita sampai kepada sebuah pertanyaan yang fundamental: haruskah kehidupan beragama kita semata-semata berwatak tradisional dan adakah penggunaan rasio dalam menyegarkan kembali tradisionalisme agama itu dianggap sebagai "bahaya"? Pertanyaan ini patut dipikirkan jawabannya secara mendalam, karena selama ini percampuran antara semangat kebangsaan kaum nasionalis dan tradisionalisme agama hanya membawa hasil positif di bidang politik belaka, bukannya di bidang budaya dan bahasa. Tradisionalisme agama tidak menyukai ideologi-agama dalam kehidupan bernegara, seperti terbukti dari penolakan atas Piagam Jakarta.

Kehidupan beragama kita, yang dengan sendirinya membawakan aspek kebudayaan dalam kebudayaan kita, bagaimanapun juga haruslah berwatak rasional. Apa yang dikemukakan A.A. Navis dalam cerpen "Robohnya Surau Kami" adalah rasionalitas kehidupan beragama yang kita perlukan, bukannya sesuatu yang harus ditakuti. Ini tidak berarti memandang rendah tradisionalisme agama, karena elemen-elemen positif dan rasional dari tradisionalisme itu sendiri harus kita teruskan. Tetapi unsur-unsur irrasional yang akan menghambat fungsionalisasi tradisionalisme itu sendiri haruslah diganti dengan nilai-nilai rasional yang akan menjamin kelangsungan tradisionalisme agama itu sendiri. Sama halnya dengan kontra-reformasi yang dijalani oleh gereja Katolik Roma, yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup tradisionalisme agamanya. Penggunaan gamelan di satu sisi —misalnya, dan musik *hard rock* serta *rap* di sisi lain, sama-sama rasionalnya dalam penyampaian pesan-pesan gerejawi melalui misa dan sebagainya.

Dengan demikian, revitalisasi tradisionalisme agama sangat diperlukan, dalam bentuk memasukkan unsur-unsur rasional ke dalamnya, hingga tradisionalisme agama itu sendiri dapat dirasakan sebagai kebutuhan, baik di kalangan elitis yang diwakili para cendekiawan, maupun rakyat jelata yang mengembangkan tradisionalisme agama populis. Di sinilah terletak tantangan yang dihadapi Islam di negeri kita, dengan penduduk muslimnya yang berjumlah lebih dari 170 juta jiwa. Masalahnya sekarang, bagaimana mengembangkan modernisme agama dan tradisionalisme agama yang serba rasional, dan menghindarkan agar keduanya tidak bertubrukan secara praktis. Dapatkah kaum muslimin di negeri ini mencapai hal itu? {}

Islam: Apakah Bentuk Perlawanannya?

Pada pertengahan bulan Mei 2002, penulis menyampaikan penilaiannya atas diri KHA. Mutamakin dalam sebuah seminar yang berlangsung di IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. Pendapat itu dikemukakan dalam seminar untuk menyambut terbitnya sebuah buku tentang diri beliau, yang memang benar-benar merupakan karya berbobot ilmiah dan melihat peranan beliau dari berbagai sudut pandang. Baik dari aspek epistemologis, kesejarahan maupun aspek sosiologis. Karya tersebut memerlukan sebuah penanganan serius yang harus diteruskan oleh para peneliti lainnya.

Dalam seminar itu, penulis mengemukakan sebuah sudut pandang yang sama sekali baru dalam menilai dan memahami tokoh KHA. Mutamakin yang wafat pada abad ke 18 Masehi dan dimakamkan di desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Diantara keturunannya yang masih aktif dalam kehidupan masyarakat adalah Rois 'Am NU (Nahdlatul Ulama), KH. A. M. Sahal Mahfudz dan diri penulis sendiri. Salah satu sesepuh keluarga dan keturunan beliau, dengan pengaruh sangat besar semasa hidup adalah KH. Abdullah Salam yang meninggal dunia tahun lalu dan dimakamkan di desa tersebut. Sebagai penghafal al-Qur'ân beliau memimpin sebuah pesantren di desa tersebut dan mengembangkan asketisme yang sangat mengagumkan, dalam bahasa pesantren dikenal dengan istilah *akhlakul karimah*.

Dalam menilik riwayat KH. A. Mutamakin itu penulis juga menggunakan Serat Cebolek yang diterbitkan Keraton Amangkurat IV dan Pakubuwono II di Surakarta, yang dibahas oleh disertasi Dr. Soebardi; juga ceritera ketoprak dan ceritera-ceritera lain, di samping berbagai tulisan kaum pesantren tentang beliau dan terutama tulisan-tulisan beliau sendiri. Yang tidak sempat penulis gunakan, adalah tulisan Dr. Kuntowidjoyo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang KH. Rifa'i, Batang, yang menggunakan referensi Serat Cebolek dan sebuah buku tentang beliau yang diterbitkan oleh *LKiS*, di Yogyakarta, tulisan Dr. Abdul Jalil, Pejabat sementara (Pjs) Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo di Semarang.

*****

Penulis berpendapat, KH. A. Mutamakin telah memelopori sebuah pendekatan baru dalam hubungan antara Islam dan kekuasaan negara pada abad ke 18 Masehi, yang memerlukan penelitian mendalam dari kita, untuk memahami strategi perjuangan Islam di masa lampau, saat ini maupun masa depan. Tilikan mendalam ini diperlukan guna memungkinkan kita untuk menemukan strategi perjuangan Islam yang tepat di negeri ini.

Perjuangan umat Islam dalam abad ke 18 Masehi itu, pada intinya berupa sikap pro/menunjang pemerintah, dan sikap menentangnya. Kaum syari'ah/ *fiqh* (hukum Islam) pada umumnya bersikap mendukung kekuasaan, mungkin atas dasar adagium yang terkenal: "pemimpin lalim untuk 60 tahun memerintah, masih lebih baik daripada anarki sesaat" (*imâmun fâjirun li sittîna 'âmman khairun min faudha sâ'atin*). Sikap ini merupakan sebuah kenyataan tidak adanya kontrol atas jalannya pemerintahan, semuanya tergantung pada kehendak sang penguasa. Para pelanggar hukum, termasuk pelanggar fiqh/hukum Islam terkena sangsi atau tidak secara legal seluruhnya tergantung sang penguasa. Kaum fiqh itu menetapkan KH. A. Mutamakin harus

dihukum, karena memasang lukisan binatang secara utuh, dan sering menonton wayang dengan lakon Bima Suci/Dewa Ruci. Dengan menonton pagelaran wayang berlakon Dewa Ruci itu, ia telah melanggar syari'ah dan harus dihukum. Tetapi hukuman itu terserah pada sultan sebagai penguasa.

Sebaliknya, para pemimpin tarekat dan tassawuf bersikap menentang penguasa, merupakan pemicu pemberontakan di beberapa tempat dalam abad tersebut. Dalam pandangan ini, penguasa dianggap menyimpang dari kebenaran formal agama, karena itu haruslah dilawan secara terbuka. Sikap ini, sebenarnya sama-sama bersifat politis, bila dibandingkan dengan sikap di atas. Hanya saja, jika yang satu menentang maka yang lain mendukung. Sikap politis inilah yang membuat penguasa waktu itu banyak menghukum mati dan menyiksa para pemimpin gerakan tarekat. Cerita ulama yang mati dibakar atas perintah sultan adalah sesuatu yang memilukan di waktu itu.

*****

Di sini, KH. A. Mutamakin memperkenalkan pendekatan yang lain sama sekali. Ia mengutamakan pemunculan paham alternatif terhadap kelaliman penguasa, namun tidak memberikan perlawanan secara terbuka. Dengan demikian, ia lebih mengutamakan sikap memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang pemimpin wajib bertindak dan membiarkan para ulama sebagai alternatif kultural di hadapan sang penguasa. Pendekatan inilah yang di kemudian hari dikenal dengan pendekatan kultural yang memicu perlawanan rakyat, tanpa melawan sang penguasa. Sikap ini dikecam dengan keras oleh pendekatan politis yang menunjang penguasa dan yang menentangnya.

Pendekatan kultural ini, tidak pernah jelas-jelas menentang penguasa, tapi ia juga tidak pernah menunjang penguasa. Di masa itu, kaum syari'ah memberikan dukungan kepada penguasa sedangkan pihak tarekat bersikap menentang. KH. A.

Mutamakin mengembangkan sikap kultural di atas, yakni pilihan alternatif yang bersifat kultural. Di masa Orde Baru, keadaan menjadi terbalik: pihak tarekat justru menjadi penunjang dan mendukung kekuasaan, seperti terjadi pada pemimpin-pemimpin tarekat pada masa itu. Sedangkan kaum syari'at, seperti yang tergabung dalam kalangan NU/PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menampilkan perlawanan kultural terhadap kekuasaan.

Sekarang, pertanyaan pokok adalah: haruskah perlawanan kultural itu dikembangkan terus di masa depan, atau justru dimatikan, dan dengan demikian perjuangan seterusnya menjadi perlawanan politis saja. Jawabannya menurut penulis adalah sesuatu yang sangat komplek: bagi organisasi non-politis, seperti NU, pendekatan yang harus diambil adalah pendekatan kultural yang lebih didasarkan pada alternatif-alternatif yang mengutamakan kebersihan prilaku di bidang pemerintahan. Sedangkan bagi organisasi-organisasi politik, seperti PKB (Partai Persatuan Pembangunan), tekanan harus diletakkan pada penciptaan sistem politik yang bersih, meliputi ketiga bidang eksekutif-legislatif-yudikatif. Hanya dengan kombinasi kedua pendekatan kultural dan politis itu dapat ditegakkan proses demokratisasi di negeri kita. Sebagaimana diketahui, demokratisasi hanya dapat tegak kalau dapat diupayakan berlakunya kedaulatan hukum dan adanya perlakuan yang sama bagi semua warga negara di muka Undang-Undang. Bukankah dengan demikian, menjadi relevan bagi kita di saat ini, mengembangkan pendekatan kultural yang dahulu dirintis KH. A. Mutamakin? {}

Islam: Ideologis Atau Kultural? (1)

Dalam acara NU (Nahdlatul Ulama)/PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan beberapa pesantren di Kalimantan Selatan, serta orasi budaya dalam Konferensi Besar Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Samarinda, penulis melihat sebuah fenomena yang sangat menarik. Di tiap tempat, penulis selalu disuguhi pagelaran qasidah *shalawat badr*, bahkan di daerah lain terjadi orang-orang non-muslim membawakannya. Ini berarti, sajak arab ciptaan KH. Ali Mansyur dari Tuban, di Banyuwangi tahun 1962 itu, telah menjadi khazanah budaya nasional, minimal budaya NU/PKB. Terlepas dari penyerahan bintang NU kepada keluarga almarhum pencipta sajak tersebut di Muktamar Krapyak, Yogyakarta, tahun 1989 itu, fakta penyebaran sajak yang ditembangkan dalam birama (*bahr*) tradisional tersebut, tampak jelas telah dianggap sebagai fenomena budaya tersendiri tanpa disadari.

Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara budaya dan agama. Sama eratnya dengan penyampaian lagu-puja dalam qasidah *dzibâ'iyah* yang dibawakan jutaan orang anak-anak muda NU, setiap minggu, jelas menunjukkan bahwa penyebaran agama Islam di negeri ini antara lain dilakukan dengan penyampaian budaya. Artinya, penyebaran Islam itu dilakukan secara damai, tidak melalui jalan peperangan.

Memang harus diakui, kekuatan yang dimiliki kaum muslimin, melalui kekuasaan atau tidak, telah turut mendukung penyebaran agama secara damai itu.

Namun, tidak selamanya penyebaran agama secara damai itu terkait dengan kekuasaan, seperti terlihat pada berbagai aktifitas yang dulu menyertai aliran Syi'ah di negeri kita, beberapa abad yang lalu. Secara budaya, apa yang tadinya dianggap sebagai tindakan penyebaran agama, sekarang diterima sebagai adat di berbagai daerah. Perayaan Tabot, di Bengkulu umpamanya, dapat dikemukakan sebagai salah satu contoh. Adat yang satu ini, menampilkan diusungnya Tabot/peti mati/ keranda cucu Nabi Saw, Sayyidina Hasan dan Husein, yang justru menjadi tanda bagi kesetiaan orang pada ajaran *ahl al bait* (keluarga beliau) yang menjadi titik sentral ajaran Syi'ah itu. Bahwa ia telah menjadi manifestasi budaya, menunjukkan arti kesejarahan yang sangat penting.

*****

Hal yang sama juga kita temui dalam penggunaan nama-nama di lingkungan DPR/MPR-RI kita. Gedung yang megah itu diharuskan menggunakan nama-nama dalam bahasa Sansekerta, seperti Graha Nusantara dan sebagainya. Sedangkan DPR/MPR-RI sendiri, sebagai produk Undang-Undang Dasar (UUD), lebih mencerminkan dialog antara para pemimpin Indonesia sebelum kemerdekaan, yang menggunakan pengaruh bahasa Arab. Lihatlah kata-kata yang dipakai, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga-tiganya, sebelum mengalami konjugasi dalam bahasa kita, adalah kata-kata dalam bahasa Arab. Baik kata dewan, wakil maupun rakyat, berasal dari Timur Tengah. Begitu juga kata pemilihan umum, dengan kata "umum" digunakan untuk hal-hal yang menyangkut publik, jelas berasal dari "sono".

Namun, perkembangan bahasa yang semula diambil dari kata-kata Arab dan kemudian dilanjutkan dengan kata-kata

Sansekerta, merupakan adaptasi yang dimiliki oleh bangsa kita. Kalau itu kita kaitkan dengan perkembangan di bidang-bidang lain, akan lebih besar kemelut pengertian yang diakibatkan oleh pemakaian sehari-hari. Ambil saja kata hukum, yang berasal dari kata *al-hukm* dalam bahasa arab. Kata ini semula digunakan untuk menunjuk hukum agama Islam (*fiqh*), namun karena perluasan pemakaiannya yang meliputi penggunaan produk-produk yang digunakannya, akhirnya kata yang berasal-usul Arab itu meliputi makna baru, yang memiliki arti lain seperti disebutkan di atas. *Al-hukm* yang semula berarti aturan dan undang-undang agama (*canonical law*), berkembang menjadi hukum –yang berarti undang-undang negara.

Perubahan pengertian ini, disebabkan sebagian oleh perubahan arti kata *law/recht*, yang diambilkan dari bahasa-bahasa Eropa modern. Belum lagi kalau diingat adanya bahasa-semu (*meta language*) dalam bahasa nasional kita, seperti disinyalir oleh Dr. Toety Herati Nurhadi: diamankan berarti ditangkap, harga disesuaikan berarti dinaikkan dan sebagainya. Akibat dari penggunaan bahasa semu ini, masyarakat sempat terkotak-kotak dan timbulah isolasi antar golongan di dalamnya. Akibat dari isolasi tersebut adalah munculnya jalan pintas berupa budaya kekerasan (*culture of violence*) yang terjadi —terutama dalam bentuk munculnya penggunaan preman dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

******

Jelaslah dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan adalah pembakuan arti yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa pembakuan ini, kita akan tetap rancu dalam pemikiran dan kacau dalam pengertian. Akibatnya, kita sebagai bangsa tidak tahu kemana orientasi kehidupan harus diarahkan. Hal ini tampak antara lain, dalam pernyataan seorang anggota fraksi PDI-P DPR-RI bahwa ia bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil partai. Ini berarti, kerancuan telah menelusup dalam tubuh kita sebagai

bangsa, menunjukkan cara berpikir yang carut marut yang kita alami saat ini. Demokrasi kita, yang semula berarti pengutamaan kepentingan rakyat banyak, diubah dengan tidak terasa kepada pemenuhan kebutuhan golongan dan ambisi pribadi.

Dengan demikian, kebutuhan menyamakan pandangan tentang demokrasi yang ingin kita ciptakan dalam kehidupan bangsa, haruslah tetap dilanjutkan. Walaupun sudah lebih dari 150 tahun, Alexis de Tocquevile menerbitkan bukunya tentang demokrasi di Amerika Serikat, sampai hari inipun pembicaraan tentang jenis-jenis dan jangkauan proses tersebut dalam kehidupan bangsa Amerika tetap berlangsung. Dengan demikian, perkembangan proses demokratisasi itu sendiri senantiasa dijaga oleh para pemikir, agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Ini adalah sebuah hal yang sangat mendasar (fundamental), karenanya ia tidak dapat diabaikan begitu saja.

Karena itu, keinginan berbagai kalangan gerakan Islam, agar Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam pasal 29 UUD kita, haruslah terus dibicarakan. Ia menunjukkan kurang adanya pengertian di kalangan gerakan-gerakan Islam tersebut. Bukankah pencantuman Piagam Jakarta itu dalam salah satu pasal UUD akan berarti memasukkan ideologi agama tersebut ke dalam kehidupan negara, dan dengan demikian memberikan kepadanya kedudukan resmi sebagai ideologi negara? Bukankah dengan demikian, para warga negara lain yang non-muslim dimasukkan ke dalam lingkungan warga negara kelas dua? Dan bukankah orang yang berpaham ideologisme non-agama, seperti kaum nasionalis dan sosialis, juga tidak memperoleh kedudukan terhormat di negeri ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dijawab, bila kita menginginkan kehidupan bangsa yang benar-benar demokratis di masa depan. {}

Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (2)

Pada waktu penulis berkunjung ke Pusat Persatuan Muslim Tiongkok, penulis menyatakan persamaan antara kaum muslimin Tiongkok dan Indonesia. Kedua negeri ini diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD) yang tidak mencantumkan Islam sebagai dasar negara. Dalam struktur seperti itu, Islam tidak berfungsi sebagai hukum negara, melainkan sebagai jalan hidup masyarakat. Dalam hal ini, tentulah masyarakat sendiri yang memilih berkeyakinan Islam di Indonesia, dan masyarakat yang menentukan untuk tidak menampakkan afiliasi agamanya seperti di Tiongkok. Persamaan mendasar ini, harus dipakai selaku tali pengikat antara kedua negara itu dalam hubungan formal dan non-formal antar mereka.

Namun, antara kedua negeri itu terdapat perbedaan yang sangat besar, yang sering luput dari perhatian kita. Mengingat perbedaan tersebut, maka pentinglah arti sejarah bagi pembentukan pandangan umum sebuah negeri. Hal ini sering diabaikan orang, hingga secara tidak terasa kita terjerumus kepada sikap menyamakan hal yang tidak sama. Karenanya, dalam tulisan ini dicoba untuk menyoroti hal itu, agar kita tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Dengan cara inilah kita melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan masa lampau yang diperbuat, dalam menyongsong masa depan.

Salah satu hal yang membedakan kedua negeri adalah sejarah masing-masing yang saling berbeda. Karena sejak semula Tiongkok berpenduduk sangat banyak, maka pemerintahan dikembangkan lebih seragam. Keseragaman itu dilambangkan oleh sistem administrasi yang sama dan birokrasi yang tunggal di semua propinsi, mengikuti apa yang ditetapkan di ibu Kota Nanking maupun Beijing. Kedudukan Han Lim sebagai wadah tunggal pendidikan tenaga administrasi pemerintahan, telah ada semenjak ratusan tahun yang lalu. Sementara APDN (Akademi Pegawai Dalam Negeri) dan IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) di negeri kita baru berlangsung puluhan tahun lamanya, itupun dengan hasil yang sudah sangat menggembirakan. Di Universitas Tokyo, Jepang dan Ecole Superieur, Perancis yang berusia sedikit lebih tua juga mencatat hal yang sama.

*****

Perbedaan sangat mencolok antara kedua bangsa dapat ditelusuri pada sejarah masing-masing. Satu sebagai negara daratan (*land-based country*) di Tiongkok dan satu lagi sebagai negara maritim. Sudah tentu dengan lebih banyak keseragaman di China dan keragaman kerajaan-kerajaan di negeri kita. Kalau daratan Tiongkok terkenal dengan sistem agraris yang berintikan sawah dan padang rumput (lengkap dengan tradisi penggembalaannya), maka perairan negeri kita justru menunjukkan ciri perbedaan sangat besar dalam cara hidup masing-masing daerah. Ada yang bergantung pada hasil hutan yang sangat besar, seperti di Jambi dan Pulau Kalimantan, ada pula yang lebih mengandalkan perdagangan laut antar pulau, seperti terdapat dalam kebudayaan Bugis dan Madura. Hanya di Jawa, Sultan Agung Hanyakrakusuma dapat menegakkan cara hidup agraris lengkap dengan sistem kepegawaiannya.

Namun, pengenalan antropologis antara keduanya, dengan yang satu menggunakan konsep agraris dan yang kedua dengan

konsep maritim, harus diimbangi dengan analisa sosiologis, yang juga akan menunjukkan perbedaan dan persamaan mereka. Umpamannya saja, kita tunjukkan pada kuatnya akar kekuasaan pihak yang memerintah (*the ruling class*). Sebenarnya, nama Mandarin untuk bahasa nasional Tiongkok saat ini, diambil dari nama kelompok birokrat pemerintahan yang menguasai negeri itu semenjak lebih dari 2000 tahun lampau. Kelompok birokrat ini sanggup bertahan, bahkan menghadapi tantangan kaum pendekar bersenjata yang menguasai pedalaman Tiongkok selama ratusan tahun terakhir ini. Sekarangpun, masih belum diketahui bagaimana mereka hilang dalam pemerintahan dan sistem politik yang ada, walaupun kekuasaan komite militer di lingkungan Partai Komunis Tiongkok masih sangat besar. Apakah kelas bersenjata itu diserap ke dalam komite militer tersebut dengan bawahan-bawahannya, juga tidak kita ketahui.

Di negeri kita pun kekuasaan kaum priyayi dengan nilai-nilainya sendiri terasa sangat besar di masa lampau. Hanya saja, dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, kaum agamawan muslim (dikenal dengan nama kaum santri) tampak menyelusup ke dalam jantung kekuatan kaum priyayi tersebut. Jalan yang dilalui ada dua model, yaitu jalur kekuasaan politik dan jalur pengembangan profesi. Kalau ini kita lupakan, sama saja artinya dengan membiarkan diri hidup di masa lampau tanpa mengenal hidup masa kini dan masa mendatang.

*****

Jelaslah, tampak betapa besar perbedaan antara Tiongkok dan Indonesia, serta betapa besar pula persamaan antara keduanya. Kalau kita proyeksikan bayangan masa depan, sistem-sistem politik yang dianut kedua negeri itu –di masa kini dan masa depan– akan bertambah nyata persamaan maupun perbedaan antara kedua bangsa tersebut. Bagaimana masing-masing menjawab tantangan yang dihadapi, yang datang dari proses modernisasi

yang penuh dengan persaingan, adalah pengenalan akan dua buah proses yang sama-sama menarik untuk dikaji. Di sinilah, terasa betapa pentingnya deskripsi historis yang dikemukakan oleh kedua sistem politik yang digunakan kedua bangsa itu (ethnografi, yang sangat dikuasai oleh administrasi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda).

Mengingat hal itulah perlu kita sadari betapa pentingnya catatan-catatan historis yang dikenal oleh kedua belah pihak. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah kedua bangsa. Bahwa perbedaan-perbedaan dari orkestra-kamar (*chamber orchestra*) yang memang tidak sama sejarahnya itu adalah hal yang wajar, merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah. Tetapi, membandingkan antar keduanya, untuk mencari pelajaran yang dapat kita gunakan untuk mengenal cara hidup kita sendiri, adalah sebuah hal yang wajar pula.

Karenanya, segala macam tulisan dan rekaman suara yang memberikan gambaran akan perjalanan sejarah kedua bangsa itu, jelas akan sangat menarik hati para pengamat. Akankah kita menjadi sebuah bangsa yang hanya menopang dominasi masa lampau, terlepas sama sekali dari konteks historis yang sedang berjalan? Ataukah justru kita menjadi bangsa yang tidak dapat menatap masa depan sendiri, semuanya terpulang kepada kita sendiri. Di sinilah perlunya kita mengenal kedua bangsa secara lebih mendalam sebagai bangsa yang sama-sama bukan negara agama, walaupun mempunyai perkembangan sejarah (*historical development*) yang berbeda. {}

Islam: Ideologis Atraukah Kultural? (3)

Beberapa partai politik masih mencantumkan Islam sebagai asas/dasar negara, begitu juga beberapa perkumpulan lain yang non-politis. Ketika hal itu ditanyakan pada penulis, maka jawabannya adalah biar saja, karena itu adalah kehendak mereka. Dengan rasa heran, yang bertanya mengemukakan: aneh sekali, Anda dari dahulu selalu menentang negara Islam, mengapakah partai politik yang berasaskan Islam tidak Anda tolak? Bukankah ini berarti Anda menerima pandangan mereka? Bukankah kedua hal itu saling bertentangan, tapi Anda terima?

Jawabannya justru karena penulis menolak negara Islam. Jadi jelas, penulis menolak negara Islam di Indonesia, tidak di tempat lain yang penduduknya homogen (berpandangan tunggal). Karena bangsa kita beraneka ragam dalam pandangan hidup, dengan sendirinya negara tidak dapat hanya melayani mereka yang berpandangan negara Islam saja. Orang muslim pun, seperti penulis yang tidak menerima negara Islam di Indonesia, harus dihargai pendapat dan sikap hidup mereka. Apalagi yang tidak beragama Islam, yang jumlahnya melebihi 10 % bangsa ini. Adalah tindakan gegabah untuk menganggap konsep negara Islam diterima kaum muslimin di negeri ini, hanya karena mereka merupakan mayoritas penduduk.

Itulah yang membuat mengapa penulis menolak gagasan negara Islam di sini, karena penulis tidak ingin menyangkal

kebenaran yang dibawakan oleh statistik. Lain halnya dengan bangsa Pakistan, yang ingin mendirikan negara sendiri karena persamaan agama, dan untuk itu mereka berani berpindah tempat ke kawasan tersebut dari daerah asal, dan di Pakistan mereka membentuk kelompok kaum pendatang (*muhajirin*). Dapat dimengerti mengapa mereka menginginkan Republik Islam Pakistan pada waktu ini, walaupun tidak sejalan dengan pikiran penulis sendiri.

*****

Kembali pada masalah asas Islam bagi partai politik maupun perkumpulan lain. Karena yang beratribut Islam adalah partai politik dan/atau perkumpulan-perkumpulan lain, maka tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Kalau mereka memperjuangkan Piagam Jakarta, untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita, maka itu adalah hak mereka juga untuk merubah konstitusi dan dasar negara. Ini adalah konsekuensi berdemokrasi, bahkan di Amerika Serikat pun ada orang yang ingin agar Undang-Undang Dasar-nya diubah menjadi Undang-Undang Dasar berideologi komunis. Masalahnya tinggal apakah rakyat mau menerimanya dalam pemilu atau tidak.

Sikap membedakan kehidupan negara dari kehidupan perkumpulan yang seperti ini, adalah sikap sehat dan demokratis yang harus ditegakkan, kalau kita ingin mengembangkan demokrasi di negara kita. Dasar dari sikap ini adalah keyakinan rakyat banyak yang tahu apa yang harus dilakukan, walaupun mayoritas tidak berpendidikan tinggi, dan bahkan masih besar prosentase mereka yang buta huruf. Kalau dalam hal ini saja kita sudah tidak memiliki keberanian, maka mereka yang bercita-cita mendirikan negara Islam tidak memperoleh tempat untuk menyuarakan kehendak, dan mereka akan menempuh jalan pemberontakan bersenjata.

Karenanya, kita harus memberikan tempat bagi perbedaan

pendapat dan kemerdekaan berbicara, artinya adalah kebebasan menyatakan pikiran tanpa dikekang sama sekali. Inilah yang mendasari pendapat penulis, bahwa TAP MPRS No. 25 tahun 1966 harus dicabut. Karena TAP itu melarang penyebaran paham Marxisme-Leninisme atau Komunisme. Sebagai sebuah paham, pikiran itu hanya dapat diperangi oleh pendidikan dan penerangan, bukan oleh sebuah Ketetapan MPR ataupun produk hukum apapun. Lain halnya, kalau yang dilarang adalah lembaga atau institusi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), karena itu dapat dilarang oleh negara, seperti halnya kita melarang lembaga bernama *Freemason* (lembaga yang berpikiran bebas tanpa agama). Di sinilah diperlukan ketelitian kita, agar produk-produk kenegaraan kita tidak merugikan diri sendiri.

*****

Hal sekecil ini, yaitu perbedaan-perbedaan antara paham dan lembaga harus dilakukan dengan cermat. Tanpa kecermatan seperti itu, kita dapat berjalan di arah yang salah, yaitu menindak hal yang tidak perlu diperhatikan dan membiarkan sesuatu yang memerlukan tindakan. Inilah letaknya arti penting dari perembugan/permusyawaratan, seperti yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar kita: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang seringkali dianggap sebagai ajang percaturan kekuasaan, antara dua hal yang berjalan sendiri-sendiri. Kekurangan memahami situasi seperti ini hanya akan memperparah keadaan, karena timbul dari kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang peranan pemerintah dalam menjaga kepentingan negara.

Ini adalah sesuatu yang berjalan dari sebuah generasi yang diwariskan dari generasi penerus. Joko Tingkir, umpamanya, mempunyai keturunan Kyai Haji Ahmad Mutamakin dari Kajen, Pati, yang sangat tunduk pada Amangkurat IV di Surakarta. Ada semacam kontinuitas cara yang dipertahankan dengan segala

kekuatan, karena Joko Tingkir alias Sultan Hadiwidjaya adalah penguasa kesultanan Demak yang digulingkan oleh Sutawidjaya, pendiri dinasti Mataram yang kemudian bergelar Panembahan Senopati Ing Ngalaga Sayyidin Panatagama Kalifatullah Ing Tanah Jawi. Karena penulis masih keturunan Kyai Haji Ahmad Mutamakin, berarti masih terkait dengan Sunan Benawa di Kendal, ayah Sunan Pakubuwana I, dengan sendirinya para penguasa Mataram masih menghormati penulis.

Kenyataan inilah yang harus diperhatikan dalam mengikuti sistem politik Jawa, karena kuatnya kontinuitas tradisi tersebut. Karena sistem politik Jawa masih memiliki bekasnya yang mendalam atas sistem politik nasional yang kita miliki sekarang, dengan sendirinya tali temali ini harus diperhatikan juga. Ini memperkuat pendapat penulis, bahwa kita tidak memiliki acuan negara Islam bagi sistem politik yang kita kembangkan. Karena hal ini diabaikan oleh sementara pihak dalam wujud sistem politik kita yang ada, maka pemilu adalah satu-satunya tempat untuk menguji kebenaran pendapat penulis ini. Menurut dugaan penulis, kurang dari 20 % pemilih akan memberikan suara kepada partai-partai politik yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Sejarahlah yang akan menjawab, benarkah apa yang disangkakan penulis itu akan terjadi? {}

Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (4)

Dalam upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa untuk bidang humaniora di Universitas Soka Gakkai, Tokyo, baru-baru ini, penulis mengemukakan dalam sambutannya bahwa sebuah tradisi baru telah di mulai di Asia. Di samping PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang membawakan moralitas keagamaan dalam kehidupan politik suatu bangsa, kita lihat adanya hal sama yang dilakukan oleh partai Komeito, yang didukung oleh gerakan Buddha terbesar di dunia, Soka Gakkai di Jepang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bharatiya Janata Party, yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee. Dan, didukung oleh oraganisasi Hindu kenamaan di negeri itu, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), yang didirikan tahun 1925, setahun sebelum NU lahir (tahun 1926).

Malam harinya, sebelum pemberian gelar tersebut, penulis berkunjung ke rumah Prof. Mitsuo Nakamura, seorang ahli gerakan Islam di Indonesia, yang tinggal di Ito City (sekitar dua jam berkendaraan mobil dari kota Tokyo). Sebuah pertanyaan beliau menunjuk dengan tepat problematika yang dihadapi penulis: "Anda memisahkan ideologi agama dari kehidupan negara. Mengapakah sekarang Anda justru membawa agama dalam kehidupan bernegara?" tanyanya. Ternyata, badan yang terasa kecapaian akibat berkendaraan mobil ke Ito City selama dua jam itu, hilang seketika dengan pertanyaan tersebut. Inilah yang

penulis cari selama beberapa tahun ini, tetapi tidak pernah dirumuskannya dalam bentuk pertanyaan seperti itu.

Penulis memberi jawaban, bahwa yang terjadi (dan terus terang saja, dikembangkan penulis di Indonesia melalui PKB), adalah penolakan terhadap langkanya moralitas dalam kehidupan politik kita dewasa ini. Jadi dengan demikian, kalau dalam masyarakat sekuler di Barat ada moralitas non-agama dalam kehidupan politik, di negara-negara berkembang yang belum memiliki tradisi yang mapan, moralitas ditegakkan melalui dasar-dasar agama. Jadi, ukuran-ukuran ideologis-agama tetap tidak memperoleh tempat dalam kehidupan bernegara karena sifatnya yang sesisi dan hanya khusus untuk kepentingan para pemeluk agama tersebut. Jadi di sinilah terletak perbedaan antara moralitas dan ideologi, walaupun sama-sama berasal dari wahyu yang satu.

*****

Kenyataan ini adalah sesuatu yang penting: kita harus jeli membaca sejarah bangsa-bangsa di dunia, dalam mengambil pelajaran serta sikap yang diperlukan. Kalau di satu sisi, kita melihat moralitas yang tinggi tanpa berdasarkan agama, seperti diperlihatkan Jiang Zemin dan Zhu Rongji di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sepenuhnya disandarkan pada moralitas sekuler yang bersifat materiil. Kita harus mampu mengembangkan moralitas politik yang di dasarkan pada ajaran-ajaran umum semua agama. Kejujuran, kesungguhan kerja dan pertanggungan-jawab secara jujur kepada nasib bangsa di kemudian hari merupakan sebagian saja dari moralitas umum seperti itu. Karenanya, pemakaian agama untuk menimbulkan moralitas seperti itu justru harus dihargai, dan bukannya dicurigai.

Antonio Gramsci mengemukakan gagasan sosialisme yang penuh kemanusiaan, dan di dalamnya tentu peranan besar dari moralitas yang tinggi, sebagai sebuah koreksi atas Marxisme-Leninisme yang sarat dengan ketentuan-ketentuan organisatoris

belaka. Pandangannya saat itu (sebelum 1927) dianggap sebagai penyimpangan Komunisme di Italia, namun adanya kebangkrutan dan kehancuran Uni-Soviet justru membenarkannya. Demikian pula halnya dengan Alexander Dubcek di Praha yang berani menawarkan Komunisme yang berwajah kemanusiaan. Namun, beberapa puluh tahun kemudian apa yang mereka bawakan menjadi kenyataan: bahwa Komunisme pun harus melakukan koreksi atas peranannya dalam kebangunan manusia di akhir abad lalu dan sepanjang abad ini. Pengamatan ini sepenuhnya mengikuti apa yang diingatkan Vladimir Ilyich Lenin: "penyakit kiri ke-kanak-kanakan" (*leftism infantile disease*) yang dihadapi kaum revolusioner manapun yaitu heroisme romantis. Mereka menganggap revolusi akan rampung ketika aku yang berjuang. Aku-*isme* seperti inilah yang justru merusak revolusi, karena perjuangan jangka panjang harus ditundukkan kepada kebutuhan pribadi seorang pemimpin yang tidak lama jangka hidupnya.

Lawan dari aku-*isme* itu adalah budaya/kultur dan agama, termasuk manifestasi budaya yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Kalau tidak kita pahami dengan benar, peranan agama tidak lagi berorientasi kultural, melainkan berorientasi institusional. Kegagalan memahami hal ini berarti kegagalan pula dalam memahami proses demokratisasi, yang memang sejak semula sudah tidak ideal. Sir Winston Spencer Churchill pernah menyatakan, demokrasi banyak kelemahan dan kekurangannya, tetapi ia tetap merupakan perwujudan terbaik dari upaya umat manusia menegakkan pemerintahan yang benar. Tanpa menghiraukan hal-hal seperti ini, maka pandangan Mao Zedong di RRT menjadi sesuatu yang tidak sehat.

*****

Demikianlah, terlihat betapa erat hubungan antara budaya/kultur dan politik, paling tidak untuk menampilkan kesusilaan

politik (*political morality)* yang diperlukan oleh sistem pemerintahan manapun di dunia ini. Kata-kata Zhu Rongji "sediakan sepuluh buah peti mati, sembilan buah untuk para koruptor dan sebuah lagi untuk diriku, kalau aku juga korup", adalah ungkapan moralitas yang diingini. Karenanya, baik itu moralitas sekuler dari sebuah ideologi duniawi seperti Komunisme, maupun moralitas agama yang digunakan dalam pengembangan sistem politik, haruslah dibaca sebagai keniscayaan sebuah pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab pada rakyat.

Di sini, kita harus belajar dari para moralis dunia, dari Fir'aun Akhnaton di Mesir kuno hingga Mahatma Gandhi di India dalam abad ke 20, membuat rambu-rambu yang harus digunakan dalam mengemban amanat rakyat yang kita junjung tinggi. Kegagalan memahami hal ini, hanya akan membuat seorang penguasa mementingkan diri saja, seperti halnya Kaisar Nero yang membakar kota Roma untuk mencari kesenangan. Juga Kaisar Bu Tek Chian yang curiga kepada semua orang dengan anggapan mereka ingin menyingkirkan dirinya dari pemerintahan, maupun Sultan Agung Hanyakrakusuma dari Mataram yang bergembira dengan para dayang-dayangnya di atas Taman Sari dengan menyaksikan lawan-lawan politiknya di makan buaya, karena tidak dapat melawan binatang-binatang buas itu tanpa senjata.

Jadi benar menurut *fiqh*: "tindakan dan kebijaksanaan seorang pemimpin mengenai rakyat yang dipimpin, harus terkait langsung dengan kesejahteraan mereka", merupakan sebuah rambu moral yang melarang untuk menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri. Tiap agama dan keyakinan memiliki sejumlah adagium/ketentuan seperti itu, karena itulah moralitas-agama sangat diperlukan dalam menciptakan sistem politik yang sehat. Karenanya, kita tidak perlu ragu-ragu bahwa moralitas-agama memberikan sumbangan bagi pembentukan sistem politik yang sehat bagi sebuah bangsa. Pada tingkat inilah agama dan politik dapat dihubungkan, dan tidak pada tingkat ideologis. {}

ISLAM: IDEOLOGIS ATAUKAH KULTURAL? (5)

Dalam perjalanan menuju Banjarmasin, di pagi hari, penulis mengikuti siaran warta berita televisi di ruang tunggu pesawat Mandala. Ditayangkan di televisi itu peringatan Tabot di Bengkulu, yang diselenggarakan untuk menghormati Syech Burhanudin yang hidup di kawasan itu pada akhir abad ke 17 dan awal abad ke 18 Masehi. Karena dijelaskan dalam pemberitaan tersebut, bahwa acara tersebut juga diikuti orang-orang keturunan India, jelaslah bahwa orang-orang Syi'ah sekte Isma'illiyah adalah pembawa Islam ke Bengkulu saat itu. Sekte Syi'ah Isma'iliyah inilah yang kemudian menurunkan para pemimpin yang bernama Aga Khan di negeri itu.

Walaupun kemudian ajaran Sunni tradisional menguasai Bengkulu, upacara Tabot itu tampaknya tidak juga kunjung hilang, dan sekarang bahkan menjadi bagian dari adat setempat. Dengan demikian muncul Syi'isme dalam baju adat atau kultur masyarakat setempat di permukaan, sedangkan seluruh ajaran kaum muslimin —di kawasan itu, di "sunni"kan melalui fiqh/ hukum Islam. Ini berarti bahwa, manifestasi Syi'isme muncul dalam bentuk budaya setempat. Sayyidina Hasan dan Husain dimulyakan dalam "ajaran" Sunni, dan dengan demikian dilepaskan dari sekte Syi'isme. Ini adalah kejadian lumrah, seperti halnya pembacaan *dziba'* oleh jutaan warga NU di berbagai kawasan di negeri kita, dengan tidak lagi tampil dalam bentuk ideologis.

Kedua hal tersebut di atas, yaitu munculnya Syi'isme dan pembacaan *dziba'* dalam bentuk budaya adalah bentuk paling kongkrit dari penampilan Islam di masa lampau di negeri ini, yakni dalam bentuk kultural bukannya ideologis. Kalau hal ini tidak kita mengerti dengan baik, berarti kita tidak memahami proses masuknya Islam ke Indonesia. Inilah hal yang harus kita perhatikan baik-baik dalam hati, jika ingin menyimak perkembangan agama tersebut di kawasan Asia Tenggara. Ketidakmampuan memahami hal ini hanya akan menghadapkan Islam pada paham-paham lain di negeri ini, sesuatu yang jelas-jelas tidak diingini oleh mayoritas kaum muslimin Indonesia —jika tidak dikatakan oleh mayoritas bangsa.

*****

Inilah yang menjadi tema utama yang harus diperhatikan dalam mencermati perkembangan Islam di negeri ini, yang sering disebut sebagai "negerinya kaum muslim moderat." Kegagalan mengambil sikap ini, apapun alasannya (ideologis ataupun politis), jelas hanya menjadi tantangan belaka bagi kaum muslimin moderat di negeri ini. Karena kedudukan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslimin (sekitar 185 juta jiwa) di seluruh dunia, dengan sendirinya siapa yang menang di negeri ini akan menentukan masa depan Islam; adakah ia berkembang sebagai ideologi ataukah secara kultural? Tulisan-tulisan berikut akan mencoba menelusuri perkembangan ini, tentu saja dengan memenangkan pendapat kaum moderat yang tidak mementingkan ideologi. Dalam pandangan mereka, Islam muncul dalam keseharian kultural, tanpa berbaju ideologi sama sekali.

Dengan mencoba bersikap simpatik kepada pendekatan ideologis, penulis bermaksud menekankan pentingnya saling pengertian antara kedua pendekatan tersebut. Terorisme berasal dari ketidakpahaman kita akan proses modernisasi yang dialami bangsa kita dalam abad ke 19 Masehi hingga saat ini, dan

mungkin di masa depan. Kalau kita tidak menginginkan terorisme merajalela di negeri kita, dengan menggunakan nama Islam, tentu pendekatan ideologis ini harus benar-benar di perhatikan dengan cermat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan apapun sebab-sebab yang menimbulkannya, terorisme dengan menggunakan nama Islam lebih banyak disebabkan oleh ketidakpahaman, dan bukannya sebuah proses yang tidak dapat dihindari. Ini bukan berarti, penulis meniadakan kemungkinan adanya asal-usul lain bagi terorisme yang menggunakan nama Islam yang kini sudah merajalela di mana-mana —seperti kita saksikan di berbagai kawasan di negeri ini dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah proses sejarah, hal itu adalah sesuatu yang biasa, betapapun sakit dan susah kita dibuatnya, yang tampak dari rumah-rumah, sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum lain yang dirusakkan, maupun jiwa yang melayang karenanya.

*****

Di samping hal-hal ideologis, pendekatan ini seringkali ditunggangi oleh kepentingan politis. Ini terjadi terus-menerus hingga tulisan ini dikirimkan ke meja redaksi untuk diterbitkan. Kepentingan politik sesaat, untuk merebut atau mempertahankan kepemimpinan negara, membuat sejumlah lingkaran kekuasaan di negeri ini —dalam beberapa tahun terakhir, untuk mendukung gerakan-gerakan ideologis Islam. Dikombinasikan dengan ketakutan sebagian penguasa untuk menindak terorisme berbaju ideologis itu karena kepentingan politik mereka, jadilah sikap toleransi kepada mereka justru menjadi pendorong bagi peranan para teroris untuk menggunakan nama suci itu.

William Cleveland menuliskan dalam disertasinya, beberapa waktu lalu, ia menjelaskan ideologi Islamistik dan Syakib Arsalan, pemimpin sekte Druz di Lebanon yang juga adalah kakek dari Kamal Jumlad, berasal dari penolakannya atas gagasan

nasionalisme Arab. Hal itu timbul dari ambisi pribadinva untuk tetap menjadi anggota parlemen Ottoman di Turki, suatu hal yang hanya dapat dicapai kalau keutuhan Islam di bawah pemerintahan Ottoman dapat dipertahankan di seluruh kawasan Arab, kalau tidak juga di tempat-tempat lain dalam dunia Islam. Tentu saja, kita dapat menolak atau menerima pendapat ini, tapi yang terpenting adalah upaya untuk mencoba mengerti asal-usul historis maupun idealistik dari gagasan itu sendiri.

Disertasi itu, yang ditulis oleh paman tua Paul Cleveland, ketua Lembaga Persahabatan Amerika Serikat-Indonesia (Usindo) saat ini, mencoba mengerti alasan-alasan historis bagi pemikiran utama yang dikembangkan Syakib Arsalan, yang tentu saja berbeda dari (mungkin bertentangan dengan) sebab-sebab idealistik dari Syakib Arsalan, yang dikenal sebagai penganjur Islam ideologis dengan bukunya *"limâzâ ta'-akhara al-muslimûn wa taqoddama ghoiruhum"* (Mengapa Kaum Muslimin Mundur dan Selain Mereka Maju?), menjadi sangat penting artinya. Dari sinilah kita lalu mengerti mengapa harus diketahui sebab-sebab paham Islam ideologis itu, termasuk nantinya sebab-sebab sosiologis dan sebagainya. Tulisan-tulisan dalam seri ini, bermaksud mengupas sebab-sebab timbulnya "Islam ideologis" tersebut. Kalau tujuan ini dapat dicapai, nama Islam dapat dijernihkan dan dipisahkan dari terorisme, serta dapat dikembangkan pegangan lebih pasti bagi kaum "muslimin moderat". Mereka ini dalam pandangan penulis adalah mayoritas kaum muslimin yang tengah disalahpahami orang —terutama oleh kaum non-muslim.

ISLAM: GERAKAN ATAUKAH KULTUR ?

Ketika menghadapi Hari Waisak 2546 pada 26 Mei 2002 penulis mendapat undangan dari KASI (Konferensi Agung Sangha Indonesia) untuk hadir dalam acara tersebut di Balai Sidang Senayan Jakarta. Penulis menjawab akan hadir. Dan, rombongan KASI berlalu dengan hati lega. Setelah berjalan beberapa waktu penulis mendengar bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai personifikasi kepala negara dan pemerintah akan datang pada peringatan yang sama di Candi Borobudur oleh Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), pada waktu yang besamaan pula. Di saat itulah ada orang yang bertanya pada penulis, akan datangkah ke acara KASI?

Ketika penulis menjawab ya, segera disusul dengan pertanyaan berikut, hadirkah Anda dalam acara KASI itu yang berbeda dari pemerintah? Penulis menjawab, akan hadir. Apakah alasannya? Karena penulis yakin, KASI mewakili para bhiksu dan agamawan lain dalam agama Buddha di negeri kita. Sedangkan Walubi adalah organisasi yang dikendalikan bukan oleh agamawan. Dengan kata lain, Walubi adalah organisasi milik orang awam (*laymen*). Prinsip inilah yang penulis pakai sejak awal dalam bersikap pada sebuah organisasi agama.

Pada Hari Raya Waisak itu, sebelum berangkat ke Balai Sidang, penulis mendengar bahwa Megawati Soekarnoputri ternyata tidak hadir di Candi Borobudur untuk keperluan

tersebut. Namun, pemerintah diwakili Menteri Agama. Dengan demikian jelas, pemerintah mengakui Walubi sebagai perwakilan umat Buddha di negeri kita. Sedangkan di Balai Sidang hadir Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, yang justru tidak membidangi masalah tersebut. Dengan ungkapan lain, pemerintah justru mengutamakan Walubi sebagai perwakilan umat Buddha dan bukannya KASI.

Nah, disamping penulis, juga hadir Kardinal Dharma-atmadja, Haksu Tjhie Tjay Ing dan seseorang yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untunglah, Akbar Tandjung datang mewakili DPR dan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie yang bertindak selaku penasihat panitia. Namun, kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan Walubi dan bukannya KASI sebagai perwakilan umat Buddha di Indonesia tidak dapat dihindari lagi.

Sikap tidak jelas dari pemerintah itu pada dasarnya sangat menguntungkan KASI. Dengan ungkapan lain, di hadapan kekuasaan pemerintah yang tidak begitu melindunginya, ternyata KASI justru ditunjang dua pihak yang penting, pihak agamawan Buddha sendiri dan para pemuka agama-agama lain yang menghargainya. Bukankah kedua modal itu akan memungkinkan KASI dapat bergerak lebih maju?

Kejadian di atas menjadi lebih menarik lagi, jika membandingkannya dengan keadaan internal kaum muslim di negeri kita. Kalau dalam agama-agama lain seorang agamawan diangkat organisasi tertinggi dari agama tersebut, yang biasanya didominasi para agamawan, justru dalam Islam hal itu tidak ada. Bukankah justru Rasulullah Saw sendiri yang bersabda, “Tidak ada kependetaan dalam Islam” (*lâ rahbâniyyata fî al-Islâm*). Karenanya, pantaslah kalau dalam Islam tidak ada agamawan yang diangkat oleh sebuah pihak yang dinilai sebagai lembaga tertinggi agama tersebut. Ini berarti, tidak ada pihak yang memiliki otoritas dalam pengangkatan ulama, terserah pada pengakuan masyarakat kepada seseorang untuk dianggap sebagai ulama. Karena

kekosongan seperti itu, lalu organisasi-organisasi Islam meletakkan para wakil mereka dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apakah yang terjadi? Hilangnya keulamaan dalam arti penguasaan ilmu-ilmu agama dalam kepengurusan MUI itu sendiri. Seseorang yang hafal sepuluh ayat Al-Qur'an dan sepuluh hadis Nabi saja sudah bisa masuk dalam jajaran pimpinan harian MUI. Karena ia tidak mewakili umat, melainkan sebuah organisasi.

Karena itu, kedudukan MUI tidak tepat jika dianggap mewakili umat, karena mereka mewakili organisasi. Maka itu, aspek penguasaan ilmu-ilmu agama di lingkungan MUI tidak bersifat baku, padahal merekalah pembawa tradisi kultural dalam kehidupan umat. Dalam keadaan demikian, perwakilan yang ada tidak mencerminkan kelompok agamawan, melainkan hanya menampilkan perwakilan gerakan-gerakan agama, seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.

Karena langkanya kohesi intern umat, cara termudah mempersatukan seluruh elemen umat adalah mencari musuh bersama: kekuatan Barat yang dianggap merusak kekuatan Islam. Maka di sinilah terletak kelemahan dan justru kekuatan yang dimiliki umat Islam. Dikatakan kelemahan, karena tidak ada kohesi dan kejelasan siapa yang diterima dan tidak sebagai agamawan. Dan dikatakan kekuatan, karena langkanya sikap dominan dari para agamawan. Maka, pemikiran-pemikiran orang awam tentang agama diperlakukan sama dengan pemikiran para ahli agama itu sendiri.

Contoh konkret yang dapat dikemukakan di sini, yaitu tentang Ki Panji Kusmin di awal-awal tahun 1970-an. Orang awam ini dapat digambarkan (atau justru sebaliknya) sebagai pihak representatif yang mewakili Islam. Bahwa kemudian tokoh muslim yang memiliki kekuatan tersendiri, walaupun tidak didukung oleh kekuatan pemerintahan, menentang pandangannya yang memandang Tuhan tidak perlu dibela siapa pun dalam kebesarannya, jelas-jelas ditentang oleh pandangan formal untuk

membela-Nya, sangat nyata menunjukkan dikotomi tersebut.

Tetapi, bagaimanapun juga harus ada standar minimal yang digunakan untuk menilai apakah seseorang dapat dianggap mewakili Islam atau tidak. Tanpa kriteria ini, hanya situasi semrawutlah yang lahir, seperti yang terjadi sekarang ini. Karena tiap orang dapat menyatakan dirinya mewakili Islam. Di sinilah arti penting dari sabda Nabi Muhammad Saw: "Kalau persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat," (*idzâ wusida al-amru ilâ ghairi ahlihî, fantatziri al-sâ'ah*). Sanggupkah kaum muslimin di negeri kita menetapkan kriteria tersebut? {}

ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA

Saat membaca kembali makalah-makalah yang dikirimkan kepada sejumlah penerbitan, disampaikan dalam sekian buah seminar dan dipaparkan dalam sekian banyak diskusi, penulis mendapati pandangan-pandangannya sendiri tentang Islam yang tengah mengalami perubahan-perubahan besar. Semula, penulis mengikuti jalan pikiran kaum ekstrimis yang menganggap Islam sebagai alterntif terhadap pola pemikiran "Barat", seiring dengan kesediaan penulis turut serta dalam gerakan *lkhwanul Muslimun* di Jombang, dalam tahun-tahun 50-an. Kemudian, penulis mempelajari dengan mendalam Nasionalisme Arab di Mesir pada tahun-tahun 60-an, dan Sosialisme Arab *(al-isytirâkiyyah al-'arâbiyyah)* di Baghdad. Sekembali di tanah air, di tahun-tahun 70-an penulis melihat Islam sebagai jalan hidup (*syarî'ah*) yang saling belajar dan saling mengambil berbagai ideologi non-agama, serta berbagai pandangan dari agama-agama lain.

Pengembaraan penulis itu, menyembulkan dua hal sekaligus: di satu pihak, pengalaman pribadi penulis yang tidak akan pernah dirasakan atau dialami orang lain, dan sekaligus kesamaan pengalaman dengan orang lain yang mengalami pengembaraan mereka sendiri. Apakah selama pengembaraan itu berakhir pada ekletisme yang berwatak kosmopolitan, sedangkan pada orang lain pengembaraan mereka membawa hasil sebaliknya,

tidaklah menjadi soal bagi penulis. Pengalaman pribadi orang tidak akan pernah sama dengan pengalaman orang lain. Dengan demikian, kita justru harus merasa bangga dengan pikiran-pikiran sendiri yang berbeda dari pemikiran orang lain.

Dari kenyataan itulah, penulis sampai pada kesimpulan, bahwa Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah sesuatu yang khas, yang dapat disebutkan sebagai "Islam ku", hingga karenanya watak perorangan seperti itu patut dipahami sebagai pengalaman pribadi, yang patut diketahui orang lain tanpa memiliki kekuatan pemaksa. Kalau pandangan ini dipaksakan juga, akan terjadi dislokasi pada diri orang lain, yang justru akan membunuh keindahan semula dari pandangannya sendiri.

*****

Dalam berbeda pandangan, orang sering memaksakan kehendak dan menganggap pandangan yang dikemukakannya sebagai satu-satunya kebenaran, dan karenanya ingin dipaksakan kepada orang lain. Cara seperti ini tidaklah rasional, walaupun kandungan isinya sangat rasional. Sebaliknya, pandangan spiritual yang irrasional dapat ditawarkan kepada orang lain tanpa paksaan, dengan dalih itu pengalaman pribadi yang tidak perlu diikuti orang. Kebenarannya baru akan terbukti jika hal-hal irrasional itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata.

Tradisionalisme agama, pada umumnya, mengambil pola ini dan hal itulah yang dimaksudkan oleh Marshall McLuhan seorang pakar komunikasi dengan istilah "*happening*". Ini bisa dilihat, misalnya, dalam setiap tahun para pemain rebana selalu memperagakan kebolehan mereka di arena Masjid Raya Pasuruan, tanpa ada yang mengundang. Kebanyakan mereka datang mengendarai truk ke kota tersebut dengan mengenakan seragam masing-masing, yang dibeli dari hasil keringat sendiri, serta tak lupa membawa makanan sendiri dari rumah. Setelah bermain rebana selama lima sampai sepuluh menit, mereka pun lalu

pulang tanpa mendengarkan pagelaran rebana orang-rombongan lain.

Hal yang sama juga terjadi dalam haul/peringatan kematian Sunan Bonang di Tuban dalam setiap tahunnya. Tanpa diumumkankan, orang datang berduyun-duyun ke alun-alun Tuban, membawa tikar/koran dan minuman sendiri, untuk sekedar mendengarkan uraian para penceramah tentang diri beliau. Di sini, pihak panitia hanya cukup mengundang para penceramah itu, memberitahukan Muspida dan menyediakan meja-kursi ala kadarnya demi sopan santunnya kepada para undangan. Tidak penting benar, adakah Sunan Bonang pernah hidup? Dalam pikiran pengunjung memang demikian, dan itu adalah kenyataan —yang dalam pandangan mereka "tidak terbantahkan". Nah, "kebenaran" yang diperoleh seperti ini adalah sesuatu yang didasarkan pada keyakinan, bukan dari sebuah pengalaman. Hal inilah yang oleh penulis disebutkan sebagai "Islam Anda", yang kadar penghormatan terhadapnya ditentukan oleh banyaknya orang yang melakukannya sebagai keharusan dan kebenaran.

*****

Sementara itu, dalam menelaah nasib Islam di kemudian hari, kita sampai pada keharusan-keharusan rasional untuk dilaksanakan ataupun dijauhi, jika kita ingin dianggap sebagai "muslim yang baik". Kesantrian, dalam arti pelaksanaan ajaran Islam oleh seseorang, tidak menentukan "kebaikan" seperti itu. Banyak santri tidak memperoleh predikat "muslim yang baik", karena ia tidak pernah memikirkan masa depan Islam. Sedangkan santri yang kurang sempurna dalam menjalankan ajaran agama sering dianggap sebagai "muslim yang baik", hanya karena ia menyatakan pikiran-pikiran tentang masa depan Islam.

Pandangan seperti ini, yang mementingkan masa depan Islam, sering juga disebut "Islam Kita". Ia dirumuskan, karena perumusnya merasa prihatin dengan masa depan agama tersebut,

sehingga keprihatinan itu sendiri mengacu kepada kepentingan bersama kaum muslimin. Suatu kesimpulan dalam "Islam Kita" ini mencakup "Islam ku" dan "Islam Anda", karena ia berwatak umum dan menyangkut nasib kaum muslimin seluruhnya, di manapun mereka berada.

Kesulitan dalam merumuskan pandangan "Islam Kita" itu jelas tampak nyata di depan mata. Bukankah pengalaman yang membentuk "Islam ku" itu berbeda isi dan bentuknya dari "Islam Anda", yang membuat sulitnya merumuskan "Islam Kita"? Di sini, terdapat kecenderungan "Islam Kita" yang hendak dipaksakan oleh sementara orang, dengan wewenang menafsirkan segala sesuatu dipegang mereka. Jelas, pemaksaan kehendak dalam bentuk pemaksaan tafsiran itu bertentangan dengan demokrasi. Dan dengan sendirinya, hal itu ditolak oleh mayoritas bangsa. Nah, pemaksaan kehendak itu sering diwujudkan dalam apa yang dinamakan "ideologi-lslam", yang oleh orang-orang tersebut hendak dipaksakan sebagai ideologi negeri ini. Karenanya, kalau kita ingin melestarikan "Islam ku" maupun "Islam Anda", yang harus dikerjakan adalah menolak Islam yang dijadikan ideologi negara melalui Piagam Jakarta dan yang sejenisnya. Bisakah hal-hal esensial yang menjadi keprihatinan kaum muslimin, melalui proses yang sangat sukar, akhirnya diterima sebagai "Islam Kita", dengan penerimaan suka rela yang tidak bersifat pemaksaan pandangan? Cukup jelas, bukan? {}

KAUM MUSLIMIN DAN CITA-CITA

Soal cita-cita kaum muslimin, tentu saja harus dipresentasikan dengan mendalam. Ini sesuai dengan kenyataan, bahwa kaum muslimin terbagi dalam dua kelompok besar. Ada kaum muslimin yang menjadi gerakan Islam, ada pula yang hanya ingin menjadi warga negara tempat mereka hidup, tanpa menjadi warga gerakan apapun di dalamnya. Dalam hal ini sudah tentu harus diperkecualikan gerakan yang menyangkut seluruh warga negara, seperti gerakan Pramuka yang menggantikan gerakan kepanduan di masa lampau dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengecualian ini dilakukan dengan kesadaraan penuh karena ia menyangkut kehidupan keseluruhan warga bangsa, dan dengan demikian tidak memiliki "warna ideologis apapun."

Sedangkan jenis lainnya adalah kaum muslimin warga gerakan-gerakan Islam, apapun wujud dan bentuknya. Ada yang hanya bersifat lokal belaka, nasional, dan ada yang bersifat internasional. Yang terakhir ini dapat dilihat pada pembubaran Laskar Jihad di Saudi Arabia yang secara otomatis berarti pula pembubaran perkumpulan yang bernama Laskar Jihad di Indonesia. Ini juga dapat dilihat pada pembentukan Nahdlatul Ulama (NU) di beberapa kawasan mancanegara, ataupun pembentukan Ikhwanul Muslimin di sejumlah negara Timur Tengah. Karena sifatnya yang sangat heterogen, jelas tidak ada satu pihak pun

yang dapat mengajukan klaim sebagai "perwakilan Islam" di manapun.

Karena itu pula lembaga-lembaga keagamaan Islam, tidak dapat bersatu dalam sebuah kesatuan dengan memiliki otoritas penuh. Lembaga yang mencoba mewakili ulama atau kaum muslimin dengan klaim seperti itu, namun hanya menjadi salah sebuah diantara organisasi-organisasi Islam yang ada, dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini tidak memiliki supremasi, seperti yang ada dalam agama-agama lain, seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan-persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) atau Parisade Hindu Dharma. Tetapi, MUI harus berbagi tempat dengan NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Karenanya, hanya hal-hal yang disepakati bersama oleh sekian banyak perkumpulan itu, yang dapat dianggap sebagai nilai-nilai yang diterima umat.

Ketika Rois Syuriyah NU cabang Pasuruan menyatakan "pengeboran Inul " bertentangan dengan ketentuan agama Islam, disusul dengan fatwa MUI, timbul reaksi di kalangan para warga negara republik kita. Untuk apa kedua lembaga itu "mengurus Inul" sejauh itu? Apalagi ketika H. Rhoma Irama menyatakan Inul tidak boleh membawa lagu ciptaan beliau, kalangan muda santri mentertawakannya sebagai "tindakan ketinggalan jaman". Memang, sepertinya tidak akan cocok lagu-lagu beliau dibawakan oleh orang seperti Inul. Dalam hal ini, masyarakat mengembangkan pandangan mereka sendiri. Ketika ditanya dalam wawancara TV, Inul menyatakan, ia "mengebor" untuk mencari makan. Ia tidak "menutup-nutupinya" dengan berbagai istilah keren seperti "memajukan seni" dan sebagainya melainkan, secara berterus-terang ia mengatakan mencari makan. Kejujuran ucapan seperti ini, sangat bertentangan dengan sikap palsu gaya "sok untuk kepentingan bangsa" yang diperlihatkan kebanyakan tokoh-tokoh politik kita, untuk menutupi ambisi politik pribadi mereka masing-masing. Mungkin inilah maksud hadits "katakan apa yang benar, walaupun pahit" (*qul al-haqqa walau kanna murran*).

Karenanya tidak heran, jika pendapat atau kritikan berbagai macam pihak terhadap Inul, tidak memperoleh respon yang berarti dari kaum muslimin sendiri. Dengan kata lain, pendapat mereka itu akhirnya memiliki pengaruh sangat terbatas, bahkan banyak badan-badan penyiaran yang tidak mendukung. Bahkan ancaman H. Rhoma Irama untuk menggerakkan sejumlah organisasi ekstrim Islam melawan Inul, dalam pandangan penulis merupakan sesuatu yang sudah keterlaluan (*over acting*), yang mengancam keselamatan hidup kita sebagai bangsa. Apa bedanya ancaman itu dengan tindakan Front Pembela Islam (FPI) yang menyerbu rumah-rumah makan (*Coffe House*) di Kemang, Jakarta Selatan beberapa tahun lalu.

*****

Hal ini yang tampaknya sering tidak disadari beberapa tokoh Islam maupun beberapa perkumpulan kaum muslimin, yaitu kita harus merubah moralitas masyarakat dengan sabar. Agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya dan menjadikan contoh sebagai wahana utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dengan tingkat kemajemukan sangat tinggi seperti yang kita miliki sekarang ini, kalau hal ini tidak kita sadari, tentu kita akan marah dan bersikap "memaksakan" kehendak kepada masyarakat.

Ini membutuhkan sikap serba resmi (formalisme) yang belum tentu disepakati semua pihak. Mengapa? Karena ini dapat menjurus kepada "terorisme moralitas", dengan akibat yang sama seperti peledakan bom di Bali, di Medan maupun di lapangan terbang Cengkareng. Pelakunya harus dicari sampai dapat dan harus diganjar hukuman sangat berat, karena bersifat merusak dan mengacaukan keadaan secara umum. Tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi pada tokoh-tokoh yang kita kagumi

seperti H. Rhoma Irama.

Karena itu dalam pandangan penulis, perlu diperhatikan bahwa cita-cita kaum muslimin dibagi dua, yaitu antara keinginan kaum muslim yang tidak memasuki perkumpulan Islam manapun dan cita-cita para warga gerakan Islam. Tanpa adanya perhatian terhadap perbedaan ini, maka apa yang kita anggap penting, tidak begitu diperhatikan oleh kaum muslim yang lain. Akibatnya kita akan kehilangan hubungan. Berlakulah dalam hal ini adagium *ushul fiqh* (teori hukum Islam atau *Islamic legal theory*), Yang berbunyi *"yuthalaqu al-âm wa yurâdlû bihi al-khâs"* (hal umum yang disebut, hal khusus yang dimaksud). Kita harus hati-hati dan sadar sepenuhnya dengan apa yang kita ucapkan, agar kita memperoleh setepatnya apa yang kita inginkan. Memang ini melelahkan, tapi inilah konsekuensi dari apa yang kita upayakan selama ini.

Dengan demikian, keputusan para pendiri negeri ini untuk tidak mendirikan sebuah negara agama adalah keputusan yang berakibat jauh. Hal inilah yang harus kita sadari konsekuensinya. Karena ada pemisahan agama dari negara, maka hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional yang belum tentu sama dengan keyakinan kita. Berarti dasar dari pembentukan hukum adalah tata cara yang kita gunakan bersama sehari-hari.

Yang dapat dijadikan materi hukum bagi bangsa kita berarti sesuatu yang tidak harus berdasarkan agama, yang memperoleh materi hukumnya dari wahyu yang dikeluarkan Tuhan. Dengan kata lain, proses penafsiran kembali (reinterpretasi) yang selama berabad-abad ini digunakan kaum muslimin, sebagai acuan moral yang mereka ikuti dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ada juga yang kemudian menjadi materi hukum nasional kita dan ada yang menjadi moralitas bangsa (setidak-tidaknya moralitas kaum muslimin). Disamping memperjuangkan ajaran-ajaran Islam dan hukum formal, memang lebih berat memperjuangkan moralitas bangsa. Tapi ini adalah konsekuensi terjauh dari pandangan kita untuk memisahkan agama dari negara. Mu-

ISLAM DAN ORIENTASI BANGSA

Yang paling banyak dilakukan orang adalah mengacaukan antara orientasi kehidupan dengan konsep sebuah bangsa. Makanya sering ada kerancuan dengan menganggap adanya sebuah konsep negara dalam Islam. Atas dasar ini, orang pandai –semacam Abul A'la Al-Maududi, menganggap ideologi sebagai sebuah kerangka-pandang Islam. Karena itulah, ia lalu menganggap tidak ada nasionalisme dalam Islam, karena Islam bersifat universal bagi seluruh umat manusia. Tentunya, ini berhadapan dengan kenyataan bahwa sangat besar jumlah kaum muslimin yang memeluk nasionalisme, seperti mendiang Bung Karno. Pertanyaannya, dapatkah mereka dianggap kurang Islam dibanding ulama besar tersebut?

Pendapat al-Maududi itu jelas membedakan antara mereka yang menerima universalitas Islam sebagai sebuah formalitas, dengan mereka yang tidak memiliki atau mempercayai formalitas seperti itu. Pendapat ini, antara lain disanggah oleh seorang peneliti dari Amerika Serikat (AS), William Cleveland. Dalam disertasinya berjudul "*Islam against the West : Shakib Arslan and the campaign for Islamic nationalism*", Cleveland mengungkapkan bahwa teori universalitas pandangan Islam dari Shakib Arsalan (kakek Kamal Jumlad dari Lebanon, seorang pemimpin Druz), bersumber pada keanggotaannya dalam parlemen *Ottoman* (*Ustmaniyyah*) bagi landasan pandangannya mengenai universalitas

dari ajaran formal Islam. Kalau ia tidak berpandangan demikian, ia harus ikut nasionalisme Arab, sebuah pandangan yang justru ditolaknya. Dengan demikian, universalitas dari pandangan formal Islam ia jadikan teori, karena ia ingin mempertahankan kedudukannya sebagai anggota parlemen *Ottoman* tersebut.

Baik karya-karya Al-Maududi maupun disertasi Cleveland di atas, menunjukkan dua pandangan yang saling bertentangan. Tapi, kedua pandangan itu menunjukkan bahwa pandangan Al-Maududi lebih dikenal di kalangan orang-orang Perancis –sebagai golongan *l'integrist*, dan di dunia Barat lain di kenal dengan sebutan *Islamists*, yang menganggap bahwa Islam harus diwujudkan secara keseluruhan, bukan secara parsial. Pandangan ini bermula dari ayat dalam kitab suci al-Qur'ân: "hari ini telah Ku-sempurnakan bagi kalian, agama kalian, dan Ku-sempurnakan bagi kalian pemberian nikmat-Ku, dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama kalian" (*al-yauma akmaltu lakum dîinakum wa atmamtu alaikum nikmatî wa radhîtu lakum al-Islâma dîna*) (QS al-Maidah (3): 5). Menurut pandangan ini, Islam hanya akan tampak dan berarti kalau ia menjadi sebuah sistem, dan itu hanya berarti kalau dia ada secara formal. Maka, dari pikiran inilah lahir gagasan negara Islam.

*****

Dengan demikian, Islam dapat dibagi menjadi dua bagian: Islam formal dan tidak formal. Dalam pandangan formal, ajaran Islam yang formal selalu menjadi aturan bernegara, dalam bentuk undang-undang. Ini hanya akan memberikan tempat bagi sebuah versi hukum belaka dengan versi lain yang berada di luar undang-undang (UU). Dengan demikian, yang benar adalah apa yang tertera dalam rumusan UU, sedangkan yang tidak tercantum di dalamnya tentu saja tidak dipakai. Ini sudah tentu berbeda dari pandangan umum madzhab *fiqh* (*Islamic law school*).

Dalam pandangan mereka, orang dapat saja berbeda pandangan dan rumusan aturan, tergantung dari pilihan masing-masing. Adagium terkenal dalam hal ini adalah: "perbedaan pandangan di kalangan para Imam adalah rahmat bagi umat" (*ikhtilâf al-aimmah rahmat al-ummah*). Bahkan, pandangan ini memperkenankan perubahan-perubahan rumusan hukum agama dari waktu ke waktu.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, merumuskan kebolehan itu dengan kata-kata: rumusan hukum agama sangat tergantung kepada prinsip-prinsip yang digunakan. Jelaslah, perubahan rumusan hukum agama itu menjadi diperkenankan, karena adanya kebutuhan. Salah satu kaidah fiqh berbunyi: "kebutuhan dapat saja dianggap sebagai keadaan darurat" (*al-hâjatu tanzilu manzila al-dharûrah*). Prinsip ini memperkenankan perubahan rumusan hukum agama jika memang ada kebutuhan nyata untuk itu.

Karena hukum agama dalam sebuah negara Islam adalah keputusan-keputusan hukum yang diwujudkan secara formal, hingga dengan sendirinya asas pluralitas tidak dapat dilaksanakan, dan yang ada adalah UU formal. Dan, sistem formal agama lalu menjadi lahan tawar-menawar. Karena itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa, ajaran formal Islam selalu bersifat kaku dan tidak mampu menampung perkembangan-perkembangan baru yang terjadi. Contohnya adalah sikap para penguasa Saudi Arabia yang telah membongkar tanah pusara Sayyid Ali al Uraidhi, di Madinah, untuk mencegah terjadinya penyembahan berhala yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi ratusan juta orang kaum tradisionalis muslim, yang seringkali disebut orang kolot, sikap seperti itu berarti justru membuat Islam tidak bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Islam akan mengalami kebekuan, yang sering di sebut dengan istilah *al-jumûd.*

*****

Kasus Sayyid 'Uraidhi di atas, putra ketiga Ja'far Shaddieq setelah Isma'il (diabadikan dalam nama kelompok Syi'ah Isma'iliyyah) dan Musa al-Kadzim (perintis Syi'ah Itsna 'Asyariyah yang memerintah Iran dan menjadi kelompok mayoritas di Irak saat ini), menunjukkan betapa besar para pengikut beliau di seluruh dunia. Katakanlah para kelompok Sunni tradisionalis, perasaan mereka dianggap sepele saja oleh pemerintah Saudi Arabia. Sikap formal yang diikuti Syeikh M. Abdul Wahab (diabadikan dalam istilah-salah, Wahabbisme) membuat pemerintah Saudi Arabia menjadi formalis, merusak/menghancurkan makam beliau di 'Uraidhah, dekat Madinah, beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Saudi Arabia yang –konon, katanya "melembut", ternyata tetap tidak demikian, karena permintaan kaum formalis di lingkungan kerajaan tersebut.

Kejadian di atas, yang katanya ber-undang-undang dasar kitab suci al-Qurân dengan 6666 ayatnya, menunjuk dengan jelas kenyataan bahwa formalisme di negeri itu justru memacu konservativisme di kalangan para ulamanya. Kalau hal ini tidak mereka perbaiki dalam waktu dekat ini, maka di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia akan terjadi pertentangan sangat dahsyat, yang belum pernah terjadi selama ini. Keputusan Raja Saudi pertama, Abdul Aziz, di tahun 1924, untuk mengijinkan kaum muslimin melakukan ibadah haji menurut keyakinan masing-masing, telah membuat Saudi Arabia bisa diterima semua kalangan Dunia Islam. Keputusan membongkar kuburan Sayyid 'Uraidhi adalah sesuatu yang justru berkebalikan dari keluasan pandangan di atas.

Pegangan golongan formalis dalam Islam adalah ayat: "masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan" (*udkhulû fi al-silmi kâffah*) (QS al-Baqarah (2): 208), yang berarti kalau anda menyerah kepada Tuhan, lakukan hal itu secara sungguh-sungguh dan tak tanggung-tanggung. Para formalis mengartikan kata "*al-silmi*" di sini, dengan arti Islam sebagai sistem, katakanlah sistem Islami. Namun, penafsiran ini hanya memperoleh peng-

ikut yang sedikit, sedangkan mayoritas kaum muslimin (terutama para ulama), memegang arti Islam sebagai pengayom. Toleransi kita diminta oleh kitab suci yang kita yakini, bahwa Islam adalah pelindung bagi semua orang, termasuk kaum non-muslim. Ini bersesuaian dengan ayat lain yang berbunyi: "tiadalah Ku-utus engkau kecuali sebagai penyambung tali persaudaraan dengan sesama umat manusia" (*wa mâ arsalnâka illâ rahmatan li al-'alamîn*)(QS al-Anbiya(21):107), dengan kata terakhir *"al-'alamîn"* ini diartikan para ahli tafsir memiliki pengertian umat manusia belaka, dan bukan semua makhluk yang ada di dunia ini. Indah, pengertian tentang Islam sebagai pelindung itu, bukan? {}





BAB II

ISLAM NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMMAT



Negara Islam, Adakah Konsepnya?

Ada pertanyaan sangat menarik untuk diketahui jawabannya; apakah sebenarnya konsep Islam tentang negara? Sampai seberapa jauhkah hal ini dirasakan oleh kalangan pemikir Islam sendiri? Dan, apakah konsekuensi dari konsep ini jika memang ada? Rangkaian pertanyaan di atas perlu diajukan di sini, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak diajukan pemikiran tentang Negara Islam, yang berimplikasi pada orang yang tidak menggunakan pemikiran itu dinilai telah meninggalkan Islam.

Jawaban-jawaban atas rangkaian pertanyaan itu dapat disederhanakan dalam pandangan penulis dengan kata-kata: tidak ada. Penulis beranggapan, Islam sebagai jalan hidup (*syari'ah*) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Mengapakah penulis beranggapan demikian? Karena sepanjang hidupnya, penulis telah mencari dengan sia-sia makhluk yang dinamakan Negara Islam itu. Sampai hari inipun ia belum menemukannya, jadi tidak salahlah jika disimpulkan memang Islam tidak memiliki konsep bagaimana negara harus dibuat dan dipertahankan.

Dasar dari jawaban itu adalah tiadanya pendapat yang baku dalam dunia Islam tentang dua hal. Pertama, Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian

pemimpin. Rasulullah Saw digantikan Sayyidina Abu Bakar – tiga hari setelah beliau wafat. Selama masa itu masyarakat kaum muslimin, minimal di Madinah, menunggu dengan sabar bagaimana kelangkaan petunjuk tentang hal itu dipecahkan. Setelah tiga hari, semua bersepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar-lah yang menggantikan Rasulullah Saw melalui bai'at/prasetia. Janji itu disampaikan oleh para kepala suku/wakil-wakil mereka, dan dengan demikian terhindarlah kaum muslimin dari malapetaka. Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal dunia, menyatakan kepada komunitas kaum muslimin, hendaknya Umar Bin Khattab yang diangkat menggantikan beliau, yang berarti telah ditempuh cara penunjukkan pengganti, sebelum yang digantikan wafat. Ini tentu sama dengan penunjukkan seorang Wakil Presiden di masa modern ini, yang harus mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan itu jika berpindah ke tangannya.

Ketika Umar ditikam Abdurrahman bin Muljam dan berada di akhir masa hidupnya, ia meminta agar ditunjuk sebuah dewan pemilih (*electoral college -ahl halli wa al-aqdli*), yang terdiri dari tujuh orang, termasuk anaknya, Abdullah, yang tidak boleh dipilih menjadi pengganti beliau. Lalu, bersepakatlah mereka untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai kepala negara/kepala pemerintahan. Untuk selanjutnya, Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Abu Sufyan tengah mempersiapkan anak cucunya untuk mengisi jabatan di atas, sebagai penganti Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dengan demikian, sistem kerajaan dengan sebuah marga yang menurunkan calon-calon raja/sultan dalam Islam.

*****

Demikian pula, besarnya negara yang dikonsepkan menurut Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab, Islam adalah

imperium dunia dari pantai timur Atlantik hingga Asia Tenggara. Ternyata tidak ada kejelasan juga apakah sebuah negara Islam berukuran mendunia atau sebuah bangsa saja (wawasan etnis), dengan demikian tidak jelas; negara-bangsa (*nation-state*), ataukah negara-kota (*city state*) yang menjadi bentuk konseptualnya.

Dalam hal ini, Islam menjadi seperti komunisme: manakah yang didahulukan, antara sosialisasi sebuah negara-bangsa yang berideologi satu sebagai negara induk, ataukah menunggu sampai seluruh dunia di-Islam-kan, baru dipikirkan bentuk negara dan ideologinya? Menyikapi analogi negara Komunis, manakah yang didahulukan antara pendapat Joseph Stalin ataukah Leon Trotsky? Sudah tentu perdebatan ini jangan seperti yang dilakukan Stalin hingga membunuh Trotsky di Meksiko.

Hal ini menjadi sangat penting, karena mengemukan gagasan Negara Islam tanpa ada kejelasan konseptualnya, berarti membiarkan gagasan tersebut tercabik-tercabik karena perbedaan pandangan para pemimpin Islam sendiri. Misalnya kemelut di Iran, antara para "pemimpin moderat" seperti Presiden Khatami dengan para Mullah konservatif seperti Khamenei, saat ini. Satu-satunya hal yang mereka sepakati bersama adalah nama "Islam" itu sendiri. Mungkin, mereka juga berselisih paham tentang "jenis" Islam yang akan diterapkan dalam negara tersebut, haruskah Islam Syi'ah atau sesuatu yang lebih "universal"? Kalau harus mengikuti paham Syi'ah itu, bukankah gagasan Negara Islam lalu menjadi milik kelompok minoritas belaka? Bukankah syi'isme hanya menjadi pandangan satu dari delapan orang muslim di dunia saja?

*****

Jelaslah dengan demikian, gagasan Negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Ia pun hanya dipikirkan oleh sejumlah orang

pemimpin saja, yang terlalu memandang Islam dari sudut institusionalnya belaka. Belum lagi kalau dibicarakan lebih lanjut, dalam arti bagaimana halnya dengan mereka yang menolak gagasan tersebut, adakah mereka masih layak disebut kaum muslimin atau bukan? Padahal mereka adalah mayoritas penganut agama tersebut?

Kalau diteruskan dengan sebuah pertanyaan lain, akan menjadi berantakanlah gagasan tersebut: dengan cara apa dia akan diwujudkan? Dengan cara teror atau dengan "menghukum" kaum non-muslim? Bagaimana halnya dengan para pemikir muslimin yang mempertahankan hak mereka, seperti yang dijalani penulis? Layakkah ia disebut kaum teroris, padahal ia sangat menentang penggunaan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu, mengapakah ia harus bertanggungjawab atas perbuatan kelompok minoritas yang menjadi teroris itu? {}

Islam dan Perjuangan Negara Islam

Penulis menerima sebuah permintaan dari teman-teman MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), untuk menghentikan penyerbuan tentara Philipina atas kamp-kamp mereka di Philipina Selatan. Padahal, mereka sudah menandatangani perjanjian Tripoli (Lybia) baru-baru ini yang berisikan ketentuan memperjuangkan otonomi daerah itu bagi kaum muslimin, melalui negosiasi dan perundingan. Ini berarti mereka telah meninggalkan perjuangan bersenjata, guna memungkinkan perundingan damai. Namun, MNLF (*Moro National Liberation Front*), yang dipimpin oleh Nur Misuari, menurut tentara Philipina kembali pada perjuangan bersenjata dengan cara bergerilya, untuk memperjuangkan sebuah Negara Islam (NI).

Ternyata, kemudian Nur Misuari dikejar-kejar, dan dengan menggunakan perahu memasuki kawasan Malaysia di Sarawak. Di tempat itu ia ditangkap oleh pihak keamanan Malaysia, lalu diterbangkan ke Kuala Lumpur, dan selanjutnya diekstradisikan ke Manila. Kini ia meringkuk di tahanan, dan menjalani proses pengadilan Philipina. Sekarang, pihak MILF meminta pertolongan penulis agar tentara Philipina tidak menyerbu kamp-kamp mereka, atas dasar alasan MILF juga akan memberontak seperti halnya MNLF, dalam anggapan mereka. Penulis menjawab, tidak

dapat melakukan hal itu, karena tidak akan didengar oleh tentara Philipina; sedangkan Presiden Gloria Macapagal Arroyo saja tidak didengar oleh tentara Philipina. Apalagi orang luar yang melakukan hal itu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tentara Philipina, atau oknum-oknum dalam kepemimpinan formalnya, cenderung untuk melanggar kebijakan pemerintah untuk berunding. Hal ini patut disayangkan, tetapi demikianlah kenyataan yang ada dan sikap seperti itu juga dijalankan oleh oknum-oknum militeristik dalam lingkungan tentara Thailand dan Indonesia. Di Thailand, mereka cenderung mencurigai orang-orang Islam di selatan, timur dan utara negeri itu. Diabaikan kenyataan, bahwa komunitas kaum muslimin kini sudah mencapai antara 20-25% dari total penduduk negeri itu. Demikian juga Indonesia, ada sikap menolak berunding dengan pihak GAM dan pihak Hasan Tiro untuk merumuskan batasan-batasan otonomi khusus di Aceh, dengan menembak mati orang-orang GAM yang dianggap sebagai pengacau keamanan yang harus ditumpas dengan kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan.

Akibatnya unsur-unsur yang tadinya menolak separatisme, mau tak mau akhirnya menjadi kaum separatis. Sedangkan pihak moderat (kaum yang tidak keras) akhirnya dikalahkan oleh kelompok-kelompok garis keras (kaum ekstrimis atau fundamentalis, apalagi di kalangan kaum mudanya). Kaum muslim moderat itu digambarkan oleh saingan-saingan mereka sebagai yang berhati lemah dan tunduk pada pemerintah. Dengan demikian, keadaan akan dikuasi oleh mereka yang berhaluan keras, hingga menimbulkan kesan seolah-olah seluruh kaum muslimin di kawasan yang bersangkutan itu benar-benar telah menjadi kaum separatis secara keseluruhan.

Dengan demikian, terjadi eskalasi antara perlawanan mereka dan pembalasan bersenjata atas mereka oleh aparat pemerintah, yang pada akhirnya belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Di Aceh, misalnya, proyek DOM (Daerah Operasi Militer)

berjalan bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian, dan akhirnya dunia internasional menyalahkan negara kita sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kalau Belanda saja tidak dapat menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan pendudukan/ kolonial selama lebih dari 350 tahun, apakah kita juga akan bermusuhan dengan rakyat sendiri di kawasan tersebut untuk masa yang sama?

Karenanya, jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah pertentangan pemerintah dan kaum beragama di Philipina, Thailand dan Aceh, sebaiknya dilakukan secara berunding, agar tidak menjadi semakin berlarut-larut. Kenyataan yang demikian sederhana, memang tampak seperti mengalah kepada mereka yang berhaluan keras (kaum ekstrimis atau fundamentalis). Namun, yang dipersoalkan bukanlah mereka, tapi rakyat banyak yang menginginkan otonomi khusus melalui perundingan damai. Perundingan seperti itu mengharuskan adanya kesediaan oknum-oknum militer untuk mendengarkan dan menghormati pendapat pemerintah, dan bukan sebaliknya.

*****

Dengan demikian, penyelesaian yang diharapkan bukanlah penyelesaian militer, melainkan penyelesaian politis. Sepintas lalu, sikap seperti ini tampak bagaikan mengalah, dan pihak pemerintah dikalahkan oleh aspirasi-aspirasi setempat. Dalam kenyataannya, tidak sedemikian benar yang terjadi, karena *toh* pada akhirnya kaum ekstrimis itu akan diserap oleh masyarakat yang memang berjiwa moderat. Hal inilah yang mendorong Bung Karno menyelesaikan masalah Tengku Daud Beureueh di Aceh, yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakan Darul Islam di tahun-tahun 50-an dengan penyelesaian secara politis. Demikian pula, diselesaikannya pemberontakan PRRI Permesta secara politis setelah penyerbuan oleh TNI ke kawasan Sumatera Barat dan Tomohon di Sulawesi Utara.

Kalau penyelesaian politis ini tidak dilakukan, maka rakyat kebanyakan akan dimanipulir oleh kaum muda yang bergaris keras. Mereka tinggal menunjuk kepada kenyataan adanya represi dan penembakan oleh tentara atas penduduk yang tidak bersalah, yang nantinya akan membuat perlawanan rakyat menjadi semakin nyata. Kalau ini terjadi, oknum-oknum militer itu akan menyerahkan persoalan kepada pemerintah yang dengan susah payah harus mengulang kembali dari awal perundingan dengan mereka yang menginginkan otonomi khusus bagi kawasan yang bersangkutan, dalam jumlah orang yang lebih sedikit dari semula.

Karena itu, jelas bagi pihak militer yang ingin menggunakan kekerasan di Philipina selatan, Thailand selatan maupun di Aceh, hendaknya segera menghentikan langkah-langkah mereka itu. Biarkan pemerintah mencari penyelesaian damai melalui perundingan dengan kaum moderat yang masih berjumlah besar. Kalau terlambat, perundingan itu akan menjadi lebih sulit, dan hasilnya tidak dapat dipastikan. Demikian pula, dalam proses yang terjadi wibawa pemerintah masih tetap besar kalau penyelesaian dicapai melalui perundingan sekarang. Dan sebaliknya, wibawa itu tentu semakin berkurang, kalau eskalasi pertentangan bersenjata tetap berjalan. Benarkah para jenderal itu berpikir hanya untuk kepentingan bangsa dan bukannya kepentingan sendiri? {}

Negara Berideologi Satu, bukan Dua

Selama beberapa tahun terakhir ini, ada suara-suara untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, yaitu sebagai pengganti Pancasila. Menurut pandangan penulis, hal itu terjadi karena ada penyempitan pandangan mengenai Pancasila itu sendiri, yaitu pengertian Pancasila menurut mereka yang berkuasa. Ini berarti pemahaman Pancasila melalui satu jurusan belaka, yaitu jurusan melestarikan kekuasan. Pandangan lain yang menyatakan Pancasila harus dipahami lebih longgar, dilarang sama sekali. Dengan demikian, sebenarnya yang terjadi bukanlah pertentangan tentang Pancasila itu sendiri, melainkan tentang pengertian Pancasila tersebut.

Menurut pandangan kekuasaan, penafsiran yang benar tentang Pancasila adalah apa yang disepakati pemerintah, bukannya kritik terhadap pendekatan ini yang terasa monolit bagi rakyat. Karena dalam pandangan mereka penafsiran pemerintah hanyalah satu dari penafsiran yang ada. Untuk menetapkan mana yang benar, Mahkamah Agung (MA) harus mengemukakan penafsiran legal berdasarkan Undang-undang (UU) yang ada. Jadi, penafsiran yang tidak sejalan dengan pemerintah, belum tentu salah. Penafsiran legal-*lah* yang dijadikan ukuran, bukan penafsiran pemerintah.

Ketika yang dianggap benar hanyalah penafsiran kekuasaan dan MA takut membuat penafsiran legal yang mengikat, maka masyarakat tidak memiliki pilihan lain, kecuali mencarikan alternatif bagi Pancasila yang telah dikebiri itu. Muncullah Islam sebagai alternatif penafsiran, bukannya alternatif ideologis. Namun, karena kurangnya kecanggihan, maka Islam dikemukakan sebagai alternatif ideologis bagi Pancasila, bukannya terbatas pada masalah penafsiran saja. Dalam bahasa teori hukum Islam (*ushûl fiqh*), hal itu dinamai penyebutan yang mutlak umum, dengan maksud yang mutlak khusus (*yuthlaqu al-'âm wa yurâdu bihi al-khâsh*).

Dengan pemaparan di atas, menjadi jelas bahwa ideologi negara kita hanyalah satu, yaitu Pancasila. Pendekatan lain, yaitu menjadikan Islam sebagai ideologi negara adalah sesuatu yang salah. Hal itu perlu dinyatakan di sini, karena akhir-akhir ini ada keraguan, bahwa sesuatu yang berdasarkan Islam sangat berbahaya bagi negara kita. Ini antara lain tercantum dalam apa yang dikemukakan Lee Kuan Yew, Menteri Senior Republik Singapura, yang menyatakan bahwa dalam satu dua generasi lagi Indonesia akan diperintah oleh teroris yang menggunakan Islam. Ini tentu dapat dibaca sebagai undangan bagi Amerika Serikat, untuk menduduki Indonesia dan membagi-baginya ke dalam beberapa negara. Tentu saja, penulis boleh beranggapan bahwa hal itu dikemukakan karena Lee Kuan Yew takut dengan Indonesia yang kuat dan besar serta tidak dapat disogok. Itu akan sangat berbahaya bagi Singapura, karena itu Indonesia harus dibagi-bagi ke dalam beberapa republik.

Namun, asumsi di balik pernyataan "Islam akan tumbuh di negeri ini sebagai alternatif Pancasila," adalah sesuatu yang banyak dipakai orang. Karena itu, kita harus membatasi Islam pada fungsi penafsiran yang plural dan majemuk, dengan demikian ia tidak dapat menjadi ideologi negara. Dalam hal ini, Islam memiliki fungsi yang sama dengan nasionalisme, sosialisme dan pandangan-pandangan lain di dunia ini. Inilah yang merupakan

pembedaan antara Pancasila sebagai ideologi negara yang berwatak pluralistik, dari berbagai ideologi masyarakat yang berkembang di negeri ini, seperti Islam, nasionalisme, sosialisme, dan lain-lain.

Jelaslah, dengan uraian di atas, bahwa penghadapan Islam kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena menghadapkan sesuatu yang bersifat umum kepada pandangan yang bersifat khusus. Kalau itu diteruskan, berarti rasionalitas telah ditinggalkan, dan hanya emosi yang mengendalikan pandangan hidup kita. Tentu kita lebih mementingkan sesuatu yang rasional, bila dibandingkan dengan sesuatu yang emosional.

Sebagai bangsa, tentu kita hanya mempunyai sebuah ideologi negara, tetapi dengan penafsiran kemasyarakatan yang berbeda-beda. Dengan demikian, yang diberlakukan secara formal adalah penafsiran legal yang dilakukan oleh MA. Inilah yang harus kita bangun ke depan, dan untuk itu diperlukan keberanian moral untuk berhadapan dengan negara, atau dengan kata lain menghadapi sistem kekuasaan. Kalau ini dilupakan, sudah tentu kita tidak tahu apa yang menjadi tugas kita di masa depan.

Pembedaan antara ideologi di satu sisi dan penafsiran atasnya, menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi kehidupan kita di masa depan. Beberapa minggu sebelum dilengserkan dari jabatan Presiden, penulis mengusulkan pada sebuah sidang kabinet agar dibuat ketentuan DPRD Tingkat I di semua propinsi di Indonesia dapat memutuskan peraturan daerah (perda) berdasarkan *Syari'ah Islâmiyah* apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau tidak, tentulah harus dilakukan secara legal oleh MA. Inilah mengapa sebabnya MA harus kuat dan berani, serta berkedudukan sama tinggi dengan badan legislatif maupun eksekutif.

Di sinilah rahasia keseimbangan antara badan-badan yudikatif, legislatif dan eksekutif harus benar-benar dijaga, sebagai sebuah hal yang mendasar bagi kehidupan kita. UUD adalah

instrumen satu-satunya yang mempersatukan kita sebagai bangsa, karena itu penafsiran atasnya secara legal, adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kita berideologi negara yang satu, bukannya dua. Tapi mempunyai penafsiran legal atasnya, yang dapat bervariasi dalam bentuk dan isi, walaupun hanya satu pihak yang dapat melakukannya, yaitu MA. Karena itulah, keanggotaannya harus diputuskan bersama oleh pihak ekskutif dan legislatif. {}

Islam, Negara dan Rasa Keadilan

Dalam dua sumber tekstual kitab suci al-Qurân mengenai keadilan, tampak terlihat dengan jelas bagaimana keadilan dapat ditegakkan, baik dari masalah prinsip hingga prosedurnya. Dari sudut gagasan, umpamanya, kitab suci al-Qurân menyatakan; "wahai orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan dan jadilah saksi-saksi bagi Allah, walaupun mengenai diri kalian sendiri" (*yâ ayyuha al-ladzîna âmanû kuunu qawwâmîna bi al-qisthi syuhadâ'a li Allâhi walau 'alâ anfusikum*) (QS al-Nisa (4): 134). Dari ayat ini tampak jelas bahwa, rasa keadilan menjadi titik sentral dalam Islam.

Sedangkan dari sudut prosedur, kitab suci al-Qurân menyatakan; "jika kalian saling berhutang, maka hendaknya kalian gunakan tanda-tanda tertulis" (*idzâ tadâyyantum bidainin ilâ ajalin musamman fa'uktubûhu*)(QS al-Baqarah (2): 282). Dalam hal ini, rasa keadilan harus ditegakkan dengan bukti tertulis, sehingga tidak dapat dipungkiri oleh orang banyak. Secara prosedural, hal ini juga dijalankan dalam masyarakat berteknologi maju, sehingga kesan yang ada selama ini menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat tertinggal dapat dihilangkan.

Demikian pula, seorang hakim tidak dapat lepas dari tuntutan keadilan ini, seperti yang dikemukakan oleh sebuah hadits; "jika seorang hakim ragu-ragu tentang kesalahan seorang

terdakwa, maka ia tidak boleh menjatuhkan hukuman mati, sebab ditakutkan ia dapat berbuat kesalahan." Jadi, aspek-aspek keadilan itu bersifat menyeluruh, meliputi prinsip, prosedur dan pelaksanaannya.

*****

Apa yang dikemukakan di atas, adalah aspek-aspek yang terkandung dalam masalah mikro. Dalam banyak hal, keadilan mikro itu seluruhnya tergantung dari bangunan mikro sistem kemasyarakatan yang ditegakkan. Dalam hal ini, prinsip keadilan juga dapat dilihat secara makro dalam Islam. Banyak ungkapan dari sumber-sumber tertulis yang memungkinkan adanya penafsiran makro yang berdasarkan rasa keadilan bagi umat manusia. Ungkapan dalam hadits; "tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima" (*al- yadu al 'ulyâ khairun min al yadi al suflâ)*, jelas menunjukkan adanya keharusan dipeliharanya keadilan dalam hubungan antara negara kreditor kepada debitur. Sayangnya, hal ini justru tidak terdapat dalam tata ekonomi modern kita di seluruh dunia saat ini.

Pengertian makro, juga tampak dalam keharusan bagi para pemimpin negara/masyarakat untuk menunaikan tugas membawa kesejahteraan. Adagium *fiqh* menyatakan; "langkah dan kebijakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin" (*tasharruf al-imâm 'alâ al ra'îyyah manûthun bi al-mashlahah*). Artinya, kesejahteraan masyarakat itu tidak akan dapat tercapai, jika wawasan keadilan tidak tercermin dalam kesejahteraan seluruh warga masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian saja.

Demikian menjadi jelas, bahwa Islam menghendaki kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat dan hal itu tidak akan tercapai tanpa keadilan yang terwujud secara kongkrit. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena kebanyakan di negeri-negeri muslim, seorang penguasa selalu menikmati kekayaan berlimpah,

sementara kaum miskin tidak punya apa-apa. Akhirnya, kehidupan mereka seperti terombang-ambing di tengah banyaknya produk-produk murah yang dijagokan oleh para pemilik modal yang berjumlah sangat kecil. Ketimpangan situasi seperti itu, dalam kehidupan modern –secara internasional dewasa ini - menunjukkan bahwa Islam tidak menyetujui kapitalisme klasik yang didasarkan pada prinsip persaingan bebas (*laises faire*) dalam pergaulan internasional saat ini.

*****

Karena itu, orientasi pembangunan negara untuk kepentingan warga masyarakat kebanyakan, haruslah diutamakan dan bukannya pengembangan sumber daya manusia yang tinggi maupun penguasaan teknis yang memadai bagi modernisasi masyarakat kaum muslimin. Dengan kata lain, bukan modernitas yang dikejar melainkan terpenuhinya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dicapai. Kehidupan modern yang penuh kenikmatan bagi sekelompok orang bukanlah sesuatu yang dituju Islam, melainkan masyarakat sejahtera bagi seluruh penduduk. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat menentukan bagi kehidupan sebuah masyarakat.

Dalam pengertian ini, asas keseimbangan mengharuskan kita mencari sebuah tuntunan masyarakat yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan orang kebanyakan tanpa mengekang kelompok industrialis maupun pemilik modal untuk berkembang. Di sinilah terletak kemampuan kita untuk menemukan sebuah sistem yang akan menjamin untuk batas waktu tertentu antara kepentingan rakyat kebanyakan dan kepentingan kelompok industrialis pemilik modal. Dalam hal ini, sebenarnya telah banyak dicoba untuk menemukan sistem yang demikian itu, namun semuanya gagal apabila hanya mengandalkan kepada ideologi-ideologi yang ada. Sistem kapitalisme, sosialisme maupun komunisme, misalnya, telah gagal dalam upaya itu. Hanya

kalau ada modifikasi atas ideologi yang dianut, seperti *folks kapitalismus* (kapitalisme rakyat), yang mencoba untuk membuat koreksi atas kapitalisme klasik yang hanya mementingkan persaingan bebas, karena tidak menganggap penting arti rakyat kebanyakan.

Seringkali, koreksi-koreksi itu dilakukan dengan mencampuradukkan beberapa ideologi di dalam sebuah wawasan yang sangat umum. *Folks kapitalismus* mengambil semangat egalitarian dari sosialisme, sedangkan birokrasi komunisme sekarang banyak mengambil dari kapitalisme klasik, paling tidak mengenai cara-cara berkompetisi. Di sini, Islam-pun juga pernah harus melakukan hal yang sama yaitu berani mengambil cara-cara semangat ideologi-ideologi lain. Belasan tahun yang lalu, ada gagasan tentang "Sosialisme Islam", yang walaupun gagal berkembang namun tetap saja harus dihargai sebagai upaya dinamisasi agama tersebut. Begitu juga, pengertian-pengertian dasar kita harus mengalami perubahan. Dahulu, pengangguran berarti tiadanya pekerjaan bagi para warga negara, sekarang orang yang tidak bekerja dalam jumlah di bawah 3 % dianggap sudah bekerja dan jumlah tersebut tidak dinamai penganggur.

Dengan arti perubahan tersebut, maka pemahaman kita mengenai hubungan antara negara dan warganya juga bersifat dinamis. Jika negara mampu mewujudkan kemakmuran warganya pada taraf tertentu, maka hal itu sudah dianggap menunaikan kewajiban menciptakan kesejahteraan, karena negara mampu melindungi para warganya dengan menjamin taraf kehidupan pada titik tertentu, misalnya, melalui asuransi sosial. Ini berarti penciptaan kemakmuran dan keadilan ,yang kedua-duanya dijadikan tujuan UUD 1945 sudah ditunaikan dengan baik, meski ada sejumlah warga negara di bawah 3 % angkatan kerja yang sedang menganggur. Nah, kalau ini yang dituju oleh sebuah masyarakat Islam, untuk ini berarti pula Islam telah berhasil mensejahterakan warga negara tanpa menjadi sebuah sistem formal. Sangat kompleks memang, tapi cukup berharga untuk direnungkan, bukan? {}

NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Sebenarnya, terdapat hubungan sangat erat antara kepemimpinan dan konsep negara dalam pandangan Islam. Penulis pernah mengemukakan sumber tertulis (*dalil naqli*) bagi sebuah pandangan Islam. Adagium itu adalah "tiada agama tanpa kelompok/masyarakat, tiada masyarakat tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa sang pemimpin "(*lâ dîna illâ bi jamâ'atin wa lâ tamâ'ata illâ bi imâmatin wa lâ imâmata illâ bi imâmin*). Di sini tampak jelas, arti seorang pemimpin bagi Islam, ia adalah pejabat yang bertanggung jawab tentang penegakan perintah-perintah Islam dan pencegah larangan-larangan-Nya (*amar ma'rûf nahi munkar*). Karenanya, pemimpin dilengkapi dengan kekuasaan efektif, yang jelas kekuasaan efektif inilah yang oleh Munas Ulama tahun 1957 di Medan, dinyatakan sebagai "wewenang kekuasaan efektif " (*syaukah*).

Karena itulah, Munas tersebut mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah "penguasa pemerintahan untuk sementara, dengan kekuasaan efektif" (*walîyyu al-amri dharuri bi al-syaukah*). Maksud dari kata "untuk sementara", karena ia adalah pengganti Imam yang dalam hal ini Kepala Pemerintahan. Namun wewenang yang dimilikinya sebagai pengganti Imam tidak berdasarkan sumber tertulis (*dalil naqli*), melainkan karena pertimbangan rasional (*dalil aqli*), yang tidak mengurangi

keabsahan kekuasaan itu sendiri. Kemudian kata “sementara”, artinya sebelum datangnya hari kiamat. Keputusan Munas di atas, dinyatakan berlaku bagi semua Presiden Republik Indonesia, namun oleh mereka yang “dibius” oleh konsep Negara Islam, dinyatakan hanya berlaku untuk Kepresidenan Bung Karno saja.

Dengan demikian, sebuah negara yang bukan negara Islam dianggap tidak memiliki ajaran tentang konsep kepemimpinan yang Islami. Karena itu diandaikan, konsep bukan negara Islam seolah-olah tidak memiliki konsep Islam tentang kepemimpinan, dan dengan demikian konsep itu tidak memiliki keabsahan dalam pandangan Islam. Ternyata setelah berjalan puluhan tahun lamanya, kini kita mengetahui kenyataan sebenarnya, yaitu bahwa kelangkaan konsep Islam tentang negara, tidak berarti agama tersebut tidak memiliki pandangan tentang kepemimpinan. Pandangan ini melihat kepemimpinan menurut Islam berlaku untuk kepemimpinan negara (kepemimpinan formal) maupun kepemimpinan dalam masyarakat (kepemimpinan non-formal). Dalam tulisan ini akan ditinjau orientasi minimalnya, karena hal-hal lain diserahkan kepada kita untuk merumuskannya.

*****

Dalam pandangan Islam: “orientasi seorang pemimpinan terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin”. Ini berarti, Islam tidak membeda-bedakan antara kepemimpinan negara dengan kepemimpinan masyarakat, juga mengenai bentuk dan batas waktunya. Serta tidak memikirkan format kenegaraan atau kemasyarakatan yang melatarbelakangi kepemimpinan itu, apakah itu imperium dunia, republik negara bangsa atau negara kota. Maka dari itu, sia-sia juga jika kita kaitkan langsung kepemimpinan di “Negara Islam” yang ada dengan proses demokratisasi. Karenanya, kita lihat sekarang ini kepemimpinan dalam “Negara Islam”ada yang bersifat otoriter atau demokratis, dengan sistem pemerintahan Raja atau Amir, kepempinan ulama

maupun kepemimpinan para sesepuh masyarakat (*community leaders*). Selama kepemimpinan itu mendatangkan kesejahteraan langsung pada masyarakat, selama itu pula kepemimpinan yang ada memiliki legitimasi dalam pandangan umat Islam.

Namun di sinilah kita sering terjebak, yaitu dalam anggapan kesejahteraan di atas hanya menyangkut kenyataan-kenyataan lahiriah dan angka statistik belaka, seperti kepemilikan benda, usia hidup rata-rata dan sebagainya. Sering dilupakan, masalah kesejahteraan juga menyangkut kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Hal-hal itu nantinya akan menyangkut kebebasan berorganisasi, kebebasan rakyat dalam menentukan bentuk negara yang mereka ingini dan beberapa aspek kehidupan agar tercipta rasa keadilan.

Proses peralihan (transisi) kepemimpinan dunia, negara dan masyarakat seperti kita lihat dewasa ini, masih menimbulkan keresahan. Keresahan ini seperti yang menghinggapi negara dengan mayoritas warganya yang beragama Islam, akibat dari gagalnya upaya-upaya terorisme yang terjadi di mana-mana dengan mengatasnamakan Islam. Sebenarnya, para pakar masyarakat muslim di seluruh dunia, harus mensosialisasikan pengenalan dan identifikasi sebab-sebab utama munculnya terorisme itu. Dan bukannya diselesaikan dengan penyerangan dan pengeboman seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak. Pengeboman itu sendiri secara tidak jujur dikemukakan Presiden Amerika Serikat (AS) Geogre W. Bush Jr. sebagai upaya menurunkan diktaktor Saddam Husein dari jabatan kepresidenan di Irak. Padahal, pertimbangan-pertimbangan geopolitik internasional yang membuat Amerika mengambil tindakan terhadap Irak. Yaitu, karena Saudi Arabia telah "menyimpang" dari politik luar negeri AS, padahal ia adalah penghasil minyak bumi (BBM) nomor satu di dunia, maka harus dicarikan kekuatan pengimbang terhadapnya. Pilihan itu jatuh kepada Irak, karena ia adalah penghasil minyak bumi kedua terbesar saat ini. Karena Irak di bawah

kepresidenan Saddam tidak akan mungkin mengikuti politik luar negeri AS maka ia harus diganti secepatnya. Kalau Saddam dianggap sebagai "kekuatan jahat" (*evil force*), mengapakah hal itu tidak dikenakan atas para pemimpin Saudi Arabia? Negara yang tiap tahun menghukum mati sekitar dua ribu orang yang dianggap "kaum oposan"? Standar moral ganda (*double morality*) seperti inilah yang digunakan para pemimpin seperti Bush saat ini, yang membuat istilah "politik" berpengertian sangat buruk. Politik yang oleh mendiang Presiden AS John F. Kennedy sebagai "karya termulya", karena menyangkut kesejahteraan (lahir dan batin) rakyat.

*****

Kembali pada kepemimpinan Islam, dalam Islam kepemimpinan haruslah berorientasi kepada pencapaian kesejahteraan orang banyak. Sebuah adagium terkenal dari hukum Islam adalah "kebijakan dan tindakan seorang pemimpin haruslah terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin" (*tasharruf al-imâm 'alâ al ra'iyyah manûthun bi al-mashlahah*). Jelaslah dengan demikian kepemimpinan yang tidak berorientasi kepada hal itu, melainkan hanya sibuk dengan mengurusi kelangsungan kekuasaan saja, bertentangan dengan pandangan Islam mengenai kepemimpinan. Karenanya, dalam menilai kepemimpinan dalam sebuah gerakan, selalu diutamakan pembicaraan mengenai kesejahteraan itu, yang dalam bahasa Arab dinamakan *al-mashlahah al-âmmah* (secara harafiyah, dalam bahasa Indonesia berarti: kepentingan umum).

Selain itu, Islam tidak mempunyai konsep yang pasti (baku) tentang bagaimana sang pemimpin ditetapkan. Kepemimpinan sebuah organisasi Islam, ada yang ditetapkan melalui pemilihan dalam kongres atau muktamar, tetapi masih tampak betapa kuatnya faktor keturunan dalam hal ini, seperti dialami penulis sendiri. Baiknya sistem ini, jika orang dengan garis keturunan

yang mewarisi kepemimpinan, membentuk kehidupannya sesuai dengan konsep kemaslahatan umat. Buruknya, jika pemimpin berdasarkan garis keturunan terpilih, padahal pemimpin itu justru tidak memahami tugas dan kewajibannya, melainkan hanya asyik dengan kekuasaan dan kemudahan-kemudahan yang diperolehnya, maka akan menjadi lemahlah kepemimpinan tersebut. Apalagi jika kepemimpinan itu di tangan seorang penakut, yaitu pemimpin yang takut kepada tekanan-tekanan dari luar dirinya. Memang kedengarannya mudah mengembangkan kepemimpinan dalam kehidupan, tetapi sebenarnya sulit juga, bukan? {}

NU dan Negara Islam (1)

Sebuah pertanyaan diajukan kepada penulis: apakah reaksi NU (Nahdlatul Ulama) terhadap gagasan Negara Islam (NI), yang dikembangkan oleh beberapa partai politik yang menggunakan nama tersebut? Pertanyaan ini sangat menarik untuk dikaji terlebih dahulu dan dicarikan jawaban yang tepat atasnya. Inilah untuk pertama kali organisasi yang didirikan tahun 1926 ini ingin diketahui orang bagaimana pandangannya mengenai NI. Ini juga berarti, keingintahuan akan hubungan NU dan keadaan bernegara yang kita jalani sekarang ini dipersoalkan orang. Dengan kata lain, pendapat NU sekarang bukan hanya menjadi masalah intern organisasi saja, melainkan sudah menjadi "bagian" dari kesadaran umum bangsa kita. Dengan upaya menjawab pertanyaan tersebut, penulis ingin menjadi bagian dari proses berpikir yang sangat luas seperti itu, sebuah keinginan yang pantas-pantas saja dimiliki seseorang yang sudah sejak lama tergoda oleh gagasan NI.

Dalam sebuah tesis MA –yang dibuatnya beberapa tahun yang lalu, Pendeta Einar Martahan Sitompul, yang di kemudian hari menjadi Sekretaris Jenderal Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), menuliskan bahwa Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin (Borneo Selatan), harus menjawab sebuah pertanyaan, yang dalam tradisi organisasi tersebut dinamai *bahtsl al-masâ'il* (pembahasan masalah). Salah sebuah masalah yang

diajukan kepada muktamar tersebut berbunyi: wajibkah bagi kaum muslimin untuk mempertahankan kawasan Kerajaan Hindia Belanda, demikian negara kita waktu itu disebut, padahal diperintah orang-orang non-muslim? Muktamar yang dihadiri oleh ribuan orang ulama itu, menjawab bahwa wajib hukumnya secara agama, karena adanya dua sebab. Sebab pertama, karena kaum muslimin merdeka dan bebas menjalankan ajaran Islam, di samping sebab kedua, karena dahulu di kawasan tersebut telah ada Kerajaan Islam. Jawaban kedua itu, diambilkan dari karya hukum agama di masa lampau, berjudul "*Bughyah al-Mustarsyidîn*".

Jawabaan di atas memperkuat pandangan Ibn Taimiyyah, beberapa abad yang lalu. Dalam pendapat pemikir ini, hukum agama Islam (*fiqh*) memperkenankan adanya "pimpinan berbilang" (*ta'addud al-a'immah*), yang berarti pengakuan akan kenyataan bahwa kawasan dunia Islam sangatlah lebar di muka bumi ini, hingga tidak dapat dihindarkan untuk dapat menjadi efektif (*syaukah*). Konsep ini, yaitu adanya pimpinan umat yang hanya khusus berlaku bagi kawasan yang bersangkutan, telah diperkirakan oleh kitab suci al-Qurân dengan firman Allah; "Sesungguhnya Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar kamu sekalian saling mengenal" (*innâ khalaqnâkum min dzakarin wa untsâ wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâ'ila li ta'ârafû*) (QS al-Hujurat (49): 13). Firman Allah inilah yang menjadi dasar adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, walaupun dilarang adanya perpecahan diantara mereka, seperti kata firman Allah juga: "Berpeganglah kalian (erat-erat) kepada tali Allah secara keseluruhan, dan janganlah terbelah-belah/saling bertentangan" (*wa'tashimû bi habli Allâhi jamî'an wa lâ tafarraqû*) (QS ali-Imran (3): 103).

*****

Dengan keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 1935 itu, NU dapat menerima kenyataan tentang kedudukan negara dalam

pandangan Islam –menurut paham organisasi tersebut. Yaitu pendapat tentang tidak perlunya NI didirikan, maka dalam hal ini diperlukan sebuah klarifikasi yang jelas tentang perlu tidak-nya didirikan sebuah NI. Di sini ada dua pendapat, pertama; sebuah NI harus ada, seperti pendapat kaum elit politik di Saudi Arabia, Iran, Pakistan dan Mauritania. Pendapat kedua, seperti dianut oleh NU dan banyak organisasi Islam lainnya, tidak perlu ada NI. Ini disebabkan oleh heterogenitas sangat tinggi di antara para warga negara, di samping kenyataan ajaran Islam menjadi tanggungjawab masyarakat, dan bukannya negara. Pandangan NU ini bertolak dari kenyataan bahwa Islam tidak memiliki ajaran formal yang baku tentang negara, yang jelas ada adalah mengenai tanggungjawab masyarakat untuk melaksanakan Syari'ah Islam.

Memang, diajukan pada penulis argumentasi dalam bentuk firman Allah; "Hari ini telah Ku-sempurnakan agama kalian, Ku-sempurnakan bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku dan Ku-relakan Islam "sebagai" agama (*al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmatî wa radîitu lakum al-Islâma dînan*) (QS al-Maidah (5): 3). Jelaslah dengan demikian, Islam tidak harus men-dirikan negara agama, melainkan ia berbicara tentang kemanu-siaan secara umum, yang sama sekali tidak memiliki sifat memak-sa, yang jelas terdapat dalam tiap konsep tentang negara. Demikian pula, firman Allah; "Masuklah kalian ke dalam Islam (kedamai-an) secara keseluruhan" (*udkhulû fî al-silmi kâffah*) (QS al-Baqarah (2): 208). Ini berarti kewajiban bagi kita untuk menegakkan ajaran-ajaran kehidupan yang tidak terhingga, sedangkan yang disem-purnakan adalah prinsip-prinsip Islam. Hal itu menunjukkan, Islam sesuai dengan tempat dan waktu manapun juga, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Inilah maksud dari ungkapan Islam tepat untuk segenap waktu dan tempat (*al-Islâm yasluhu likulli zamânin wa makânin*).

Sebuah argumentasi sering dikemukakan, yaitu ungkapan Kitab Suci; "Orang yang tidak 'mengeluarkan' fatwa hukum (se-suai dengan) apa yang diturunkan Tuhan, maka orang itu

(termasuk) orang yang kafir –atau dalam variasi lain dinyatakan orang yang dzalim atau orang yang munafiq-" (*wa man lam yahkum bimâ anzala Allâhu faulâika humu al kâfirûn*) (QS al-Maidah (5): 47). Namun bagi penulis, tidak ada alasan untuk melihat keharusan mendirikan NI, karena hukum Islam tidak bergantung pada adanya negara, melainkan masyarakat pun dapat memberlakukan hukum agama. Misalnya, kita bersholat Jum'at juga tidak karena undang-undang negara, melainkan karena itu diperintahkan oleh syari'at Islam. Sebuah masyarakat yang secara moral berpegang dan dengan sendirinya melaksanakan syari'at Islam, tidak lagi memerlukan kehadiran sebuah negara agama, seperti yang dibuktikan para sahabat di Madinah setelah Nabi Muhammad Saw wafat.

*****

Inilah yang membuat mengapa NU tidak memperjuangkan sebuah NI di Indonesia (menjadi NII, Negara Islam Indonesia). Kemajemukan (heterogenitas) yang tinggi dalam kehidupan bangsa kita, membuat kita hanya dapat bersatu dan kemudian mendirikan negara, yang tidak berdasarkan agama tertentu. Kenyataan inilah yang sering dikacaukan oleh orang yang tidak mau mengerti bahwa mendirikan sebuah NI tidak wajib bagi kaum muslimin, tapi mendirikan masyarakat yang berpegang kepada ajaran-ajaran Islam adalah sesuatu yang wajib. Artinya, haruskah agama secara formal ditubuhkan dalam bentuk negara, atau cukup dilahirkan dalam bentuk masyarakat saja? Orang "berakal sehat" tentu akan berpendapat sebaiknya kita mendirikan NI, kalau memang hal itu tidak memperoleh tentangan, dan tidak melanggar prinsip persamaan hak bagi semua warga negara untuk mengatur kehidupan mereka.

Telah disebutkan di atas tentang fatwa Ibn Taimiyyah, tentang kebolehan Imam berbilang yang berarti tidak adanya keharusan mendirikan NI. Lalu mengapakah fatwa-fatwa beliau

tidak digunakan sebagai rujukan oleh Muktamar NU? Karena, pandangan beliau digunakan oleh wangsa yang berkuasa di Saudi Arabia bersama-sama dengan ajaran-ajaran Madzhab Hambali (disebutkan juga dalam bahasa Inggris *Hambalite School*), yang secara *de facto* melarang orang bermadzhab lain. Kenyataan ini tentu saja membuat orang-orang NU bersikap reaktif terhadap madzhab tersebut. Tentu saja hal itu secara resmi tidak dilakukan, karena sikap Saudi Arabia terhadap madzhab-madzhab non-Hambali juga tidak bersifat formal. Dengan kata lain, pertentangan pendapat antara "pandangan kaum Wahabi" yang secara *de facto* demikian keras terhadap madzhab-madzhab lain itu, menampilkan reaksi tersendiri yang tidak kalah kerasnya. Ini adalah contoh dari sikap keras yang menimbulkan sikap yang sama pada "pihak seberang".

Contoh dari sikap saling menolak, dan saling tak mau mengalah itu membuat gagasan membentuk NI di negara kita (menjadi NII), sebagai sebuah utopia yang terdengar sangat indah, namun sangat meragukan dalam kenyataan. Ini belum kalau pihak non-muslim ataupun pihak kaum muslimin nominal (kaum abangan), tidak berkeberatan atas gagasan mewujudkan negara Islam itu. Jadi gagasan yang semula tampak indah itu, pada akhirnya akan dinafikan sendiri oleh bermacam-macam sikap para warga negara, yang hanya sepakat dalam mendirikan negara bukan agama. Inilah yang harus dipikirkan sebagai kenyataan sejarah. Kalaupun *toh* dipaksakan –sekali lagi- untuk mewujudkan gagasan NI itu di negara kita, maka yang akan terjadi hanyalah serangkaian pemberontakan bersenjata seperti yang terjadi di negara kita tahun-tahun 50-an. Apakah deretan pemberontakan bersenjata seperti itu, yang ingin kita saksikan kembali dalam sejarah modern bangsa kita. {}

NU dan Negara Islam (2)

Ketika berada di Makassar pada minggu ke tiga bulan Februari 2003, penulis di wawancarai oleh TVRI di studio kawasan tersebut, yang di*relay* oleh studio-studio TVRI seluruh Indonesia Timur. Penulis memulai wawancara itu dengan menyatakan, menyadari sepenuhnya bahwa masih cukup kuat sekelompok orang yang menginginkan negara Islam (NI). Pengaruh almarhum Kahar Mudzakar yang dinyatakan meninggal dalam paruh kedua tahun-tahun 50-an, ternyata masih besar. Karenanya, penulis menyatakan dalam wawancara tersebut, pembicaraan sebaiknya ditekankan pada pembahasan tentang NI seperti Sulawesi Selatan itu. Penulis menyatakan, bahwa ia menganggap tidak ada kewajiban mendirikan NI, tapi ia juga tidak memusuhi orang-orang yang berpikiran seperti itu.

Dalam dialog interaktif yang terjadi setelah itu, penulis dihujani pertanyaan demi pertanyaan tentang hal itu. Bahkan ada yang menyatakan, penulis adalah diktator karena tidak menyetujui pemikiran adanya NI. Penulis menjawab, bahwa saya menganggap boleh saja menganut paham itu, dan berbicara terbuka di muka umum tentang gagasan tersebut, itu sudah berarti saya bukan diktator. Salah satu tanda kediktaktoran adalah tidak adanya dialog dan orang menerima saja sebuah gagasan dan tidak boleh membicarakannya secara kritis dan terbuka. Dari

dialog interaktif itu dapat diketahui bahwa pengaruh luar pun harus dipikirkan, seperti pengaruh dari berbagai kawasan dunia Islam yang juga di dasarkan pada kadar pengetahuan agama yang rendah.

Rendahnya pengetahuan agama yang dimiliki itu, digabungkan dengan rasa kekhawatiran sangat besar melihat tantangan modernisasi terhadap lembaga/institusi ke-Islam-an, membuat mereka melihat bahaya di mana-mana terhadap Islam. Proses pemahaman keadaan seperti itu, yang terlalu ditekankan pada aspek kelembagaan/institusional Islam belaka, dapat dinamakan sebagai proses pendangkalan agama kalangan kaum muslimin. Pihak-pihak lain yang non-muslim juga mengalami pendangkalan seperti itu, dan juga memberikan responsi yang salah terhadap tantangan keadaan. Kalau kita melihat pada budaya/kultur kaum muslimin dimana-mana, sebenarnya kekhawatiran demikian besar seperti itu tidak seharusnya ada di kalangan mereka. Cara hidup, membaca al-Qurân dan Hadist, main rebana, tahlil, berbagai bentuk "seni Islam" dan lain-lainnya, justru mampu menumbuhkan rasa percaya diri yang besar, dalam diri kaum muslimin.

Salah sebuah pertanyaan dalam dialog interaktif itu adalah kutipan al-Qurân "Barang siapa tidak (ber) pendapat hukum dengan apa yang di turunkan Allah, mereka adalah orang yang kafir " (*wa man lam yahkum bimâ anzala Allâh fa'ulâika hum al-kâfirûn*)(QS al-Maidah(5):44). Lalu bagaimana mungkin kita menjalankan hukum Allah, tanpa NI? Jawabnya, karena ada masyarakat yang menerapkan hal itu, dan, atau mendidik kita agar melaksanakan hukum Allah, maka negara dapat saja ditinggalkan. Untuk memelihara pluralitas bangsa, tidak ada kewajiban mendirikan NI atau menentang mereka yang menentang adanya gagasan mendirikan NI. Netralitas seperti inilah yang sebenarnya jadi pandangan Islam dalam soal wajib adanya gagasan mendirikan NI.

Netralitas ini sangat penting untuk dijunjung tinggi, karena

hanya dengan demikian sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat didirikan. Dengan gagasan mendirikan NI, maka pihak minoritas -baik minoritas agama maupun minoritas lain-lainnya-, tidak mau berada dalam sebuah negara dan menjadi bagian dari negara tersebut. Dengan demikian, yang dinamakan Republik Indonesia tidak dapat diwujudkan, karena ketidak-sediaan tersebut. Akhirnya, Indonesia akan tidak terwujud sebagai kesatuan, karena ada negara Aceh, negara bagian Timur dan Selatan dari Sumatra Utara, negara Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Seluruh pulau Jawa, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan sebagian Maluku yang lain-lainnya, berada di luar susunan kenegaraan, karena berdasarkan agama seperti itu.

Karenanya, keputusan para wakil berbagai organisasi Islam dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk meng-hilangkan Piagam Jakarta dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebuah sikap yang sangat bijaksana dan harus di pertahankan. Keputusan itu diikuti oleh antara lain: *Resolusi Jihad*, yang dikeluarkan PBNU pada tanggal 22 Oktober 1945, adalah sesuatu yang sangat mendasar: pernyataan bahwa mempertahankan wilayah Republik Indonesia adalah kewajiban agama bagi kaum mus-limin. Dengan rangkaian kegiatan seperti itu, termasuk mendiri-kan Markas Besar Oelama Djawa –Timoer (MBODT) di Surabaya dalam bulan Nopember 1945, adalah salah satu dari kegiatan bermacam-macam untuk mempertahankan Republik Indonesia, yang notabene bukanlah sebuah NI. Diteruskan dengan perang gerilya melawan tentara pendudukan Belanda di tahun-tahun berikutnya. Dengan peran aktif para ulama dan pesantren-pesantren yang mereka pimpin, selamatlah negara kita dari berbagai rongrongan dalam dan luar negeri, hingga tercapainya penyerahan kedaulatan dalam tahun 1949 - 1950.

*****

Perkembangan sejarah setelah itu menunjukkan bahwa agama Islam tidak berkurang peranannya dalam kehidupan bangsa, walaupun beberapa kali usaha merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berhasil digagalkan, seperti dalam Dewan Konstituante di tahun 1956-1959. Demikian juga beberapa kali pemberontakan bersenjata terhadap NKRI dapat digagalkan seperti DI-TII dan APRA (Bandung 1950). Ini tidak berarti Islam dibatasi ruang geraknya dalam negara, seperti terbukti dari kiprah yang dilakukan oleh Al-Azhar di Kairo.

Siapapun tidak dapat menyangkal bangsa Indonesia adalah memiliki jumlah terbesar kaum muslimin. Ini berbeda dari bangsa-bangsa lain, Indonesia justru memiliki jumlah yang sangat besar kaum "muslimin statistik" atau lebih di kenal dengan sebutan "muslim abangan". Walaupun demikian, kaum muslim yang taat beragama dengan nama "kaum santri" masih merupakan minoritas. Karena itu, alangkah tidak bijaksananya sikap ingin memaksakan NI atas diri mereka.

Lalu, bagaimana dengan ayat kitab suci al-Qurân yang di sebutkan diatas? Jawabnya, kalau tidak ada NI untuk menegakkan hukum agama maka masyarakatlah yang berkewajiban. Dalam hal ini, berlaku juga sebuah kenyataan sejarah yang telah berjalan 1000 tahun lamanya yaitu penafsiran ulang (re-interprensi) atas hukum agama yang ada. Dahulu kita berkeberatan terhadap celana dan dasi, karena itu adalah pakaian orang-orang non-muslim. Sebuah diktum mengemukakan, "Barang siapa menyerupai sesuatu kaum ia adalah sebagian dari mereka" (*man tasyâbaha bi qaumin fahuwa min hum*). Tetapi sekarang, tidak ada lagi persoalan tentang hal itu karena esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan melainkan pada akhlak yang dilaksanakan.

Karena itu, kita lalu mengerti mengapa para wakil berbagai gerakan Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) memutuskan untuk menghilangkan Piagam Jakarta dari UUD 1945. Mereka inilah yang berpandangan jauh, dapat melihat bersungguhnya kaum muslim menegakkan ajaran-ajaran agama mereka tanpa bersandar kepada negara. Dengan demikian, mereka menghidupi baik agama maupun negara. Sikap inilah yang secara gigih dipertahankan Nahdlatul Ulama (NU), sehingga agama Islam terus berkembang dan hidup di negeri kita. {}

Islam: Perjuangan Etis Ataukah Ideologis?

Pada suatu pagi selepas berjalan-jalan, penulis diminta oleh sejumlah orang untuk memberikan apa yang mereka namakan "petuah". Saat itu, ada Kyai Aminullah Muchtar dari Bekasi, sejumlah aktifis NU dan PKB dan sekelompok pengikut aliran kepercayaan dari Samosir. Dalam kesempatan itu, penulis mengemukakan pentingnya arti pemahaman arti yang benar tentang Islam. Karena ditafsirkan secara tidak benar, maka Islam tampil sebagai ajakan untuk menggunakan kekerasan/terorisme dan tidak memperhatikan suara-suara moderat. Padahal, justru Islam-*lah* pembawa pesan-pesan persaudaraan abadi antara umat manusia, bila ditafsirkan secara benar.

Pada kesempatan itu, penulis mengajak terlebih dahulu memahami fungsi Islam bagi kehidupan manusia. Kata al-Qurân, Nabi Muhammad Saw diutus tidak lain untuk membawakan amanat persaudaraan dalam kehidupan (*wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lil 'âlamîn*) (QS al-Anbiya(21):107), dengan kata "rahmah" diambilkan dari pengertian "rahim" ibu, dengan demikian manusia semuanya bersaudara. Kata "*'alamîn*" di sini berarti manusia, bukannya berarti semua makhluk yang ada. Jadi tugas kenabian yang utama adalah membawakan persaudaraan yang diperlukan guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan. Bahkan dikemukakan

penulis, kaum muslimin diperkenankan menggunakan kekerasan hanya kalau aqidah mereka terancam, atau mereka diusir dari tempat tinggalnya (*idzâ ukhriju min diyârihim*).

Kemudian, penulis menyebutkan disertasi doktor dari Charles Torrey yang diajukan kepada Universitas Heidelberg di Jerman tahun 1880. Dalam disertasi itu, Torrey mengemukakan bahwa kitab suci al-Qurân menggunakan istilah-istilah paling duniawi, seperti kata "rugi", "untung" dan "panen", untuk menyatakan hal-hal yang paling dalam dari keyakinan manusia. Umpamanya saja, ungkapan "ia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi (perniagaannya)" (*wa hua fil âkhirati min al-khâsirîn*) (QS Ali Imran(3):85). Begitu juga ayat lain, "menghutangi Allah dengan hutang yang baik" (*yuqridhullaha qardhan hasanan*) (QS al-Baqarah(2):245), serta ayat "barang siapa menginginkan panen di akhirat, akan Ku-tambahi panenannya" (*man kâna yurîdu hartsa al-âkhirati nazid lahû fi hartsihi*) (QS al-Syura (42):20).

*****

Dalam uraian selanjutnya, penulis mengemukakan pengertian negara dari kata "daulah", yang tidak dikenal oleh al-Qur'an. Dalam hal ini, kata tersebut mempunyai arti lain, yaitu "berputar" atau "beredar", yaitu dalam ayat "agar harta yang terkumpul itu tidak berputar/beredar antara orang-orang kaya saja di lingkungan anda semua" (*kailâ yakûna dûlatan baina al-aghniyâ'i minkum*)(QS al-Hasyr(59):7). Ini menunjukkan yang dianggap oleh al-Qur'an adalah sistem ekonomi dari sebuah negara, bukan bentuk dari sebuah negara itu sendiri. Jadi, pembuktian tekstual ini menunjukkan Islam tidak memandang penting bentuk negara. Atau, dengan kata lain, Islam tidak mementingkan konsep negara itu sendiri.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, Islam lebih mengutamakan fungsi negara dari pada bentuknya. Dalam hal ini, bentuk kepemimpinan dalam sejarah Islam senantiasa

mengalami perubahan. Bermula dari sistem prasetia (*bai'at*) dari suku-suku kepada Sayyidina Abu Bakar, melalui pergantian pemimpin dengan penunjukkan dari beliau kepada Sayyidina Umar, diteruskan dengan sistem para pemilih (*ahl halli wa al-aqdi*) baik langsung maupun tidak, diteruskan dengan sistem kerajaan atau keturunan di satu sisi dan kepala negara atau kepala pemerintahan dipilih oleh lembaga perwakilan, serta para pemimpin yang melalui *coup d'etat* di sementara negara, semuanya menunjukkan tiadanya konsep pergantian pemimpin negara secara jelas dalam pandangan Islam.

Demikian juga, Islam tidak menentukan besarnya negara yang akan dibentuk. Di zaman Nabi Saw, negara meliputi satu wilayah kecil saja –yaitu kota Madinah dan sekitarnya, diteruskan dengan imperium dunia di masa para khalifah dan kemudian dinasti Umaiyyah dan Abbasyiah. Setelah itu, berdirilah kerajaan-kerajaan lokal dari dinasti *Murabbitîn* di barat Afrika hingga Mataram di Pulau Jawa. Kini, kita kenal dua model; model negara-bangsa (*nation state*) dan negara kota (*city state*). Keadaan menjadi lebih sulit, karena negara kota menyebut dirinya negara-bangsa, seperti Kuwait dan Qatar.

*****

Dengan tidak jelasnya konsep Islam tentang pergantian pemimpin negara dan bentuk negara seperti diterangkan di atas, boleh dikatakan bahwa Islam tidak mengenal konsep negara. Dalam hal ini, yang dipentingkan adalah masyarakat (*mujtama'* atau *society*), dan ini diperkuat oleh penggunaan kata umat (*ummah*) dalam pengertian ini. Sidney Jones mengupas perubahan arti kata ini dalam berbagai masa di Indonesia, yang diterbitkan di jurnal *Indonesia* Universitas Cornell di Ithaca, New York, beberapa tahun lalu. Semuanya menunjuk pada pengertian masyarakat itu, baik seluruh bangsa maupun hanya para pengikut gerakan-gerakan Islam di sini belaka.

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan adanya pandangan tentang negara dalam Islam, harus diartikan pandangan agama tersebut tentang masyarakat. Ini semua, akan membawa konsekuensi tiadanya hubungan antara Islam sebagai ideologi politik dan negara. Dengan kata lain, Islam mengenal ideologi sebagai pegangan hidup masyarakat, minimal berlaku untuk para warga gerakan-gerakan Islam saja. Dengan demikian, negara dapat saja didirikan tanpa ideologi Islam, untuk menyantuni hak-hak semua warga negara di hadapan Undang-Undang Dasar (UUD), baik mereka muslim maupun non-muslim.

Tanpa menyadari hal ini, kita secara emosional akan mengajukan tuntutan akan adanya sebuah ideologi Islam dalam kehidupan bernegara. Ini berarti, warga negara non-muslim akan menjadi warga negara kelas dua, baik secara hukum maupun dalam kenyatan praktis. Sedangkan Republik Indonesia tanpa menggunakan ideologi agama secara konstitusional dalam hidupnya, menghilangkan kesenjangan itu. Dengan tidak menggunakan agama sebagai ideologi politik, yang berakibat pada pemilahan warga negara muslimin dari non-muslimin, maka, terjadilah proses alami kaum muslimin dalam memperjuangkan ideologi masyarakat yang mereka ingini melalui upaya menegakkan etika Islam, bukannya ideologi Islam. Bukankah ini lebih rasional? {}

Yang Terbaik Ada di Tengah

Judul diatas diilhami oleh sabda Nabi Muhammad Saw: " Sebaik-baik persoalan adalah yang berada ditengah " (*khairu al-umûr ausâthuha*). Ia juga mencerminkan pandangan agama Buddha tentang "jalan tengah" yang dicari dan diwujudkan oleh penganut agama tersebut. Walaupun demikian, judul itu dimaksudkan untuk mengupas sebuah buku karya tokoh Syi'ah terkemuka Dr. Musa Al Asy'ari, "Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan" –dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Darul Ulum Jombang, beberapa waktu lalu. Katakanlah sebagai sebuah resensi, yang juga semacam analisa terhadap kecenderungan umum mengambil "jalan tengah" yang dimiliki bangsa kita, dan mempengaruhi kehidupan di negeri ini.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sikap mencari jalan tengah ini, akhirnya berujung pada sikap mencari jalan sendiri di tengah-tengah tawaran penyelesaian berbagai persoalan yang masuk ke kawasan ini. Namun, sebelum menyimpulkan hal itu, terlebih dahulu penulis ingin melihat buku itu dari kacamata sejarah yang menjadi jalan hidup banyak peradaban dunia. Kalau kita tidak pahami masalah tersebut dari sudut ini, kita akan mudah menggangap "jalan tengah" sebagai sesuatu yang khas dari bangsa kita, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Bahwa bangsa kita cenderung untuk mencari sesuatu yang

independen dari bangsa-bangsa lain, merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mr. Muhammad Yamin, umpamanya menggangap kerajaan Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat dan menguasai kawasan antara pulau Madagaskar di lautan Hindia/Samudra Indonesia di Barat dan pulau Tahiti di tengah-tengah lautan Pasifik, dengan benderanya yang terkenal Merah Putih. Padahal, angkatan laut kerajaan tersebut hanyalah *fatsal* (pengikut) belaka dari Angkatan Laut Tiongkok yang menguasai kawasan perairan tersebut selama berabad-abad. Kita tentu tidak senang dengan klaim tersebut karena mengartikan kita lemah. Tetapi kenyataan sejarah berbunyi lain, Australia, misalnya, yang menjadi dominion Inggris, secara hukum dan tata negara, memiliki indenpendensi sendiri terlepas dari negara induk.

*****

Penulis melihat, bahwa sejarah dunia penuh dengan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Umpamanya saja, seperti di tunjukan oleh Oswald Spengler dalam *"Die Untergang des Abendlandes"(The Decline of The West).* Buku yang menggambarkan kejayaan peradaban Barat dalam abad ke 20 ini ternyata mulai mengalami keruntuhan (*Untergang*). Filosof Spanyol kenamaan, Ortega Y Gasset, justru menunjuk kepada tantangan dari massa rakyat kebanyakan dalam peradaban modern terhadap karya-karya dan produk kaum elit, seperti tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal "*Rebellion of the Masses*" (Pemberontakan Rakyat Kebanyakan).

Kemudian itu semua, disederhanakan oleh Arnold Jacob Toynbee dalam karya momentumnya yang terdiri dari 2 jilid, "*A Study of History*". Toynbee mengemukakan sebuah mekanisme sejarah dalam peradaban manusia, yaitu tantangan (*challenges*) dan jawaban (*responses*). Kalau tantangan terlalu berat, seperti tantangan alam di kawasan Kutub Utara, seperti yang dialami bangsa Eskimo, maka manusia tidak dapat memberikan jawaban

memadai, jadi hanya mampu bertahan hidup saja. Sebaliknya, kalau tantangan harus dapat diatasi dengan kreatifitas, seperti tantangan banjir sungai yang merusak untuk beberapa bulan dan kemudian membawa kemakmuran melalui kesuburan tanah untuk masa selanjutnya, akan melahirkan peradaban tepi sungai yang sangat besar, seperti ditepian Nil, Tigris, Euphrat, Gangga, Huang Ho, Yang Tse Kiang, Musi dan Brantas. Lahirnya pusat-pusat peradaban dunia ditepian sungai-sungai itu, merupakan bukti kesejahteraan yang tidak terbantah.

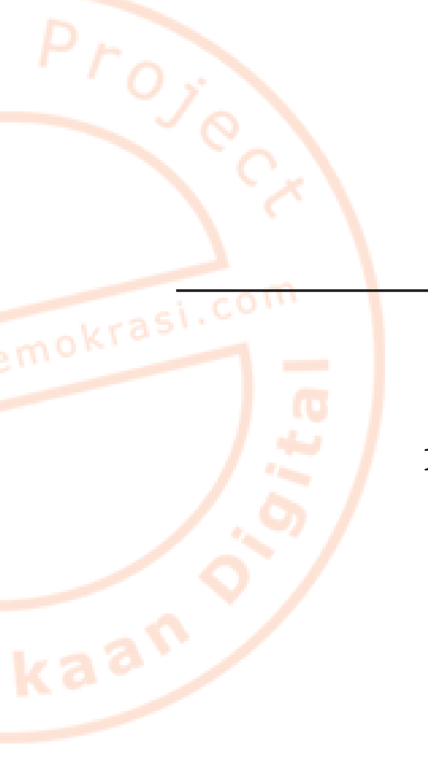
Jan Romein, seorang sejarawan Belanda, penulis buku "*Aera Eropa*" ia menggambarkan adanya PKU I (Pola Kemanusiaan Umum pertama, *Eerste Algemeene Menselijk Patron*). PKU I itu, menurut karya Romein tersebut memperlihatkan diri dalam tradisionalisme yang dianut oleh peradaban dunia dan kerajaan-kerajaan besar waktu itu, berupa masyarakat agraris, birokrasi kuat dibawah kekuasaan raja yang moralitas yang sama di mana-mana. Dalam abad ke-6 sebelum masehi, terjadi krisis moral besar-besaran yang ditandai dengan munculnya nama-nama Lao Tze dan Konghucu di China, Budha Gautama di India, Zarathustra di Persia dan Akhnaton di Mesir. Mereka para moralis hebat ini mengembalikan dunia kepada tradisionalismenya, karena memperkuat "keseimbangan". Sebaliknya, para filosof Yunani Kuno, membuat penyimpangan pertama terhadap PKU kesatu itu, dengan mengemukakan rasionalitas sebagai ukuran perbuatan manusia yang terbaik. Penyimpangan-penyimpangan PKU I ini diikuti oleh penyimpangan-penyimpangan lain oleh Eropa seperti kedaulatan hukum Romawi (*Lex Romanum*) pengorganisasian kinerja, *Renaissance* (Abad Kebangkitan), Abad Pencerahan (*Aufklarung*), Abad Industri dan Abad Ideologi. Dengan adanya penyimpangan itu, Eropa memaksa dunia untuk menemukan PKU II (*Tweede Algemeene Menselijk Patron*), yang belum kita kenal bentuk finalnya.

*****

Nah, kita menolak teokrasi (negara agama) dan sekularisme, dengan mengajukan alternatif ketiga berupa Pancasila. Kompromi politik yang dikembangkan kemudian (dan sampai sekarang belum juga berhasil) sebagai ideologi bangsa, menolak dominasi agama maupun kekuasaan anti agama dalam kehidupan bernegara kita. Karena sekularisme dipandang sebagai penolakan kepada agama -dan bukannya sebagai pemisahan agama dari negara-, maka kita merasakan perlunya mempercayai Pancasila yang menggabungkan sila pertama (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), dan sila-sila lain yang oleh banyak penulis dianggap sebagai penolakan atas agama.

Buku yang ditinjau penulis ini, sebenarnya adalah upaya dari jenis yang berupaya menyatukan "kebenaran agama" dan ilmu pengetahuan sekuler (dirumuskan sebagai kemerdekaan berpikir oleh pengarangnya). Jelas yang dimaksudkan adalah sebuah sintesa baru yang terbaik bagi kita dari dua hal yang saling bertentangan. Apakah ini merupakan sesuatu yang berharga, ataukah hanya berujung kepada sebuah masyarakat (dan negara) "yang bukan-bukan"? {}





BAB III

ISLAM KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA



Islam dan Hak Asasi Manusia

Tulisan-tulisan yang menyatakan Islam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), seringkali menyebutkan Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Justru di negeri-negeri muslim-lah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dengan HAM. Dalam keadaan demikian, klaim Islam sebagai agama pelindung HAM hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan dalam praktek kehidupan.

Di sisi lain, kita melihat para penulis seperti Al-Maududi, seorang pemimpin muslim yang lahir di India dan kemudian pindah ke Pakistan di abad yang lalu, justru tidak mempedulikan hubungan antara Islam dan HAM. Baginya, bahkan hubungan antara Islam dan Nasionalisme justru tidak ada. Nasionalisme adalah ideologi buatan manusia, sedangkan Islam adalah buatan Allah Swt. Bagaimana mungkin mempersamakan sesuatu buatan Allah Swt dengan sesuatu buatan manusia? Lantas, bagaimanakah harus diterangkan hubungan antara perkembangan Islam dalam kehidupan yang dipenuhi oleh tindakan-tindakan manusia? Al-Maududi tidak mau menjawab pertanyaan ini, sebuah sikap

yang pada akhirnya menghilangkan arti acuan yang digunakannya.

Bukankah Liga Muslim (*Muslim League*) yang didukungnya adalah buatan Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan, yang kemudaian melahirkan Pakistan, tiga kali berganti nama antara Republik Pakistan dan Republik Islam Pakistan? Bukankah ini berarti campur tangan manusia yang sangat besar dalam pertumbuhan negeri muslim itu? Dan, bagaimanakah harus dibaca tindakan Pervez Musharraf yang pada bulan lalu telah memenangkan kepresidenan negeri itu melalui *plebisit*, bukannya melalui pemilu? Dan bagaimana dengan tuduhan-tuduhannya, bahwa para pemuka partai politik, termasuk Liga Muslim, sebagai orang-orang yang korup dan hanya mementingkan diri sendiri?

*****

Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas deklarasi universal HAM, yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tahun 1948. Dalam deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak Asasi Manusia. Padahal *fiqh*/hukum Islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari agama Islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan (*apostasy*), yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965, haruslah dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Sebuah pertanyaan yang tidak akan ada jawabnya, karena hal itu merupakan kenyataan yang demikian besar mengguncang perasaan kita.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa di hadapan kita hanya ada satu dari dua kemungkinan: menolak deklarasi universal HAM itu sebagai sesuatu yang asing bagi Islam, seperti yang dilakukan Al-Maududi terhadap Nasionalisme atau justru merubah diktum *fiqh*/hukum Islam itu sendiri. Sikap menolak,

hanya akan berakibat seperti sikap burung onta yang menolak kenyataan dan menghindarinya, dengan bersandar kepada lamunan indah tentang keselamatan diri sendiri. Sikap seperti ini, hanya akan berarti menyakiti diri sendiri dalam jangka panjang.

Dengan demikian, mau tak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan *fiqh*/hukum Islam, yang secara formal sudah berabad-abad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan keimanan kita pada Allah dan utusan-Nya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa *hukum muhkamat* lainnya, kita harus memiliki keyakinan akan kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah-ubah maka hilanglah ke-Islaman kita.

*****

Sebuah contoh menarik dalam hal ini adalah tentang budak sahaya (*slaves*), yang justru banyak menghiasi al-Qurân dan al-Hadits (tradisi kenabian). Sekarang, perbudakan dan sejenisnya tidak lagi diakui oleh bangsa muslim manapun, hingga secara tidak terasa ia hilang dari perbendaharaan pemikiran kaum muslimin. Praktek-praktek perbudakan, kalaupun masih ada, tidak diakui lagi oleh negeri muslim manapun dan paling hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok muslimin yang kecil tanpa perlindungan negara. Dalam jangka tidak lama lagi, praktek semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

Nah, kita harus mampu melihat ufuk kejauhan, dalam hal ini mereka yang mengalami konversi ke agama lain. Ini merupakan keharusan, kalau kita ingin Islam dapat menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Firman Allah Swt dalam kitab suci al-Qurân, "Tiada yang tetap dalam kehidupan kecuali wajah Tuhan"(*Kullu man 'alayha fâ nin. Wa yabqâ wajhu rabbika*) (QS al-Rahman(55): 26-27) menunjukkan hal itu dengan jelas. Ketentuan *ushûl fiqh* (*Islamic legal theory*) "hukum agama

sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri" (*al-hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujûdan wa 'adaman*) jelas menunjuk kepada kemungkinan perubahan diktum seperti ini.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan antisipasi terhadap hal ini. Dalam salah sebuah muktamarnya, NU telah mengambil keputusan "perumusan hukum haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan". Ambil contoh masalah Keluarga Berencana (KB), yang dahulu dilarang karena pembatasan kelahiran, yang menjadi hak reproduksi di tangan Allah semata. Sekarang, karena pertimbangan biaya pendidikan yang semakin tinggi membolehkan perencanaan keluarga, dengan tetap membiarkan hak reproduksi di tangan Allah. Kalau diinginkan memperoleh anak lagi, tinggal membuang kondom atau menjauhi obat-obat yang dapat mengatur kelahiran. Jelaslah dengan demikian, bahwa Islam patut menjadi agama di setiap masa dan tempat (*yashluhu kulla zamânin wa makân*). Indah bukan, untuk mengetahui hal ini semasa kita masih hidup? {}

Penafsiran Kembali "Kebenaran Relatif"

Dalam dialog dengan para mahasiswa di Samarinda akhir Januari lalu, seorang mahasiswa bertanya; mengapakah penulis tak mau menerima sesuatu yang dianggap sebagai pendirian Islam, umpamanya saja mengenai kehadiran "negara Islam"? Lagi-lagi, sebuah pertanyaan yang di mana-mana penulis hadapi, terutama dari kalangan anak muda. *Nah*, jawaban penulis atas pertanyaan itu, dikemukakan dalam tulisan ini untuk dipikirkan bersama. Kalau ada argumentasi yang kuat, diharapkan disampaikan pada penulis, bisa jadi merubah pendirian penulis, atau malah sebaliknya. Ini penting dilakukan, untuk semakin menajamkan argumentasi orang yang pro (menyetujui) atau kontra (menentang) terhadap sebuah gagasan atau pendapat. Ini adalah hal yang biasa dalam sebuah pertukaran pendapat yang bebas dan terbuka, untuk mencapai kebenaran bagi sebuah persoalan. Kita belum terbiasa dengan hal seperti ini karena sekian lama kita terpasung dalam menyampaikan pendapat. Mengapa? Karena para penguasa otoriter memaksakan pendapat dan memaksakan "kebenaran" miliknya sendiri. Dengan cara demikian, kalau dibuka pintu perdebatan, salah-salah akan ada argumentasi yang menyangkal "kebenaran" yang dikemukakannya tersebut.

Apalagi, kalau kontra argumentasi itu dikemukakan dalam bentuk pertanyaan. Kalau tidak dapat menjawab, maka sang penguasa itu akan kehilangan pendapat, sesuatu yang tidak diinginkan. Bukankah filosof Yunani kuno, Plato, pernah menyatakan, sebuah pertanyaan berarti separuh kebenaran. Ketakutan akan kelemahan argumentasi sendiri, menyebabkan seseorang tidak memperkenankan adanya pertukaran argumentasi, yang menjadi dasar sebuah perdebatan terbuka dan saling tukar pendapat. Karenanya sejarah telah mencatat, seorang penguasa otoriter tidak akan bersedia mengadakan dialog dan pertukaran pendapat. Lain halnya dengan agama yang memiliki "kebenaran moral" sendiri, yang tetap ada walaupun ada sanggahan. Kitab suci al-Qurân menyatakan; "Kalau para hamba-Ku bertanya tentang diri-Ku, maka sesungguhnya Aku dekat (dengan mereka) memenuhi permintaan orang yang berdo'a jika (diajukan) kepada-Ku" (*wa idzâ sa'alaka 'ibadî 'annî ibadi fa-innî qarîbun ujîbu da'wata al da'i idzâ da'âni*) (QS al-Baqarah (2): 186).

Prinsip di atas, perlu dikemukakan di sini, karena hanya melalui dialog yang bebas dan terbuka, dapat dicapai kebenaran akhir yang diikuti dan diterima orang yang berpikiran sehat dan wajar. Inilah arti penting dari sikap jujur, untuk mempertahankan kebenaran, berpikir, berpendapat dan menyatakan pendapat. Ini pula yang merupakan ciri berlangsungnya kehidupan demokratis, tidak seperti di beberapa negara tetangga kita. Mereka mengajukan klaim sebagai negara demokratis, namun dengan alasan keamanan internal, diberlakukan kekangan/hambatan-psikologis untuk tidak menyatakan pendapat secara bebas. Dengan kata lain, yang berlaku di tempat-tempat itu adalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi sesungguhnya. Kalau ditambahkan *embel-embel* kata lain pada istilah demokrasi, seperti demokrasi rakyat dan demokrasi Islam, maka pada akhirnya demokrasi itu sendiri akan mati dan tidak muncul ke permukaan.

*****

Kembali pada pertanyaan mahasiswa di atas, mengapa ada "ajaran Islam" yang ditolak penulis, dapat dijawab penulis tidak pernah menolak "ajaran Islam yang baku", seperti tauhid dan sebagainya. Namun, penulis hanya menyanggah pendapat yang oleh banyak orang dianggap sebagai "ajaran tetap" dalam agama Islam tersebut. Padahal, ajaran itu telah berubah melalui perubahan zaman, dengan menggunakan cara tertentu. Diantara cara tertentu itu, adalah penafsiran ulang (*reinterpretasi*) oleh kaum muslimin sendiri, atas sesuatu yang tadinya diterima sebagai kebenaran oleh mereka. "Kebenaran relatif" itu lalu berubah dengan adanya penafsiran ulang itu, oleh Islam sendiri sebagai agama terakhir dalam pandangan para pemeluknya.

Contoh yang dapat dikemukakan di sini, adalah penafsiran ulang atas ucapan Rasulullah Saw: "Maka Aku (akan) membanggakan kalian (di hadapan) umat-umat (lain) pada hari kiamat" (*fa innî mubâhin bikum al umam yauma al-qiyâmah*). Dalam penafsiran lama, kaum muslimin mengartikan kebanggaan beliau itu bertalian dengan jumlah (kuantitas) kaum muslimin, hingga merekapun berbanyak-banyak anak. Tafsiran ulang yang baru, yang didukung oleh kenyataan meluasnya program Keluarga Berencana (KB) di kalangan kaum muslimin, minimal di negeri ini, menunjuk pada arti lain dari apa yang dibanggakan itu: kebanggaan akan mutu (kualitas) kaum muslimin sendiri. Dengan demikian, Islam dapat berkembang sesuai dengan perubahan tempat dan waktu (*yashluhu li kulli zamânin wa makânin*).

Dengan demikian, apa yang tadinya dianggap sebagai "kebenaran" paling tidak, lalu dianggap oleh sebagaian kaum muslimin sendiri pada masa kini sebagai "kebenaran relatif" yang perlu diberi tafsiran baru. Contoh di atas merupakan "sebuah kenyataan empirik" yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Sebuah tafsir ulang lain yang dapat dikemukakan di sini, adalah melaksanakan sumpah setia ketika mereka berjanji; "orang-orang yang berpegang pada janji mereka, di kala menyampaikan pra-

setia" (*wa al-mûfûna bi 'ahdihim idzâ 'âahadû*)(QS al-Baqarah(2):176), sebuah ungkapan firman Allah yang tadinya dianggap janji secara umum saja. Ini berarti, tafsir ulang yang memberikan arti lain atas istilah tersebut, dengan pengertian baru "menjunjung tinggi profesionalisme". Bukankah janji tertinggi dari seseorang, disampaikan ketika ia mengucapkan sumpah/prasetia jabatan? Bukankah dengan demikian, berarti Islam sangat mengutamakan profesionalisme, dengan segala implikasinya?

*****

Jelaslah dari keterangan di atas, dengan tafsir ulang seperti itu, "kebenaran relatif" Islam dapat ditegakkan secara pasti. Dengan demikian, terdapat jalinan sangat halus antara keyakinan dan data empirik yang terdapat dalam diri seorang muslim. Hal ini telah terjadi dengan sendirinya, sebagai proses alami yang wajar, dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin. Ini dimungkinkan oleh kenyataan yang terdapat dalam sejarah kaum muslim sendiri, seperti yang kita ketahui dari bacaan selama ini. Di sinilah sangat terasa kegunaan sebuah adagium "perbedaan pendapat para pemimpin adalah rahmat bagi umat" (*ikhtilâf al-a'immah rahmatu al ummah*). Kalau kita pegang adagium ini, maka yang dilarang hanyalah perpecahan dan pertentangan saja di antara kita.

Ketentuan *ushûl fiqh* (teori hukum Islam) berbunyi; bahwa hukum agama (*qarâr al-hukmi*) terbagi dalam dua jenis; *qath'iyah al tsubût* (ketentuan berdasarkan sumber tertulis atau *dalil naqli*) dan *dhanniyah al-tsubût* (hukum tidak berdasarkan sumber tertulis atau *dalil aqli*). Dengan demikian, sepanjang dapat diterima oleh akal, maka sebuah hukum agama dapat berlaku berdasarkan pandangan akal dan selama tidak bertentangan dengan sumber-sumber tertulis al-Qurân dan al-Hadits. Pembedaan ini dilakukan dalam teori hukum Islam karena tidak semua hal lalu ada

sumber-sumber tertulisnya. Bagi kasus-kasus yang termasuk dalam kategori ini, maka dibuatlah jenis hukum yang tidak berdasarkan pada sumber-sumber tertulis. Termasuk dalam hal ini, fatwa Syekh Qardhawi, bahwa bunga bank yang tidak eksploitatif dan berguna bagi reproduksi barang (termasuk dalam ongkos produksi), tidaklah dapat dianggap riba.

Sekarang, masalahnya tinggal menentukan bila sebuah hukum agama berdasarkan sumber tertulis al-Qurân dan al-Hadits (*qath'iyah al-tsubût*), sedangkan keadaan membutuhkan penafsiran baru, lalu apakah yang harus diterapkan dalam hal seperti itu? Dalam hal ini, kita lalu menggunakan sebuah kaidah hukum Islam (*qaidah al-fiqh*), bahwa keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah larangan untuk dilaksanakan (*al-dharûratu tubîhu al mahdhûrât*). Hal ini, umpamanya saja, terlihat pada kasus negara yang melakukan ratifikasi deklarasi universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) —(*universal declaration of human rights*) yang ditetapkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, termasuk dalam HAM itu adalah masalah berpindah agama. Ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sebab menurut ketentuan orang yang berpindah agama Islam kepada agama lain, harus dianggap sebagai *apostacy* (murtad). Kalau ini dilaksanakan, maka lebih dari 25 juta jiwa penduduk Indonesia –yang berpindah dari agama Islam ke agama lain dalam lingkungan negara Republik Indonesia, dapat dijatuhi hukuman mati menurut hukum agama (*fiqh*). {}

Islam dan Kepemimpinan Wanita

Sejumlah pemimpin partai-partai politik Islam, beberapa tahun yang lalu, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita tidak tepat dalam pandangan agama. Dasar anggapan itu adalah ungkapan al-Qurân "lelaki lebih tegak atas wanita" (*al-rijâlu qawwâmûna 'alâ al-nisa*) (QS Al-Nisa(4):33), yang dapat diartikan menjadi dua macam. Pertama, lelaki bertanggung jawab fisik atas keselamatan wanita; dan kedua, lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Ternyata para pemimpin partai politik Islam di atas memilih pendapat kedua itu, terbukti dari ucapan mereka di muka umum. Anggapan tersebut, yang pada umumnya menjadi pendapat dunia Islam selama ini, dalam kenyataan justru menunjukkan sebaliknya.

Beberapa sumber tekstual (*'adillah naqliyah*) melanjutkan anggapan ini dengan ungkapan "wanita hanya mempunyai separuh akal lelaki", dan sumber-sumber sejenis. Bahkan sebuah kutipan dari kitab suci al-Qurân dipakai dalam hal ini, yaitu "bagian pria (dalam masalah warisan) adalah dua kali bagian wanita" (*li al dzakari mistlu hatzi al-untsaya'in*)(QS al-Nisa(4):10), padahal kutipan itu hanya mengenai masalah waris-mewaris saja. Karena itu, pandangan kedua ini, yang masih umum dipakai orang dalam dunia Islam, selalu menilai rendah wanita.

Dalam tulisan ini, penulis ingin meluruskan hal itu agar hak lelaki dan hak wanita menjadi semakin berimbang karena memang Islam menilai seperti itu. Firman Allah Swt dalam al-

Qurân. "Sesungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan'' (*innâ khalaqnâkum min dzakarin wa untsa*), (QS al-Hujurat (15): 13) mengisyaratkan persamaan seperti itu. Perbedaan pria dan wanita bersifat biologis, tidaklah bersifat institusional/kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam literatur Islam. Akibatnya, masyarakat pun menjadi terpengaruh, termasuk kaum wanitanya sendiri.

Sewaktu masih menjadi Ketua Umum PBNU, penulis pernah didatangi salah seorang ulama Pakistan, sewaktu Benazir Bhutto masih menjadi orang pertama dalam pemerintahan negeri tersebut. Ia meminta agar penulis membacakan surat Al-Fatihah bagi bangsa Pakistan, agar mereka terhindar dari malapetaka. Bukankah, katanya, Rasulullah Saw bersabda, "celakalah sebuah kaum yang dipimpin wanita?'' Bukankah dengan menjadi Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto justru melakukan hal itu?'' Penulis menjawab, bahwa dalam hal ini diperlukan penafsiran baru sesuai dengan perubahan yang terjadi? Bukankah Nabi Muhammad Saw menunjuk kepada kepemimpinan abad VII hingga VIII Masehi di Jazirah Arabia? Kepemimpinan suku atau kaum, waktu itu memang berbentuk perseorangan (*individual leadership*), sedangkan sekarang kepemimpinan negara justru dilembagakan?

Benazir Bhutto harus mengambil keputusan melalui sidang kabinet, dengan para menteri yang mayoritasnya pria. Dan, kabinet tidak boleh menyimpang dari kebijakan parlemen, yang mayoritas anggotanya adalah pria. Hingga, parlemen pun tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar, dengan penjagaan dan pengawalan dari Mahkamah Agung yang seluruhnya beranggotakan kaum pria. Anda benar, kata tamu tersebut, namun saya minta Anda tetap saja membaca surat Al-Fatihah untuk keselamatan bangsa Pakistan.

Apa yang digambarkan di atas menunjuk kepada suatu hal: sulitnya mengubah sebuah pandangan yang telah berabad-abad lamanya diikuti orang. Dalam hal ini, antara pandangan

agama Islam di mata orang-orang itu, dalam kenyataan berlawanan dengan apa yang dirumuskan oleh UUD. Seolah-olah terjadi perbenturan antara agama dan negara. Padahal, dalam kenyataan, ribuan anak-anak perempuan ulama muslimin justru menjadi sarjana S2 hingga S3, karena UUD memungkinkan hal itu. Bukankah persamaan hak antara pria dan wanita dijamin oleh UUD kita, termasuk dalam pendidikan?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Sumatra Barat, mengeluarkan peraturan daerah yang melarang warga masyarakat dari jenis wanita untuk keluar rumah tanpa mahram (suami atau sanak keluarga yang tidak boleh dikawininya), setelah pukul 09.00 malam. Bukankah ini jelas melanggar UUD, yang menyamakan kedudukan antara pria dan wanita di muka undang-undang? Karenanya, sidang kabinet yang dihadiri oleh penulis telah memutuskan tidak diperkenankan adanya peraturan daerah tersebut atau produk-produk lain hasil DPRD I atau DPRD II, yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar. Maka, dalam hal ini, mestinya Mahkamah Agung-lah yang memiliki wewenang untuk menyatakan apakah sebuah produk DPRD tersebut melanggar UUD atau tidak. Jika demikian, otomatis produk itu tidak berlaku lagi.

Dari uraian di atas jelaslah, memperjuangkan hak-hak wanita adalah pekerjaan yang masih berat di masa kini, hingga wajiblah kita bersikap sabar dan bertindak hati-hati dalam hal ini. Tetapi, keadaan ini pun, bukanlah hanya monopoli golongan Islam saja. Di Amerika Serikat (AS) yang dianggap memelihara hak-hak wanita dan pria secara berimbang menurut Undang-Undang Dasarnya, ternyata dalam praktik tidak semudah apa yang dianggap seperti semula. Belum pernah dalam sejarahnya ada presiden wanita, walaupun UUD-nya tidak pernah melarang akan hal itu. Di sini, ternyata terdapat kesenjangan besar antara teori dan praktik dalam sebuah masyarakat paling "maju" sekalipun. {}

ISLAM DAN DIALOG ANTAR AGAMA

Charles Torrey dalam disertasi doktor-nya di Universitas Heidelburg tahun 1880-an, mengemukakan bahwa al-Qurân mempunyai keistimewaan, berupa penggunaan istilah-istilah profesi untuk menyatakan keyakinan agama. Disebutkannya ayat; "barang siapa memberikan pinjaman yang baik pada Allah, maka akan diberi imbalan berlipat ganda" (*man yuridi al-Allâha qardlan hasanan fa yudhâ'ifahu*) (QS al:Baqarah(2): 245), yang berarti bukan sebuah transaksi kredit melainkan pelaksanaan amal kebajikan. Contoh lain, adalah; "barang siapa menghendaki panenan yang baik di akhirat, akan Ku-tambahi panenannya" (*man kâna yurîdhu hartsa al-âkhirati nazid lahu fî-hartsihi*) (QS al Syura(42):20) –yang lagi-lagi menggunakan kata panenan sebagai penunjuk kepada amal kebajikan/amal sholeh.

Di sini, Torrey juga menggunakan sebuah ayat lain untuk menunjuk kepada perbedaan antara Islam dan agama-agama lain, tanpa menolak klaim kebenaran agama-agama tersebut. "Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, maka amal kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi perdagangannya" (*man yabtaghi ghaira al-Islâma dînan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-âkhirati min al-khâsirîn*) (QS Ali Imran(3):85), ayat ini menunjuk perbedaan dalam keyakinan antara Islam dan agama-agama lain. Perbedaan

antara Islam dan agama lain, dalam ayat ini jelas menunjuk kepada masalah keyakinan, dengan tidak menolak kerjasama antar Islam dan berbagai agama lainnya.

Dengan demikian, perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu, tentunya akan dapat ditujukan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antar agama dalam kehidupan. Dengan kata lain, prinsip pemenuhan kebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti adagium *ushul fiqh*/teori legal hukum Islam; "sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula" (*ma lâ -yatimu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjibun*) tidak akan terlaksana, karena itu dialog antar agama juga menjadi kewajiban.

*****

Kitab suci al-Qurân juga menyatakan: "sesungguhnya telah Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal" (*innâ khalaqnâkum min dzakarin wa untsa wa ja'alnaakum syu'ûban wa qabâ'ila li ta'ârafû*) (QS al-Hujurat (49):13), menunjuk kepada perbedaan pandangan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan pandangan merupakan sebuah hal yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan (*tafarruq*).

Tentu saja, antara berbagai keyakinan tidak perlu dipersamakan secara total, karena masing-masing memiliki kepercayaan/ aqidah yang dianggap benar. Dalam hal ini, sama kedudukannya dengan penafsiran-penafsiran itu terhadap aqidah keyakinan masing-masing. Dalam Konsili Vatikan II yang dipimpin Paus Yohanes XXIII dari tahun 1962 hingga 1965, menyebutkan bahwa

para uskup yang menjadi peserta menghormati setiap upaya mencapai kebenaran, walaupun tetap yakin bahwa kebenaran abadi hanya ada dalam ajaran masing-masing agama, tidak perlu diperbandingkan atau dipertentangkan.

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa kerjasama antara berbagai sistem keyakinan itu sangat dimungkinkan yakni kerjasama menangani kehidupan masyarakat, karena masing-masing memiliki keharusan menciptakan kesejahteraan lahir (keadilan dan kemakmuran) dalam kehidupan bersama, walaupun bentuknya berbeda-beda. Di sinilah, nantinya, terbentuk persamaan antar agama, bukannya dalam ajaran/aqidah yang dianut. Karena ukuran capaian harus menggunakan bukti-bukti empirik, seperti tingkat penghasilan rata-rata warga masyarakat ataupun jumlah kepemilikan –misalnya, telpon atau kendaraan per 10.000 keluarga. Dengan demikian, ukuran rata-rata tingkat kepemilikan dapat dipersamakan oleh capaian-capaian tersebut. Sedangkan yang tidak, seperti ukuran keadilan, dapat diamati secara empirik pula dalam kehidupan sebuah sistem kemasyarakatan.

*****

Yang dikemukakan di atas adalah persamaan-persamaan antara berbagai agama. Lalu, bagaimana halnya dengan ayat al-Qurân, seperti; "dan orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan rela kepadamu, hingga engkau mengikuti kebenaran/aqidah mereka" (*wa lan tardhâ an-kal yahûdu wa la al-nashârâ hattâ tattabi'a millatahum*) (QS al-Baqarah (2):120). Kalau kita bersikap demikian, hal itu sebenarnya wajar-wajar saja, karena menyangkut penerimaan keyakinan/aqidah. Selama Nabi Muhamad saw masih berkeyakinan; "Tuhan adalah Allah dan beliau sendiri adalah utusan Allah Swt", selama itu pula orang-orang Yahudi dan Kristen tidak dapat menerima (berarti tidak rela kepada) keyakinan/aqidah tersebut. Sama halnya dengan sikap kaum

muslimin sendiri, selama orang Kristen yakin bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, maka selama itu pula kaum muslimin tidak akan rela kepada kedua agama tersebut.

Dalam arti, tidak menerima ajaran mereka, tetapi hal itu tidak menghalangi para pemeluk ketiga agama itu untuk bekerjasama dalam hal *muamalat*, yaitu memperbaiki nasib bersama dalam mencapai kesejahteraan materi. Mereka dapat bekerjasama untuk mengatur kesejahteraan materi tersebut dengan menggunakan ajaran masing-masing. {}

Umat Buddha dan Kesadaran Berbangsa

Tulisan ini merupakan sambutan yang disampaikan penulis atas datangnya Hari Raya Waisak 2547/2003. Semakin hari semakin nyata, bahwa peranan umat Buddha sebagai bagian dari bangsa Indonesia tampak semakin penting, terutama karena mereka banyak yang bergerak di bidang ekonomi dan dunia usaha. Dunia tersebut mengharuskan adanya orientasi yang jelas sebagai umat agar tidak terjadi kehilangan arah secara kolektif. Karena itulah, dalam jumlah penganut yang tidak terlalu besar, namun pengaruh umat Buddha itu sendiri tambah hari tampak semakin besar.

Jacob Oetama, pemimpin umum "*Kompas*" mengatakan masa depan bangsa kita ditentukan oleh kemampuan mempersatukan diri antara dua kelompok golongan yang berperan besar dalam hidup kita: kaum muslimin "*mainstream*" (mereka yang tidak mendukung terorisme serta tidak menghendaki negara agama di negeri kita) dan kaum pengusaha. Di pihak kaum pengusaha dengan demikian banyak sumber-sumber dan kemampuan teknis yang mereka miliki, siapa lagi yang dimaksud kalau bukan pengusaha Tionghoa, yang umumnya beragama Buddha atau pun Konghucu.

Orang-orang Tionghoa, yang di negeri asal dianggap sebagai perantau (*Hoa-Kiauw*), di negeri ini menggangap diri dan

diterima sebagai warga negara, dan memiliki hak-hak yang sama dengan para warga negara yang lain. Mengapa? Karena mereka lahir di negeri ini dan menjadi warga negara, sehingga sepatutnya mereka juga dikenal sebagai "penduduk asli" seperti yang lain-lain juga. Hanya karena peraturan kolonial yang tertulis sajalah mereka dianggap sebagai "orang Asing Timur" (*vremde oosterlingen*) yang hidup damai dengan penduduk Asli. Orang-orang seperti John Lie, yang turut angkat senjata memperjuangkan kemerdekaan kita, adalah bukti dari perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda. Yang sangat menyakitkan, mereka dianggap sebagai orang lain.

Tentu saja, menganggap mereka sebagai orang lain adalah kesalahan besar yang harus kita koreksi. Kalaupun ada ikatan dengan tanah leluhur, itu tidak lain hanyalah sesuatu yang bersifat kultural dan historis belaka. Sama dengan orang Minahasa dan orang Minangkabau menggunakan nama-nama barat, seperti Frederick Waworontu dan Emil Salim, yang tidak menjadikan mereka Barat.

Karena itulah, saya selalu melawan anggapan atau penyebutan umat Buddha yang sebagian besar dianut oleh suku Tionghoa di sini sebagai "warga keturunan". Mereka adalah orang Tionghoa sebagaimana halnya ada orang Papua, orang Aceh, orang Sunda dan sebagainya. Juga menjadi kerja kita untuk memberikan kerangka gerak yang memadai bagi golongan Buddha, yang merupakan salah sebuah asset (kekayaan) bangsa kita. Pengembangan asset ini haruslah dilakukan dengan kepala dingin, sebagai bagian dari penataan kehidupan nasional secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Kalau nilai-nilai yang diikuti golongan Islam, seperti santri, ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), orang-orang Katholik oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan umat Kristen Protestan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), orang-orang Konghucu oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), maka umat Buddha dalam

pandangan penulis mengikuti dan melaksanakan nilai-nilai agama tersebut sebagaimana dirumuskan oleh Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI). Bukannya oleh pihak lain atau perkumpulan orang awam manapun. Merekalah yang harus tunduk kepada perkumpulan para agamawan. Hal inilah yang harus kita sadari, baik sebagai aparat pemerintah maupun sebagai warga masyarakat. Selama hal ini belum terwujud dengan sempurna, maka kehidupan kita sebagai bangsa juga akan pincang. {}



Islam dan Idiosinkrasi Penguasa

Idiosinkrasi adalah sifat-sifat perorangan yang khusus ada pada seseorang, yang membuat ia menjadi lain dari orang kebanyakan. Dalam sejarah Islam, hal ini juga tampak secara jelas, walaupun ia juga ada di kalangan non-muslim. Kalau idiosinkrasi ada dalam diri penguasa muslim, maka ia akan dimaafkan, karena orang itu banyak jasanya dalam bidang-bidang lain untuk kepentingan bersama. Baik di masa kuno maupun di masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang, idiosinkrasi itu akan tetap ada dan akan dibiarkan selama tidak merugikan kepentingan orang banyak.

Seperti Sultan Agung Hanyakrakusuma, seorang penguasa yang dinilai berjasa sangat besar bagi kepentingan orang banyak. Ia berhasil mengabadikan dan menegakkan birokrasi pemerintahan yang berwatak agraris, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya dalam membangun sistem birokrasi agraris untuk mencapai kemajuan pertanian yang tidak pernah surut semasa hidupnya. Sebaliknya, salah satu kekurangannya adalah ketidakmampuannya dalam menggunakan kekuatan laut untuk kejayaan bangsa yang dipimpinnya. Karena, kekuatan laut dari berbagai kota pelabuhan dalam pemerintahan Mataram saat itu, merupakan saingan politik yang harus dihancurkan.

Salah satu idiosinkrasi yang dimiliki Sultan Agung Hanya krakusuma adalah kegemarannya menyiksa para oposan politik yang menentangnya. Terkenal sekali deskripsi bagaimana ia bercengkerama dengan para dayang di atas taman/gazebo di atas air, dan para tahanan politik dibiarkan berkumpul di atas tanah (seperti pulau kecil) yang ada di permukaan kolam. Dan, pada saat yang ditentukan, ia membiarkan para pengawal melepaskan beberapa buaya yang merayap ke "pulau" itu dan memakan para tawanan politik yang tak bersenjata. Anehnya, ia tampak menikmati bagaimana lawan-lawan politiknya menjerit ketakutan sebelum dimangsa buaya-buaya buas tersebut.

*****

Sultan Trenggono dari Demak, dalam abad sebelumnya, sangat tertarik dengan seorang wanita cantik, yang kebetulan menjadi istri muda Ki Pengging Sepuh, salah seorang panglimanya. Suatu ketika, Ki Pengging diperintahkan sang Sultan untuk menyerbu daerah-daerah non-muslim di Jawa Timur, dan akhirnya ia pun gugur di daerah Pasuruan (Segarapura, Kemantren Jero, kini terletak di Kecamatan Rejoso). Maka, seiring dengan kematian Ki Pengging Sepuh itu, segera setelah habis masa *iddah* si perempuan muda dan cantik itupun diambil Sultan Trenggono sebagai istri selir. Idiosinkrasi pemimpin Kesultanan Demak tersebut menunjukkan, bahwa motif pribadi dapat saja mendorong seorang penguasa untuk mengambil tindakan atas nama agama, dalam hal ini "peng-islaman daerah Pasuruan".

Drama seperti itu menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi akan membuat seorang penguasa pada akhirnya menjadi lalim dan mempersamakan kepentingan pribadi dengan kepentingan bangsa secara utuh. Hal ini juga mendera para pemimpin seperti Mao Zedong (RRT) dan Kim Il Sung (Korea Utara). Begitu lama mereka berkuasa, tanpa berani ada yang menentang secara terbuka, hingga memaksa orang banyak untuk

melawan dengan cara mereka sendiri.

Dengan demikian, masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana membatasi para pemegang kekuasaan, baik dalam arti waktu maupun wewenangnya. Tanpa ada kepastian dalam hal itu, maka demokrasi tidak akan pernah berdiri dalam negara yang bersangkutan. Demokrasi bukanlah sekedar aturan permainan kelembagaan yang berdasarkan formalitas belaka, melainkan menciptakan tradisi demokrasi yang benar-benar hidup di kalangan rakyat. Para penguasa yang demikian lama menguasai pemerintahan, seperti yang terjadi di sebagian negara, jelas-jelas tidak demokratis walaupun mereka melaksanakan aturan kelembagaan yang ada. Tanpa mengembangkan tradisi demokrasi dalam lembaga-lembaga yang bersangkutan, klaim sejumlah pemimpin bahwa di negara mereka sudah tercipta demokrasi, yaitu dengan adanya pemilihan umum yang teratur, jelas merupakan pelanggaran terhadap gagasan demokrasi itu sendiri.

*****

Hal itulah yang harus diingat ketika seorang penguasa menyatakan akan membangun demokrasi dalam konsep negara Islam. Pendapat tersebut mengabaikan dua hal di atas, yaitu adanya idiosinkrasi para penguasa di satu pihak, serta demokrasi sebagai formalitas saja di pihak lain. Keduanya merupakan sesuatu yang harus dihilangkan dalam konsep tersebut. Dengan kata lain, sebuah konsep tentang negara dalam Islam, tidak dapat hanya terkait dengan idealisme kekuasaan itu sendiri, melainkan juga terkait kepada mekanisme apa yang digunakan.

Kenyataan seperti itulah yang pada akhirnya memaksa Kongres Amerika Serikat (AS) untuk membatasi kepresidenan di negara itu hanya dalam masa dua *term* saja, pada paruh pertama abad yang lalu. Hal yang tadinya bersifat tradisi, yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat semenjak George

Washington, akhirnya dilanggar oleh Franklin D. Roosevelt di tahun 40-an abad lalu. Karena ia membuat dirinya terpilih kembali untuk keempat kalinya pada tahun 1944, yang berarti secara efektif kekuasaan berada di tangan pembantunya yaitu John Hopkins. Maka Kongres kemudian mengubah hal itu dalam undang-undang yang membatasi masa jabatan Presiden Amerika Serikat hanya untuk dua kali empat tahun saja.

Jelaslah dengan demikian, bahwa membuat konsep tentang sebuah negara demokratis bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan sebuah agama, seperti konsep negara dalam Islam. Ini belum lagi diingat, bahwa para pemilih senantiasa berkembang dalam pikiran dan perasaan —seperti yang terjadi di Republik Islam Iran saat ini. Dahulu para pemilih di sana mendukung para Ayatullah konservatif, sekarang justru mendukung para Ayatullah dan para pemimpin moderat, seperti Presiden Khatami. Kalau kecenderungan ini berlangsung terus, bukankah ini berarti akan terjadi tekanan oleh dan atas para anggota parlemen untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan demokrasi dalam menetapkan syarat-syarat pemilihan presiden? Ini belum lagi keharusan menjawab pertanyaan yang belum juga dilaksanakan oleh Parlemen Iran hingga saat ini, yaitu membiarkan orang-orang yang tidak beragama Islam -atau yang dianggap demikian oleh Parlemen Iran, dari tindakan mencalonkan diri sebagai presiden. Bukankah hal itu menunjukkan ketakutan bahwa orang-orang non-muslim akan dapat menjadi presiden, dan bukankah ketakutan seperti itu menunjukkan para legislator Iran membatasi demokrasi itu sendiri? {}

Ulil dengan Liberalismenya

Ulil Abshar Abdalla adalah seorang muda Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari lingkungan "orang santri". Istrinya pun dari kalangan santri, yaitu putri budayawan muslim Mustofa Bisri, sehingga kredibilitasnya sebagai seorang santri tidak pernah dipertanyakan orang. Mungkin juga cara hidupnya masih bersifat santri. Tetapi dua hal yang membedakan Ulil dari orang-orang pesantren lainya, yaitu ia bukan lulusan pesantren, dan profesinya bukanlah profesi lingkungan pesantren. Rupanya kedua hal itulah yang akhirnya membuat ia dimaki-maki sebagai seorang yang "menghina" Islam, sementara oleh banyak kalangan lain ia dianggap "abangan". Dan di lingkungan NU, cukup banyak yang mempertanyakan jalan pikirannya yang memang dianggap "aneh" bagi kalangan santri, baik dari pesantren maupun bukan.

Mengapa demikian? Karena ia berani mengemukakan liberalisme Islam, sebuah pandangan yang sama sekali baru dan memiliki sejumlah implikasi sangat jauh. Salah satu implikasinya, adalah anggapan bahwa Ulil akan mempertahankan "kemerdekaan" berpikir seorang santri dengan demikian bebasnya, sehingga meruntuhkan asas-asas keyakinannya sendiri akan "kebenaran" Islam. Padahal itu telah menjadi keyakinan yang baku dalam diri setiap orang beragama tersebut. Itulah sebabnya, mengapa demikian besar reaksi orang terhadap pemikirannya ini.

Reaksi seperti ini pernah terjadi ketika penulis mengemukakan bahwa ucapan "*Assalâmu'alaikum*" dapat diganti dengan ucapan lain. Mereka menganggap penulis lah yang memutuskan hal itu. Segera penulis dimaki-maki oleh mereka yang tidak mengerti maksud penulis sebenarnya. Sehingga KH. Syukron Makmun dari jalan Tulodong di Kebayoran Baru (Jakarta Selatan) mengemukakan, bahwa penulis ingin merubah cara orang bershalat. Penulis, demikian kata kyai yang dahulu kondang itu, menghendaki orang menutup shalat dengan ucapan "selamat pagi" dan "selamat sore". Padahal penulis tahu definisi shalat adalah sesuatu yang dimulai dengan *"takbiratul al-ihram"* dan disudahi dengan ucapan *"salam"*. Jadi, menurut paham Mazhab al-Syafi'i, penulis tidak akan semaunya sendiri menghilangkan salam sebagai peribadatan, melainkan hanya mengemukakan perubahan salam sebagai ungkapan, baik ketika orang bertemu dengan seorang muslim yang lain maupun dengan non muslim. Di lingkungan Universitas Al-Azhar di Kairo misalnya, para syaikh/kyai yang menjadi dosen juga sering merubah "tanda perkenalan" tersebut, umpamanya saja dengan ungkapan "selamat pagi yang cerah" (*shabah al-nur*). Kurangnya pengetahuan kyai kita itu, mengakibatkan beliau berburuk sangka kepada penulis. Dan tentu reaksi terhadap pandangan Ulil sekarang, adalah akibat dari kekurangan pengetahuan itu.

*****

Tidak heranlah jika reaksi orang menjadi sangat besar terhadap tokoh muda kita ini. Yang terpenting, penulis ingin menekankan dalam tulisan ini, bahwa Ulil Abshar Abdalla adalah seorang santri yang berpendapat, bahwa kemerdekaan berpikir adalah sebuah keniscayaan dalam Islam. Tentu saja ia percaya akan batas-batas kemerdekaan itu, karena bagaimanapun tidak ada yang sempurna kecuali kehadirat Tuhan. Selama ia percaya ayat dalam kitab suci al-Qur'ân: "dan tak ada yang abadi

kecuali kehadirat Tuhan" (*walâ yabqâ illâ wajhuh*), dan yakin akan kebenaran kalimat Tauhid, maka ia adalah seorang Muslim. Orang lain boleh berpendapat apa saja, tetapi tidak dapat mengubah kenyataan ini. Seorang muslim yang menyatakan bahwa Ulil anti muslim, akan terkena sabda Nabi Muhammad Saw: "Barang siapa yang mengkafirkan saudara yang beragam Islam, justru ialah yang kafir" (*man kaffara akhâhu musliman fahuwa kâfirun*).

Ulil dalam hal ini bertindak seperti Ibnu Rusyd (Averros), yang membela habis-habisan kemerdekaan berpikir dalam Islam. Sebagai akibat Averros juga di "kafir" kan orang, tentu saja oleh mereka yang berpikiran sempit dan takut akan perubahan-perubahan. Dalam hal ini, memang spektrum antara pengikut paham sumber tertulis "*ahl al-naql*", dan penganut paham serba akal "*ahl al-aqli*" (kaum rasionalisme) dalam Islam memang sangat lebar. Kedua pendekatan ini pun, sekarang sedang ditantang oleh paham yang menerima "sumber intuisi" *(ahl al-dzauq)*, seperti dikemukakan oleh al-Jabiri dari Universitas Yar'muk di Yordania. Sumber ketiga ini, diusung oleh al-Imam al-Ghazali dalam *magnum opus* (karya besar), "*Ihyâ'ulûm al-dîn*", yang saat ini masih diajarkan di pondok-pondok pesantren dan perguruan-perguruan tinggi di seantero dunia Islam.

Jelaslah, dengan demikian "kesalahan" Ulil adalah karena ia bersikap "menentang" anggapan salah yang sudah tertanam kuat di benak kaum muslim. Bahwa kitab suci al-Qur'ân menyatakan "Telah ku sempurnakan bagi kalian agama kalian hari ini" (*alyauma akmaltu lakum dînakum*)(QS al-Maidah(5):4) dan "Masuklah ke dalam Islam/ kedamaian secara menyeluruh" (*udkhulû fî al-silmi kâffah*)(QS al-Baqarah(2):128), maka seolah-olah jalan telah tertutup untuk berpikir bebas. Padahal, yang dimaksudkan kedua ayat tersebut adalah terwujudnya prinsip-prinsip kebenaran dalam agama Islam, bukannya perincian tentang kebenaran dalam Islam. Ulil mengetahui hal itu, dan karena pengetahuannya tersebut ia berani menumbuhkan dan

mengembangkan liberalisme (keterbukaan) dalam keyakinan agama yang diperlukannya. Dan orang-orang lain itu marah kepadanya, karena mereka tidak menguasai penafsiran istilah tersebut. Berpulang kepada kita jualah untuk menilai tindakan Ulil Abshar Abdalla, yang mengembangkan paham liberalisme dalam Islam.

Lalu mengapa ia melakukan hal itu? Apakah ia tidak mengetahui kemungkinan akan timbulnya reaksi seperti itu? Tentu saja ia mengetahui kemungkinan itu, karena sebagai seorang santri Ulil tentu paham "kebebasan" yang dinilai buruk itu. Lalu, mengapa ia tetap melakukan kerja menyebarkan paham tersebut? Tentu karena ia "terganggu" oleh kenyataan akan lebarnya spektrum di atas. Karena ia khawatir pendapat "keras" akan mewarnai jalan pikiran kaum muslim pada umumnya. Mungkin juga, ia ingin membuat para "muslim pinggiran" merasa di rumah mereka sendiri (*at home*) dengan pemahaman mereka. Kedua alasan itu baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan, mungkin saja menjadi motif yang diambil Ulil Abshar Abdalla tersebut.

Kembali berpulang kepada kita semua, untuk memahami Ulil dari sudut ini atau tidak. Jika dibenarkan, tentu saja kita akan "membiarkan" Ulil mengemukakan gagasan-gagasannya di masa depan. Disadari, hanya dengan cara "menemukan" pemikiran seperti itu, barulah Islam dapat berhadapan dengan tantangan sekularisme. Kalau demikian reaksi kita, tentu saja kita masih mengharapkan Ulil mau melahirkan pendapat-pendapat terbuka dalam media khalayak. Bukankah para ulama di masa lampau cukup bijaksana untuk memperkenalkan pebedaan-perbedaan pemikiran seperti itu? Adagium seperti "perbedaan pandangan di kalangan para pemimpin adalah rahmat bagi umat " (*ikhtilâf al-a'immah rahmah al-ummah*).

Jika kita tidak menerima sikap untuk membiarkan Ulil "berpikir" dalam media khalayak, maka kita dihadapkan kepada dua pilihan yaitu "larangan terbatas" untuk berpikir bebas, atau sama sekali menutup diri terhadap kontaminasi

(penularan) dari proses modernisasi. Sikap pertama, hanya akan melambatkan pemikiran demi pemikiran dari orang-orang seperti Ulil. Padahal pemikiran-pemikiran ini, harus dimengerti oleh mereka yang dianggap sebagai "orang luar". Pendapat kedua, berarti kita harus menutup diri, yang pada puncaknya dapat berwujud pada radikalisme yang bersandar pada tindak kekerasan. Dari pandangan inilah lahirnya terorisme yang sekarang "menghantui" dunia Islam. Kalau kita tidak ingin menjadi radikal, sudah tentu kita harus dapat mengendalikan kecurigaan kita atas proses modernisasi, yang untuk sebagian berakibat kepada munculnya paham "serba kekerasan", yang saat ini sedang menghingapi dunia Islam. Pilihan yang kelihatannya mudah tetapi sulit di lakukan, bukan? {}

HARUSKAH INUL DIBERANGUS?

Semula penulis hanya tertawa saja mendengar nama Inul, wanita muda yang menjadi anggota Fatayat Nahdlatul 'Ulama di anak cabang (Ancab) Japanan, Pasuruan, memang terdengar lucu. Antara lain karena istilah yang digunakan orang atas dirinya "*ngebor*". Karena itulah penulis pernah mengatakan di muka umum bahwa salah satu jalan beraspal di kota Pasuruan berlubang-lubang karena sering di "bor" Inul. Bahkan sebelumnya, di muka ratusan ribu orang saat berceramah di Tuban pada upacara peringatan kewafatan (haul) Sunan Bonang, di tengah-tengah hujan lebat penulis mengucapkan selamat kepada hadirin atas datangnya Lebaran Haji tahun ini, dengan ucapan "Selamat ber Inul Adha".

Gurauan itu berubah menjadi keheranan ketika Rois Syuriah NU cabang Pasuruan, melarang para warganya agar tidak menyaksikan pagelaran Inul. Hal itu, diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan keputusan yang sama. Penulis heran, karena selama ini apa yang dilakukan Inul, masih jauh di bawah "erotika" berbagai goyangan orang lain. Mengapakah nampaknya kita sibuk dengan urusan Inul? Dan pura-pura tidak tahu atas berbagai pelanggaran hak azasi manusia di negeri ini, Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang semakin menghebat, bahkan pelanggaran konstitusi lainnya, dibiarkan saja oleh lembaga

keagamaan itu. Sedangkan sikap sebaliknya diarahkan pada Inul dengan pagelarannya, yang tidak melanggar undang-undang apapun di negeri ini.

Keheranan penulis itu berubah menjadi sesuatu yang lain, ketika sang teman sangat baik, H. Rhoma Irama melarang Inul untuk tidak "menggelar hal-hal yang merusak moral bangsa". Dari ucapan-ucapannya melalui berbagai media kepada Inul, penulis mendapati sebuah sikap Bang Rhoma Irama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, yaitu melarang Inul melakukan pagelaran. Betapa jauhnya sikap Bang Rhoma dengan penulis, sekalipun perasaan penulis hampir bersamaan dengan perasaan "Bang Haji". Walaupun mengikuti perasaan, namun kita tidak boleh melanggar undang-undang, apalagi kalau memang ternyata tidak ada undang-undang yang dilanggar Inul. Dan yang seharusnya menyatakan pelanggaran inipun bukanlah kita sendiri sebagai warga masyarakat melainkan Mahkamah Agung.

*****

Sebagai orang yang menghargai alasan berdirinya sebuah bangsa (*raisson d'etre du nation*), seperti ucapan Ernest Renan, seorang intelektual Prancis yang dikutip Bung Karno, ke-bhinekaan lah yang justru menjadi pengikat kita dalam membentuk bangsa Indonesia. Justru kebhinekaan atau pluralitas bangsa kita yang sangat tinggi itu merupakan kekayaan yang menghimpun, hingga menjadi sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi UUD 45 dan peraturan lah yang menjadi panutan kita, seperti diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bukanya pemimpin manapun dalam kehidupan bangsa kita.

Ketika Mr. AA Maramis mengajukan keberataan atas Piagam Jakarta, karena akan mengakibatkan dua kelas warga negara di Indonesia (muslim dan non-muslim), maka para pendiri negara ini setuju seluruhnya untuk mengeluarkan piagam

tersebut dari pembukaan UUD 45. Berarti kita bukan lagi negara agama –negara Islam-, dan dengan demikian penafsiran Mahkamah Agung atas UUD 45 menjadi satu-satunya penafsiran legal atas hukum di negeri ini.

Kalau pun ada warga negara tidak menyetujui suatu tindakan, maka tindakan yang diperbolehkan hanyalah mengajak kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal itu (*amar ma'rûf*). Dengan kata lain melalui "kesadaran masyarakat" hal-hal seperti itu dapat dicegah bukannya melalui tindakan langsung perorangan. Sama halnya ketika ada penilaian, apakah yang dilakukan para mahasiswa dengan berdemo di kediaman (presiden) Megawati di jalan Teuku Umar, dapat dianggap "sebagai gangguan atas ketertiban umum"? Penulis segera menyatakan reaksinya, bukannya Polri (termasuk Kapolri) yang berhak mengemukakan penilaian seperti itu, melainkan Mahkamah Agung. Dengan sistem hukum yang dijalankan seperti itu, barulah seluruh warga negara bebas dari ketakutan terhadap aparat negara mereka sendiri. Kasus lainnya yaitu saat Kapolda Jateng menyatakan akan membubarkan Pesantren Al-Mukmin di Ngruki Solo, segera penulis membuat pernyataan menolak hal itu. Karena negara tidak boleh campur tangan dalam masalah ajaran agama apapun, termasuk pembubaran sebuah pondok pesantren. Biarkan masyarakat saja yang menilai hal itu, sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

*****

Karena keyakinan itulah penulis menolak tindakan apapun atas pagelaran Inul. Tentu saja penulis menghimbau secara pribadi kepada Inul agar menghilangkan gerakan-gerakan "erotis" dalam pagelaran tersebut, kalau memang sudah melewati batas moralitas. Menurut cerita teman-teman penulis sendiri, yang menyaksikan pagelaran tersebut, gerakan-gerakan "ngebor" Inul sendiri sudah cukup untuk "mengikat" penonton. Memang garis batas antara hal-hal erotis dan moralitas sangatlah samar, tetapi

justru kita sendirilah yang harus pandai-pandai menjaga garis batas itu secara "suka-rela", karena reaksi masyarakat seperti apa yang dilakukan Bang Haji Rhoma Irama merupakan sirine (tanda peringatan) yang harus diperhatikan.

Sikap tidak memperdulikan "peringatan moral" dari masyarakat, apabila diabaikan akan menyulut reaksi-reaksi dalam bentuk yang lain. Tentu saja kita tidak ingin hal itu terjadi, karenanya kita harus bersikap hati-hati tanpa melanggar ketentuan-ketentuan atau undang-undang. Namun begitu banyak KKN dan pelanggaran hukum yang dilakukan tanpa ada sanksi apapun, sehingga masyarakat tidak lagi percaya kepada sistem politik kita dewasa ini

Sebuah sikap dewasa yang diterima masyarakat adalah kejujuran. Karenanya, kejujuran Inul untuk mengatakan ia melakukan pagelaran "ngebor" hanya untuk mencari makan tanpa embel-embel bohong –seperti *'sok'* untuk memajukan seni dan sebagainya-, merupakan hal yang menyegarkan. Namun kepercayaan masyarakat yang telah terpelihara itu, harus disertai dengan menjaga agar batas-batas halus antara yang diperkenankan dan yang tidak- hendaklah jangan dilanggar.

Dengan menyatakan hal tadi, penulis ingin bersikap jujur, baik terhadap Inul maupun terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Terlebih jelas lagi, penulis ingin bersikap jujur kepada masyarakat. Demikian pula ketika ketua panitia mukernas partai politik yang diikuti penulis menyatakan akan mengundang Inul dalam acara pembukaan forum tersebut, namun tanpa memintanya melakukan pagelaran. Segera penulis menyetujui gagasan tersebut, karena bukankah ia selebriti? Seperti selebriti lainnya yang diundang. Karena itu adalah tanggung jawab panitia, maka penulis tidak ikut campur tangan. {}

INUL, RHOMA DAN SAYA

Pada awalnya kasus Inul lepas dari perhatian penulis, namun kemudian Rhoma Irama, -yang oleh penulis biasa dipanggil "Bang Haji"- menurut berita meminta kepada beberapa stasiun televisi dan beberapa media lain untuk tidak menyiarkan/menayangkan Inul melakukan "pemboran". Penulis tidak tahu efektifitas tindakan Bang Haji itu. Kemudian Sastro Ngatawi pada suatu hari meminta penulis bertemu Inul, dalam sebuah acara makan siang di Hotel Grand Melia di kawasan Kuningan, Jakarta. Penulis menyetujui pertemuan itu, dalam acara itu Inul menyampaikan beberapa hal. Salah satunya yang memang sudah diketahui, adalah kenyataan bahwa memang berat "pukulan" yang dilontarkan Bang Haji atas kegiatan pagelaran seni Inul tersebut. Namun begitu penulis turut menyikapi masalah ini, banyak pihak (terutama kaum perempuan) yang semula diam saja, lalu bergerak menyuarakan pendapat mereka yang umumnya menyalahkan Bang Haji, bahkan ada yang mengancam akan mengajukan somasi kepada Bang Haji ke Pengadilan Negeri.

Tentu saja, hal ini dirasakan penulis sebagai sesuatu yang kontraproduktif, karena bagaimanapun Bang Haji adalah seorang aktivis yang berjuang untuk kebesaran Islam dan kejayaan kaum muslimin. Sikapnya ditentukan oleh cara perjuangannya itu.

Dalam pandangan penulis, Bang Haji melakukan perjuangan dengan caranya sendiri untuk menjaga moralitas sesama muslim, seperti yang dirumuskan *fiqh* / hukum Islam, sebagai *amar ma'rûf nahi munkar*. Kitab suci Al-Qur'an menyatakanya: "Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di muka bumi, karena kalian mewajibkan apa yang diperintah agama dan mencegah apa yang dilarang agama" (*kuntum khaira ummatin ukhrijat li al-nâs ta'murûna bi al-ma'rûf wa tanhauna an' al-munkar*) (QS Ali Imran (3): 110). Dengan demikian apa yang diperbuat Bang Haji sepenuhnya benar, namun caranya dengan mengeluarkan larangan pada Inul itu, tidak dapat dibenarkan oleh konstitusi.

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) kita, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan yang menentukan hal itu bukanlah perorangan warga masyarakat, melainkan hanya Mahkamah Agung. Dengan kata lain, Bang Haji melakukan pelanggaran konstitusi walaupun demi menjaga moral dan akhlak kaum muslimin dari kerusakan. Karena berusaha menjaga prosedur seperti yang digariskan dalam UUD 45, maka penulis melakukan tindakan dengan berpendapat, "Bang Haji secara konstitusional tidak berhak melakukan pelarangan terhadap Inul karena 'pengeboran' nya ".

*****

Tindakan mempertahankan konstitusi itu dilakukan penulis, karena UUD kita memang sangat sering dilanggar, termasuk oleh pemerintah. Kalau pelanggaran demi pelanggaran oleh siapapun di negeri ini dibiarkan, maka tentu kita tidak akan dapat menegakkan demokrasi. Karena dasar dari demokrasi adalah tegaknya kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Sedangkan tanpa kedaulatan hukum itu tidak akan ada demokrasi di negeri ini. Karena peduli terhadap penegakkan demokrasi di negeri ini, maka

dengan sendirinya penulis harus menegakkan kedaulatan hukum. Dan ini hanya akan dapat tercapai apabila konstitusi juga dihormati dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Itulah sebabnya, mengapa penulis "berani" menentang tindakan Bang Haji itu, walaupun menyetujui maksud Bang Haji menjaga moralitas bangsa akibat dari pagelaran-pegelaran seni yang melanggar norma. Jika Bang Haji melihat bahaya bagi kaum muslimin, penulis bahkan memperluasnya bagi seluruh anak bangsa. Karena itulah, penulis sepakat dengan Bang Haji mengenai pentingnya arti menjaga moralitas masyarakat, tetapi dengan tidak melarang pagelaran Inul. Sikap yang dikeluarkan Bang Haji sebenarnya harus melalui himbauan kepada masyarakat, dengan tidak melarang lembaga-lembaga umum seperti stasiun televisi atau media massa. Jadi antara esensi dan prosedur harus diusahakan bersamaan.

Contoh klasik ini memperlihatkan kepada kita betapa sulitnya menjaga kedaulatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak berarti penulis sepenuhnya bertentangan dengan Bang Haji, karena memiliki persamaan esensi, yaitu pentingnya menjaga moralitas bangsa. Tentu saja, banyak orang yang menyetujui langkah "jalan pintas" yang dilakukan Bang Haji itu. Tetapi dalam jangka panjang hal itu justru menghancurkan kedaulatan hukum, dengan demikian demokrasi tidak akan tegak di negeri kita. Mengapa terjadi "pertentangan" seperti ini? Karena ada kerancuan soal pemilik kedaulatan hukum tertinggi dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara.

*****

Mengapakah penulis melakukan tindakan tegas seperti itu? Jawabnya sederhana saja, yaitu pengalaman pribadi penulis atas hilangnya kedaulatan hukum. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 21 Juli 2001, para ketua umum partai politik yang berkuasa, dengan dibantu beberapa pihak, di rumah Megawati

Soekarnoputri di bilangan Kebagusan (Pasar Minggu, Jakarta) telah memutuskan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Tindakan itu diambil guna memungkinkan menilai langkah-langkah penulis dalam kasus Brunei dan Bulog. Kenyataannya, dalam kedua kasus itu, tidak terdapat bukti hukum untuk menyalahkan penulis. Karena itu penyelesaiannya lalu mereka larikan ke dalam "penyelesaian politis". Inilah kerancuan kalau kita tidak setia kepada konstitusi.

Penulis tidak ingin hal itu terjadi kembali, apalagi jika penyimpangan UUD 45 itu dilakukan oleh orang yang sangat dihormati seperti Bang Haji. Karena itu lah, penulis rela dimarahi dan ditentang oleh siapapun termasuk sejumlah ulama NU (Nahdlatul 'Ulama) sendiri. Dengan kesadaran penuh penulis bertemu dengan Bang Haji, walau tanpa ada kesesuaian dalam langkah-langkah yang diambil untuk menjaga moralitas bangsa. Karena penulis tetap berkesimpulan prosedur dan esensi (proses dan tujuan), selamanya harus ada kesesuaian. Hanya dengan cara demikianlah kedaulatan hukum dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selama ada seorang warga negara dalam kedudukan yang sama seperti penulis, mengambil tindakan untuk mempertahankan supremasi hukum di negeri kita, selama itu pula masih ada harapan bagi demokrasi untuk dapat ditegakkan di negeri kita.

Hal itu hanya dapat dilakukan, apabila kita tidak memisahkan konstitusi (kedaulatan hukum) dari prosedur penegakkan hukum itu sendiri. Kerangka itu pula yang mendasari penulis menentang divestasi Indosat dan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar & Minyak) juga TDL (Tarif Dasar Listrik) tanpa ada kenaikan pendapatan masyarakat. Karena dalam UUD 45 disebutkan negara melaksanakan hajat hidup orang banyak. Sedang dalam satelit milik Indosat terkandung informasi intelejen mengenai negara kita. Berarti keselamatan kita sebagai bangsa – dalam hal ini informasi intelejen dalam satelit Indosat- tidak boleh diserahkan kepada orang lain, karena ia merupakan hajat

hidup orang banyak. Keputusan tentang hal ini harus dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Pemerintah tidak dapat mengambil langkah apapun sebelum MA mengeluarkan keputusan membolehkannya. Begitu juga dengan kenaikan harga BBM dan TDL. Kedengarannya mudah menegakkan konstitusi, tetapi sulit dalam pelaksanaan bukan? {}



Aceh, Kekerasan dan Rasa Kebangsaan

Dalam berbagai pernyataan, sejumlah pejabat pemerintah pekan lalu menyatakan, sikap pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menunjukkan tidak mau berunding dengan RI. Dengan demikian GAM harus dianggap sebagai musuh bersenjata dan harus diserang. Kapolri bahkan menyatakan, Polri akan menambah personil di kawasan itu guna menghadapi setiap kemungkinan. Bentuk-bentuk lain tindakan fisik yang akan dilakukan terhadap GAM disuarakan secara bergantian, umumnya oleh para pejabat tinggi kita. Ini merupakan pertanda ketidaksabaran mereka untuk berunding dan akan kembalinya penyelesaian konflik di Aceh ke arena perjuangan bersenjata melawan GAM. Apakah konsekuensi dari pandangan tersebut? Jelas tidak hanya menyangkut pemerintah saja, melainkan seluruh bangsa.

Kalau kita tidak berunding dengan GAM, sudah tentu konsekuensinya adalah kembali bertempur melawan mereka. Ini berarti memaksa kelompok-kelompok GAM yang moderat untuk bergabung dengan mereka yang ekstrim (bergaris keras). Artinya, rakyat Aceh akan menyaksikan kembali berbagai tindak kekerasan yang mau tidak mau akan mengorbankan nyawa banyak orang yang tidak bersalah, seperti kembalinya Daerah Operasi Militer (DOM) di Tanah Rencong. Kalau DOM I saja sudah

mengorbankan lebih dari 9.900 nyawa yang tidak bersalah, kemungkinan besar hal seperti itu akan terulang kembali. Dalam keadaan demikian, salahkah jika rakyat kawasan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) lalu beranggapan apa gunanya berada di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI)?

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa dua hal akan menjadi akibat dari ucapan-ucapan para pejabat pemerintah kita mengenai Aceh. Pertama, membuat kelompok-kelompok akomodatif di kalangan GAM tidak dapat bersikap lain kecuali mengikuti kebijakan keras dari kelompok-kelompok ekstrim di dalam GAM sendiri. Kedua, jika hal itu terjadi, akan ada akibat politis yang harus kita hindari yaitu memisahnya NAD dari NKRI. Ini tentu bukan kehendak kita, karena pada pasca perang kemerdekaan saja, para pemimpin berbagai gerakan Islam menyetujui dihapusnya Piagam Jakarta, dari UUD 1945 demi menjaga kelangsungan negara dan kesatuan bangsa kita. Relakah kita jika keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara yang dihasilkan tanggal 17 Agustus 1945 tercabik-cabik, karena adanya kebijakan kita yang selalu gegabah dalam masalah NAD?

Tentu saja kita tidak hanya ingin hal itu terjadi, apalagi hanya karena ucapan-ucapan tidak berarti dari para pejabat pemerintah sendiri. Ribuan warga telah memberikan nyawa dan harta benda mereka, masih banyak para pejuang yang menanggung cacat sebagai akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, sebagai sebuah entitas negara dan bangsa. Tentu saja kita menjadi tidak akan rela adanya berbagai tuntutan separatisme seperti itu. Karenanya, melalui tulisan ini, penulis mengajukan sanggahan terhadap ucapan-ucapan seperti itu, yang mengganggu keselamatan dan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara.

Siapa pun yang mengeluarkan, dari rakyat jelata di tingkat yang paling rendah hingga pejabat pemerintah pusat, semua harus berhati-hati dalam menanggapi langkah-langkah yang diambil oleh kelompok-kelompok ekstrim di lingkungan GAM

itu sendiri. Tidak semua hal dapat dipecahkan melalui langkah-langkah yang gegabah dan terburu-buru. Karena itu diperlukan daya tahan sangat besar untuk berunding dalam jangka panjang, guna menyelamatkan teritorial negara kita. Ini yang penulis lakukan semasa menjadi Presiden dengan berpergian ke sana ke mari ke luar negeri, menjaga agar dunia internasional mengakui keutuhan teritorial kita. Tidak rela rasanya jika langkah penulis itu dianggap sebagai lelucon saja, dan kemudian saat ini keutuhan teritorial itu terganggu karena ucapan-ucapan sangat negatif dari dalam negeri sendiri.

*****

Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan ucapan-ucapan di atas, jelas tidak mengikuti perintah agama untuk bersabar dan memaafkan, dari apa yang kita anggap sebagai kesalahan-kesalahan mereka. Apalah artinya mengeluarkan biaya sangat besar dalam RAPBN untuk menerjemahkan kitab suci al-Qurân dalam bahasa nasional kita, kalau kemudian para pejabat pemerintah kita sendiri tidak mau memahaminya? Kearifan sikap justru sangat diperlukan, dan hanya didapat kalau kita sendiri mau mengerti dan mengambil pelajaran, antara lain dari kitab suci kita sendiri.

Puluhan ayat kitab suci al-Qurân meminta kaum muslimin untuk bersikap sabar dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang paling sederhana adalah firman Allah: "Bersabarlah dalam menghadapi apa yang menjadi musibah bagi kalian" (*wa' ashbiru 'alâ mâ ashâbak*)(QS Luqman(31):17), dan ungkapan "kesabaran itu indah" (*shabrun jamîl*)(QS al-Ma'ârij(70):5), menunjukkan kepada kita betapa kuatnya kedudukan sikap bersabar itu dalam pandangan Islam. Terkadang orang kehilangan kesabaran, dan menjadi teroris seperti orang yang meledakkan bom di Bali.

Karenanya kita himbau sekali lagi bagi orang-orang yang mengemukakan "jalan kekerasan" di atas. Dalam saat-saat

serba sulit seperti sekarang ini, tentu mudah bagi kita untuk menjadi marah. Tetapi bukankah justru sikap mudah marah itu yang dikehendaki golongan ekstrim di negeri kita, dari mana pun ia berasal. Kedewasaan sikap kita justru harus ditunjukkan di saat-saat seperti ini. Dengan sendirinya ucapan-ucapan yang menunjukkan hilangnya kesabaran harus dihindari. {}



Ras dan Diskriminasi di Negara Ini

Dalam perjalanan ke gedung TVRI saat subuh awal Februari 2003, penulis mendengar siaran sebuah radio swasta Jakarta yang menyiarkan dialog tentang masalah ras dan diskriminasi. Karena format siarannya dialog interaktif, maka dapat dimengerti jika para pendengar melalui telepon mengemukakan pendapat dan pertanyaan berbeda-beda mengenai kedua hal itu. Ada yang menunjuk kepada keterangan etnografis, yang menyatakan orang-orang di Asia Tenggara, Jepang, Korea, Tiongkok, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan mempunyai penduduk asli dari ras Mongol (mongoloid). Karena itu narasumber pada dialog itu, menolak perbedaan antara kaum asli dan kaum turunan di Indonesia. Menurutnya kita semua berasal dari satu turunan dan tidak ada bedanya satu dari yang lain. Maka pembagian kelompok asli dan keturunan di negeri kita tidak dapat diterima dari sudut pemikirannya.

Pendengar lain juga memiliki pandangan yang sama, ada yang melihat dari segi sejarah atau historis, bahwa orang yang mempunyai asal-usul sangat berbeda secara bersama-sama mendirikan negara ini, dengan demikian dari masa itulah harus dihitung titik tolak eksistensi kita sebagai bangsa. Menurut pendapat ini, kalau menggunakan ukuran tersebut kita tidak akan dapat membeda-bedakan warga negara Indonesia yang demikian besar jumlahnya. Dengan kata lain, pendapat ini juga menolak pembedaan para warga negara kita menjadi asli dan keturunan, karena hal itu tidak berasal dari kenyataan historis tentang pembentukan bangsa ini. Menurut pendapat ini,

perbedaan seperti itu terlalu dipaksakan dan tidak sesuai dengan kenyataan empirik, ini berarti penolakan atas teori perbedaan tersebut.

Seorang pendengar, bahkan menolak bahwa ada diskriminasi golongan di negeri kita. Yang ada adalah diskriminasi perorangan atau diskriminasi oknum yang terjadi pada warga dengan ras yang berbeda. Penulis bertanya-tanya akan hal itu, bagaimana kita menjelaskan adanya semacam kuota yang terjadi di negeri kita, seperti orang keturunan Tionghoa hanya boleh mengisi 15% kursi mahasiswa baru di sebuah Perguruan Tinggi Negeri? Juga, bagaimana menerangkan bahwa dalam seluruh jajaran TNI, hanya ada dua orang Perwira Tinggi dari ras "non pribumi", yaitu Mayjen Purnawirawan TNI Iskandar Kamil dan Brigjen Purnawirawan TNI Teddy Yusuf? Juga pertanyaan sebaliknya, soal adanya "kuota halus" di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa sendiri, mengenai sangat langkanya *manager* dari "orang-orang pribumi asli" dalam perusahaan-perusahaan besar milik mereka.

Ada juga pendengar yang menyebutkan, bahwa di masa lampau bendera Merah Putih berkibar diatas sejumlah kapal laut milik Indonesia, yang menandakan kebesaran angkatan laut kita pada masa itu. Dalam kenyataan, sebenarnya angkatan laut kita waktu itu adalah bagian dari angkatan laut Tiongkok. Jika dibandingkan dengan keadaan sekarang, seperti kekuatan angkatan laut Australia dan Kanada, yang menjadi bagian dari sebuah dominion angkatan laut dari angkatan perang Inggris Raya (*Great Britain*). Jadi sebagai angkatan laut dominion, angkatan laut kita pada era tersebut adalah bagian dari sebuah angkatan laut Tiongkok. Kenyataan sejarah ini harus kita akui, jika kita ingin mendirikan/mengembangkan sebuah entitas yang besar dan jaya.

*****

Sebelum masa ini para warga negara keturunan Tionghoa harus berganti nama menjadi nama "pribumi", tidak diperke-

nankan mendirikan sekolah-sekolah, tidak diperkenankan beragama Khonghucu dan tidak diperbolehkan membuat surat kabar atau majalah umum berbahasa Mandarin. Terlebih parah lagi adalah larangan beragama Khonghucu, yang didasarkan pada asumsi bahwa aliran tersebut adalah sebuah filsafat hidup bukannya agama. Sebagai akibat, kita memiliki pengusaha bermata sipit yang bernama Mochammad Harun Musa. Padahal jelas sekali, dia bukan seorang muslim, atau pun bukan pula beragama Kristiani, melainkan ia "beragama" Buddha dalam kartu identitasnya.

Dalam hal keyakinan ini, kita berhadapan dengan pihak-pihak pejabat pemerintah yang beranggapan, negara dapat menentukan mana agama dan mana yang bukan. Mereka sebenarnya memiliki motif lain, seperti dahulu sejumlah perwira BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) yang beranggapan jika warga "keturunan Tionghoa" dilarang beragama Khonghucu, maka para warga negara itu akan masuk ke dalam agama "resmi" yang diizinkan negara. Inilah bahaya penafsiran oleh negara, padahal sebenarnya yang menentukan sesuatu agama atau bukan, adalah pemeluknya sendiri. Karena itu, peranan negara sebaiknya dibatasi pada pemberian bantuan belaka. Karena hal itu pula lah penulis menyanggah niatan Kapolda Jawa Tengah, yang ingin menutup Pondok Pesantren Al-Mukmin di Ngruki, Solo. Biarkan masyarakat yang menolak peranannya dalam pembentukan sebuah negara Islam di negara ini!

Di sini harus jelas, mana yang menjadi batasan antara peranan negara dan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan beragama. Negara hanya bersifat membantu, justru masyarakat yang harus berperan menentukan hidup matinya agama tersebut di negeri ini. Di sinilah terletak arti firman Tuhan dalam kitab suci al-Qurân: "Tak ada paksaan dalam beragama, (karena) benar-benar telah jelas mana yang benar dan mana yang palsu "(*lâ ikrâha fî al-dîn qottabayyana al-rusydu min al-ghayyi*)" (QS al Baqarah(2): 256). Jelas dalam ayat itu, tidak ada peranan negara sama sekali melainkan yang ada hanyalah peranan masyarakat yang menentukan mana

yang benar dan mana yang palsu. Jika semua agama itu bersikap saling menghormati, maka setiap agama berhak hidup di negeri ini, terlepas dari senang atau tidaknya pejabat pemerintahan.

*****

Sangat jelas dari uraian di atas, bahwa diskriminasi memang ada di masa lampau, tetapi sekarang harus dikikis habis. Ini kalau kita ingin memiliki negara yang kuat dan bangsa yang besar. Perbedaan di antara kita, justru harus dianggap sebagai kekayaan bangsa. Berbeda, dalam pandangan Islam, wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi pada tingkat sebuah bangsa besar, seperti manusia Indonesia. Kitab suci al-Qurân menyebutkan: "Berpeganglah kalian kepada tali Tuhan dan secara keseluruhan serta jangan terpecah-pecah dan saling bertentangan" (*wa' tashimû bi habli Allah jamî'an wa lâ tafarraqû*) (QS Ali Imran (3):107). Ayat kitab suci tersebut jelas membedakan perbedaan pendapat dengan pertentangan, yang memang nyata-nyata dilarang.

Walau telah lewat, tulisan ini dimaksudkan sebagai hadiah Tahun Baru Imlek yang harus kita hargai, seperti hari-hari besar agama yang lain. Tentu, hadiah berupa peletakkan dasar-dasar perbedaan diantara kita, sambil menolak pertentangan dan keterpecahbelahan diantara komponen-komponen bangsa kita, jauh lebih berharga daripada hadiah materi. Apalagi, jika penerima hadiah itu berlimpah-limpah secara materi, sedangkan pemberi hadiah itu justru secara relatif lebih tidak berpunya. Memang mudah sekali mengatakan tidak boleh ada diskriminasi, tetapi justru upaya mengikis habis upaya itu memerlukan waktu, yang mungkin memerlukan masa bergenerasi dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Memang selalu ada jarak waktu sangat panjang antara penetapan secara resmi dengan kenyataan empirik dalam kehidupan. Mudah dirumuskan, namun sulit dilaksanakan. {}

KEADILAN DAN REKONSILIASI

Minggu lalu, di bilangan Kramat V, Jakarta, penulis meresmikan sebuah panti jompo milik sebuah yayasan yang dipimpin orang-orang eks Tapol (Tahanan Politik) dan Napol (Narapidana Politik), kasarnya orang-orang PKI (Partai Komunis Indonesia) yang sudah dibubarkan. Mereka mendirikan sebuah panti jompo di gedung bekas kantor Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), yang dianggap sebagai organisasi perempuan PKI. Peresmian yang diminta mereka secara apa adanya pada pagi yang cerah itu, disaksikan antara lain oleh SK Trimurti, salah seorang pejuang kemerdekaan kita. Ini penulis lakukan karena solidaritas terhadap nasib mereka, yang sampai sekarang pun masih mengalami tekanan-tekanan dan kehilangan segala-galanya. Puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang dipenjarakan karena mereka dituduh "terlibat" dan bahkan memimpin PKI. Banyak yang meninggal dunia dalam keadaan sangat menyedihkan, sedangkan yang masih hidup banyak yang tidak memiliki hak-hak politik sama sekali, termasuk hak memilih dalam pemilu. Rumah-rumah dan harta benda mereka yang dirampas. Dan stigma (cap) mereka adalah pengkhianat bangsa, tetap melekat pada diri mereka hingga saat ini. Dengan dipimpin oleh dr. Tjiptaning Proletariati, mereka membentuk PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru) yang memiliki cabang di mana-mana, walhasil gerakan mereka berskala nasional. Namun karena

prikemanusiaan juga lah penulis mempunyai solidaritas yang kuat dengan mereka, seperti halnya solidaritas penulis kepada mantan anak buah Kartosuwiryo, yang disebut DI/TII (Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia). Bahkan waktu turut "berkuasa", PKI pernah turut-turut memberikan cap pemberontak secara keseluruhan kepada (mantan) orang-orang DI/TII itu.

Penulis pernah menyebutkan dalam sebuah tulisan, orang-orang itu tadinya direkut oleh Kartosuwiryo dengan menggunakan nama DI/TII tersebut, karena ia diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman, guna menghindarkan kekosongan daerah Jawa Barat, yang ditinggalkan TNI untuk kembali ke Jawa Tengah (kawasan RI), akibat perjanjian Renville yang mengharuskan terjadinya hal itu. Seorang pembaca menyanggah "catatan" penulis itu karena di matanya tidak mungkin Kartosuwiryo menjadi "penasehat militer" Jenderal Soedirman karena lebih pantas kalau ia adalah penasehat politik. Pembaca itu tidak tahu, bahwa penasehat politik Jenderal Sudirman adalah ayah penulis sendiri KH. A. Wahid Hasyim. Karena itu simpati penulis kepada mereka juga tidak kalah besarnya dari simpati kepada mantan orang-orang PKI.

*****

Di sini penulis ingin menekankan, bahwa konflik-konflik bersenjata di masa lampau dapat dianggap selesai, apapun alasannya, karena kita sekarang sudah kuat sebagai bangsa dan tidak usah menakuti kelompok manapun. Justru keadilan yang harus kita tegakkan, sebagai persyaratan utama bagi sebuah proses demokratisasi. Kita adalah bangsa yang besar dengan penduduk saat ini 205 juta lebih saat ini. Kita harus mampu menegakkan keadilan, dan tidak "menghukum" mereka yang tidak bersalah. Seperti pembelaan (pledoi) Amrozi di muka Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa ia merakit bom kecil saja, sedangkan ada orang yang *dibalik* pemboman Bali itu dengan bom besar yang mem-

bunuh lebih dari 200 orang. Pernyataan Amrozi ini seharusnya mendorong kita memeriksa "pengakuan" tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan, karena itu hingga saat ini kita tetap tidak tahu, adakah pendapat Amrozi itu sendiri berdasarkan fakta atau tidak. Demikian juga, kita tetap tidak tahu siapa yang meledakan bom di Hotel Marriott Jakarta beberapa waktu kemudian.

Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lampau kita, sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi itu dalam perspektif prikemanusiaan, bukannya secara ideologis. Kalau kita menggunakan kacamata ideologis saja, maka sudah tentu akan sangat mudah bagi kita untuk menganggap diri sendiri benar dan orang lain bersalah. Ini bertentangan dengan hakekat kehidupan bangsa kita yang demikian beragam. Kebhinekaan/ keragaman justru menunjukkan kekayaan kita yang sangat besar. Karenanya kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa atas kemelut yang masih menghinggapi kehidupan bangsa kita saat ini.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap sebagai "biang kerok" terorisme di negeri kita saat ini. Pengadilan pun lalu menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, yang sekarang sedang dijalaninya di LP (Lembaga Permasyarakatan) Cipinang di Jakarta Timur. Memang pengadilan menetapkan ia bersalah namun kepastian sejarah belum kita ketahui, mengingat data-data yang "tidak pasti" (*unreliable*) digunakan dalam mengambil keputusan. Ini juga terjadi karena memang pengadilan-pengadilan kita penuh dengan "mafia peradilan', maka kita tidak dapat diyakinkan oleh "kepastian hukum" yang dihasilkannya. Seperti halnya kasus Akbar Tandjung, jelas keputusan Mahkamah Agung terus "diragukan" apapun bunyi keputusan itu sendiri. Tidak heranlah sekarang kita mengalami "kelesuan" dalam menengakkan kedaulatan hukum. Inilah rahasia mengapa tidak ada investasi dari luar negeri, karena langkanya kepastian hukum tadi.

*****

Sebuah kasus lain cukup menarik untuk dikemukakan di sini. Kyai Mahfud Sumalangu (Kebumen), adalah pahlawan yang memerangi balatentara pendudukan Belanda di Banyumas Selatan. Ketika Kabinet Hatta memutuskan "rasionalisasi" TNI atas usul Jenderal Besar AH. Nasution, antara lain berupa ketentuan bahwa Komandan Batalyon TNI haruslah berijazah dan ijazah hanya dibatasi pada keluaran beberapa lembaga pendidikan saja (tidak termasuk pesantren), maka kyai kita itu tidak diperkenankan menjadi Komandan Batalyon di Purworejo dan sebagai gantinya diangkat seorang perwira muda bernama A. Yani. Akibatnya kyai kita itu mendirikan Angkatan Umat Islam (AUI) yang kemudian dinyatakan oleh A. Yani sebagai pemberontak. Peristiwa tragis ini terjadi pada awal tahun-tahun 50-an, namun bekasnya yang pahit masih saja tersisa sampai sampai hari ini.

Hal-hal seperti ini masih banyak terjadi/terdapat di negeri kita dewasa ini. Karenanya, kita masih harus memiliki kelapangan dada untuk dapat menerima kehadiran pihak-pihak lain yang tidak sepaham dengan kita. Termasuk di dalamnya orang-orang mantan Napol dan Tapol PKI, yang kebanyakan bukan orang yang benar-benar memahami betul ideologi mereka itu. Karena itulah, penulis tidak pernah menganggap baik orang-orang PKI maupun orang-orang DI/TII sebagai "lawan yang harus diwaspadai". Penulis justru beranggapan bahwa orang-orang mantan PKI itu, sekarang sedang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, karena apa yang saat ini mereka anggap sebagai "kezaliman-kezaliman", justru pernah mereka jalani saat "berkuasa". Sekarang mereka berpegang pada keyakinan yang mereka miliki yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau kita juga menggunakan cara itu, berarti kita sudah turut menegakkan keadilan.

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa yang kita perlukan adalah sebuah rekonsiliasi nasional, setelah pengadilan memberikan

keputusan "yang adil" bagi semua pihak. Kalau "konglomerat hitam" dapat diberi status *Release and Discharge* (bebas dari segala tuntutan), mengapakah kita tidak dapat melakukan hal seperti itu pada orang-orang mantan PKI dan DI/TII? Jadi, pengertian dari rekonsiliasi yang benar adalah pertama mengharuskan adanya pemeriksaan tuntas oleh pihak pengadilan, kalau bukti-bukti yang jelas masih dapat dicari. Baru kemudian diumumkan pengampunan setelah vonis pengadilan dikeluarkan. Di sinilah letak keadilan yang harus ditegakkan di bumi nusantara. Sebuah tekad untuk memeriksa kasus-kasus yang terjadi di depan mata kita dalam masa lima belas tahun terakhir ini, justru meminta kepada kita agar "melupakan" apa yang terjadi 40-50 tahun yang lalu. Kedengarannya mudah dilakukan, namun dalam kenyataan sulit dilaksanakan bukan? {}



BAB IV

ISLAM
HAK EKONOMI
DAN KEADILAN SOSIAL



ISLAM DAN ORIENTASI EKONOMI

Dalam pandangan Islam, tujuan hidup perorangan adalah mencari kebahagian dunia dan akhirat yang dicapai melalui penempatan kehidupan manusia dalam kerangka peribadatan kepada Allah Swt. Terkenal dalam hal ini firman Allah melalui kitab suci al-Qurân: "tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Ku" (*wa mâ khalaqtu al-jinna wa al-Insâ illâ liya'budûn*)(QS al-Dzâriyât(51):56). Dengan adanya konteks ini, manusia selalu merasakan kebutuhan akan Tuhan, dan dengan demikian ia tidak berbuat sesuka hati. Karena itulah, akan ada kendali atas perilakunya selama hidup dalam hal ini adalah pencarian pahala/kebaikan di akhirat, dan pencegahan sesuatu yang secara moral dinilai buruk atau baik di dunia. Karena itulah do'a seorang muslim yang paling tepat adalah "wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat" (*rabbanâ âtina fî ad-dunya hasanatan wa fî al-âkhirati hasanatan*)(QS al- Baqarah(2):201).

Yang digambarkan di atas adalah kerangka mikro bagi kehidupan seorang muslim di dunia dan akhirat. Hal ini adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan seorang manusia, yang disimpulkan dari keyakinan akan adanya Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya. Tanpa kedua hal pokok itu sebagai keyakinan, secara teknis dia bukanlah seorang muslim.

Namun secara makro ia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri, karena ia adalah bagian dari sebuah masyarakat. Terkenal dalam hal ini ungkapan: agama tidak akan terwujud tanpa kelompok, dan kelompok tidak akan terwujud tanpa pimpinan, dan tiada pimpinan tanpa pemimpin" (*lâ dîina illâ bi jamâ'atin wa lâ jamâ'ata illâ biimâmatin wa lâ imâmata illâ bi imâmin*).

Dengan demikian, kedudukan dan tugas seorang pemimpin sangat berat dalam pandangan Islam. Dia harus menciptakan kelompok yang kuat, patuh dan setia pada kerangka peribadatan yang dikemukakan di atas. Untuk mencapai hal itu, ia harus mengikuti sebuah strategi yang jelas untuk memperkuat masyarakat yang adil dan makmur. Ini diungkapkan dengan indahnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam bahasa Arab ia harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bertumpukan keadilan dan kemakmuran "*al maslahah al âmmah*" .

*****

Hal kedua yang harus ditegakkannya adalah orientasi yang benar dalam memerintah, termasuk orientasi ekonomi yang jelas. Jika segala macam kebijakan pemerintah, tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini –sejak kemerdekaan kita-, hampir seluruhnya mengacu kepada kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa, yang berarti adanya orientasi yang tidak memihak kepada kepentingan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi ekonomi kita.

Perubahan orientasi dari kecenderungan menolong usaha besar dan raksasa, harus digantikan oleh orientasi membangun UKM, terutama dalam penyediaan kredit yang berbunga sangat rendah sebagai modal pembentukan UKM tersebut.

Perubahan orientasi ekonomi itu berarti juga perubahan tekanan dalam ekonomi kita. Jika sebelumnya penekanan pada

bidang ekspor, yang hasilnya -dalam bentuk pajak- sangat sedikit kembali ke kas pemerintah, karena begitu banyak keringanan untuk kalangan eksportir. Maka, selanjutnya justru harus diutamakan perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran.

Untuk itu, tiga hal sangat diperlukan, yaitu: peningkatan pendapatan guna menciptakan kemampuan daya beli yang besar; pengerahan industri guna menghidupkan kembali penyediaan barang untuk pasaran dalam negeri dan independensi keseluruhan ekonomi dari ketergantungan kepada tata niaga internasional.

Ini berarti, kita harus tetap memelihara kompetisi yang jujur, mengadakan efisiensi dan menciptakan jaringan fungsional bagi UKM kita, baik untuk menggalakan produksi dalam negeri maupun untuk penciptaan pemasaran dalam negeri yang kita perlukan. Keterkaitannya adalah tetap memelihara tata niaga internasional yang bersih dan bersaing, disamping memperluas basis pajak kita (dari sekitar dua juta orang wajib pajak saat ini ke arah dua puluh juta orang wajib pajak dalam beberapa tahun mendatang). Ditambah dengan pemberantasan kebocoran-kebocoran dan ditiadakannya pungutan liar yang masih ada sekarang ini, barulah dengan demikian, dapat kita naikkan pendapatan.

*****

Tata ekonomi seperti itu akan lebih memungkinkan tercapainya kesejahteraan dengan cepat, yang dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai penciptaan masyarakat adil dan makmur. Dalam *fiqh* disebutkan "kebijakan dan tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus sejalan dengan kemaslahatan mereka'(*tasharruf al-imâm 'alâ ar-ra'iyyah manûthun bi al-mashlahah*) berlaku juga untuk bidang ekonomi. Ekonomi yang berorientasi kepada kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, menjadikan ekonomi kita akan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Apakah ekonomi yang sedemikian itu akan dinamai

ekonomi Islam atau hanya disebut ekonomi nasional saja, tidaklah relevan untuk didiskusikan di sini. Yang terpenting, bangunan ekonomi yang dikembangkan, baik tatanan maupun orientasinya, sesuai dengan ajaran Islam. Penulis yakin, ekonomi yang sedemikian itu juga sesuai dengan ajaran-ajaran berbagai agama lain. Karenanya, penamaan ekonomi seperti itu dengan nama ekonomi Islam, sebenarnya juga tidak diperlukan sekali, karena yang terpenting adalah pemberlakuannya, dan bukan penamaannya.

Dalam kerangka inilah, kepentingan mikro ekonomi Islam secara pribadi, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat, lalu sama posisinya dengan dibangunnya ekonomi makro yang mementingkan keadilan dan kemakmuran seluruh bangsa. Sebenarnya kita dapat melakukan hal itu, apabila terdapat adanya *political will* untuk menerapkannya, karena memang ekonomi terlalu penting bagi sebuah bangsa jika hanya untuk diputuskan oleh sejumlah ahli ekonomi belaka, tanpa melibatkan seluruh bangsa. Karena menyangkut kesejahteraan seluruh bangsa, maka diperlukan keputusan bersama dalan hal ini. Untuk mengambil keputusan seperti itu, haruslah didengar lebih dahulu perdebatannya sebelum diambil keputusan. {}

Islam, Moralitas dan Ekonomi

Sejumlah ahli ekonomi berpendapat bahwa ada kaitan langsung antara Islam dan ekonomi. Dengan demikian, ada yang dinamakan ekonomi Islam, yaitu Islam memuat ajaran-ajaran ekonomi yang harus diterapkan oleh masyarakat kaum muslimin. Pengakuan ini sangatlah menarik, karena kita sudah lama melihat bahwa ekonomi hanyalah bersifat empirik saja, sedangkan agama memiliki nuansa spiritual yang sangat kuat. Jadi, ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik, adakah ekonomi Islam?

Pada tahun-tahun 70-an dan 80-an, sejumlah ekonom mengajukan pendapat, bahwa sebuah ekonomi dapatlah dinamakan ekonomi Islam, kalau mengikuti ketentuan-ketentuan agama Islam mengenai riba, eksistensi bank dan penolakan terhadap asuransi. Menurut pendapat ini, sistem perbankan tidak diperkenankan menggunakan bunga bank (*bank interest*), sedangkan ketentuan-ketentuan yang lazim dalam asuransi sama saja dengan permainan judi, yang diharamkan oleh Islam. Dengan demikian, pemberian atau pengambilan bunga bank dan penerimaan asuransi berarti penyimpangan dari hukum Islam. Ekonomi yang menggunakan kedua-duanya sama saja dengan ekonomi yang menolak ajaran Islam.

Dalam tahun-tahun 70-an, muncul juga pendapat orang-orang seperti Prof. Dr. Mubyarto dari Universitas Gajah Mada (UGM), yang mengemukakan pendapat tentang Ekonomi Pancasila. Menurut pendapat beliau, Ekonomi Pancasila harus terkait langsung dengan ekonomi orang kecil, dan bertumpu pada moralitas. Pendapat ini identik dengan konsepsi dari ekonomi Islam, minus soal bunga bank dan asuransi. Karenanya, pembahasan tentang ekonomi Islam dengan segera lalu terhenti, karena orang lalu berdiskusi tentang Ekonomi Pancasila. Dalam pada itu, ekonomi yang empirik dan bebas nilai, seperti yang dibawakan kaum teknokrat, tetap dilaksanakan dan berkembang pesat.

Sekarang ini, terasa adanya keperluan untuk membahas ada tidaknya ekonomi Islam. Pertama, karena adanya sejumlah program yang menggunakan nama *syari'ah*, seperti bank *syari'ah* yang ada di lingkungan sebuah bank besar milik negara (BUMN). Begitu juga ada beberapa upaya percobaan untuk menerapkan asuransi menurut ajaran Islam –yang dikenal dengan nama *takaful*. Kedua, karena dalam waktu lima belas tahun terakhir, ekonomi kita benar-benar bersifat empirik dan tidak menggunakan acuan moral sama sekali. Ini berarti, telah terbangunnya ekonomi yang benar-benar kapitalistik dan berazas siapa yang kuat dan cerdik, dialah yang menguasai segala-galanya.

Bahkan, begitu kuatnya watak kapitalistik dalam ekonomi kita waktu itu, hingga seorang bankir dan pendiri jaringan sebuah bank raksasa di negeri ini, senantiasa mengucapkan "puji Tuhan" setiap kali akan menipu orang. Jadi agama diredusir hanya menjadi keimanan dan keyakinan belaka, sedangkan dimensi sosial dijauhkan dari agama dalam pengertian tersebut. Benarkah dengan sistem ekonomi harus membuang jauh-jauh pertimbangan moral sama sekali? Di sisi lain, sebuah sistem ekonomi yang hanya bertumpu pada acuan moral saja dapatkah dinamai sebuah sistem ekonomi. Kalau jawabannya positif, berarti ekonomi Islam ada; dan kalau jawabannya negatif, berarti tidak ada ekonomi

Islam. Justru dalam menentukan jawaban atas kedua pertanyaan di atas, terletak wujud atau tidak terwujudnya ekonomi Islam.

Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa tidak dapat begitu saja bunga bank dianggap sebagai riba, tergantung pada besar-kecil dan maksud pemungutan bunga bank tersebut. Menurut pendapatnya, jika bunga bank dipungut dari upaya non-produktif –katakanlah bersifat konsumtif belaka, maka ia dapat dikatakan riba. Kalau bunga bank itu merupakan bagian dari sebuah upaya produktif maka bunga bank yang digunakan atas transaksi itu bukanlah riba, melainkan bagian dari ongkos produksi saja.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa ada tiga hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan sama sekali. Pertama, orientasi ekonomi itu sendiri, yang harus memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kepentingan orang banyak. Ini sesuai dengan ketentuan agama Islam bahwa tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab oleh *fiqh* adalah *maslahah*, diterjemahkan oleh penulis dengan istilah kesejahteraan. Dan, dalam bahasa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, masyarakat sejahtera dirumuskan sebagai masyarakat adil dan makmur, hingga orientasi kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat itu, yang dikandung oleh Islam dalam hal perekonomian, sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945.

Kedua, mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu, tidak ditentukan format dan bentuknya. Dengan demikian, acuan persaingan-perdagangan bebas dan efisiensi yang dibawakan oleh kapitalisme, tidaklah bertentangan dengan pandangan ekonomi yang dibawakan Islam. Bahkan Islam menganjurkan adanya sikap *fa tstabiqu al-khairat* (berlombalah dalam kebaikan), yang menjadi inti dalam praktek ekonomi yang sehat. Dengan persaingan dan perlombaan, akan terjadi efisiensi yang semakin meningkat. Namun, pemerintah

sebagai penguasa harus memberikan perlindungan kepada yang lemah tanpa melakukan intervensi dalam perdagangan. Ini adalah prinsip yang harus dipegang teguh dalam menentukan kebijakan ekonomi, hingga negara-negara yang berteknologi maju-pun melindungi para penganggur yang tidak memperoleh pekerjaan sampai 3% dari jumlah keseluruhan kaum pekerja.

Dari orientasi dan mekanisme pasar seperti itu, jelas bahwa tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan masalah bunga bank dan pelaksanaan asuransi sebagai unit parsial dalam kehidupan ekonomi, dapat saja dirumuskan suatu yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, dengan predikat bank Islam/bank *syari'ah* maupun *takaful*/ asuransi Islam. Pendekatan parsial yang memakai kata Islam sebagai pengenal, tanpa menyebut ekonomi secara keseluruhan sebagai "ekonomi Islam" dapat saja dilakukan tanpa kehilangan Islamisitas kita sendiri. *What is a name?* ungkap dramawan dunia William Shakespeare. Karenanya, dapat saja kita melihat pelaksanaan prinsip-prinsip Islam, namun dalam orientasi dan mekanismenya adalah ekonomi kapitalistik. Orientasi kapitalistik itu dibedakan dari orientasi yang diuraikan di atas, yaitu dalam orientasi kapitalistik yang diutamakan adalah individu pengusaha besar dan pemilik modal. Dalam Islam, justru kepentingan rakyat-kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang menjadi ukuran. {}

Islam dan Keadilan Sosial

Salah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Islam, baik rumusan "hendaklah kalian bertindak adil" (*an ta'dilû*) maupun keharusan "menegakkan keadilan" (*kûnû qawwâmîna bi al-qisthi*), berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci al-Qurân. Dengan meminjam dua buah kata sangat populer dalam peristilahan kaum muslimin di atas, UUD 45 mengemukakan tujuan bernegara: menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan bernegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau negara lain mengemukakan kemakmuran dan kemerdekaan (*prosperity and liberty*) sebagai tujuan, maka negara kita lebih menekankan prinsip keadilan daripada prinsip kemerdekaan itu.

Dengan demikian, sangat mengherankan jika kita sekarang lebih mementingkan swastanisasi/privatisasi dalam dunia usaha, daripada mengembangkan rasa keadilan itu sendiri. Seolah-olah kita mengikuti kedua prinsip kemakmuran dan kebebasan itu, dan dengan demikian kita kehilangan rasa keadilan kita. Sikap dengan mudah menentukan kenaikan harga BBM -yang kemudian dicabut kembali-, menunjukkan hal itu dengan jelas, kalau kita tidak berprinsip keadilan. Tentulah kenaikan harga itu harus

menunggu kenaikan pendapatan, bukan sebaliknya. Bukankah dengan demikian, telah terjadi pengambilalihan sebuah paham dari negeri lain ke negeri kita yang memiliki prinsip lain, sesuai dengan ketentuan UUD 45? Adakah kapitalisme klasik yang melindungi kaum lemah, dengan akibat mereka harus dihilangkan begitu saja dalam kehidupan kita sebagai bangsa? Bukankah yang dimaksudkan oleh para pendiri negeri kita, adalah bentuk pemerintahan yang melindungi kaum lemah?

Jelaslah dengan demikian, antara ketentuan dalam UUD 45 dan kebijakan pemerintah, terdapat kesenjangan dan perbedaan yang sangat menyolok. Dapat dikatakan, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidaklah didasarkan pada konstitusi. Dengan demikian dapat disimpulkan, ketentuan UUD ditinggalkan karena keserakahan beberapa orang saja yang menginginkan keuntungan maksimal bagi diri dan golongan mereka saja. Ini adalah sikap dan kebijakan pemerintah yang harus dikoreksi oleh masyarakat dengan tegas. Keengganan kita untuk melakukan koreksi itu, hanya akan mengakibatkan kebijakan dan sikap pemerintah yang lebih jauh lagi menyimpang dari ketentuan UUD 45.

Hendaknya pun pemerintah bersikap lapang dada dan menerima kritikan atas penyimpangan dari UUD 45 itu, sebagai sebuah masukan yang konstruktif. Kita memiliki UUD 45 yang harus diperhatikan dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kalau ingin menyimpang dari ketentuan konstitusi itu, maka konstitusi harus dirubah melalui pemilu yang akan datang. Seperti halnya pengamatan Jenderal (Purn.) Try Soetrisno, bahwa rangkaian amandemen yang diputuskan sekarang telah menjadikan sistem politik kita benar-benar liberal, yang berdasarkan pemungutan suara terbanyak saja. Tentu ini harus dikoreksi dengan amandemen UUD lagi, karena hak minoritas harus dilindungi.

*****

Dalam memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi, kita juga harus melihat bagaimana sejarah Islam menerima hal itu sebagai sebuah proses dan melakukan identifikasi atas jalannya proses tersebut. Dalam hal ini, penulis mengemukakan sebuah proses yang kita identifikasikan sebagai proses penafsiran kembali (*reinterpretasi*) atas ajaran-ajaran agama yang tadinya dianggap sebagai sebuah keadaan yang "normal". Tanpa proses penafsiran ulang itu tentunya Islam akan sangat sempit memahami ayat-ayat al-Qurân. Seperti misalnya "Hari ini telah Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Ku-sempurnakan (pemberian) nikmat-Ku dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama" (*al-yauma akmaltu lakum dînakum wa atmamtu alaikum ni'matî wa rodhîtu lakum al-Islâma dînan*) (QS al-Maidah(3):4). Ayat tersebut menunjukkan Allah menurunkan prinsip-prinsip yang tetap (seperti daging bangkai itu haram), sedangkan hukum-hukum agama (*canon laws*) terus-menerus mengalami perubahan dalam perinciannya.

Sangat terkenal dalam hal ini hukum agama (*fiqh*) mengenai Keluarga Berencana (KB), yang bersifat rincian dan mengalami perubahan-perubahan. Dahulu, pembatasan kelahiran sama sekali ditolak, padahal waktu itu ia adalah satu-satunya cara untuk membatasi peningkatan jumlah penduduk. Dasarnya adalah campur-tangan manusia dalam hak reproduksi manusia di tangan Tuhan sebagai sang pencipta. Namun, kemudian manusia merumuskan upaya baru untuk merencanakan kelahiran (*tanzim al-nasl* atau *family planning*) sebagai ikhtiar menentukan jumlah penduduk sebuah negara pada suatu waktu. Dengan demikian, dipakailah cara-cara, metoda, alat-alat dan obat yang dapat dibenarkan oleh agama, seperti pil KB, kondom dan sebagainya. Penggunaan metoda dan alat-alat tersebut sekarang ini, dilakukan karena ada penafsiran kembali ayat suci dalam upaya mengurangi jumlah kenaikan penduduk dari pembatasan kelahiran (*birth control*) ke perencanaan keluarga (*family planning*).

Contoh sederhana di atas, menunjukkan kepada kita, dengan jelas, betapa pentingnya proses penafsiran ulang tersebut.

Tanpa kehadirannya, Islam akan menjadi agama yang mengalami "kemacetan" dan menyalahi ketentuan agama itu sendiri yang tertuang dalam ucapan "Islam sesuai untuk segenap tempat dan masa" (*al-Islam yasluhu li kulli makânin wa zamânin*). Dengan demikian jelaslah, agama yang dibawakan Nabi Muhammad Saw itu pantas dinyatakan sebagai sesuatu yang sempurna, karena hanya pada hal-hal prinsip saja Islam bersifat tetap, sedangkan dalam hal-hal rincian dapat dilakukan penafsiran ulang kalau telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk itu.

*****

Dalam hal ini, kita lalu teringat pada konsep keadilan yang pada prinsipnya berarti pemberdayaan kaum miskin/lemah untuk memperbaiki nasib mereka sendiri dalam sejarah manusia yang terus mengalami perubahan sosial. Secara umum, Islam memperhatian susunan masyarakat yang adil dengan membela nasib mereka yang miskin/lemah, seperti terlihat pada ayat suci berikut; "Apa yang dilimpahkan (dalam bentuk pungutan *fai'*) oleh Allah atas kaum (penduduk sekitar Madinah), maka harus digunakan bagi Allah, utusan-Nya, sanak keluarga terdekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para peminta-minta/ pengemis dan pejalan kaki di jalan Allah. Agar supaya harta yang terkumpul itu tidak hanya berputar/beredar di kalangan orang-orang kaya saja di lingkungan kalian". (*mâ afâ-a Allâhu 'alâ rasûlihi min ahl al-qurâ fa li-Allâhi wa li al-rasûl wa li dzî al-qurbâ wa al-yatâ mâ wa al-masâkîn wa ibn al sabîl, kailâ yakûnâ dûlatan bain al-aghniyâ'a minkum*) (QS al-Hasyr(5):8).

Konsep mengenai susunan masyarakat seperti dikemukakan oleh ayat suci di atas, menunjukkan dengan jelas watak struktural dari bangunan masyarakat yang dikehendaki Islam, baik yang dicapai melalui perjuangan struktural (seperti dikehendaki Sosialisme dan Komunisme) maupun tidak, haruslah senantiasa

diingat oleh para pemimpin gerakan Islam saat ini. Jika hal ini diabaikan, maka sang pemimpin gerakan Islam hanya akan menjadi mangsa pandangan yang memanfaatkan manusia untuk kepentingan manusia lain (*exploitation de l'home par l'home*). Jelas, sikap seperti itu berlawanan dengan keseluruhan ajaran Islam sebagai agama terakhir bagi manusia. Karenanya, mereka yang memperebutkan jabatan atau menjalankan KKN dalam mengemban jabatan itu, mau tidak mau harus berhadapan dengan pengertian keadilan dalam Islam, baik bersifat struktural atau non-struktural.

Dengan demikian jelaslah, bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman dan pengertian dalam Islam mengenai kata "keadilan" itu sendiri. Dalam proses memahami dan mencoba mengerti garis terjauh dari kata *a' dilû'* atau '*al-qisth*' itu sendiri, lalu ada sementara pemikir muslim yang menganggap, sebaiknya digunakan kata "keadilan sosial" (*social justice*) dalam wacana kaum muslimin mengenai perubahan sosial yang terjadi. Kelompok ini, yang menginginkan pendekatan struktural dalam memahami perubahan sosial itu, namun pada umumnya masih berfungsi wacana dari sebagian besar adalah para pemikir saja, bukannya pejuang/aktifis masyarakat. Tetapi, lambat-laun akan muncul para aktifis yang menggunakan acuan struktural itu, dan dengan demikian merubah keseluruhan watak perjuangan kaum muslimin. Implikasinya akan muncul istilah "muslim revolusioner" dan lawannya yaitu "muslim reaksioner". Memang mudah merumuskan perjuangan kaum muslimin itu, namun sulit memimpinnya, bukan? {}

Islam dan Masalah Kecukupan

Kitab suci al-Qurân berkali-kali menandaskan, bahwa masalah kecukupan adalah masalah yang kerapkali mengganggu hidup manusia. Dikatakan; "Telah membuat kalian lalai, upaya memperbanyak harta, hingga kalian masuk liang kubur" (*al-hâkum al-takâtsur hattâ zurtum al-maqâbir*) (QS al-Takatsur(102):1-2) , jelas dari ayat ini bahwa, upaya mengejar harta sebanyak mungkin dapat melupakannya dari Tuhan, apalagi bila si penderita adalah sesama manusia. Dengan demikian, melalui ayat di atas, Islam jelas sekali menentukan bahwa manusia harus bersama-sama dalam kehidupan, termasuk dalam mencari apa yang dinamakan "kecukupan", baik yang bersifat perorangan maupun keseluruhan masyarakat (*affluent society*).

Dengan demikian, nyata bagi kita, kecukupan itu dalam pemikiran Islam ada batasnya, yaitu mencapai tingkat perolehan yang tinggi tanpa mencegah orang lain mencapai hal yang sama. Kesamaan hak ini perlu mendapat tekanan, karena dalam konsep kapitalisme klasik tidak pernah dipikirkan tentang gairah mencapai hal yang maksimal, dan senantiasa dilupakan bahwa ada manusia lain yang menjadi korban.

Dalam persaingan bebas tidak lagi mempedulikan siapa korban, *toh* manusia memang tidak bernasib sama. Jadi, negara berkewajiban menyediakan kompensasi bagi pihak yang kalah

dalam bentuk kecukupan minimal yang disediakan bagi warga negara. Contoh yang paling umum terjadi dalam asuransi sosial yang diberikan kepada orang yang menganggur, yaitu 80% pendapatan tertinggi semasa mereka masih bekerja. Asuransi sosial ini adalah jaminan sosial akan kebutuhan terendah seorang warga masyarakat, dan itulah yang menjadi tugas utama pemerintah, yakni penyediaan jaminan sosial yang mencukupi kebutuhan *standard* akan kehidupan. Untuk tujuan politik, pemerintah menyediakan berbagai pelatihan kerja, guna memungkinkan para penganggur itu memperoleh lapangan pekerjaan baru yang tadinya tidak dapat mereka masuki.

Diharapkan dengan pembayaran pajak yang besar dari persaingan bebas, maka pemerintah akan mampu menanggulangi masalah pengangguran itu dengan menetapkan dasar kecukupan minimal bagi seorang warga negara. Kalau tercapai jumlah yang ditentukan itu, berarti pemerintah sudah melaksanakan tugas. Jadi keseluruhan hidup manusia diukur dengan capaian minimal tersebut, dan selebihnya manusia dapat mengejar ketinggian maksimal dalam keenakan hidup secara material. Hal ini berarti, seluruh kehidupan diukur dengan ukuran capaian materialistik belaka. Maka, tidak mengherankan jika penerapan ukuran-ukuran pincang itu menghasilkan juga pola kehidupan yang pincang; masyarakat gay, masyarakat lesbi dan bahkan perkawinan antar sesama lelaki dan perempuan, hingga tak mengherankan jika dalam institusi perkawinan pun juga terjadi perkembangan yang sedemikian rupa. Di sini, sudah tentu ukuran-ukuran moral yang kita ikuti selama ini justru "mengganggu" lembaga-lembaga baru yang akan diwujudkan mereka.

Sudah tentu pengembangan ukuran materialistik bagi warga negara harus diwujudkan guna pencapaian masyarakat yang sejahtera bagi para warganya. Tetapi, hal ini tanpa harus meninggalkan ukuran-ukuran moral yang konvensional dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab sosial para warga masyarakat tidak dapat digantikan negara demikian saja, seperti

yang terjadi di Skandinavia. Angka bunuh diri yang tinggi di dalamnya, menunjukkan besarnya rasa tidak puas atas tatanan spiritual yang dikembangkan. Sikap netral negara yang tidak memihak pada si lemah, membuat para warga negara gundah perasaannya. Di tengah-tengah kemakmuran serba benda tersebut, ternyata manusia tidak cukup dilayani dengan struktur materialistik belaka, melainkan juga membutuhkan institusi-institusi lain yang lebih mengarah kepada hal-hal spiritual dalam negara yang diperintah oleh kaum sosial demokrat itu. Aspek spiritual ini menjadi menonjol, dan mengambil bentuk munculnya nasionalisme sempit atau rasionalisme model baru seperti yang terjadi di Eropa Barat, yang sering menyebut diri mereka sebagai golongan konservatif.

*****

Kehidupan di bawah tingkat kecukupan itu tidak menjadi perhatian benar bagi pemerintah, paling jauh hanya ditangani aspek psikologis yang bersifat materialistik saja. Contohnya adalah manusia lanjut usia (manula) yang dalam masyarakat kita, jumlah ini semakin lama semakin bertambah besar. Sebagai catatan di berbagai negara dibangunlah sejumlah rumah panti jompo bagi para warga negara yang mencapai usia manula. Mereka berkumpul di rumah-rumah jompo dan hidup bersama manula-manula lain. Negara tidak melihat hal yang aneh dalam keterpisahan (isolasi) antara sesama warga negara itu. Jadi, yang diperhatikan hanya sudut psikologis, tanpa meninjau terlalu jauh keterikatan manula dari keluarganya.

Tentu, apa yang diterangkaan di atas dapat diperdebatkan, seperti jawaban atas pertanyaan adakah pengaruh seorang manula atas cucunya; bersifat positif ataukah negatif? Jawaban-jawaban atas pertanyaan seperti itu tentu saja menjadi penting untuk ditemukan rumusan-rumusannya yang definitif. Demikian pula, dapatkah jawaban-jawaban seperti itu menjadi sama bagi

setiap warga negara, ataukah hanya berkenaan dengan warga negara tertentu saja? Karena itu, diperlukan sejumlah lembaga yang dipimpin oleh para pakar dari berbagai bidang untuk memadu jawaban yang diperoleh, sehingga menjadi landasan bagi sejumlah kebijakan umum.

Dari hal-hal yang disebutkan di atas, menjadi jelas bagi kita, bahwa wawasan agama harus dapat digabungkan dengan pertimbangan-pertimbangan kepakaran yang lain. Karenanya, menjadi penting untuk memahami peranan agama dalam melihat masalahnya tidak hanya dari sudut agama belaka, melainkan secara menyeluruh dari berbagai bidang. Menjadi pertanyaan penting bagi kita, adakah Islam dapat menerima jawaban multi-fungsi dan multi-bidang seperti ini.

*****

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa aplikasi atau penerapan-penerapan ajaran agama, termasuk agama Islam, memang bersifat sangat sulit dan sangat komplek dalam kehidupan nyata. Karenanya, kita harus bersikap hati-hati dalam masalah ini; kita tidak dapat berlepas-tangan dari aspek-aspek penyediaan jawab-an dari sudut pandangan agama atau justru hanya mengandalkan diri.

Pendekatan ini menjadi sesuatu yang bersifat komprehensif, di mana berlawanan dengan lembaga yang lain dari pemerintah yang sama, guna memungkinkan jawaban-jawaban dalam hal ini. Penulis beranggapan faktor nilai (*values*) turut menentukan tindakan-tindakan manusia untuk memecahkan masalah-masa-lah yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Sungguh rumit bukan? {}

ISLAM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam *fiqh* dikemukakan keharusan seorang pemimpin agar mementingkan kesejahteraan rakyat yang dipimpin, sebagai tugas yang harus dilaksanakan: "kebijaksanaan dan tindakan Imam (pemimpin) harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin" (*tasharruf al-imâm 'alâ al-ra'iyyah manûtun bi al-maslahah*), menetapkan hal ini dengan sangat jelas. Tujuan berkuasa bukanlah kekuasaan itu sendiri, melainkan sesuatu yang dirumuskan dengan kata kemaslahatan (*al-maslahah*). Prinsip kemaslahatan itu sendiri seringkali diterjemahkan dengan kata "kesejahteraan rakyat", yang dalam ungkapan ekonom dosen Harvard dan mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk India, John Kenneth Galbraith, sebagai "*The Affluent Society*".

Dalam bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata kesejahteraan tersebut dirumuskan dengan ungkapan lain, yaitu dengan istilah "masyarakat adil dan makmur". Itulah tujuan dari berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam siklus berikut: hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, guna mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa, guna mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Dengan menganggapnya sebagai tujuan bernegara, UUD 1945 jelas-jelas menempatkan

kesejahteraan/keadilan-kemakmuran sebagai sesuatu yang esensial bagi kehidupan kita.

Dalam hal ini, menjadi nyata bagi kita bahwa prinsip menyelenggarakan negara yang adil dan makmur menurut UUD 1945, menjadi sama nilainya dengan pencapaian kesejahteraan yang dimaksudkan oleh *fiqh* tadi. Hal inilah yang harus dipikirkan secara mendalam oleh mereka yang menginginkan amandemen terhadap UUD 1945. Tidakkah amandemen seperti itu dalam waktu dekat ini, akan merusak rumusan tujuan bernegara tersebut?

*****

Tingginya kesejahteraan suatu bangsa, dengan demikian menjadi sesuatu yang esensial bagi Islam. Saudi Arabia dan negara-negara teluk lainnya telah mencapai taraf ini, walaupun masalah keadilan di negeri-negeri tersebut masih belum terwujud seluruhnya. Keadilan baru dibatasi pengertiannya pada keadilan hukum belaka, namun keadilan politik dan budaya belum terwujud. Dengan demikian, masih menjadi pertanyaan besar, apakah negara-negara tersebut demokratis ataukah belum? Memang terasa, jawaban atas pertanyaan di atas bersifat sangat pelik, apalagi dalam hal ini kita berhadapan dengan sebuah pertanyaan besar: benarkah demokrasi berdasarkan hak bersuara bagi tiap individu (*one man one vote principle*) telah mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya?

Penulis mengemukakan hal ini dengan maksud agar hal itu dibicarakan secara serius dalam wacana terbuka bagi kaum muslimin. Haruskah kita menerima pencapaian kesejahteraan dan terselenggaranya keadilan sekaligus sebagai persyaratan demokrasi? Jawaban yang jujur tentang hal ini memang sangat diperlukan, jika diinginkan wacana itu sendiri mempunyai nilai dan arti yang tinggi.

Jalinan antara kesejahteraan dan keadilan menjadi sangat

penting bagi kaum muslimin di negeri ini, paling tidak bagi kaum santri yang melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya upaya tersebut dapat dilihat pada tidak tercapainya keadilan maupun kesejahteraan di negeri ini, walaupun ia memiliki tiga sumber alam yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain: hutan yang lebat yang dikenal sebagai paru-paru dunia, kekayaan tambang yang luar biasa dan kekayaan laut yang kini banyak dicuri orang. Kegagalan mencapai kesejahteraan hidup bagi rakyat banyak itu, dapat dikembalikan sebabnya kepada kebijakan ekonomi dan peraturan-peraturan semenjak kemerdekaan kita, yang lebih banyak ditekankan pada kepentingan orang kaya/cabang atas dari masyarakat kita, bukan kepentingan rakyat banyak.

*****

Karena eratnya hubungan antara kebijakan/tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan pencapaian kesejahteraan, jelas bagi kita ajaran Islam memang belum dilaksanakan dengan tuntas oleh bangsa kita selama ini. Dikombinasikan dengan korupsi dan pungutan-pungutan liar yang ada, maka secara keseluruhan dapat dikatakan telah terjadi penguasaan aset-aset kekayaan bangsa. Dan dari penguasaan seperti itu dapatkah diharapkan akan tercapai kesejahteraan yang merata bagi bangsa kita? Jawaban atas pertanyaan ini, menunjukkan keharusan bagi kita untuk berani banting setir/kemudi dalam upaya mencapainya. Kalau tidak, berarti kita rela membiarkan sebagian besar bangsa kita hidup di bawah garis kemiskinan atau tidak jauh dari garis tersebut. Inginkah kita hal itu akan terjadi, manakala kita ingat tujuan mendirikan negeri ini?

Jelaslah bagi kita bahwa, pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa kita, merupakan amanat agama juga? Bukankah kita menjadi berdosa jika hal ini dilupakan dan kita tetap tidak melakukan perbaikan? Bukankah penjualan tanah dan

aset-aset lain oleh rakyat kecil di pedesaan kita, sekedar untuk memperoleh makanan saja, merupakan kejahatan kita atas agama yang tidak dapat dimaafkan?

Jawaban atas rangkaian pertanyaan di atas, membawa kita kepada keharusan menempuh kebijakan dan tindakan baru di bidang ekonomi: pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk memperluas dengan cepat inisiatif mendirikan dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam hal ini, segenap sumber-sumber daya kita harus diarahkan kepada upaya tersebut, yang berarti pemerintah langsung memimpin tindakan itu. Ini tidak berarti kita menentang usaha besar dan raksasa, melainkan mereka harus berdiri sendiri tanpa pertolongan pemerintah dan tanpa memperoleh keistimewaan apapun. Selain itu, kita tetap berpegang pada persaingan bebas, efisiensi dan permodalan swasta dalam dan luar negeri.

Jelaslah dari uraian di atas, upaya menegakkan ekonomi rakyat seperti itu tidak terlepas dari tujuan UUD 1945 atau ajaran Islam. Pencapaian kesejahteraan/*maslahah* menurut ajaran Islam dan pencapaian masyarakat adil dan makmur menurut UUD 1945 adalah sesuatu yang esensial bagi kita. Tanpa orientasi itu, apapun yang kita lakukan akan bertentangan dengan kedua-duanya. Cukup mudah dalam perumusan, tapi sangat sulit dalam pelaksanaan, untuk melakukan upaya banting setir/kemudi di bidang ekonomi, bukan? {}

Islam: Antara Birokrasi dan Pasar Bebas

Dalam menguraikan sejarah ekonomi bangsa-bangsa Timur Tengah, Charles Issawi menunjuk kepada Bangsa Mesir. Bangsa ini sulit melepaskan diri dari birokrasi pemerintahan, karena tradisi sejarah itu yang menunjukkan kekuatan mereka semenjak ribuan tahun yang lalu. Di mulai dengan Fir'aun/Paraoh yang menjadi manifestasi kekuasaan Tuhan di muka bumi, melalui para sultan yang menjadi wakilnya dan kekuasaan kaum imperialis yang luar biasa, birokrasi pemerintah menjadi sesuatu yang kokoh dengan adanya Sosialisme Arab di bawah Gamal Abdel Naser. Birokrasi pemerintahan mengembangkan diri begitu rupa, hingga kepentingan-kepentingannya seringkali disamakan dengan kepentingan rakyat banyak, sebuah hal yang secara perlahan-lahan tapi pasti sedang merasuki kehidupan kita sebagai bangsa.

Hal ini jarang dipikirkan orang, dan mau tak mau kita harus mengaitkannya dengan konsep negara Islam yang saat ini ditiup-tiupkan oleh sementara orang. Karenanya, sebuah pertanyaan harus dijawab sebelum meneruskan pemikiran tentang konsep tersebut yaitu: di manakah letak birokrasi pemerintahan dalam sebuah konsep negara Islam? Ini diperlukan, untuk menghindarkan sebuah negara Islam, kalau konsep seperti itu dapat dibuat dan kemudian dilaksanakan, karena hal itu akan menyangkut kepentingan kita bersama sebagai bangsa.

Dapat saja keinginan itu dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, tetapi ia harus dibicarakan di sini untuk memperoleh kejelasan tentang posisi Islam dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang bernegara dan bermasyarakat. Jika ini kita abaikan, jangan-jangan kita dihadapkan kepada semakin kuatnya birokrasi pemerintahan dalam kehidupan kita. Ini untuk menghindarkan kita dari penyesalan berkepanjangan, jika gagasan tentang konsep negara Islam dapat diwujudkan.

*****

Ketika penulis menanyakan kepada Datuk Seri Dr. Mahathir Muhamad, tentang keputusan Malaysia keluar dari kungkungan Dana Moneter Internasional (IMF), beliau menjawab bahwa guru besar *Massachussets Institute of Technology* (MIT), Paul Krugman yang menganjurkan hal itu. Ketika guru besar itu singgah di Jakarta, penulis bertanya kepadanya; apakah hal itu sebaiknya juga dilakukan oleh Indonesia? Beliau menyatakan, Malaysia dapat melakukannya karena memiliki birokrasi yang bersih dan ramping (*clean and lean bureaucracy*), dan Indonesia sebaiknya tidak melakukan hal itu, karena tidak memiliki birokrasi seperti yang disebutkan tadi. Penulis tidak menjawabnya, karena disadari kita memang memiliki birokrasi pemerintahan yang terlalu besar dan korup.

Karena itu, yang ingin diutamakan adalah beberapa hal, dimulai dari peningkatan pendapatan pegawai negeri sipil dan warga TNI/POLRI. Persenjataan dan kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara drastis, kalau diinginkan mereka tidak terlibat tindakan-tindakan korup dan penyelundupan. Tanpa dilakukannya kedua hal itu, mustahil kita akan memiliki birokrasi yang jujur. Sementara itu, pengalihan tenaga-tenaga birokrasi harus terus dilakukan begitu rupa, agar tempat-tempat yang memerlukannya memperoleh tenaga birokrat yang cukup, dan tempat-tempat yang tidak begitu memerlukan terlalu banyak akan

memperoleh birokrasi sejumlah yang diperlukan.

Demikian pula, status purnawirawan harus diterapkan pada waktunya agar tidak menghambat karier maupun kemungkinan promosi generasi muda. Jika hal ini dilaksanakan secara konsekuen, dalam waktu beberapa tahun saja akan tercapai keseimbangan antara kebutuhan birokrasi dan tersediannya tenaga untuk itu. Pada tahap itulah kita baru dapat melakukan rekonsiliasi kepegawaian –seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Memang berat tugas menciptakan birokrasi dalam jumlah dan tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan, tapi memang masa depan bangsa ini tergantung sepenuhnya pada kemampuan kita untuk mewujudkan keseimbangan seperti itu.

*****

Hal itu berarti keharusan menciptakan profesionalisme penuh bagi sistem kepegawaian kita. Kitab suci al-Qurân menyebutkan keharusan itu dengan istilah "memenuhi janji mereka di kala mengucapkan sumpah prasetia kepada jabatan" (*wal mûfûna bi 'ahdihim idzâ 'âhadû*)(QS al-Baqarah(2):176). Adakah sebuah janji yang lebih besar dari pada sesuatu yang diucapkan ketika menyatakan janji prasetia kepada jabatan? Karena itulah profesionalisme harus ditegakkan, guna memungkinkan kita menepati janji prasetia yang kita ucapkan ketika pertama kali menerima jabatan.

Birokrasi pemerintahan memang diperlukan oleh sebuah negara modern, namun birokrasi seperti itu haruslah benar-benar profesional, untuk membantu dalam pengambilan keputusan pemerintah serta mencari kebijakan yang diperlukan untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi, birokrasi pemerintahan bukanlah entitas independen, melainkan sebagai pihak yang selalu berpegang kepada kepentingan warga negara kebanyakan.

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa Islam tidak memberikan kekuasaan mutlak kepada birokrasi pemerintahan untuk

berbuat semau mereka. Tetapi, Islam juga memandang pentingnya arti birokrasi pemerintahan yang baik, karena segenap kebijakan pemimpin tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya oleh sebuah birokrasi pemerintahan. Sebaliknya, pasar bebas yang merupakan inti dari sistem ekonomi hanya akan terwujud tanpa terlalu besarnya birokrasi pemerintahan. Karenanya, birokrasi pemerintahan yang tidak terlalu besar dan tunduk sepenuhnya kepada para pemimpin politik sebagai pengambil keputusan terakhir, merupakan keharusan yang tak dapat ditawar lagi (*conditio sine qua non, mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihî fahua wâjibun*). Tidakkah lalu menjadi jelas bagi kita, bahwa menurut pandangan Islam, birokrasi pemerintahan seharusnya berukuran tidak terlalu besar dan memiliki wewenang serba terbatas. {}

Islam dan Teori Pembangunan Nasional

Nabi Muhammad Saw bersabda: "setiap kalian adalah penggembala, dan seorang penggembala akan ditanya tentang gembalaannya" (*kullukum râ'in wa kullu râ'in mas'ûlun 'an ra'îyyatihi*). Hal ini merupakan landasan moral bagi setiap warga negara untuk mempertanyakan orientasi dan teori pembangunan nasional yang dipakai di negaranya. Sejauh ini, yang diajukan selalu hanya orientasi pembangunan yang elitis dan teori pembangunan nasional yang sekuler. Sangat sedikit perhatian diberikan pada orientasi dan teori pembangunan nasional yang diambil dari ajaran agama. Padahal, banyak sekali aspek-aspek spiritual yang dapat dijadikan landasan bagi teori pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dan orientasi pembangunan yang memiliki sisi keagamaan sangat kuat.

Akibat yang sangat terasa bagi kita dewasa ini adalah orientasi pembangunan kita yang serba elitis dan hanya mementingkan kaum kaya dan cabang atas dari masyarakat kita, sedangkan banyak sekali para orang kaya –yang di kemudian hari menjadi konglomerat hitam, dengan membawa lari modal pinjaman mereka ke luar negeri. Ini adalah akibat langsung dari orientasi pembangunan yang serba elitis tadi, yang bertumpu pada ekspor produk-produk ke luar negeri, dan sama sekali tidak memberikan perhatian pada pembentukan modal secara besar-besaran kepada

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), minimal dengan pemberian kredit murah bagi mereka, serta pemberian kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas lain. Akibatnya, adalah krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan di negeri kita, hingga dewasa ini.

Untuk meredam suara protes yang mencari sebab-musabab kedua krisis ini, dikemukakanlah acuan-acuan seperti persaingan, perniagaan internasional yang bebas dan keharusan berefisiensi. Padahal ketiga patokan itu berarti persyaratan yang harus dipenuhi, jika diinginkan gerak perekonomian yang sehat bagi sebuah negara. Orientasi memajukan gerak ekonomi, baik yang bersifat elitis seperti memajukan konglomerasi, maupun yang profesional dengan bersandar pada pertumbuhan UKM yang kuat, mengharuskan adanya kompetisi yang ketat, penghormatan kepada tata niaga internasional dan kemampuan efisiensi yang tinggi.

*****

Ukuran tunggal yang digunakan dalam menilai majunya perekonomian, memang berbeda dari teori pembangunan nasional yang sekuler dari teori pembangunan nasional yang lebih lengkap (baik aspek spiritual keagamaan maupun aspek-aspek lainnya). Teori pembangunan nasional yang sekuler selalu bermula dari tinggi rendahnya pendapatan nasional sebuah bangsa, dengan menggunakan berbagai pertimbangan kuantitatif. Sedangkan teori pembangunan nasional yang bersumber pada agama, senantiasa bermula dari tanggungjawab menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (menurut bahasa UUD 1945), sedangkan menurut ajaran agama Islam dinamai kesejahteraan. Perbedaan titik tolak dalam memandang hasil pembangunan nasional ini, tidak dapat dihindarkan, karena memang cara melihat masalahnya pun berbeda. Dari sudut pandang spiritual keagamaan, yang dinilai adalah capaian individu warga masyara-

kat, sedangkan bagi teori pembangunan nasional yang sekuler, yang dipentingkan adalah capaian makro masyarakat secara keseluruhan. Tentu saja cara pandangnya pun berbeda satu dari yang lain, karena perbedaan titik tolak tersebut.

Dari perbedaan teori yang digunakan, yang akhirnya perbedaan dalam cara memandang pembangunan nasional, jelas bahwa kita harus memilih antara teori pembangunan nasional yang sekuler atau teori pembangunan yang lebih menyeluruh. Tentu saja pilihan orang seperti penulis lalu jatuh pada teori pembangunan nasional yang lebih berorientasi spiritual/keagamaan. Karena, di samping ukuran-ukuran kuantitatif seperti penghasilan nasional, capaian umur rata-rata warga negara – baik pria dan wanita serta pemilikan rata-rata perorangan tiap penduduk sebuah negara terhadap mobil, rumah, telepon dan sebagainya, juga digunakan ukuran non-materiil –seperti keadilan, HAM, dan kemakmuran kolektif. Jadi, ukuran yang digunakan tidak hanya satu corak saja, tapi memiliki beragam ukuran dari satu ke lain bidang.

Ini menjadi sesuatu yang penting, karena dengan ukuran-ukuran kuantitatif akan tetap terdapat disparitas yang tinggi dalam kehidupan di berbagai sektor, seperti perniagaan, pertukangan dan sebagainya. Justru di negara-negara berkembang, disparitas itu terasa sangat tinggi. Sedangkan di negara-negara berteknologi maju hal itu kurang terasa. Kecenderungan masyarakat di Jepang, misalnya, yang membatasi perbedaan pendapatan tertinggi sekitar 20 kali lipat pendapatan terendah, membuat masyarakat tidak terlalu dilanda kecemburuan sosial yang besar. Dengan ungkapan lain, kapitalisme di negara-negara berteknologi maju telah membentuk susunan masyarakat yang lebih kecil kesenjangannya, sesuatu yang belum ada pengaturannya di negara-negara yang sedang berkembang.

*****

Dengan demikian, slogan-motto-semboyan yang digunakan dalam pembangunan nasional pun juga berbeda. Nah, perbedaan ini harus dicari sumber-sumbernya dalam teori pembangunan nasional yang digunakan. Inilah yang membuat penulis membedakan teori pembangunan nasional yang sekuler dari teori yang juga memasukkan dalam dirinya aspek-aspek spiritual-keagamaan. Pencarian orientasi lebih lengkap ini dilakukan penulis, karena ia melihat ketimpangan-ketimpangan dalam orientasi pembangunan yang sedang berjalan, yang memanjakan golongan atas dan pengusaha kaya belaka.

Perhatian kurang sekali diberikan, kepada teori pembangunan nasional yang lebih lengkap, yang memunculkan orientasi kesejahteraan bersama seluruh warga negara, di samping ukuran kuantitatif yang lazim digunakan. Krisis ekonomi finansial yang melanda kehidupan bangsa kita dewasa ini, jelas diakibatkan oleh orientasi pembangunan nasional yang terlalu elitis, dan mengabaikan ukuran-ukuran seperti kesejahteraan bersama, keadilan sosial, penegakan hukum dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

Jelaslah dengan demikian, bahwa ukuran mikro dan makro yang benar harus sama-sama digunakan dalam mengukur capaian pembangunan nasional kita. Ini berarti perubahan besar dalam cara memandang strategi pembangunan nasional yang digunakan. Di samping optimasi persaingan, penerimaan tulus terhadap tata niaga internasional dan penghargaaan rasional kepada efisiensi (yang lebih bersifat ukuran-ukuran mikro), digunakan juga orientasi yang benar akan keadilan sosial, kedaulatan hukum dan HAM. Dengan kata lain, di samping ukuran-ukuran kuantitatif yang bersifat mikro, digunakan juga ukuran-ukuran kualitatif dalam arti orientasi pada keadilan, kedaulatan hukum dan kepentingan rakyat banyak sebagai hal-hal makro yang juga harus diperhatikan. {}

ISLAM DAN GLOBALISASI EKONOMI

Globalisasi ekonomi dunia, saat ini sering diartikan sebagai persaingan terbuka, ketundukan mutlak pada kompetisi dan penerimaan total atas "kebenaran" tata niaga internasional yang diwakili oleh *World Trade Organisation* (WTO). Benarkah dan cukupkah hal ini, menjadi perhatian kita melalui tulisan ini. Dalam uraian ini, akan tampak bagaimana pandangan tentang hal-hal tersebut, dan dimaksudkan akan tercapai kejelasan mengenai hal ini dalam uraian berikut.

Dengan kata lain, globalisasi ekonomi dimaksudkan untuk membenarkan dominasi perusahaan-perusahaan besar atas perekonomian negara-negara berkembang, yang tentu saja akan sangat merugikan negara-negara tersebut. Karena itulah, tentangan atas WTO dan pengertian globalisasi seperti itu justru dilancarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang berpangkalan di negara-negara berteknologi maju. Penentangan terbuka atas WTO oleh LSM internasional di Seatle, mempengaruhi sikap negara-negara berkembang, yang dimunculkan dalam konferensi WTO di Qatar tahun lalu.

Namun, tentangan terhadap gagasan globalisasi ekonomi itu tidak dilanjutkan dengan kampanye besar-besaran untuk menumbuhkan pengertian baru atas kata globalisasi itu sendiri. Yang terjadi adalah sebuah pendekatan negatif, yang tanpa diikuti kampanye besar-besaran untuk mensukseskan sebuah pendekatan positif berupa pengertian baru akan kata globalisasi tersebut. Dengan kegagalan menampilkan strategi positif itu

tampak bahwa pengertian lama yang negatif tentang globalisasi tetap berlaku. Hal ini tentu berbeda, misalnya, dengan strategi Bung Karno untuk menyerang imperialisme dengan mengemukakan alternatifnya, yaitu negara-negara Asia-Afrika.

Dalam memahami arti globalisasi di luar pengertian yang sudah lazim, kita dapat juga bertitik tolak dari pandangan agama tentang pembangunan nasional. Pandangan itu, berangkat dari apa yang dimaksudkan agama Islam tentang fungsi ekonomi dalam kehidupan sebuah masyarakat, bertumpu pada dua faktor utama: arti barang dan jasa bagi kehidupan manusia dan bagaimana masyarakat menggunakan barang dan jasa tersebut. Modal, dalam pandangan ini, adalah sesuatu yang diperlukan untuk membuat sesuatu barang atau jasa bagi kehidupan masyarakat. Dalam memandang modal seperti itu, menjadi jelas bahwa keuntungan/profit merupakan hasil sekunder yang tidak hanya memperbaiki kehidupan pemilik modal, tapi juga ia tidak berakibat menyengsarakan pembeli/pengguna barang tersebut.

Maksudnya, laba tidak hanya berfungsi menguntungkan pemilik modal, tapi ia juga berfungsi menciptakan keadilan dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Dengan kata lain, laba/keuntungan tidak boleh bersifat manipulatif, berarti tidak dibenarkan penggunaan sebuah faktor produksi, untuk memanipulasi pihak lain. Dalam pandangan Islam, tidak diperkenankan adanya pendekatan *laisses faire* (kebebasan penuh) yang menjadi ciri kapitalisme yang paling menonjol. Dalam pandangan ini, benda dan jasa harus memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, hingga hilanglah sifat eksploitatif dari sebuah transaksi ekonomi. Dengan ungkapan lain, yang dijauhi oleh Islam bukanlah pencarian laba/untung dari sebuah transaksi ekonomi, melainkan sebuah pencarian laba/untung yang bersifat eksploitatif.

Dengan pendekatan non-eksploitatif semacam itu, memang tidak dibenarkan adanya perkembangan pasar tanpa campur tangan pemerintah, minimal untuk mencegah terjadinya

eksploitasi itu sendiri. Di sinilah peranan negara menjadi sangat penting, yaitu menjamin agar tidak ada manusia/warga negara yang terhimpit oleh sebuah transaksi ekonomi. Manusia harus diutamakan dari mekanisme pasar dan bukan sebaliknya. Jika prinsip non-eksploitatif dalam sebuah transaksi ekonomi seperti digambarkan di atas terjadi, maka dengan sendirinya pengertian akan globalisasi juga harus dijauhkan dari dominasi sebuah negara/perusahaan atas negara/perusahaan lain. Karena itu, globalisasi dalam pengertian lama yang hanya mementingkan satu pihak saja haruslah dirubah dengan pengertian baru yang lebih menekankan keseimbangan antara pemakai/pengguna sebuah barang/jasa dan penghasil (produsennya).

Dengan demikian, pencarian untung/laba dalam globalisasi tidak harus diartikan sebagai kemerdekaan penuh untuk melikuidasi saingan mereka, melainkan justru diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Penyesuaian antara kepentingan pihak konsumen dan produsen ini, tentulah menjadi titik penyesuaian antara kepentingan berbagai negara satu sama lain di bidang ekonomi dan perdagangan.

Di lihat dari sudut penafsiran seperti itu, dalam pandangan Islam diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara produsen barang/jasa dan negara pengguna barang/jasa tersebut, sehingga tercapai keseimbangan atas kehidupan internasional di bidang ekonomi/finansial. Dengan kata lain, keadilan tidak memperkenankan kata globalisasi digunakan untuk menjarah kepentingan sesuatu bangsa atau negara, hingga kata itu sendiri berubah arti menjadi tercapainya keseimbangan antara kedua belah pihak. Singkatnya, WTO seharusnya berperan mendorong perkembangan ke arah itu, bukannya menjamin kebebasan berniaga secara penuh, dengan hasil terlemparnya bangsa atau perusahaan lain karenanya. Sederhana, bukan? {}

Syari'atisasi dan Bank Syari'ah

Judul di atas keluar dari pengamatan penulis yang melihat proses "penyantrian" kaum muslimin di seluruh dunia Islam saat ini. Tentu saja, pendapat ini berdasarkan pengamatan sebelumnya, bahwa ratusan juta muslimin dapat dianggap sebagai orang-orang "Islam statistik" belaka alias kaum muslimin yang tidak mau atau tidak dapat menjalankan ajaran-ajaran agama mereka. Orang-orang seperti itu, di kalangan "kaum santri" di negeri kita, dikenal dengan nama "orang-orang abangan" (nominal muslim). Mereka berjumlah sangat besar, jauh lebih besar daripada kaum santri. Jika di masa lampau ada anggapan, bahwa kaum santri yang melaksanakan secara tuntas ajaran-ajaran agama mereka berjumlah sekitar 30 % dari penduduk Indonesia, maka selebihnya, mayoritas bangsa ini tidak melaksanakan "kewajiban-kewajiban" agama dengan tuntas.

Karena " menyadari" hal itu, dengan kata lain menganggap Islam baru tersebar dalam lingkup *tauhid* di negeri kita, maka para wakil berbagai organisasi Islam, menerima pencabutan Piagam Jakarta dari pembukaan UUD 1945. Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Mudzakir, Abikusno Tjokrosuyoso, Ahmad Subardjo, Agus Salim, A. Wahid Hasyim menerima pencabutan piagam itu dengan mewakili organisasi masing-masing. Tentu mereka bersikap seperti itu, karena secara *de facto* telah berkonsultasi

dengan kawan-kawan lain dari organisasi masing-masing, atau paling tidak mereka mengetahui sikap itu diterima secara umum di kalangan gerakan Islam di Indonesia. Hanya dengan keyakinan seperti itulah, mereka akan mengambil sikap seperti dikemukakan di atas. Pengetahuan sejarah tersebut sangat diperlukan, untuk mengetahui jalan pikiran para wakil berbagai perkumpulan Islam itu, sebuah kenyataan sejarah yang penting untuk mengetahui motif dari keputusan yang diambil tersebut.

Pada saat ini, organisasi-organisasi Islam menguasai wacana politik dan budaya di negeri kita. Sebagaimana terlihat dalam demikian banyak para "santri" yang membeberkan pandangan dan pemikiran mengenai kedua bidang tersebut dalam media khalayak. Walaupun yang dibicarakan adalah topik-topik yang sangat beragam, yang hanya sebagian saja menyangkut aspek-aspek agama Islam, namun hampir duapertiga paparan pendapat dan pemikiran itu berasal dari "dunia santri". Bahkan mereka yang tidak menjalankan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari telah turut bersama-sama menyatakan pendapat dan pandangan kaum santri di media khalayak. Ternyata fakta ini tidak terbantahkan, sehingga banyak pegamat asing tentang Indonesia, berpandangan bahwa sangatlah penting untuk mengetahui pandangan kaum santri tentang berbagai hal yang menyangkut Indonesia.

*****

Salah satu perkembangan yang menarik untuk diamati adalah pelaksanaan s*yari'at* (jalan hidup kaum muslimin), yang umumnya terkodifikasikan dalam kehidupan masyarakat santri di negeri kita. Walaupun tidak semua ajaran Islam dijalankan dengan tekun, paling tidak slogan "*syari'atisasi*" telah dilakukan oleh mereka yang "sadar" akan pentingnya Islam sebagai "pemberi warna" hidup bangsa kita. Bahkan, berbagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, telah

membuat sesuatu yang melanggar "kesepakatan bersama" untuk tidak mengaitkan negara kepada kehidupan beragama secara formal atau resmi. Karena itu, ketika penulis masih menjadi Presiden, telah mengusulkan agar tiap Peraturan Daerah yang isinya bertentangan dengan undang-undang dasar dianggap batal.

Karena itulah, perkembangan upaya "*syari'atisasi*" harus dimonitor terus, semestinya perkembangan itu harus sejalan dengan keputusan sidang kabinet yang tertera di atas. Nah, mengapa sampai sekarang belum ada pelaksanaan *syari'ah* di beberapa daerah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945? Jawabnya, karena Mahkamah Agung yang seharusnya memberikan kata akhir bagi pembahasan hal-hal mendasar bagi kehidupan kita bersama, tidak menjalankan kewajibannya. Sebuah Mahkamah Agung yang benar-benar menjalankan kewajiban, tentulah tidak takut kepada tekanan berbagai pihak, termasuk "kaum teroris". Karena ketakutan itu, Mahkamah Agung kita akhirnya tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam menyelesaikan berbagai masalah sangat penting bagi negeri kita. Mahkamah Agung kita sekarang takut kepada tekanan yang ingin memberlakukan *syari'ah* Islam, maka benarlah apa yang dikatakan Franklin D. Roosevelt, Presiden USA yang meninggal dunia tahun 1945, bahwa apa yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri (*what we have to fear is fear itself*).

Umpamanya, Peraturan Daerah yang dibuat DPRD Sumatera Barat bahwa perempuan tidak boleh bekerja sendirian setelah jam 09.00 malam tanpa "dikawal" seorang keluarga dekat, jelaslah sekali bertentangan dengan UUD 1945, yang menyamakan kedudukan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara lelaki dan perempuan. *Syari'atisasi* macam inilah yang seharusnya dilihat bertentangan dengan UUD 1945, atau tidak oleh MA yang penakut itu. Kalau ada upaya membuat *syari'atisasi* yang sejalan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, persoalannya adalah penggunaan nama "*syari'ah*" itu sendiri. Tentu itu dilakukan

dengan tujuan "meng-Islamkan" perundang-undangan di negeri ini, sesuatu yang sebenarnya berbau politik. Mantan Ketua Mahkamah Agung Mesir, Al-Ashmawi pernah mengemukakan dalam sebuah buku, bahwa tiap undang-undang yang berisikan pencegahan dan hukuman (*deterrence and punishment*) pada hakikatnya dapat diperlakukan sebagai bagian dari hukum Islam.

Jelaslah dengan demikian, upaya melakukan *syari'atisasi* dengan menggunakan kerangka Al-Ashmawi itu, adalah apa yang oleh *fiqh* (hukum Islam) dan cabang-cabangnya dinamai "melakukan hal yang tidak perlu, karena sudah dilakukan" (*tahsil al-hasil*). Namun saat ini, yang tercapai hanyalah penamaan saja, sedangkan substansi atau isinya tidak diperhatikan, sehingga dilakukan secara sembarangan saja. Sedangkan seharusnya, proses *syari'atisasi* lebih tepat dilakukan oleh masyarakat sendiri, tanpa penggunaan nama *syari'ah*. Hal tersebut dapat terjadi sebagai proses dalam hidup bernegara. Dengan demikian dapat disimpulkan, penyebutan *syari'ah* dalam produk-produk DPRD propinsi, kabupaten dan kota hanya bersifat politis saja, sesuatu yang perlu disayangkan, karena terbawa oleh kerancuan kerangka berpikir kita sendiri.

*****

Dalam hal ini perlu kita menyayangkan, bahwa beberapa bank pemerintah telah mendirikan bank syari'ah, sesuatu hal yang masih dapat diperdebatkan. Bukankah bank seperti itu menyatakan tidak memungut bunga bank (*bank interest*) tetapi menaikkan ongkos-ongkos (*bank cost*) di atas kebiasaan? Bukankah dengan demikian terjadi pembengkakan ongkos yang tidak termonitor, merupakan sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip cara kerja sebuah bank yang sehat. Lalu, bagaimanakah halnya dengan transparansi yang dituntut dari cara kerja sebuah bank agar biaya usaha dapat ditekan serendah mungkin.

Karenanya, banyak bank-bank swasta dengan para pemilik saham non-muslim, turut terkena "demam *syari'atisasi*" tersebut. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam tersebut. Begitu juga, sangat kurang diketahui bahwa Islam dapat dilihat secara institusional/kelembagaan di satu pihak, dan sebagai kultur/budaya di pihak lain. Kalau kita mementingkan budaya/kultur, maka lembaga yang mewakili Islam tidak harus dipertahankan mati-matian, seperti partai Islam, pesantren, dan tentu saja bank syari'ah. Selama budaya Islam masih hidup terus, selama itu pula benih-benih berlangsungnya cara hidup Islam tetap terjaga. Karena itu, kita tidak perlu berlomba-lomba mengadakan *syari'atisasi*, bahkan itu dilarang UUD 1945 jika dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan? {}



Ekonomi Rakyat Ataukah Ekonomi Islam?

Dalam tiga dasawarsa terakhir ini, beberapa pemikir mengemukakan apa yang mereka namakan sebagai teori ekonomi Islam. Semula, gagasan tersebut berangkat dari ajaran formal Islam mengenai riba dan asuransi, yang berintikan penolakan terhadap bunga bank sebagai riba, dan praktek asuransi yang bersandar pada sifat "untung-untungan". Ditambahkan dalam kedua hal itu, penolakan pada persaingan bebas (*laisses faire*) sebagai sistem ekonomi yang banyak digunakan. Intinya dalam hal ini adalah sikap melindungi yang lemah dan membatasi yang kuat seperti dalam pandangan Islam.

Dalam perkembangan berikutnya, dasawarsa 80-an memunculkan sejumlah orang yang dianggap menjadi eksponen pandangan ekonomi Islam. Mereka banyak berasal dari lingkungan lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga tak heran jika mereka mengacu pada orientasi kepentingan rakyat kecil dan menolak peranan perusahaan-perusahaan besar dalam tatanan ekonomi yang ada waktu itu. Namun, mereka gagal mengajukan sebuah teori yang bulat dan utuh yang dapat dianggap mewakili ekonomi Islam. Keberatan mereka terhadap praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), monopoli dan dominasi (hasil kerjasama pengusaha dengan para pejabat pemerintahan), adalah keberatan yang tidak didukung oleh teori yang lengkap,

dan dengan demikian hanya dianggap sebagai orientasi kelompok belaka.

Dengan perubahan kebijaksanaan di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di ujung dasawarsa itu dan didukung pula oleh kemunculan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), kelompok tersebut lalu berubah pikiran dan ikut memperebutkan jabatan sebagai pejabat pemerintah. Ini berarti, mereka lebih mengutamakan pendekatan institusional, dengan merebut institusi-institusi pemerintahan, dan cenderung meninggalkan perjuangan kultural. Namun, "kemenangan" institusional itu tidak membuat mereka semakin kuat, karena mereka tidak dapat menghambat korupsi, dan bahkan akhirnya justru mereka sendirilah yang melakukan korupsi. Akhirnya mereka menghamba pada kekuasaan, dengan mengusung pendekatan institusional dalam perjuangan, dan melupakan perjuangan kultural. Justru organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang mempelopori perlawanan kultural itu, dengan tetap menolak untuk melegitimasi institusi pemerintahan.

*****

Dengan demikian, watak merakyat dari perjuangan di tingkat bawah berubah menjadi perjuangan politik. Karenanya, hal-hal ekonomi pun juga diukur dengan ukuran-ukuran politik. Nyata sekali dalam hal ini, contohnya yang terjadi dengan Kredit Usaha Tani (KUT). KUT yang semula merupakan program ekonomi, dengan cepat berubah menjadi sebuah program politik. Yaitu mengusahakan sebuah program pendukung kekuasaan untuk menang dalam pertarungan politik melawan pihak-pihak lain, tanpa memandang kecakapan ekonomis dan kemampuan finansial. Jadilah program itu seperti sekarang ini, yakni menjadi bulan-bulanan pihak Pengadilan Negeri (PN) karena *klien*-nya dihadapkan pada pengadilan, termasuk di dalamnya para kyai.

Ini semua, merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, dan metamorfosa yang terjadi adalah bagian dari perjuangan politik, dan bukan bagian dari perjuangan ekonomi.

Dengan perubahan perjuangan ekonomi menjadi perjuangan politik, otomatis upaya menolong rakyat kecil hanya menjadi sisa-sisa. Bahwa upaya politik mempertahankan institusi, baik itu institusi mikro seperti proyek-proyek yang tergabung dalam KUT, maupun upaya makro untuk mempertahankan kekuasaan, jelas menggambarkan kenyataan menarik: kegagalan dalam mengembangkan apa yang dinamakan ekonomi Islam, baik dalam teori maupun praktek. Rentetan yang terjadi adalah upaya pelestarian kekuasaan secara politis juga menghadapi kegagalan pula.

Turut hancur pula dalam proses ini, pengembangan teori ekonomi Islam, karena ia dikait-kaitkan dengan kekuasaan yang ada. Keadaan diperparah oleh kenyataan tidak adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah di masa lampau. Ini berarti, gagasan tentang ekonomi Islam di negeri kita, tidak pernah didasarkan atas peninjauan mendalam dari kebijakan, langkah-langkah dan keputusan-keputusan pemerintah di bidang tersebut. Bagaimana akan dibuat acuan mengenai sebuah sistem ekonomi Islam, kalau fakta-fakta ekonomi dan finansial semenjak kita merdeka tak pernah ditinjau ulang?

*****

Dari tinjauan ulang itu akan dapat diketahui, bahwa tatanan ekonomi dan finansial kita, di dasarkan hampir seluruhnya atas kecenderungan menolong sektor yang kuat dan mengabaikan sektor yang dianggap sebagai ekonomi lemah. Ketimpangan ini dapat dilihat, umpamanya dalam hal pemberian fasilitas, kemudahan dan pertolongan bagi usaha kuat. Apalagi, setelah pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa, yang belakangan menjadi konglomerat, berhasil menguasai sektor tersebut. Ekonomi rakyat

menjadi semakin tidak diperhatikan, dan ungkapan-ungkapan tentang ekonomi rakyat itu dalam kebijakan pemerintah hanyalah bersifat retorika belaka.

Alokasi dana untuk pengembangan ekonomi rakyat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), umpamanya, menunjukkan betapa sedikitnya perhatian kepada sektor ini. Kebocoran RAPBN, yang dalam perkiraan Prof. Soemitro Djojohadikusumo telah mencapai 30% dari jumlah anggaran, menjadikan sangat kecilnya perhatian pemerintah kepada sektor ini. Belum lagi matinya kreatifitas usaha kecil dan menengah (UKM) di hadapan birokrasi pemerintahan yang sangat kaku. Ketika mencari pemecahan bagi masalah-masalah yang dihadapi tadi, disinilah tampak adanya kegagalan terhadap apa yang dinamakan ekonomi Islam. Itulah sebabnya, mengapa pemikiran mengenai ekonomi Islam sekarang menjadi sangat mandul.

Ketika Drs. Kwik Kian Gie mengemukakan keinginan agar Indonesia keluar dari dana moneter internasional (IMF, *International Monetary Fund*), tak ada seorang pun dari para pemikir gagasan ekonomi Islam itu yang menyatakan suara menerima atau menolak pandangan tersebut. Ini tentu disebabkan oleh perubahan besar dari pemikiran ekonomi menuju pada upaya politik seperti digambarkan di atas.

Padahal, salah satu gagasan yang sering dilontarkan penulis secara lisan dalam rapat-rapat umum di seluruh bagian negeri ini, jelas mengacu pada kebutuhan tersebut. Yaitu keharusan kita untuk mempertahankan kompetisi, tata niaga internasional dan efisiensi yang rasional, merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dari sebuah kebangkitan ekonomi. Namun, yang harus didorong sekuat tenaga, adalah ekonomi rakyat dalam bentuk kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas dan sistem kredit sangat murah bagi perkembangan UKM dengan cepat. Dibarengi dengan peningkatan pendapatan pegawai negeri sipil dan militer, yang harus dilakukan guna mendorong peningkatan kemampu-

an daya beli (*purchasing power*) mereka.

Perkembangan gagasan ekonomi Islam jelas menunjukkan kemandulan, karena hanya bersifat normatif dan mengganggu perumusan pemikiran-pemikiran responsif. Dengan kata lain, gagasan ekonomi Islam itu lebih cenderung untuk mempermasalahkan aspek-aspek normatif, seperti bunga bank dan asuransi. Artinya, pemikiran yang dikembangkan dalam gagasan ekonomi Islam itu lebih banyak menyangkut nilai-nilai daripada pencarian cara-cara atau aplikasi yang justru diberlakukan oleh nilai-nilai tersebut. Jadi, masalahnya cukup sederhana bukan?{}

APAKAH ITU EKONOMI RAKYAT?

Penulis kata pengantar buku " *Perekonomian Indonesia dari Bangkrut Menuju Makmur*" (Teplok Press, Januari 2003), bukanlah seorang ahli ekonomi. Karena itu, tidak mengetahui lebih mendalam tentang ekonomi rakyat (*people economics*), dan tidak tahu hal-hal lain mengenai sebuah perekonomian, kecuali dua hal saja. *Pertama*, ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan manusia, dan bahwa ia memiliki mekanisme sendiri. Selebihnya, haruslah dirumuskan oleh para ahli ekonomi sendiri, dan mereka harus mempertimbangkan kaitan sebuah perekonomian dengan hal-hal lain dalam kehidupan seperti, politik, hukum, teknologi, pasar, agama dan lain-lain. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi (*economic policy*) tidak pernah sepenuhnya dapat diterapkan, sehingga harus selalu diingat keterkaitan ekonomi dengan hal-hal lain dalam kehidupan sebuah negara. *Kedua*, sebuah perekonomian tidak pernah terlepas dari perdagangan, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional, dengan demikian tidak pernah ada tempat untuk memisahkan perekonomian kita sendiri dari perekonomian global, yang membuat kita sengsara lebih dari perkiraan kita sendiri.

Hal ini dapat kita lihat pada perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia ini, yang baru berjalan puluhan ribu tahun saja. Karenanya, sangatlah menarik untuk melihat bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil dalam sejarah sebuah bangsa. Hal itu

memberikan pengaruh sangat besar kepada para pemimpin bangsa yang bersangkutan, dalam menentukan kebijakan demi kebijakan selanjutnya. Ini adalah bidang tersendiri, yang sering dinamai sejarah perekonomian (*economic history*), yang merupakan disiplin ilmu, yang harus diketahui seorang penguasa pemerintahan. Namun wajar saja, jika seorang penguasa tidak mengetahui hal itu, mereka mengira apa yang mereka putuskan hanya bersifat teknis belaka, paling tinggi sebagai sebuah "keputusan politik". Dengan demikian, mereka tidak menyadari keputusan mereka sebenarnya menyangkut bidang politik ekonomi. Bagaikan susu seekor kerbau yang diberi nama sapi, artinya "susu kerbau dianggap sebagai susu sapi" hanya karena sama-sama putih warnanya.

Kerancuan mengira apa yang dibacanya atau diamatinya dari sejarah sebuah bangsa, adalah sebuah keputusan politik, padahal itu adalah keputusan politik ekonomi, pernah juga dialami oleh penulis kata pengantar ini (selanjutnya disebut penulis). Pada waktu baru di terbitkan, penulis membaca karya Arthur M. Schlesinger Jr, penulis pidato masa mendiang Presiden Kennedy, yang berjudul "*The Age of Jackson*". Sebagai dosen Universitas Harvard di bidang sejarah, ia menghasilkan apa yang oleh penulis dianggap sebagai buku sejarah. Baru belakangan disadari penulis, bahwa yang dilakukan Presiden Jackson itu adalah mengambil keputusan politik ekonomi yang sangat mendasar. Jackson memutuskan untuk mengangkat Kepala Gubenur Bank Sentral Amerika dari seorang Jerman berkewarganegaraan Amerika Serikat. Ia memimpin sekian orang direktur dengan jabatan gubenur, dan bersama mereka mengemudikan Federal Reserve System.

*****

Keputusan Jackson membawa perubahan mendasar atas jalannya sistem ekonomi di negara tersebut. Karena ia meng-

anggap pemimpin Bank Sentral di negerinya harus ditetapkan presiden dengan persetujuan kongres. Padahal teori kapitalisme klasik menyatakan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi nasional, dan pengangkatan pejabat ekonomi dan finansial sepenuhnya menjadi wewenang pihak swasta bukan pemerintah. Tetapi Jackson justru mengangkat para pejabat pemerintahan untuk mengelola Bank Sentral itu. Hal ini menunjukkan keyakinan Jackson, bahwa urusan Bank Sentral tidak terbatas hanya pada bidang ekonomi saja, melainkan juga menyangkut pengelolaan uang pajak yang dibayarkan rakyat sebagai warga negara. Untuk melakukan pengelolaan itu dan seterusnya, juga menggunakannya untuk keperluan rakyat, harus dilakukan oleh "orang-orang pemerintah". Dengan demikian, Jackson berkeyakinan Bank Sentral bukanlah semata-mata bertanggung jawab atas jalannya perekonomian nasional, melainkan juga bertanggung jawab atas tingkat kesejahteraan rakyat.

Apa yang dilakukan Presiden Jackson itu, melahirkan apa yang disebut sebagai "kapitalisme rakyat" (*folks capitalism*). Bahwa negara biangnya kapitalisme seperti Amerika Serikat, dapat mengembangkan paham kerakyatan seperti itu, adalah suatu hal yang sangat menarik. Ini menunjukkan kapitalisme bukan barang mati melainkan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kebencian Bung Karno terhadap kapitalisme, sebenarnya adalah penolakan terhadap kapitalisme klasik itu, yang hanya dipergunakan untuk mencari keuntungan maksimal bagi para pemilik modal belaka. Jika kapitalisme itu dapat menerima modifikasi, dan dapat dipakai untuk tujuan memperbaiki tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat di sebuah negara, ia tidak patut lagi dibenci seperti itu. Karena itu, kebencian Bung Karno terhadap kapitalisme klasik, bukanlah sesuatu yang harus berlaku secara tetap atau permanen, melainkan juga harus diarahkan kepada modifikasi ideologi tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ada perbedaan besar antara berpikir ilmiah dan berpikir ideologis. Secara ilmiah

pandangan apapun memiliki kemungkinan menerima modifikasi, yang terkadang merubah orientasi dan sejarah pandangan itu sendiri. Sedangkan pemikiran ideologis adalah sesuatu yang "jahat". Karena itu kita harus bedakan benar pemikiran ideologis dan pemikiran ilmiah. Sewaktu membuat pledoi (pembelaan) di muka pengadilan kolonial di tahun 1931, sikap Bung Karno memang benar, melawan kapitalisme klasik itu. Ini karena pandangan tersebut digunakan untuk menindas bangsa kita. Karena itulah, Bung Karno menulis pledoinya tersebut, yang belakangan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Indonesia Menggugat".

*****

Sebuah contoh lain dapat dikemukakan dalam hal ini yaitu kebijakan Dr. Hjalmar Schacht, Menteri Perekonomian Jerman tahun 30-an, di bawah Kepala Pemerintahan Adolf Hitler. Ia memutuskan membangun jaringan jalan aspal yang halus *(autobahnen)* di seluruh negeri, sepanjang lebih dari 80.000 kilometer. Pembuatan jalan raya mobil menggunakan hotmix itu, dengan sendirinya menaikkan pendapatan bangsa tersebut, yang kemudian mendorong munculnya industri pembuatan barang (*manufacturing industry*) yang kuat. Kita ingat pabrik lokomotif Kruff dan mobil Volkswagen yang tangguh. Bahwa kemudian Hitler tidak mengikuti konsekuensi pandangan Schacht itu, yaitu dengan menempuh kebijakan *lebensraum* (ruang hidup), dengan menjarah negeri-negeri lain, tidak merubah kenyataan bahwa pandangan Schacht itu merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bangsa Jerman.

Kesalahan Hitler itu, yang berakibat pecahnya Perang Dunia II dengan korban 35 juta jiwa melayang, kemudian diganti oleh sebuah pandangan lain yang belakangan dikemukakan oleh Kanselir (Perdana Menteri) Jerman Barat Ludwig Erhard. Dengan pandangan yang terkenal "*Sozialen Marktwirtschaft*", adalah sebuah upaya untuk meneruskan upaya Schacht itu. Dengan

pandangannya itu, Erhard mementingkan fungsi sosial, peningkatan kesejahteraan dan perebutan pasar bagi industri di Jerman di seantero dunia. Yang direbut bukanlah negara, melainkan pasar tanpa melalui peperangan dan melanggar perikemanusian. Jelas ini merupakan modifikasi atas kapitalisme klasik yang oleh Karl Marx dan Friederich Engels dianggap mengandung benih-benih "kontradiksi struktural" yang akan menimbulkan kekerasan. Kaum kapitalisme akan berhadapan dengan kaum proletar dalam sebuah kontradiksi maha dahsyat, yang akan meliputi seluruh dunia.

*****

Buku yang ada di tangan pembaca ini, ditulis oleh Hendi Kariawan memang tidak banyak kalangan menyebutkan kontradiksi seperti itu, ataupun menggambarkan modifikasi atas kapitalisme klasik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Andrew Jackson. Tetapi buku ini sendiri adalah pencerminan dari sebuah pandangan, bahwa perekonomian nasional sebuah negeri memang harus mengabdi kepada kesejahteraan dan tingkat hidup tinggi (*high living standard*) suatu bangsa. Ini adalah juga pandangan dari kapitalisme klasik yang mengalami modifikasi. Bahwa hal itu kemudian dinamai pandangan ekonomi rakyat, tidak dapat menghilangkan kenyataan adanya modifikasi itu sendiri. Selama perekonomian nasional berdasarkan persaingan atau kompetisi terbuka, dan tetap dalam lingkup perdagangan internasional yang bebas dan menggunakan prinsip efisiensi rasional. Selama itu pula ia tetap akan memelihara semangat kapitalisme walaupun dengan nama lain.

Sumbangan pemikiran ekonomi dari buku ini, adalah sesuatu yang harus kita hargai. Dalam bahasa lain, buku ini menyajikan daya hidup (vitalitas) yang terkandung dalam paham kapitalisme, perlu dikaji secara ilmiah, bukan secara ideologis. Bahwa kemudian muncul sosialisme sebagai lawan kapitalisme tidak

berarti "konfrontasi" itu bersifat tetap/permanen. Kalau meminjam filsafat Hegel tentang thesa melawan antithesa akan lahir sinthesa, maka dari kapitalisme klasik melawan sosialisme akan lahir pandangan ekonomi rakyat seperti yang digambarkan buku ini. {}



Ekonomi Ditata dari Orientasinya

Sejak kemerdekaan di tahun 1945, orientasi ekonomi kita banyak ditekankan pada kepentingan para pengusaha besar dan modern. Di tahun 1950-an, dilakukan kebijakan Benteng, dengan para pengusaha pribumi atau nasional memperoleh hampir seluruh lisensi, kredit dan pelayanan pemerintah untuk "mengangkat" mereka. Hasilnya adalah lahirnya perusahaan *"Ali-Baba"*, yaitu dengan mayoritas pemilikan ada di tangan para pengusaha keturunan Tionghoa dan pelaksana perusahaan seperti itu dipimpin oleh "pengusaha pribumi". Ternyata, kebijakan itu gagal. 'Si Baba' atau pengusaha keturunan Tionghoa, karena ketekunan dan kesungguhannya mulai menguasai dunia usaha, baik yang bersifat peredaran/perdagangan barang-barang maupun pembuatan/produksinya, walau adanya pembatasan ruang gerak warga negara keturunan Tionghoa, untuk tidak aktif/memimpin di bidang-bidang selain perdagangan.

Demikian pula dengan sistem *quota* dalam pendidikan, mau tidak mau mempengaruhi ruang gerak warga negara keturunan Tionghoa di bidang perdagangan saja. Mereka dengan segera memanfaatkan kelebihan uang mereka, untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di luar negeri. Karena tidak terikat dengan sistem beasiswa yang disediakan pemerintah, dengan pembagian "rata-rata" untuk berbagai bidang studi, mereka lalu

memanfaatkan kecenderungan besar di luar negeri, untuk memberikan perhatian lebih besar kepada pendidikan berbagai bidang usaha: teknologi, produksi, kimia, komunikasi terapan, kemasan (*package*), pemasaran, penciptaan jaringan (*networking*) dan permodalan. Di tahun-tahun terakhir ini, mereka bahkan sudah mencapai tingkatan kesempurnaan (*excellence*) dalam bidang-bidang tersebut, seperti terbukti dari hasil-hasil yang dicapai anak-anak mereka di luar negeri.

Karena itu tidaklah mengherankan, jika lalu dunia usaha (bisnis) mereka kuasai. Para *manager*/pimpinan usaha ada di tangan mereka, bahkan hal itu terasa pada tingkat usaha di bidang keuangan/ finansial, hampir seluruhnya mereka kuasai secara nyata. Bahkan Bulog dan Dolog hampir seluruhnya berhutang uang pada mereka. Sehingga praktis merekalah yang menentukan jalannya kebijakan teknis, dalam hal-hal yang menyangkut sembilan macam kebutuhan pokok bangsa. Tidak mengherankan jika lalu ada pihak yang merasa, ekonomi negeri kita dikuasai oleh keturunan Tionghoa. Itu wajar saja. Bahkan lontaran bahasa mereka akan menjadi sangat berbahaya, jika di tutup-tutupi oleh pemerintah dan media dalam negeri. Namun, harus segera ditemukan sebuah kerangka lain, untuk menghindarkan lontaran-lontaran perasaan yang emosional seperti itu. Janganlah berbagai reaksi itu, lalu berkembang karena dipercaya oleh orang banyak.

Dalam hal ini, diperlukan adanya sebuah penataan ekonomi bangsa kita, penataan itu harus dilakukan karena kesenjangan kaya-miskin memang menjadi besar dalam kenyataan. Bagaimanapun juga harus diakui, bahwa apa-apa yang terbaik di negeri kita, dikuasai/dimiliki oleh mereka yang kaya, baik "golongan pribumi" maupun "golongan keturunan Tionghoa". Untuk menyelamatkan diri dari kemarahan orang melarat, baik yang merasa miskin ataupun yang memang benar-benar tidak menguasai/memiliki apa-apa, maka elite ekonomi/orang kaya "kalangan pribumi" selalu meniup-niupkan bahwa perekono-

mian nasional kita dikuasai/ dimiliki para pengusaha "golongan keturunan Tionghoa". Karena memang selama ini media nasional dan kekuasaan politik selalu berada di tangan mereka, dengan mudah saja pendapat umum dibentuk dengan menganggap "golongan keturunan Tionghoa", yang lazim disebut golongan non-pribumi, sebagai penguasa perekonomian bangsa kita.

Kesan salah itu dapat segera dibetulkan, dengan sebuah koreksi total atas jalannya orientasi perekonomian kita sendiri. Koreksi total itu harus dilakukan terhadap orientasi yang lebih mementingkan pelayanan kepada pengusaha besar dan raksasa, apapun alasannya, termasuk klaim pertolongan kepada pengusaha nasional "pribumi", haruslah disudahi. Yang harus ditolong adalah pengusaha kecil dan menengah, seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar yang kita miliki, maupun berbagai peraturan yang lain. Dengan demikian tidaklah tepat untuk mempersoalkan "pribumi" dan "non-pribumi", karena persoalannya bukan terletak di situ, masalahnya adalah kesenjangan antara kaya dan miskin.

Jadi, yang harus dibenahi, adalah orientasi yang terlalu melayani kepentingan orang-orang kaya, atas kerugian orang miskin. Kita harus jeli melihat masalah ini dengan kacamata yang jernih. Perubahan orientasi itu terletak pada dua bidang utama, yaitu pertolongan kepada UKM, Usaha Kecil dan Menengah dan upaya mengatasi kemiskinan. Kedua langkah itu harus disertai pengawasan yang ketat, disamping liku-liku birokrasi, yang memang merupakan hambatan tersendiri bagi upaya memberikan kredit murah kepada UKM. Padahal, apapun upaya yang dilakukan untuk menolong UKM, tentulah menghadapi hambatan. Jadi, haruslah dirumuskan kerangka yang tepat untuk tujuan ini. Dan tentu saja, upaya mengatasi kemiskinan menghadapi begitu banyak rintangan dan hambatan terutama dari lingkungan birokrasi sendiri.

****

Tujuan pemerintah dan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah *maslahah al-'âmmah*, yang secara sederhana diterjemahkan dengan kata kesejahteraan. Kata kesejahteraan ini, dalam Undang-Undang Dasar kita, dinamakan keadilan dan kemakmuran. Sekaligus dalam pembukaan UUD 1945 diterangkan, bahwa tujuan bernegara bagi kita semua diibaratkan menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini juga menjadi sasaran dari ketentuan Islam, dengan pengungkapan "kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya, terkait langsung dengan kepentingan rakyat yang dipimpinnya" (*tasharruf al-imâm manûthun bi-al-mashlahah*).

Dalam bahasa sekarang, sikap agama seperti itu dirumuskan sebagai titik yang menentukan bagi orientasi kerakyataan. Itulah yang seharusnya menjadi masalah arah kita, dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Bukannya mempersoalkan asli dan tidak dengan latar belakang seorang pengusaha. Pandangan picik seperti itu, sudah seharusnya digantikan oleh orientasi perekonomian nasional kita yang lebih sesuai dengan kebutuhan mayoritas bangsa.

Masalahnya sekarang, perekonomian nasional kita terkait sepenuhnya dengan persaingan bebas, keikutsertaan dalam perdagangan internasional yang bebas dan mengutamakan efisiensi rasional. Karenanya orientasi ekonomi rakyat harus difokuskan kepada prinsip "menjaga dan mendorong" UKM. Namun sebelumnya dalam hal ini adalah, keharusan merubah orientasi perekonomian nasional itu sendiri.

BENARKAH HARUS ADA KONSEPNYA?

Pertanyaan di atas haruslah diajukan kepada pemerintahan sekarang ini, yang tampaknya tidak memiliki konsep apa pun dalam menangani krisis multidimensi yang menghinggapi bangsa kita saat ini. Sebab kenyataannya, pemerintah tidak memiliki keberanian untuk mengambil satu sikap saja dalam setiap persoalan. Karena konsistensi pandangan yang diambil tidak diperhatikan, maka orientasi permasalahan tidak pernah memiliki kejelasan. Bukti yang paling jelas adalah, inkonsistensi dalam orientasi ekonomi kita. Di satu pihak, kita merasakan adanya kecenderungan untuk membiarkan optimalisasi keuntungan, yaitu perusahaan mendiktekan "keharusan-keharusan" yang kemudian diikuti pemerintah. Di antaranya adalah dihilangkannya bentuk-bentuk subsidi bagi kebutuhan masyarakat, untuk menghilangkan "kerugian-kerugian" setiap usaha.

Contoh yang paling jelas dan aktual adalah berbagai kenaikan tarif dan harga penjualan BBM. Jelas, hal itu disebabkan oleh desakan luar negeri, agar supaya segala macam subsidi dihilangkan. Hal itu diperlukan, guna menghindarkan "kerugian" pada berbagai BUMN. Dengan kata lain, perlunya subsidi bagi sejumlah hajat hidup orang banyak, adalah sebuah keharusan. Yang perlu diubah bukanlah adanya subsidi itu sendiri, melainkan terjadinya biaya tinggi ekonomi (*high cost economy*), akibat permainan birokrasi pemerintah. Ini berarti diperlukan

keberaniaan moral yang tinggi dan kemauan politik yang kuat, untuk melakukan pengikisan KKN. Bukan dengan mengurangi subsidi yang akan menyusahkan rakyat banyak saja. Namun, justru kebalikannya yang terjadi. Seperti yang kita lihat dewasa ini KKN tampak bertambah merajalela.

Dengan demikian, masyarakat ditimpa dua hal yang sebenarnya berbeda satu dengan yang lain. Di satu pihak, rakyat menderita akibat dicabutnya subsidi dari berbagai hal yang menjadi kebutuhan pokok. Termasuk hal yang secara politis dianggap sebagai "kebutuhan pokok", yaitu perdagangan dunia, rakyat juga "terkena imbasnya" akibat kemahiran birokrasi pemerintahan ber-KKN. Kedua hal inilah yang dikhawatirkan akan menciptakan situasi sangat negatif bagi perekonomian nasional kita, dan bahkan revolusi atau anarki sosial yang tidak terkendalikan lagi. Dalam ungkapan lain, bahaya akan terjadinya konflik horisontal haruslah benar-benar dirasakan pemerintah, justru agar supaya kita tidak terdesak oleh perkembangan keadaan yang sama sekali tidak terduga. Itu adalah akibat dari langkanya konsep dalam menangani permasalahan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini.

******

Menjelang keberangkatan ke Semarang, di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, penulis mendengarkan tayangan televisi mengenai aktivitas sebuah LSM di Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara), yang mengusahakan agar masyarakat merasakan perlunya penjagaan atas kepemilikan hutan pohon Meranti di sebuah suaka alam yang hanya seluas 200 Ha. Hal itu ternyata berdampak pada terlindung dan terjaganya hutan itu dari para perambah hutan, karena masyarakat merasa pen-ting kelestarian hutan Meranti itu. Ini menunjukkan bahwa rasa turut memiliki oleh rakyat, sebagai sebuah faktor dalam perekonomian kita, memang sangat dibutuhkan. Jadi,

penghapusan subsidi secara semena-mena akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk menyelesaikan krisis ekonomi, karena hilangnya faktor rakyat tadi.

Apa yang terjadi di Kecamatan Purba Tengah di kawasan Simalungun itu bersesuaian sepenuhnya dengan usul Erna Witoelar, semasa menjadi Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dengan gagasan agar masyarakat diberi kepemilikan sejumlah tertentu atas hutan-hutan kita, agar mereka merasa berkepentingan untuk menjaga kelestarian hutan. Usul itu diajukan untuk mencegah pembakaran hutan oleh orang-orang yang membakar hutan hanya untuk membuat ladang tanaman saja. Gagasan itu diajukan dalam sidang kabinet waktu itu, untuk mengatasi pembakaran hutan.

Di sini jelas tidak ada perbedaan antara upaya mengatasi pembakaran hutan dari upaya untuk melestarikanya. Kedua pandangan itu tertuju pada sebuah kenyataan, betapa pentingnya menciptakan rasa memiliki hutan-hutan kita oleh masyarakat luas. Ini dimungkinkan, jika pemerintah mengenal sangat dalam atas adanya rasa memiliki itu di kalangan masyarakat.

Jadi, faktor masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi oleh siapa pun, terutama pemerintah. Tanpa adanya rasa memiliki seperti itu, sia-sialah kebijakan apa pun yang akan di ambil, walaupun para perumus kebijakan itu sendiri adalah tokoh-tokoh intelektual dengan berbagai gelar ilmu dari beberapa perguruan tinggi, yang memiliki reputasi ilmiah yang sangat baik. Jadi, benarlah kata sebaris sajak Arab: "Bukanlah orang muda kalau mengatakan itulah bapak kami (yang berbuat), melainkan seorang pemuda berkata inilah Aku" (*laisa al-fatâ man yaqûlû kâna abî wallâkin al-fatâ man qâlâ hâ'anâ dza*).

****

Jadi, sikap untuk menghamba kepada orang luar tanpa memikirkan kerugian orang banyak adalah sikap yang sangat

sempit, yang didasarkan ketakutan pada pihak asing itu sendiri. Dalam ajaran Islam, kepentingan orang banyak itu dirumuskan sebagai kebutuhan umum (*al-mashlahah al-ammah*) yang dalam bahasa kita digantikan oleh kata kesejahteraan. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, hal itu dirumuskan sebagai masyarakat adil dan makmur. Kata adil *(al-adlu)* dan kemakmuran *(al-rohfalah)*, menunjukkan orientasi mementingkan kebutuhan orang banyak dan kesejahteraan mereka (moril dan materiil). Jadi, orientasi kepentingan orang banyak menjadi ukuran penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Menarik sekali, ungkapan *fiqh* "kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas/bagi rakyat yang dipimpin, harus terkait langsung, dengan kesejahteraan mereka (*tasharruf al-Imâm 'alâ al-ra'iyyah manûthun bi al-mashlahah*). Karena itu, kepentingan rakyat adalah ukuran satu-satunya dalam Islam bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam dunia modern sekarang, kebijakan subsidi yang tidak begitu mempengaruhi perdagangan bebas selalu terjadi. Seperti di Amerika Serikat, dana milyaran dollar US untuk membeli dan menyimpan susu dan produk ikutannya (keju, mentega, dsb), dimasukkan dalam anggaran belanja negara (*federal budget*) tiap tahunnya. Mengapa? Karena subsidi yang diberikan itu menyangkut persediaan dan permintaan (*supply and demand*). Mengapa kita tidak berani menetapkan ukuran sendiri mengenai harga minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya? Bukankah *mark-up* dan pungutan–pungutan yang dibebankan kepada Pertamina, mengakibatkan mahalnya bahan bakar di negeri ini? Bukankah dalam hal ini diperlukan subsidi tertentu kepada minyak bumi kita? Subsidi untuk kendaraan maupun subsidi untuk pengangkutan yang diperlukan bagi rakyat kebanyakan? Jadi, penghapusan subsidi bahan bakar tanpa melihat keperluan rakyat, berarti kita menaikkan biaya penghidupan bagi masyarakat kebanyakan, tanpa diimbangi oleh kenaikan pendapatan.

Jadi, kebijakan mengurangi subsidi minyak atau menghilangkan subsidi bahan bakar minyak adalah sebuah tindakan kapitalistik, tanpa melihat aktifitas bagi kebanyakan orang. Sikap ini jelas menunjukkan tekanan-tekanan beberapa negara kuat di Barat atas pemerintah kita. Kalau pemerintah lalu menaikan harga BBM dan menaikkan tarif-tarif tertentu, ini jelas menunjukkan orientasi memaksimalkan keuntungan (*profit maximalization*) telah berhasil didesakkan oleh negara-negara kapitalis kepada pemerintah, walaupun bertentangan dengan UUD 1945 yang berorientasi memenuhi kebutuhan orang banyak. Tugas kita adalah memberikan koreksi atas keputusan tersebut, karena sudah demikian jelas Islam berorientasi kepada kebutuhan orang banyak. {}

Kemiskinan, Kaum Muslimin dan Parpol

Penulis di datangi rombongan ini di kantornya pada suatu siang. Singkatan nama mereka adalah R, S, H dan F. R menjadi kontraktor dan supplier sebuah perusahaan negara yang besar, si S semula bekerja di sebuah perusahaan swasta dan sekarang menjadi supplier bagi pemerintah daerah di sebuah propinsi. H dan F juga pengusaha yang aktif, tapi penulis tidak bertanya tentang jenis kegiatan mereka. Dua hal penting yang penulis lihat dalam kiprah mereka adalah: mereka pimpinan daerah sebuah parpol, dan dengan demikian menjadi "anak buah" penulis; dan mereka mempunyai SPK (surat perintah kerja) dari Pemerintah Daerah tempat tempat mereka tinggal, untuk menjadi supplier agrobisnis bagi rakyat di tempat mereka tinggal atau pelaksana bisnis.

Yang menarik perhatian penulis, adalah cara berpikir mereka. Di satu sisi, mereka tidak mengandalkan diri pada cara–cara politik lama seperti pembagian kaos oblong dan sejenisnya, dalam meraih perolehan suara melalui pemilu akan datang; dan di pihak lain,mereka langsung menghubungkan masalah politik dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, mereka melihat politik sebagai sebuah proses, dan tidak mendasarkan kegiatan politik atas cara-cara usang, melainkan dengan pendekatan menghilangkan kemiskinan. Dalam bahasa klise, yang

mereka perbuat bukanlah memberikan ikan kepada rakyat, melainkan memberikan kail pada mereka untuk mencari ikan sendiri. Ini berarti, tingkat kesejahteraan rakyat, ditentukan oleh masyarakat sendiri, bukan orang lain. Pendekatan baru ini, katakanlah sebuah pendekatan struktural dalam menangani masalah kemiskinan bersifat memberdayakan masyarakat, dan tidak bertumpu pada santunan kepada mereka. Pendekatan seperti inilah yang jarang terlihat dalam pendekatan politik pada masyarakat yang terbiasa dengan janji kosong untuk memberantas kemiskinan, dan hanya menerima santunan materi dan himbauan moral belaka dalam kampanye pemilihan umum.

*****

Sebuah tindakan merubah kehidupan masyarakat terjadi ketika rakyat Amerika Serikat memilih Presiden Jackson dalam Abad ke 19 Masehi. Mereka memilih pemimpin yang mengerti benar mana yang menjadi hak rakyat, dan mana yang menjadi hak perorangan para kapitalis/bangkir /industrialis. Mereka, di mata Jackson adalah orang-orang yang harus melakukan kegiatan ekonomi dalam arti membangun dan membesarkan perusahaan di berbagai bidang tetapi tingkat kesejahteraan rakyat, adalah tanggung jawab Presiden dan Kongres yang dipilih untuk periode tertentu oleh rakyat. Ini berarti, keduanya tidak boleh dicampur aduk dan pemisahan ini harus tercermin dalam kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan finansial/keuangan. Ia melihat Bank Sentral Amerika Serikat di samping menjadi alat pemupukan modal negara, juga menyangkut pengelolaan uang pajak penduduk negeri; dan karena itu pengelolaanya ada pada mereka. Maka *American Federal Reserved System* sebagai Bank Sentral negara tersebut, haruslah diisi dengan pimpinan yang ditunjuk rakyat melalui Presiden dan Kongres sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini adalah langkah pertama kearah *Folks Kapitalism* (kapitalisme rakyat), yang berbeda dari kapitalisme

klasik dari John Stuart Mill. Akibat sikapnya ini, Jackson harus berhadapan dengan para kapitalis/bankir/industrialis yang beranggapan, pemerintah sama sekali tidak boleh campur tangan dalam Bank Sentral.

Pendapat Jackson itu sebenarnya adalah pendekatan struktural, artinya, hanya dengan perubahan struktur menuju pemberdayaan warga masyarakat yang dapat mengurus diri sendiri barulah masyarakat itu sendiri akan terbebas dari kemiskinan. Jika hal ini yang akan dicapai melalui pemilu, dengan sendirinya perubahan itu akan menuju pada hilangnya kemiskinan. Karena terjadi perubahan struktur masyarakat, kalau tadinya rakyat hanya menunggu santunan pemerintah atau pihak-pihak tertentu saja, maka dengan cara pemberian kail ini masyarakat akan mampu memecahkan masalah-masalah ekonomi mereka sendiri. Di sinilah terletak hubungan antara sebuah sistem ekonomi ideal dengan sistem ekonomi yang ada.

Kemampuan rakyat mengubah nasib mereka sendiri dengan bantuan parpol dan sistem politik yang ada merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh pemilu yang demokratis dan melayani kepentingan rakyat. Yang dihasilkan adalah para anggota perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang benar-benar bertanggung jawab atas keselamatan negeri dalam arti yang luas, yang berfungsi baik, dengan wewenang-wewenang yang jelas. Dengan cara itulah pembagian wewenang antara pihak-pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif terjaga dalam keseimbangan yang nyata, karena semua berkewajiban melayani masyarakat dan masing-masing tidak mementingkan pelayanan dari masyarakat kepada dirinya.

****

Bagi kaum muslimin hal ini benar-benar merupakan kebutuhan mutlak. Kitab suci al-Qur'ân menyatakan; " Dibuatkan bagi kaum muslimim kehinaan dan kemiskinan" (*dhuribat a'laihim al-*

dzillatu wa al-maskanah) (QS al-Baqarah(2):61), berarti Islam menolak kemiskinan sebagai sesuatu yang langgeng dan tetap , Islam menganggap kedua hal berubah-ubah menurut struktur masyarakat. Dengan demikian, terserah kepada manusia jualah untuk menghapuskan atau melestarikan kemiskinan itu. Tuhan atau nasib tidak terkait dengan hal itu, sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Termasuk di dalamnya struktur masyarakat yang menghapuskan atau melestarikan kemiskinan itu sendiri. Walaupun banyak sekali pemahaman kaum muslimin yang menganggap masalah kemiskinan sebagai kepastian dari Allah, karena itu harus diganti dengan pemahaman lain dari pemahaman itu. Allah akan melestarikan kemiskinan apabila manusia sebagai warga masyarakat tidak mengadakan perubahan melalui sistem politik yang dianutnya sendiri.

Jelaslah dengan demikian, manusia menentukan nasib mereka sendiri, dan jika hal itu benar namun tidak dijalankan mereka lalu mempersalahkan Allah. Dalam hal ini kitab suci al-Qur'ân menyatakan, "Tidaklah kau lihat orang yang menipu agama? Yaitu mereka yang membiarkan anak-anak yatim (terlantar) dan tidak perduli atas makanan orang miskin? ". *(aro'aita al-ladzî yukadzdzibu bi al-dîn fadzâlikâ al-ladzî yadu'ulyatîm wa lâ yakhuddu 'alâ tha'âmi al-miskîn)* ((QS al-Maun(107):1-3) menunjukan dengan jelas kepada kita adanya orang-orang yang justru memanipulir kesengsaraan anak yatim dan makanan orang miskin demi kepentingan mereka sendiri. Karena manipulasi seperti itu dianggap sebagai perbuatan menipu agama, dengan sendirinya perbaikan harus dilakukan oleh manusia yang sadar untuk sistem politik yang membela kepentingan rakyat. Kesimpulan seperti itulah yang dicapai oleh kelompok muda yang menjadi pimpinan sebuah partai politik di suatu daerah itu, dan inilah yang membahagiakan hati penulis. Perbuatan nyata yang harus menjadi dasar bagi perkembangan sebuah parpol, dan bukannya retorika belaka. {}

Menyelesaikan Krisis Mengubah Keadaan

Pada pertengahan Desember tahun 2002 ini, penulis bertemu sutradara Garin Nugroho di Airport Adi Sucipto, Yogyakarta. Sambil menunggu pesawat terbang yang akan membawa kami ke Jakarta, Garin Nugroho dan penulis terlibat dalam pembicaraan mengenai cara mengatasi krisis multi-dimensi yang kita hadapi saat ini. Sebagai seorang yang melakukan referensi terus menerus atas kitab suci al-Qur'ân, penulis mengemukakan analogi dari para kyai. Mereka berpendapat krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini adalah seperti krisis Mesir di zaman Nabi Yusuf dahulu. Krisis itu memakan waktu tujuh tahun, menurut kitab suci tersebut. Kalau ini kita analogikan kepada keadaan sekarang, maka era tujuh tahun itu akan berakhir pada tahun 2003 (1997 hingga 2003). Memang, sekarang kalangan atas mulai dapat mengatasi krisis ekonomi, terbukti dari penuhnya jalan dengan kendaraan dan lapangan terbang, tetapi kalangan bawah masih saja mengeluh dan kesusahan karena memang mereka masih dilanda krisis.

Keluhan utama adalah menurunnya daya beli secara drastis, sedangkan harga-harga beberapa jenis barang kebutuhan sehari-hari justru melonjak. Dengan demikian, masih menjadi pertanyaan apakah dalam waktu cepat krisis multidimensi itu dapat dipecahkan, katakanlah pertengahan tahun 2003. Dalam hal ini,

sangat menarik pembicaraan penulis dengan kyai Nukman Thahir dari Ampel, Surabaya. Ia menyatakan, kalau kitab suci al-Qur'ân dibaca dengan mendalam, di sana disebutkan bahwa krisis Nabi Yusuf berlangsung tujuh tahun, namun untuk mengatasi krisis tersebut diperlukan juga waktu tujuh tahun lamanya. Penulis menjawab apa yang ia terima dari para kyai adalah waktu berlangsungnya krisis itu tujuh tahun lamanya, tidak pernah mereka mengatakan diperlukan waktu tertentu untuk menyelesaikan krisis. Karenanya, penulis mengungkapkan bahwa penyelesaian krisis itu sendiri, terjadi secara formal dimulai dalam waktu bersamaan/simultan dengan berakhirnya krisis itu. Karenanya, penyelesaian krisis tidak merupakan entitas yang berdiri sendiri terlepas dari krisis yang dialami.

Percakapan penulis dengan Garin Nugroho itulah yang menjadi petunjuk kongkrit penyelesaian masalah secara simultan itu. Mula-mula Garin Nugroho mengatakan dua hal sangat penting, satu pihak, ada perbedaan/kesenjangan antara para teoritisi hukum dan pembuat undang-undang (DPR dan MPR). Para ahli teori hukum itu mengemukakan hukum-hukum baru dalam bentuk undang-undang maupun lainnya dari berbagai sumber Eropa Continental yang kita kenal. Tetapi pelaksana berbagai macam peraturan itu, pada umumnya dididik di lingkungan hukum Anglo-Saxon yang berlaku di Amerika Serikat. Tidak usah heran, jika terjadi kesenjangan antara kedua sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa Continental itu. Adalah tugas kita, menurut Garin Nugroho, untuk "mendamaikan" antara keduanya, inilah yang harus diperbuat untuk menyelesikan krisis.

***

Dalam percakapan itu, penulis mengemukakan bahwa secara kongkrit apa yang dinamai Garin Nugroho dengan "mendamaikan" itu, haruslah tercermin dalam empat buah sistem politik baru. Katakanlah konsepsi mengenai empat buah sistem

baru yang diperlukan, untuk kongkritisasi gagasan "mendamaikan" dari Garin itu. Di sini, penulis akan mencoba mengemukakan beberapa konsep seperti di bawah ini.

Tentu saja, konsepsi-konsepsi yang dikemukakan itu adalah bukan bentuk final dari apa yang penulis pikirkan, karena justru masih memerlukan perbaikan-perbaikan serius, dan belum dapat digunakan sebagai konsepsi formal. Konsep empat sistem ini, masih harus diperjuangkan untuk masa kehidupan kita yang akan datang. Hanya dengan cara demikianlah, bangsa kita dapat mengatasi krisis multidimensional itu dengan cepat.

Empat sistem baru yang penulis kemukakan kepada Garin Nugroho; meliputi sistem politik (pemerintahan), perbaikan sistem ekonomi dengan mengemukakan sebuah orientasi baru, sistem pendidikan nasional dan sistem etika atau hukum, yang semuanya harus serba baru. Mengapa baru? karena sistem lama tidak dapat dipakai lagi, tanpa akibat-akibat serius bagi kita. Yang didahulukan adalah sistem politik (pemerintahan) yang baru. Kedua badan legislatif yang baru, DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) haruslah menjadi perwakilan *bikameral*. Mereka bertugas menetapkan undang-undang serta menyetujui pengangkatan eksekutif dengan pemungutan suara. Sedangkan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dipilih langsung oleh rakyat, karena kalau diserahkan pada DPR dan DPRD saja hanya akan memperbesar korupsi saja.

Disamping itu juga dibentuk MPR, yang hanya bersidang enam bulan saja, dalam lima tahun. Mereka bertugas menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang harus dilaksanakan seluruh komponen pemerintahan. Keanggotaanya, terdiri dari para anggota DPR, DPD dan dari golongan fungsional, guna menguntungkan kelompok-kelompok minoritas ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, yang dicapai melalui prosedur musyawarah untuk mufakat, bukannya melalui pemungutan suara. Dengan demikian, kalangan minoritas turut serta memu-

tuskan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperlukan, agar semua pihak merasa memiliki negara ini, dan dengan demikian menghindarkan separatisme yang mulai bermunculan di sana-sini. Justru inilah yang merupakan tugas demokrasi, bukannya liberalisasi total.

****

Orientasi baru dalam sistem perekonomian kita, dicapai dengan melakukan pilihan berat antara dua hal, yaitu moratorium (penundaan sementara) cicilan tanggungan luar negeri kita, dan pembebasan para konglomerat hitam yang nakal dari tuntutan perdata, jika membayar kembali 95% kredit yang dia terima dari bank-bank pemerintah (tetapi tuntutan pidana tetap dilakukan oleh petugas-petugas hukum). Uang yang didapat dari kedua langkah ini, menurut perkiraan sekitar US$ 230 milyar, dan digunakan terutama untuk: Pertama, memberikan kredit ringan, kira-kira 5% setahun, bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dengan pengawasan yang ketat. Kedua, peningkatan pendapatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan militer, kira-kira sepuluh kali lipat dalam masa tiga tahun. Langkah ini guna mencegah KKN dan menegakkan kedaulatan hukum. Melalui cara ini pula, dapat memperbesar jumlah wajib pajak, menjadi 20 juta orang dalam lima tahun dan melipatgandakan kemampuan daya beli masyarakat.

Sudah tentu dikombinasikan dengan hal-hal, seperti perbaikan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, serta penataan kembali BI (Bank Indonesia) dan MA (Mahkamah Agung). Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dengan cepat sebuah pemerintahan yang baru akan segera mengatasi krisis multi-dimensional ini. Hal penting lainnya, kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis juga sangat bergantung pada kemampuan bekerja sama dengan negeri-negeri lain. Sudah tentu, ini harus dibarengi oleh dua buah perbaikan sistematik

lain. Perbaikan pertama, adalah pada perbaikan sistem pendidikan kita, yang hampir tidak memperhatikan penanaman nilai daripada hafalan. Karena tekanan yang sangat kecil kepada praktek kehidupan, dengan sendirinya hafalan mendapatkan perhatian yang luar biasa, dan pemahaman nilai-nilai menjadi terbengkalai. Keadaan ini mengharuskan dibuatnya sistem pendidikan baru yang lebih ditekankan kepada sistem nilai dan struktur masyarakat yang ada, sehingga pendidikan masyarakat dasar (*community-based education*) dapat dilaksanakan.

Dikombinasikan dengan perbaikan sistematik pada kerangka etika/moralitas/akhlak yang telah ada dalam kehidupan bangsa, maka perbaikan sistem hukum, akan menjadi dasar bagi pengampunan umum/rekonsiliasi atas kesalahan-kesalahan masa lampau, kecuali mereka yang bersalah dan dapat dibuktikan secara hukum oleh kekuasaan kehakiman dengan sistem pengadilan kita. Tentu saja, ini juga meliputi mereka yang sekarang disebut sebagai kaum ekstremis/fundamentalis dalam gerakan Islam, selama kejahatan yang mereka perbuat tidak dapat dibuktikan secara hukum. Sudah tentu ini berlawanan dengan kehendak orang lain yang ingin menghukum segala macam "kesalahan." Namun, kita harus bertindak secara hukum, bukan karena pertimbangan-pertimbangan lain. {}



BAB V

ISLAM PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA


Democracy
www.abad-de
Perpusta

Pendidikan Islam Harus Beragam

Dalam sebuah dialog tentang pendidikan Islam, yang berlangsung di Beirut (Lebanon) tanggal 13-14 Desember 2002 dan diselenggarakan oleh (*Konrad Adenauer Stiftung*), ternyata disepakati adanya berbagai corak pendidikan agama. Hal ini juga berlaku untuk pendidikan Islam. Ternyata ada beberapa orang yang terus terang mengakui, maupun yang menganggap, pendidikan Islam yang benar haruslah mengajarkan "ajaran formal" tentang Islam. Termasuk dalam barisan ini adalah dekan-dekan Fakultas Syari'ah dan Perundang-undangan dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Diskusi tentang mewujudkan "pendidikan Islam yang benar" memang terjadi, tapi tidak ada seorang peserta pun yang menafikan dan mengingkari peranan berbagai corak pendidikan Islam yang telah ada. Penulis sendiri membawakan makalah tentang pondok pesantren sebagai bagian dari pendidikan Islam.

Dalam makalah itu, penulis melihat pondok pesantren dari berbagai sudut. Pondok pesantren sebagai "lembaga kultural" yang menggunakan simbol-simbol budaya Jawa; sebagai "agen pembaharuan" yang memperkenalkan gagasan pembangunan pedesaan (*rural development*); sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat (*centre of community learning*); dan juga pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersandar pada

silabi, yang dibawakan oleh Imam Al- Suyuti lebih dari 500 tahun-nan yang lalu, dalam *Itmam al-dirayah.* Silabi inilah yang menjadi dasar acuan pondok pesantren tradisional selama ini, dengan pengembangan "kajian Islam" yang terbagi dalam 14 macam disiplin ilmu yang kita kenal sekarang ini, dari *nahwu* / tata bahasa Arab klasik hingga tafsir al-Qur'ân dan teks Hadits Nabi. Semuanya dipelajari dalam lingkungan pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam. Melalui pondok pesantren juga nilai ke-Islam-an ditularkan dari generasi ke generasi.

Sudah tentu, cara penularan seperti itu merupakan titik sambung pengetahuan tentang Islam secara rinci, dari generasi ke generasi. Disatu sisi, ajaran-ajaran formal Islam dipertahankan sebagai sebuah "keharusan" yang diterima kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Tetapi, di sini juga terdapat "benih-benih perubahan", yang membedakan antara kaum muslimin di sebuah kawasan dengan kaum muslimin lainnya dari kawasan yang lain pula. Tentang perbedaan antara kaum muslimin di suatu kawasan ini, penulis pernah mengajukan sebuah makalah kepada Universitas PBB di Tokyo pada tahun 1980-an. Tentang perlu adanya "studi kawasan" tentang Islam di lingkungan Afrika Hitam, budaya Afrika Utara dan negeri-negeri Arab, budaya Turki-Persia-Afghan, budaya Islam di Asia Selatan, budaya Islam di Asia Tenggara dan budaya minoritas muslim di kawasan-kawasan industri maju. Sudah tentu, kajian kawasan *(area studies)* ini diteliti bersamaan dengan kajian Islam klasik *(classiccal Islamic studies)*.

****

Pembahasan pada akhirnya lebih banyak ditekankan pada dua hal yang saling terkait dalam pendidikan Islam. Kedua hal itu adalah, pembaharuan pendidikan Islam dan modernisasi pendidikan Islam, dalam bahasa Arab: *taj'did al-tarbiyah al-Islâmiah* dan *al-hadâsah.* Dalam liputan istilah pertama, tentu saja ajaran-

ajaran formal Islam harus diutamakan, dan kaum muslimin harus dididik mengenai ajaran-ajaran agama mereka. Yang diubah adalah cara penyampaiannya kepada peserta didik, sehingga mereka akan mampu memahami dan mempertahankan "kebenaran". Bahwa hal ini memiliki validitas sendiri, dapat dilihat pada kesungguhan anak-anak muda muslimin terpelajar, untuk menerapkan apa yang mereka anggap sebagai "ajaran-ajaran yang benar" tentang Islam. Contoh paling mudahnya adalah menggunakan tutup kepala di sekolah non-agama, yang di negeri ini dikenal dengan nama jilbab. Ke-Islaman lahiriyah seperti itu, juga terbukti dari semakin tingginya jumlah mereka dari tahun ke-tahun yang melakukan ibadah umroh/ haji kecil.

Demikian juga, "semangat menjalankan ajaran Islam", datangnya lebih banyak dari komunikasi di luar sekolah, antara berbagai komponen masyarakat Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak hanya disampaikan dalam ajaran-ajaran formal Islam di sekolah-sekolah agama/madrasah belaka, melainkan juga melalui sekolah-sekolah non-agama yang berserak-serak di seluruh penjuru dunia. Tentu saja, kenyataan seperti itu tidak dapat diabaikan di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di negeri manapun. Hal lain yang harus diterima sebagai kenyataan hidup kaum muslimin di mana-mana, adalah respon umat Islam terhadap "tantangan modernisasi". Tantangan seperti pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya, adalah respon yang tak kalah bermanfaatnya bagi pendidikan Islam, yang perlu kita renungkan secara mendalam.

Pendidikan Islam, tentu saja harus sanggup "meluruskan" responsi terhadap tantangan modernisasi itu, namun kesadaran kepada hal itu justru belum ada dalam pendidikan Islam di mana-mana. Hal inilah yang merisaukan hati para pengamat seperti penulis, karena ujungnya adalah diperlukan jawaban yang benar atas pernyataan berikut: bagaimanakah caranya membuat kesadaran struktural sebagai bagian alamiah dari perkembangan

pendidikan Islam? Dengan ungkapan lain, kita harus menyimak perkembangan pendidikan Islam di berbagai tempat, dan membuat peta yang jelas tentang konfigurasi pendidikan Islam itu sendiri. Ini merupakan pekerjaan rumah, yang mau tak mau harus ditangani dengan baik.

******

Jelas dari uraian di atas, pendidikan Islam memiliki begitu banyak model pengajaran, baik yang berupa pendidikan sekolah, maupun "pendidikan non-formal" seperti pengajian, arisan dan sebagainya. Tak terhindarkan lagi, keragaman jenis dan corak pendidikan Islam terjadi seperti kita lihat di tanah air kita dewasa ini. Ketidakmampuan memahami kenyataan ini, yaitu hanya melihat lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah di tanah air sebagai sebuah institusi pendidikan Islam, hanyalah akan mempersempit pandangan kita tentang pendidikan Islam itu sendiri. Ini berarti, kita hanya mementingkan satu sisi belaka dari pendidikan Islam, dan melupakan sisi non-formal dari pendidikan Islam itu sendiri. Tentu saja ini menjadi tugas berat para perencana pendidikan Islam. Kenyataan ini menunjukkan di sinilah terletak lokasi perjuangan pendidikan Islam.

Dalam kenyataan ini haruslah diperhitungkan juga penjabaran tarekat dan gerakan shalawat Nabi, yang terjadi demikian cepat di mana-mana. Tentu saja, "kenyataan yang diam" seperti itu sebenarnya berbicara sangat nyaring, namun kita sendiri yang tidak dapat menangkapnya. Seorang warga Islam yang memperoleh kedamaian dengan ritual memuja Nabi itu, dengan sendirinya berupaya menyesuaikan hidupnya dari pola hidup Nabi yang diketahuinya, yaitu kepatuhan kepada ajaran Islam. Ritual itu tentu saja akan menyadarkan kembali orang tersebut, kepada kehidupan agama walaupun hanya bersifat parsial (*juz'i*) belaka. Hal inilah yang seharusnya kita pahami sebagai "kenyataan sosial" yang tidak dapat kita pungkiri dan abaikan.

Karenanya, peta "keberagaman" pendidikan Islam seperti dimaksudkan di atas, haruslah bersifat lengkap dan tidak mengabaikan kenyataan yang ada. Lagi-lagi kita berhadapan dengan kenyataan sejarah, yang mempunyai hukum-hukumnya sendiri. Perkembangan keadaan yang tidak memperhitungkan hal ini, mungkin hanya bersifat menina-bobokan kita belaka, dari tugas sebenarnya yang harus kita pikul dan laksanakan. Sikap untuk mengabaikan keberagaman ini, adalah sama dengan sikap burung onta yang menyembunyikan kepalanya di bawah timbunan pasir tanpa menyadari badannya masih tampak. Jika kita masih bersikap seperti itu, akibatnya akan menjadi sangat besar bagi perkembangan Islam di masa yang akan datang. Karenanya jalan terbaik adalah membiarkan keanekaragaman sangat tinggi dalam pendidikan Islam dan membiarkan perkembangan yang akan menentukan. {}

Bersabar dan Memberi Maaf

Dalam kitab suci al-Qur'ân dinyatakan: "demi masa, manusia selalu merugi, kecuali mereka yang beriman, beramal shaleh, berpegang kepada kebenaran dan berpegang kepada kesabaran" (*Wa al 'ashri inna al–insâna la fî khusrin illâ al-ladzîna 'âmanû wa 'amillu al-shâlihâthi wa tawâshau bi al-haqqi wa tawâshau bi al-shab)*(QS al-Ashr (103):1-3). Ayat tersebut mengharuskan kita senantiasa menyerukan kebenaran namun tanpa kehilangan kesabaran. Dengan kata lain, kebenaran barulah ada artinya, kalau kita juga memiliki kesabaran. Kadangkala kebenaran itu baru dapat ditegakkan secara bertahap, seperti halnya demokrasi. Di sinilah rasa pentingnya arti kesabaran.

Demikian pula sikap pemaaf juga disebutkan sebagai tanda kebaikan seorang muslim. Sebuah ayat menyatakan: "Apa yang mengenai diri kalian dari (sekian banyak) musibah yang menimpa, (tidak lain merupakan) hal-hal berupa buah tangan kalian sendiri. Dan (walaupun demikian) Allah memaafkan sebagian (besar) hal-hal itu." *(mâ ashâbakum min mushîbatin fa bimâ kashabat a'ydîkum wa ya'fû 'an katsîrin)*(QS al-Syura(42):30) . Firman Allah ini mengharuskan kita juga mudah memberikan maaf kepada siapapun, sehingga sikap saling memaafkan adalah sesuatu yang secara *inherent* menjadi sifat seorang muslim. Inilah yang diambil mendiang Mahatma Gandhi sebagai muatan dalam sikap

hidupnya yang menolak kekerasan (*ahimsa*), yang terkenal itu. Sikap inilah yang kemudian diambil oleh mendiang Pendeta Marthin Luther King Junior di Amerika Serikat, dalam tahun-tahun 60-an, ketika ia memperjuangkan hak-hak sipil (*civil rights*) di kawasan itu, yaitu agar warga kulit hitam berhak memilih dalam pemilu.

Hal ini membuktikan, kesabaran dalam membawakan kebenaran adalah sifat utama yang dipuji oleh sejarah. Dalam berbagai kesempatan para ksatria Pandawa yang dengan sabar dibuang ke hutan untuk jangka waktu yang lama, sebagaimana dituturkan oleh kisah perwayangan, juga merupakan contoh sebuah kesabaran. Jadi, kesadaran akan perlunya kesabaran itu, memang sudah sejak lama menjadi sifat manusia. Tanpa kesabaran, konflik yang terjadi akan dipenuhi oleh kekerasan, sesuatu yang merugikan manusia sendiri. Ia tidak akan dipakai, kecuali dalam keadaan tertentu. Hal ini memang sering dilanggar oleh kaum muslimin sendiri. Sudah waktunya kita kaum muslimin kembali kepada ayat di atas dan mengambil kesabaran serta kesediaan memberi maaf, atas segala kejadian yang menimpa diri kita sebagai hikmah.

****

Hiruk pikuk kehidupan, selalu penuh dengan godaan kepada kita untuk tidak bersikap sabar dan mudah memberikan maaf. Dalam pandangan penulis, kedua hal tersebut seharusnya selalu digunakan oleh kaum muslimin. Tetapi harus kita akui dengan jujur, bahwa justru kesabaran itulah yang paling sulit ditegakkan dan kalau kita tidak dapat bersabar bagaimana kita akan memberi maaf atas kesalahan orang kepada kita? Karenanya, jelas bahwa antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang sangat mendalam, walaupun tidak dapat dikatakan terjadi hubungan kausalitas antara kesabaran dan kemampuan memaafkan kesalahan orang lain pada diri kita.

Kita sebagai seorang muslim, mau tidak mau harus menyediakan keduanya sebagai pegangan hidup baik secara kolektif maupun secara perorangan. Dari sinilah dapat dimengerti, mengapa hikmah 1 Muharam 1424 Hijriyah ini sebaiknya tetap ditekankan pada penciptaan kesabaran dan penumbuhan kemampuan untuk memberikan maaf kepada orang yang dalam pandangan kita, berbuat salah kepada diri kita. Bukankah kedua ayat kitab suci yang dikemukakan di atas, sudah cukup kuat dalam mendorong kita membuat kesabaran dan kemampuan memaafkan kesalahan orang kepada diri kita, sebagai hikmah yang kita petik di hari raya yang mulia tersebut. Kedengarannya prinsip yang sederhana, tetapi sulit dikembangkan dalam diri kita.

Namun, lain halnya dengan para politisi yang berinisiatif menyelenggarakan Sidang Istimewa yang terakhir, dengan dasar "kebenaran" hasil penafsiran politik masing-masing. Tindakan ini berarti melanggar Undang-Undang Dasar 1945, karena tidak memiliki landasan hukum. Dengan "nafsu" politiknya –yaitu Presiden harus *lengser*- mereka pun meninggalkan jalan permusyawaratan. Padahal, semua persoalan yang melibatkan orang banyak harus dipecahkan dengan negosiasi, seperti firman Allah: "dan persoalan mereka harus lah di musyawarahkan oleh mereka sendiri" (*wa amruhum syûrâ bainahum*) (QS al-Syura(42):38). Terlihat selain melanggar konstitusi, dalam hal ini merekalah yang tidak dapat memaafkan. Sederhana saja, walaupun rumit dalam kehidupan politik kita sebagai bangsa dan negara. {}

BERKUASA DAN HARUS MEMIMPIN

Ketua Umum PIB Syahrir membuat tulisan menarik dalam sebuah media. Dalam kesimpulan penulis, dalam karyanya itu, Syahrir menyebutkan ada orang berkuasa tetapi tidak memimpin. Dengan tepat, Syahrir menunjukkan pada kita sebagai bangsa yang sedang porak-poranda, karena tidak adanya kepemimpinan. Buktinya, krisis multidimensi yang sedang kita hadapi dewasa ini, sama sekali tidak mendapatkan pemecahan –kalau tidak dikatakan justru diperparah oleh ulah para pemimpin kita sendiri-. Ada pejabat yang menganggap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia sebagai persoalan pemerintah daerah, padahal seluruh peraturan yang menyangkut diri mereka dibuat oleh pemerintah pusat. Demikian juga pejabat lain yang tidak mau meninggalkan jabatan, walaupun telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta sebagai pihak yang bersalah. Alasannya, karena menunggu putusan Pengadilan Tinggi. Bukankah ini berarti sebuah pengakuan, bahwa sistem pengadilan kita bekerja di bawah pengaruh mafia peradilan? Alangkah tragisnya keadaan kita saat ini?

Dengan tepat pula, Syahrir menunjuk kepada pemerintahan kita yang memiliki sejumlah orang berkuasa, namun tidak sanggup memimpin. Bahkan, aparat penegak hukum kita cenderung melanggar konstitusi. Pertanyaan Klinik Hukum Merdeka,

adakah DPR/MPR kita dewasa ini legal atau tidak, mengingat baru 60 % suara hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 dihitung, namun pemerintah telah mengumumkan Surat Keputusan (SK) Presiden, mengenai komposisi DPR/MPR? Pertanyaan ini tidak dijawab hingga saat ini oleh Mahkamah Agung (MA). Begitu juga, pertanyaan penulis kepada lembaga tersebut, apakah Maklumat Keadaan Bahaya yang dikeluarkan Presiden tanggal 21-23 Juli 2001 tersebut merupakan tindakan legal atau ilegal berdasarkan konstitusi? juga tidak mendapatkan jawaban.

Ditambah lagi, bahwa *showroom* mobil termahal (mewah) di dunia saat ini berada di halaman gedung DPR, yang dipenuhi oleh mobil para anggotanya, bahkan tidak mengindahkan besarnya jumlah kubik silinder (*cc*) yang dimiliki kendaraan tersebut. Dengan kata lain, para anggota DPR/MPR kita tengah menikmati kekuasaan yang mereka peroleh tanpa memperhatikan sah atau tidaknya kekuasaan mereka itu. Dengan demikian, pengamatan Syahrir itu juga berlaku bagi para anggota DPR/MPR kita dewasa ini. Keluhan terhadap birokrasi pemerintahan dan kejengkelan rakyat sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan DPR tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat, melainkan hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri tampak jelas di mata kita.

Masalahnya adalah persoalan klasik yang harus kita hadapi sekarang ini. Kepercayaaan (*trust*) masyarakat kepada sistem pemerintahan kita dewasa ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Korupsi Kolusi dan Nepotisme, terutama dalam bentuk korupsi, kini tampak nyata sudah tak terkendali lagi. Benarlah kata *alm*. Mahbub Junaidi: bahwa nanti kita harus membayar pajak karena mengantuk, seolah-olah ini sebuah kenyataan yang hidup. Kekuasaan Wangsa Syailendra (pembangun Candi Borobudur) dan Kerajaan Majapahit (untuk membiayai perang dan perluasan kawasan) –misalnya, akhirnya runtuh karena keduanya hanya sekadar berkuasa tetapi tidak memimpin. Kekuasaan Wangsa Syailendra dianggap tidak ada oleh kaum Hindu-Buddha yang membangun Candi Prambanan yang di

kemudian hari hijrah ke Kediri di bawah Dharmawangsa dan mengingkari kekuasaan wangsa tersebut. Kekuasaan Majapahit, yang semula memeluk agama Hindu-Buddha/Bhairawa, akhirnya juga hilang tanpa dapat ditolong lagi karena ketidakmampuan mempertahankan keadaan di hadapan tantangan kaum muslimin, terutama di bawah pimpinan Sayyid Jamaluddin Husaini dalam abad ke-15 Masehi.

Dengan mengacu kepada ketidakmampuan pemerintah yang ada untuk memelihara kepercayaan (*trust*) rakyat tersebut, jelas bagi kita adanya kewajiban besar untuk berpegang kepada amanat yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, yang dirumuskan dengan sangat baik oleh para pendiri negeri ini, melalui pembukaan UUD 1945, dengan rumusan "masyarakat adil dan makmur". Hal ini jelas menunjuk pada keharusan mencapai kesejahteraan bangsa. Pernah diperdebatkan, apakah peningkatan PNB (Produk National Bruto), dapat dinilai sebagai upaya mencapai keadaan tersebut? Sekarang jangankan berusaha ke arah itu, berdebat mengenai apa yang dimaksud dengan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran pun sudah tidak lagi kita lakukan.

Kehidupan kita yang kering-kerontang ini sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya untuk mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan, dan kedua hal tersebut tidak lagi mengindahkan aspek moral/etika dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Pantaslah jika kita sekarang seolah-olah tidak memiliki kepemimpinan dan para pemimpin, karena kita sudah kehilangan aspek moral dan etika tersebut. Kepemimpinan kita saat ini, sebagai bangsa, hanya dipenuhi oleh basa-basi (etiket) yang tidak memberikan jaminan apa-apa kepada kita sebagai bangsa.

Agama Islam, yang dipeluk oleh mayoritas bangsa kita, memiliki sebuah adagium yang sangat penting: "kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin,

haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan mereka" *(tasharruf al-imâm 'alâ ar-ra'iyyah manûthun bi al-mashlahah)* jelas menunjuk hubungan langsung antara sang pemimpin dengan rakyat yang dipimpin yang diukur dengan tingkat kesejahteraan rakyat mereka. Benarkah kita saat ini memperjuangkan kesejahteraan dengan sungguh-sungguh? Kalau dilihat kelalaian para penguasa kita dewasa ini, tentu saja pertanyaan ini tidak akan ada yang menjawab sekarang. Karena dalam kenyataan hal ini tidak dipikirkan secara sungguh-sungguh oleh para penguasa kita. Tidak ada usaha untuk mengkaji kembali sistem pemerintahan kita, minimal mengenai orientasinya, hingga tidak heranlah jika langkah bangsa ini sedang terseok-seok.

Islam mengenal: "Tiada agama tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa pemimpin" *(lâ dîna illâ bi jamâ'atin wa lâ jamâ'ata illâ bi imâmatin wa lâ imâmata illâ bi imâmin)*, jelas sekali menunjuk pada pentingnya arti kepemimpinan dari sang pemimpin. Dengan demikian, kepemimpinan mempunyai arti yang sangat besar bagi sebuah bangsa. Ketika para pemimpin kita bertikai mengenai saat yang tepat bagi proklamasi kemerdekaan, ada yang merasakan sudah waktunya hal itu dilaksanakan, dan ada pula yang merasa belum waktunya, tetapi semuanya mengetahui bahwa proklamasi harus dilakukan, hanya soal waktu saja yang dipersengketakan. Ketika para pemuda menculik Soekarno ke Rengasdengklok, hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang diperlukan, sedangkan Soekarno tidak mempersoalkan keharusan siapa yang akan menyampaikan proklamasi itu sendiri. Ia hanya mempersoalkan bila proklamasi itu harus dilakukan. Dan akhirnya, semua sepakat, bahwa hal itu harus dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pengamatan Syahrir bahwa kita tidak memiliki pemimpin, melainkan hanya seorang penguasa belaka, tentu didasarkan pada sebuah kenyataan di atas. Yaitu, bahwa krisis

multidimensi yang kita hadapi sekarang ini, memerlukan jawaban serba-bagai dari para penguasa pemerintahan kita; dengan menciptakan sistem politik baru yang mengacu kepada etika dan moral, melalui kedaulatan hukum dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan undang-undang, hingga pengembangan orientasi ekonomi yang tepat, semuanya itu memerlukan kepemimpinan yang benar. Kepemimpinan yang memiliki keberanian moral, kemauan politik (*political will*) dan kejujuran untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukannya kepentingan sendiri ataupun kelompok. Karena kepemimpinan formal yang seperti itu belum ada, pantaslah bila ada anggapan, kita tidak memiliki pimpinan saat ini, melainkan hanya penguasa saja. {}



TATA KRAMA DAN 'UMMATAN WAHIDATAN

Dalam terbitan perdana sebuah jurnal ilmiah bulanan Nahdlatul Ulama, yang diterbitkan pada 1928 dan bertahan sampai tahun 60- an, KH M. Hasyim Asy'ari menuliskan fatwa beliau: bahwa kentongan (alat dari kayu yang dipukul hingga berbunyi nyaring) tidak diperkenankan untuk memanggil shalat dalam hukum Islam. Dasar dari pendapatnya itu adalah kelangkaan hadits Nabi; biasanya disebut sebagai tidak adanya teks tertulis (*dalil naqli*) dalam hal ini.

Dalam penerbitan bulan berikutnya, pendapat tersebut disanggah oleh wakil beliau Kyai Faqih dari Maskumambang, Gresik, yang menyatakan bahwa kentongan harus diperkenankan, karena bisa dianalogikan atau di-*qiyas*-kan kepada beduk sebagai alat pemanggil shalat. Karena beduk diperkenankan, atas adanya sumber tertulis (*dalil naqli*) berupa hadits Nabi Muhammad Saw. mengenai adanya atau dipergunakannya alat tersebut pada zaman Nabi, maka kentongan pun harus diperkenankan.

Segera setelah uraian Kyai Faqih itu muncul, KH M. Hasyim Asy'ari segera memanggil para ulama se-Jombang dan para santri senior beliau untuk berkumpul di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ia pun lalu memerintahkan kedua artikel itu untuk dibacakan kepada para hadirin. Setelah itu, beliau menyatakan mereka dapat menggunakan salah satu dari kedua alat pemanggil itu

dengan bebas. Yang beliau minta hanyalah satu hal, yaitu hendaknya di Mesjid Tebu Ireng, Jombang kentongan itu tidak digunakan selama-lamanya. Pandangan beliau itu mencerminkan sikap sangat menghormati pendirian Kyai Faqih dari Maskumambang tersebut, dan bagaimana sikap itu didasarkan pada "kebenaran" yang beliau kenal.

Dalam bulan Maulid/Rabi'ul Awal berikutnya, KH M. Hasyim Asy'ari diundang berceramah di Pesantren Maskumambang. Tiga hari sebelumnya, para utusan Kyai Faqih Maskumambang menemui para ketua/pemimpin *ta'mir* mesjid dan surau yang ada di kabupaten Gresik dengan membawa pesan beliau: selama Kyai M. Hasyim Asy'ari berada di kawasan kabupaten tersebut, semua kentongan yang ada harus diturunkan dari tempat bergantungnya alat itu. Sikap ini diambil beliau karena penghormatan beliau terhadap Kyai Hasyim Asy'ari, yang bagaimanapun adalah atasan beliau dalam berorganisasi. Meyakini sebuah kebenaran, tidak berarti hilangnya sikap menghormati pandangan orang lain, sebuah sikap tanda kematangan pribadi kedua tokoh tersebut.

Sikap saling menghargai satu sama lain, antara kedua tokoh tersebut yaitu antara Rois 'Am dan Wakil Rois 'Am PBNU waktu itu, menunjukkan tata krama yang sangat tinggi di antara dua orang ulama yang berbeda pendapat, tapi menghargai satu sama lain. Inilah yang justru tidak kita lihat saat ini, terlebih-lebih di antara pemimpin gerakan Islam dewasa ini, yang tampak mencuat justru sikap saling menyalahkan, sehingga tidak terdapat kesatuan pendapat antar mereka. Yang menonjol adalah perbedaan pendapat, bukan persamaan antara mereka. Penulis tidak tahu, haruskah kenyataan itu disayangkan ataukah justru dibiarkan?

Mungkin ini adalah sisa-sisa dari sebuah nostalgia yang ada mengenai "keagungan" masa lampau belaka. Tapi bukankah seseorang berhak merasa seperti itu? Bukankah kitab suci al-Qur'ân menyatakan, "Sesungguhnya telah Kuciptakan kalian (dalam

bentuk) lelaki dan perempuan dan Kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa" *(innâ khalaqnâ kum min dzakarin wa untsâ wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâ'ila li ta'ârafû innâ akramakum 'inda Allâhi atqâkum)*(QS al-Hujurat(49):13) Ayat ini jelas membenarkan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin.

Namun Allah juga berfirman dalam kitab suci-Nya itu: "Dan berpeganglah kalian kepada tali Allah (secara) keseluruhan dan janganlah bercerai-berai/terpecah belah" *(wa' tashimû bi habli allâhi jamî'an wa lâ tafarraqû)*(QS Ali Imran(3):103). Ayat ini menunjukkan kepada kita, bahwa yang dilarang bukannya perbedaan pandangan melainkan bersikap terpecah-belah satu dari yang lain. Hal ini diperkuat oleh sebuah ayat lain: "Bekerjasamalah kalian dalam (bekerja untuk) kebaikan dan ketakwaan" *(ta'âwanû 'alâ al-birri wa al-taqwâ)*(QS al-Maidah(5):3) yang jelas-jelas mengharuskan kita melakukan koordinasi berbagai kegiatan. Tetapi, kerjasama seperti itu hanya dapat dilakukan oleh kepemimpinan tunggal dalam berbagai gerakan Islam.

Masalahnya sekarang adalah langkanya kepemimpinan seperti itu. Para pimpinan gerakan Islam saling bertengkar, minimal hanya bersatu dalam ucapan. Mengapakah demikian? Karena para pemimpin itu hanya mengejar ambisi pribadi belaka, dan jarang berpikir mengenai umat Islam secara keseluruhan. Seharusnya, mereka berpikir tentang bagaimana melestarikan agama Islam sebagai budaya, melalui upaya melayani dan mewujudkan kepentingan seluruh bangsa. Ambisi politik masing-masing akan terwujud jika ada pengendalian diri, dan jika diletakkan dalam kerangka kepentingan seluruh bangsa.

Dalam ajaran Islam dikenal istilah "*ikhlas*". Keikhlasan yang dimaksudkan adalah peleburan ambisi pribadi masing-masing ke dalam pelayanan kepentingan seluruh bangsa. Di sinilah justru harus ada kesepakatan antara para pemimpin berbagai gerakan atau organisasi Islam yang ada, dan ketundukkan kepada kepu-

tusan sang pemimpin dirumuskan. Untuk melakukan perumusan seperti itu, diperlakukan dua persyaratan sekaligus, yaitu kejujuran sikap dan ucapan, yang disertai dengan sikap "mengalah" kepada kepentingan berbagai gerakan organisasi itu. Tanpa kedua hal itu, sia-sialah upaya "menyatukan" umat Islam dalam sebuah kerangka perjuangan yang diperlukan.

Dalam hal ini, penulis lagi-lagi teringat kepada sebuah adagium yang sering dinyatakan berbagai kalangan Islam: "Tak ada agama tanpa kelompok, tak ada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tak ada kepemimpinan tanpa sang pemimpin" *(lâ dîna illâ bi jamâ'atin wa lâ jamâta illâ bi imâmatin walâ imâmata illâ bî imâmin)*. Adagiumnya memang benar, walaupun sekelompok kecil pernah mengajukan klaim kepemimpinan itu dan minta diterima sebagi pemimpin. Namun sikap mereka yang memandang rendah kelompok lain, justru menggagalkan niatan tersebut, sedangkan kelompok-kelompok lain tidaklah memiliki kepemimpinan kohesif seperti itu. Herankah kita, jika wajah berbagai gerakan Islam di Tanah Air kita saat ini tampak tidak memiliki kepemimpinan yang jelas? Di sinilah kita perlu membangun kembali "kesatuan" umat *(ummatan wahidatan)*. Mudah diucapkan, tapi sulit diwujudkan bukan? **{}**

AGAMA DI TV DAN DALAM KEHIDUPAN

Pada suatu hari yang cerah, penulis memasuki ruang tunggu lapangan terbang Cengkareng, jam 05.30 Wib pagi. Sambil menunggu saat penerbangan pertama ke Yogyakarta, penulis mendengarkan siaran TV di ruang tunggu itu. Seorang penceramah agama sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para pemirsa melalui telepon, ketika dihadapkan pada masalah-masalah hukum Islam (*fiqh*), di saat menjalankan ibadah haji. Salah seorang pemirsa menanyakan; apakah sebuah tindakan yang dilakukan *jama'ah* haji dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan yang merusak ihram atau tidak.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, sang penceramah melakukan pembedaan, antara hal-hal yang merusak sarat-sarat ibadah haji, merusak kewajiban-kewajiban haji dan merusak ihram itu sendiri. Hal elementer seperti ini –dengan akibat hukum-hukum agama (*canon law*) sendiri pula yang biasa dipelajari dari kitab-kitab agama di pesantren, dijelaskan di layar televisi itu oleh sang penceramah. Ini tentu karena sang penanya diandaikan tidak tahu masalahnya, karena mereka hanya berkomunikasi melalui telepon. Sekaligus, pertanyaan itu menunjukkan perhatian sang pemirsa tersebut pada segi-segi ibadah, ketika menunaikan perjalanan ibadah haji. Mungkin itu juga disertai oleh pandangan tertentu mengenai perjalanan haji: peribadatan

yang menyenangkan, menjengkelkan atau yang tidak berguna sama sekali.

Sudah tentu sang *jama'ah* haji memiliki wewenang bertanya tentang sesuatu hal yang oleh *jama'ah* lain dianggap soal kecil. Bukankah ia telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan perjalanan tersebut, bahkan mungkin saja ia sampai menabung uang seumur hidup untuk itu. Karenanya, ia berhak bertanya apa saja, karena perjalanan tersebut merupakan sebuah obsesi dalam hidupnya. "Hak" ini adalah sesuatu yang sangat *inherent* dalam hidup sang penanya, dan sangat menyedihkan bahwa Departemen Agama Republik Indonesia (Depag-RI) yang menjadi penyelenggara ibadah haji tersebut tidak pernah mengumpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam sebuah buku yang dapat dijadikan pegangan bagi para calon *jama'ah* haji. Maka terpaksalah mereka bertanya melalui TV karena tidak ada saluran lain.

Ketika memasuki lapangan terbang itu, penulis juga berjumpa dengan Jajang C. Noer dan Debra Yatim, keduanya aktivis perempuan –yang juga sama-sama akan menuju Yogyakarta, untuk menayangkan film tentang perjuangan kaum perempuan di negeri kita. Tentu saja pertunjukkan film tersebut akan disertai tanya jawab antara para pemirsa dan kedua aktifis tersebut. Dan dapat diperkirakan, mereka akan berbeda mengenai tema makro yaitu tentang perjuangan menegakkan hak-hak wanita di negeri kita. Ini adalah hal yang wajar, bahkan kalau itu tidak dibicarakan, justru kita bertanya-tanya dalam hati, kedua orang aktifis itu untuk apa datang ke Yogyakarta? Kalau hanya untuk memutar film itu dapat dilakukan oleh para petugas setempat. Bahwa orang lain dapat saja menganggap pembicaraan mereka itu sesuatu yang bersifat setengah makro, karena membahas kurang lebih separuh warga masyarakat, yaitu kaum perempuan, tentu saja merupakan hal yang wajar pula. Pembahasan baru dianggap makro ketika menyangkut pembedaan masyarakat oleh negara, karena mereka berpendapat bahwa bahasan yang tidak

menyangkut struktur masyarakat, belumlah dianggap sebagai pembahasan yang serius. Bahwa pembahasan mengenai nasib perempuan, termasuk apakah poligami (beristri banyak) selayaknya dilarang atau tidak, juga menyangkut posisi dan harkat tiga milyar jiwa lebih kaum perempuan di seluruh dunia saat ini, dalam pandangan ini tidak otomatis menjadikan masalah *gender* sebagai masalah makro. Memang ini adalah masalah yang sangat besar dan menyangkut jumlah manusia yang sangat besar pula. Tapi, ia tidak terkait dengan masalah struktur masyarakat.

Karena itu pula ia tetap diperlakukan sebagai masalah mikro. Di tambah dengan ketidakpedulian mayoritas jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak memperhatikan masalah ini, dengan sendirinya masalah gender ini tidak berkembang menjadi masalah struktural. Memang para aktifis di berbagai bidang di lingkungan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat dari jenis hawa, selalu meneriakkan dengan lantang bahwa masalah perempuan/ gender adalah masalah struktural, tetapi tetap saja masalah itu diperlakukan dalam dunia LSM internasional dan domestik sebagai masalah non-struktural. Ini memang menyakitkan, tapi dalam kenyataan hal ini memang terjadi, dan kita tidak usah meratapinya. Perjuangan memang masih panjang, dan hal itu tidak perlu diperlakukan secara emosional.

Paham ketiga yaitu, tidak pernah mempersoalkan struktur masyarakat, dan menganggap semua struktur masyarakat yang ada dalam sejarah sebagai sesuatu yang benar. Masalah pokok yang dihadapi umat manusia, menurut pandangan ini, adalah bagaimana menegakkan keadilan dan kemakmuran yang dalam ajaran agama Islam disebut dengan istilah kesejahteraan. Jadi, menurut pandangan ini, masalah utamanya adalah penegakan hukum dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan di bidang ekonomi, terlepas dari jenis dan watak struktur itu sendiri. Inilah pandangan yang sering disebut sebagai pandangan non-struktural, juga dikenal dengan pandangan *developmentalist*.

Dalam pandangan ini, Islam atau agama-agama lain dapat

berperan memerangi materialisme dan sebagainya, tanpa terpengaruh oleh struktur masyarakat. Dengan demikian, masalah yang dihadapi terkait sepenuhnya dengan keahlian dan pengorganisasian sumber daya manusia yang dimiliki. Pandangan nonstruktural ini, antara lain diikuti oleh para teknokrat kita, yang selama ini menentukan kebijakan pembangunan yang kita ikuti sebagai bangsa.

Dan, ternyata para teknokrat tersebut telah menemui kegagalan, karena keadilan dan kemakmuran ternyata tidak kunjung tercapai, yang menikmati hanyalah sejumlah konglomerat belaka. Karenanya, pembahasan mengenai hubungan antara agama dan ideologi negara, sebaiknya dibatasi pada pandangan-pandangan agama yang ada mengenai struktur sosial yang adil bagi seluruh warga masyarakat, dan menuju pada kemakmuran bangsa. Pendekatan struktural ini diperlukan, karena memang semua agama menghendaki masyarakat yang adil, menuju pencapaian kemakmuran. "*Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafûr*" (negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun) adalah semboyan upaya kaum muslimin dalam menciptakan masyarakat yang demikian itu, sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Karenanya, membahas hubungan antara Islam dengan negara, dengan membahas struktur masyarakat yang hendak didirikan, adalah sesuatu yang secara *inherent* menyangkut keadilan, dan dengan demikian merupakan struktur masyarakat yang benar. {}

Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?

Beberapa tahun yang lampau, seorang ulama dari Pakistan datang pada penulis di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta. Pada saat itu, Benazir Buttho masih menjabat Perdana Menteri Pakistan. Permintaan orang alim itu adalah agar penulis memerintahkan semua warga NU untuk membacakan surah Al-Fatihah bagi keselamatan Bangsa Pakistan. Mengapa? Karena mereka dipimpin Benazir Buttho yang berjenis kelamin perempuan. Bukankah Rasulullah Saw telah bersabda "celakalah sebuah kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan". Penulis menjawab bahwa hadits tersebut disabdakan pada abad VIII Masehi di Jazirah Arab. Bukankah ini berarti diperlukan sebuah penafsiran baru yang berlaku untuk masa kini?

Pada waktu dan tempat itu, konsep kepemimpinan (*za'amah*) bersifat perorangan -di mana seorang kepala suku harus melakukan hal-hal berikut: memimpin peperangan melawan suku lain, membagi air melalui irigasi di daerah padang pasir yang demikian panas, memimpin karavan perdagangan dari kawasan satu ke kawasan lain dan mendamaikan segala macam persoalan antar para keluarga yang berbeda-beda kepentingan dalam sebuah suku, yang berarti juga dia harus berfungsi membuat dan sekaligus melaksanakan hukum.

Sekarang keadaannya sudah lain, dengan menjadi pemimpin, baik ia presiden maupun perdana menteri sebuah negara, konsep kepemimpinan kini telah dilembagakan/di-institusionalisasi-kan. Dalam konteks ini, Perdana Menteri Buttho tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan melalui sidang kabinet yang mayoritas para menterinya adalah kaum lelaki. Kabinet juga tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh parlemen yang beranggotakan laki-laki sebagai mayoritas. Untuk mengawal mereka, diangkatlah para Hakim Agung yang membentuk Mahkamah Agung (MA), yang anggotanya juga laki-laki. Karenanya, kepemimpinan di tangan perempuan tidak lagi menjadi masalah, karena konsep kepemimpinan itu sendiri telah dilembagakan/di-institusionalisasi-kan. "Anda memang benar, demikian kata orang alim Pakistan itu, tetapi tolong bacakan surah Al-Fatihah untuk keselamatan bangsa Pakistan".

*****

Kisah di atas, dapat dijadikan contoh betapa Arabisasi telah berkembang menjadi Islamisasi -dengan segala konsekuensinya. Hal ini pula yang membuat banyak aspek dari kehidupan kaum muslimin yang dinyatakan dalam simbolisme Arab. Atau dalam bahasa tersebut, simbolisasi itu bahkan sudah begitu merasuk ke dalam kehidupan bangsa-bangsa muslim, sehingga secara tidak terasa Arabisasi disamakan dengan Islamisasi. Sebagai contoh, nama-nama beberapa fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) juga di-Arabkan; kata *syari'ah* untuk hukum Islam, *adab* untuk sastra Arab, *ushuludin* untuk studi gerakan-gerakan Islam dan *tarbiyah* untuk pendidikan agama. Bahkan fakultas keputrian dinamakan *kulliyyatul bannat*. Seolah-olah tidak terasa ke-Islaman-nya kalau tidak menggunakan kata-kata bahasa Arab tersebut.

Kalau di IAIN saja, yang sekarang juga disebut UIN (Universitas Islam Negeri) sudah demikian keadaannya, apa pula

nama-nama berbagai pondok pesantren. Kebiasaan masa lampau untuk menunjuk kepada pondok pesantren dengan menggunakan nama sebuah kawasan/tempat, seperti Pondok Pesantren (PP) Lirboyo di Kediri, Tebu Ireng di Jombang dan Krapyak di Yogyakarta, seolah-olah kurang Islami, kalau tidak menggunakan nama-nama berbahasa Arab. Maka, dipaksakanlah nama PP Al-Munawwir di Yogya -misalnya, sebagai pengganti PP Krapyak.

Demikian juga, sebutan nama untuk hari dalam seminggu. Kalau dahulu orang awam menggunakan kata "Minggu" untuk hari ke tujuh dalam almanak, sekarang orang tidak puas kalau tidak menggunakan kata "*Ahad*". Padahal kata Minggu, sebenarnya berasal dari bahasa Portugis, "*jour dominggo*", yang berarti hari Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada hari itu orang-orang Portugis -kulit putih pergi ke Gereja. Sedang pada hari itu, kini kaum muslimin banyak mengadakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian. Bukankah dengan demikian, justru kaum muslimin menggunakan hari tutup kantor tersebut sebagai pusat kegiatan kolektif dalam ber-Tuhan?

*****

Dengan melihat kenyataan di atas, penulis mempunyai persangkaan bahwa kaum muslimin di Indonesia, sekarang justru sedang asyik bagaimana mewujudkan berbagai keagamaan mereka dengan bentuk dan nama yang diambilkan dari Bahasa Arab. Formalisasi ini, tidak lain adalah kompensasi dari rasa kurang percaya diri terhadap kemampuan bertahan dalam menghadapi "kemajuan Barat". Seolah-olah Islam akan kalah dari peradaban Barat yang sekuler, jika tidak digunakan kata-kata berbahasa Arab. Tentu saja rasa kurang percaya diri ini juga dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin sekarang di seluruh dunia. Mereka yang tidak pernah mempelajari agama dan ajaran Islam dengan mendalam, langsung kembali

ke akar Islam, yaitu kitab suci al-Qur'ân dan Hadits Nabi Saw. Dengan demikian, penafsiran mereka atas kedua sumber tertulis agama Islam itu menjadi superficial dan "sangat keras" sekali. Bukankah ini sumber dari terorisme yang menggunakan nama Islam dan yang kita tolak?

Dari "rujukan langsung" pada kedua sumber pertama Islam itu, dikenal dengan sebutan *dalil naqli*, menjadi sikap sempit yang menolak segala macam penafsiran berdasarkan ilmu-ilmu agama (*religious subject*). Padahal penafsiran baru itu adalah hasil pengalaman dan pemikiran kaum muslimin dari berbagai kawasan dalam waktu yang sangat panjang. "Pemurnian Islam" (*Islamic puritanism*) seperti itu, berarti tudingan salah alamat ke arah tradisi Islam yang sudah berkembang di berbagai kawasan selama berabad-abad, memang ada ekses buruk dari pengalaman dan perkembangan pemikiran itu, tetapi jawabnya bukanlah berbentuk puritanisme yang berlebihan, melainkan dalam kesadaran membersihkan Islam dari ekses-ekses yang keliru tersebut.

Agama lainpun pernah atau sedang mengalami hal ini, seperti yang dijalani kaum Katholik dewasa ini. Reformasi yang dibawakan oleh berbagai macam kaum Protestan, bagi kaum Katholik dijawab dengan berbagai langkah kontra-reformasi semenjak seabad lebih yang lalu. Pengalaman mereka itu yang kemudian berujung pada teologi pembebasan (*liberation theology*), merupakan perkembangan menarik yang harus dikaji oleh kaum muslimin. Ini adalah pelaksanaan dari adagium "perbedaan pendapat dari para pemimpin, adalah rahmat bagi umat" (*ikhtilâf al-a'immah rahmat al-ummah*). Adagium tersebut bermula dari ketentuan kitab suci al-Qur'ân: "Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal" (*wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâ'ila li ta'ârafû*)(QS al-Hujurat(49):13). Makanya, cara terbaik bagi kedua belah pihak, baik kaum tradisionalis maupun kaum pembaharu dalam Islam, adalah mengakui pluralitas yang dibawakan oleh agama Islam. {}

PENYESUAIAN ATAUKAH PEMBAHARUAN TERBATAS

Prof. Dr. Azyummardi Azra, Rektor UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat menjelaskan dalam dialog dengan para mahasiswa di layar TVRI tanggal 26 Nopember 2002, tentang penyebaran Islam di Nusantara. Ia mengemukakan bahwa Islam disebarkan sejak berabad-abad yang lalu, di seluruh Nusantara dengan berbagai karya para ulama kita dalam pengajian-pengajian. Di antara nama-nama yang disebutkan, terdapat nama Syekh Arsyad Banjari dari Martapura, ia dikirimn oleh salah seorang sultan yang berkuasa di kawasan tersebut untuk belajar belasan tahun lamanya di Mekkah. Namun, ia kembali ke Tanah Air dalam abad ke-18 M, dan dikuburkan di Kelampayan, Martapura. Walaupun TVRI hanya menampilkan gambar istana sultan di Martapura, namun sebenarnya saat ini ada pesantren di Kelampayan yang memiliki santri (pelajar) berjumlah belasan ribu orang.

Prof. Dr. Azyummardi Azra menyebutkan betapa besar jasa para ulama yang mengaji di Mekkah dan dan kembali ke tanah air, dalam dua hal : penyebaran agama Islam di kawasan masing-masing, dan penerapan ajaran agama Islam secara lebih murni. Ini adalah pengawasan seorang pakar atas jalannya sejarah di bumi Nusantara. Ini haruslah dihargai, dan temuan-temuannya itu haruslah diteruskan oleh para peneliti sejarah Nusantara.

Hanya dengan demikian, kita akan dapat mencapai mutu kesejarahan yang tinggi, karena didasarkan pada hasil-hasil kajian ilmiah yang benar. Tentu saja, hasil-hasil kajian ini juga harus disiarkan kepada orang awan dengan bahasa yang mereka mengerti dan disiarkan melalui media khalayak.

Apa yang dilakukan Prof. Dr. Azyummardi ini patut dihargai, karena dengan demikian ia telah menyajikan fakta-fakta sejarah kepada khalayak ramai. Ini bukanlah sesuatu yang kecil artinya, karena justru dengan cara demikianlah dapat dilakukan pendidikan masyarakat mengenai masa lampau negeri dan bangsa kita. Ini bahkan lebih besar jasanya daripada penyampaian hal-hal normatif yang sekarang mendominasi penyiaran kita. Karenanya, dibutuhkan lebih banyak orang-orang seperti Prof. Dr. Azra ini, yang pandai menghubungkan dunia ilmiah dengan masyarakat awam kita. Katakanlah dalam bahasa kuis televisi: "seratus untuk Pak Azra."

*****

Namun, tak ada gading yang tak retak, kalau meminjam sabda Rasulullah, dapat digunakan ungkapan berikut: "manusia adalah tempat kesalahan dan kelalaian" *(al insân mahallu al khatha' wa al-misyân).* Ada sedikit kesalahan dalam penyampaian beliau akan sejarah masa lampau kita. Beliau menyatakan, bahwa banyak penyimpangan yang disebabkan oleh adat dan budaya kita dari masa sebelum itu, kemudian oleh ulama kita disesuaikan dengan hukum-hukum agama *(fiqh)* yang formal. Disimpulkan dari situ, bahwa mereka para ulama melakukan pemurnian Islam. Dan pemurnian itu sebenarnya adalah upaya untuk memelihara keabsahan ajaran-ajaran agama Islam di negeri kita.

Dalam hal ini, apa yang diuraikan secara umum oleh Prof. Dr. Azra itu, berlaku untuk para ulama umumnya di kawasan ini pada masa lampau. Juga dengan percontohan mereka, seperti terlihat dalam pelaksanaan akhlak dan penerapan ibadah, mereka

para ulama itu telah merintis "ketaatan" agama yang luar biasa pada bangsa kita, yang masih terpelihara sampai hari ini di hadapan "pembaratan" (westernisasi) yang dianggap sebagai modernisasi. Proses seperti ini, yang berjalan sangat lambat selama berabad-abad lamanya, sangat ditentukan oleh percontohan yang diberikan elite kepada masyarakat kita. Inilah sebenarnya yang harus kita ingat, karena kuatnya kecenderungan elite politik kita dewasa ini hanya untuk mengejar keuntungan pribadi/golongan, di atas kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Hal yang dilupakan Prof. Dr. Azra , adalah menyebutkan juga fungsi lain yang dilakukan oleh Syekh Arsyad al-Banjari dengan karyanya (*Sabîl al-Muhtadîn*), yang sekarang ini juga menjadi nama Masjid Raya/Agung di Kota Banjarmasin. Apa yang dilupakan Dr. Azra, adalah bahwa dalam karya tersebut Syekh Arsyad juga melakukan sebuah pembaharuan terbatas atas hukum-hukum agama *(fiqh)*. Dalam karyanya itu, beliau menyampaikan hukum agama perpantangan. Hukum agama ini jelas memperbaharui hukum agama pembagian waris *(farâ-idh)* secara umum. Kalau biasanya dalam hukum agama itu disebutkan, ahli waris lelaki menerima bagian dua kali lipat ahli waris perempuan. Beliau beranggapan lain halnya dengan adat Banjar yang berlaku di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dewasa ini.

****

Dalam karyanya itu, beliau menganggap untuk masyarakat bersungai besar, seperti di Kalimantan Selatan, harus diingat adanya sebuah ketentuan lain. Yaitu, rejeki di kawasan itu adalah hasil kerjasama antara suami dan istri. Ketika sang suami masuk hutan mencari damar, rotan, kayu dan sebagainya, maka istri menjaga jangan sampai perahu yang ditumpangi itu tidak terbawa arus air, di samping kewajiban lain seperti menanak nasi dan sebagainya. Dengan demikian, hasil-hasil hutan yang dibawa

pulang adalah hasil karya dua orang, dan ini tercermin dalam pembagian harta waris. Menurut adat perpantangan itu, harta waris dibagi dahulu menjadi dua. Dengan paroh partama diserahkan kepada pasangan yang masih hidup, jika suami atau istri meninggal dunia dan hanya paroh kedua itu yang dibagikan secara hukum waris Islam.

Dengan demikian, Syekh Arsyad melestarikan hukum agama Islam *(fiqh)* dengan cara melakukan pembaharuan terbatas. Namun, pada saat yang bersamaan, beliau juga melakukan penyebaran agama Islam dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya. Inilah jasa yang sangat besar yang kita kenang dari hidup beliau, sekembalinya ke tanah air di kawasan Nusantara ini. Hanya dengan inisiatif yang beliau ambil itu, dapat kita simpulkan dua hal yang sangat penting: *pertama,* kemampuan melakukan pembaharuan terbatas, *kedua* berjasa mendidik masyarakat dalam perjuangan hidup selama puluhan tahun lamanya. Jasa dalam dua bidang ini sudah pantas membuat beliau memperoleh gelar, sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau yang sangat besar bagi kehidupan kita sebagai bangsa, di masa kini maupun masa depan.

Jasa Syekh Arsyad di bidang pembaharuan terbatas ini, dapat disamakan dengan jasa Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam dinasti para penguasa Mataram. Dengan penetepannya bahwa tahun Saka, harus dimulai pada bulan Syura, dan bulannya berjumlah tigapuluh hari. Hal yang sama juga dilakukannya atas hukum perkawinan-perceraian-rujuk yang berlaku hingga saat ini, yang diambilnya dari hukum agama Islam formal *(fiqh)*. Dengan demikian "pembaharuan terbatas" yang dilakukan kedua tokoh tersebut berjalan tanpa kekerasan, seperti yang diajarkan oleh agama Islam. Bukan dengan menggunakan kekerasan, apalagi terorisme seperti yang dilakukan sebagian sangat kecil kaum muslimin yang tidak terdidik secara baik di negeri kita saat ini. **{}**

Pentingnya Sebuah Arti

Di akhir November tahun lalu, penulis diundang oleh sebuah lembaga yang dipimpin Dr. Chandra Muzaffar untuk turut dalam sebuah diskusi di Malaysia. Karena tempat dan tanggal diskusi itu dirubah, penulis tidak dapat turut serta dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan. Penulis hanya mengirimkan ringkasan sebuah makalah tertulis kepada lembaga itu, untuk dibahas dalam kesempatan tersebut -mudah-mudahan dengan langkah itu penulis dapat turut serta dalam membahas masalah yang diperbincangkan, yaitu peranan agama dalam mencari pemahaman yang benar tentang globalisasi. Kalau hal itu tercapai, berarti penulis telah mengambil bagian dalam pembahasan mengenai satu sisi globalisasi.

Memang, pembahasan mengenai globalisasi selalu sangat menarik, bukankah hal itu menyangkut seluruh sisi kehidupan umat manusia? Baik dalam sisi kolektif kehidupan manusia, seperti perdagangan dan sistem keuangan, maupun mengenai sisi individual (pribadi) seseorang -seperti selera kita akan sesuatu-sangat ditentukan oleh pengertian kita akan globalisasi. Dengan mengambil sebuah pengertian tertentu, pemahaman kita akan globalisasi itu sendiri dengan sendirinya mengakibatkan sikap tertentu pula. Karenanya pembahasan istilah tersebut akan sangat

menarik, justru karena relevansinya dengan kehidupan umat manusia.

Inilah yang mendorong penulis untuk mengirimkan ringkasan sumbangan pemikiran bagi jalannya pembahasan mengenai peranan agama dan globalisasi yang berlangsung di Malaysia itu. Persoalanya terletak pada cara bagaimana kita memahami arti kata globalisasi tersebut. Sebuah pemahaman yang salah akan mengakibatkan pandangan yang salah pula, dan ini berakibat pada pengambilan sikap yang tidak benar. Dengan demikian sikap kita, dan juga sikap agama-agama yang ada, harus diuji kebenarannya melalui pengertian yang benar pula, dan memiliki obyektifitas yang diperlukan. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertian yang benar tentang kata tersebut sangat diperlukan, kalau kita ingin memperoleh kesimpulan yang jelas dan benar.

*****

Dalam pengertian yang umum dipakai, kata globalisasi sangat dipahami sebagai dominasi usaha-usaha besar dan raksasa atas tata niaga dan sistem keuangan internasional yang kita ikuti. Ia juga dipahami sebagai pembentukan selera warga masyarakat secara global/mendunia yang juga turut kita nikmati saat ini. Deretan penjualan "makanan siap-telan" (*fast food*) menjadi saksi akan pemaknaan seperti itu. Selera kita ditentukan oleh pasar, bukannya menentukan pasar. Dari fakta ini saja sudah cukup untuk menjadi bukti akan kuatnya dominasi tersebut. Pengertian lain globalisasi adalah dominasi komersial dan pengawasan atas sistem finansial dalam hubungan antar-negara, inilah yang sekarang menentukan sekali tata hubungan antara negara-negara yang ada. Karenanya, pembahasan arti kata globalisasi itu menjadi sangat penting dan akan menentukan masa depan umat manusia. Karena itulah kita juga harus turut berbicara, kalau tidak ingin nantinya arti itu ditentukan oleh pihak lain yang disebutkan di atas.

Dalam hal ini, penulis menganggap arti kata globalisasi ini harus dipahami secara lebih serius, karena kalau kita lengah dan tidak memberikan perhatian, justru akan menjadi mangsa tata niaga internasional yang berlaku di seluruh dunia saat ini. Makanya, dari dulu penulis telah berkali-kali menyampaikan hal ini kepada masyarakat melalui pidato, ceramah, prasaran maupun artikel seperti ini.

Sikap penulis ini hampir-hampir tidak pernah mendapatkan responsi-responsi yang kreatif. Walaupun penulis juga mengetahui banyak artikel ditulis untuk jurnal-jurnal ilmiah tentang hal ini, namun hampir seluruh karya-karya itu tidak mencapai pembaca kebanyakan dan dengan demikian masyarakat tidak turut pula dalam pembahasan mengenai arti kata globalisasi itu. Dengan demikian, pemahaman sepihak yang bersifat materialistik atas kata itu tetap saja menjadi dominan. Penulis juga tahu bahwa dengan tulisan ini pun, masyarakat tetap saja banyak yang tidak mengetahui adanya bermacam-macam pengertian dari kata tersebut, karena mungkin terlalu kecilnya upaya untuk mengajukan pengertian lain, dari apa yang dimengerti masyarakat pada waktu ini. Namun, tulisan seperti itu harus dikemukakan guna menunjang sebuah keputusan politik yang nanti akan diambil pada waktunya.

*****

Dengan kata lain penulis memiliki keyakinan, bahwa perubahan sebuah pengertian akan terjadi, jika ada pihak yang nantinya mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ini akan terjadi jika ada pemerintahan yang benar-benar memikirkan kepentingan rakyat kebanyakan, dalam perimbangan kekuatan antara berbagai pemikiran di dunia ini. Jika nantinya ada pemerintahan yang benar-benar tidak rela akan adanya ketimpangan kekuatan luar biasa antara negara-negara berteknologi maju dengan negara-negara yang sedang berkembang, tentu akan

ada tindakan-tindakan yang diambil untuk melakukan koreksi terhadap ketimpangan tersebut. Upaya korektif itulah yang akan menimbulkan pengertian yang benar atas kata globalisasi itu.

Islam mengajarkan perlunya dijaga keseimbangan antara hal-hal yang mengatur kehidupan manusia, mengapa? Karena hanya dengan keseimbangan itulah keadilan dapat dijaga dan akan berlangsung baik dalam kehidupan individual maupun kolektif kita. Sangat banyak kata "*a'dilû*" (berlakulah yang adil) dimuat dalam kitab suci al-Qur'ân, maka mau tidak mau pemikiran bersungguh-sungguh tentang masyarakat harus bertumpu pada kebijakan tersebut. Kata "*al-qisthu*" (keadilan) juga demikian banyak terdapat dalam pemikiran Islam, seperti "Wahai orang-orang beriman, tegakkan keadilan dan jadilah saksi bagi Tuhan kalian, walau akan merugikan (sebagaian dari kalangan) kalian sendiri" (*yâ ayyuha al-ladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bi al-qisthi syuhadâ'a li allâhi walau 'alâ anfusikum*)(QS al-Nisa(4):135).

Jadi, jelaslah bahwa upaya menegakkan pengertian yang benar atas kata "globalisasi", itu sangat terkait dengan penegakan keseimbangan antara berbagai kekuatan di dunia ini, yang juga berkaitan dengan pemikiran akan keadilan dalam pandangan Islam. Mungkin inilah yang dimaksudkan dengan hadits "Sebaik-baik perkara/persoalan, adalah yang (terletak) di tengah-tengah" (*khairu al 'umur au sâthuha*). Jelaslah dari hadits tadi, Islam sangat terkait dari sudut pemikiran keseimbangan antar-negara. Dengan kata lain, Islam sebenarnya tidak merelakan ketimpangan yang terjadi pada saat ini. {}

SISTEM BUDAYA DAERAH KITA DAN MODERNISASI

Beberapa belas tahun lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan penelitian tentang 14 sistem budaya daerah di negeri kita. Sistem budaya daerah Aceh hingga Nusa Tenggata Timur (NTT) diteliti, termasuk sistem budaya Jawa I dan Jawa II. Yang dimaksudkan dengan sistem budaya Jawa I adalah sistem budaya Jawa yang ada di daerah-daerah pusat keraton, seperti Yogyakarta dan Solo. Sebaliknya, sistem budaya Jawa II adalah Jawa pinggiran, terutama di Jawa Timur. Budaya pesantren, dalam hal ini, termasuk sistem budaya Jawa II.

Hasil yang sangat menarik dari penelitian tersebut, yang dipimpin Dr. Mochtar Buchori, adalah pentingnya penerapan sistem-sistem tersebut di saat sistem modern belum dapat diterapkan. Sistem budaya Ngada di Flores Timur, umpamanya, adalah substitusi bagi sistem hukum nasional kita di daerah itu, ketika belum berdiri lembaga pengadilan di sana. Kode etik *siri* dalam masyarakat Bugis, yang berintikan pembelaan terhadap kehormatan diri, tidaklah lekang pada masa ini. Beberapa kejadian penggunaan badik untuk mempertahankan diri, di berbagai daerah di kalangan orang Bugis, jelas menunjukkan kepada penerapan nilai-nilai yang berlaku melalui sistem budaya daerah Bugis itu.

Penelitian menunjukkan dua buah kecenderungan tersebut yang menunjuk pada kemampuan hidup sistem budaya daerah kita di tengah-tengah arus modernisasi yang datang tanpa dapat dicegah. Karenanya, sikap yang tepat adalah bagaimana memanfaatkan sistem budaya daerah di suatu tempat pada sebuah periode, dengan dua tujuan: menunggu mapannya modernisasi, dan mengelola arus perubahan untuk tidak datang secara tiba-tiba. Dengan cara demikian, kita dapat mengurangi akibat-akibat modernisasi menjadi sekecil mungkin.

*****

Clifford Geertz dari Universitas Princeton, menganggap kyai/ulama' pesantren sebagai "makelar budaya" *(cultural broker*). Dia menyimpulkan demikian, karena melihat para kyai melakukan fungsi *screening* bagi budaya di luar kita. Nilai-nilai baru yang dianggap merugikan, disaring oleh mereka agar tidak menanggalkan budaya lama —kyai bagaikan dam/waduk yang menyimpan air untuk menghidupi daerah sekitar. Pengaruh budaya luar yang datang ke suatu daerah, bagaikan permukaan air yang naik oleh adanya bendungan itu. Masyarakat dilindungi dari pengaruh-pengaruh negatif, dan dibiarkan mengambil pengaruh-pengaruh luar yang positif.

Hiroko Horikoshi dalam disertasinya berhasil membuktikan bahwa Kyai mengambil peranan sendiri untuk merumuskan gerak pembangunan di tempat mereka berada. Ini berarti, menurut Horikoshi reaksi pesantren terhadap modernisasi tidaklah sama dari satu ke lain tempat. Dengan demikian, tidak akan ada sebuah jawaban umum yang berlaku bagi semua pesantren terhadap proses modernisasi. Dengan kata lain, Horikoshi menolak pendapat Geertz di atas, karena tidak akan ada jawaban sama terhadap tantangan modemisasi. Menurut Horikoshi, masing-masing pesantren dan Kyai akan mencari jawaban-jawaban sendiri —dan,

dengan demikian tidak ada jawaban umum yang berlaku bagi semua dalam hal ini.

Pendapat Geertz di atas, dengan sendirinya, terbantahkan oleh temuan-temuan yang dilakukan Horikhosi terhadap reaksi Kyai Yusuf Thojiri dari pesantren Cipari, Garut, atas tantangan modernisasi. Pesantren yang dipimpin oleh besan mendiang KH. Anwar Musaddad itu, tentu memberikan reaksi lain terhadap proses modernisasi. Pesantren yang sekarang dipimpin oleh Ustadzah Aminah Anwar Musaddad itu, sekarang justru tertarik pada upaya mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bergerak di bidang garment dan pelestarian lingkungan alam melalui penghutanan kembali.

*****

Jelaslah dengan demikian, bahwa bermacam cara dapat digunakan untuk mengenal berbagai reaksi terhadap proses modernisasi. Ada reaksi yang menggunakan warisan sistem budaya daerah, tapi ada pula yang merumuskan reaksi mereka dalam bentuk tradisional yang tidak tersistemkan. Ada pula reaksi yang bersifat temporer, tapi ada pula yang bersifat langsung. Ada yang berpola umum, tapi ada pula yang menggunakan cara-cara khusus dalam memberikan reaksi.

Kesemuannya itu, memperlihatkan wajah yang sama, keengganan menerima bulat-bulat apa yang dirumuskan orang mengenai diri kita sendiri. Dengan kata lain, proses pribumisasi (*nativisasi*) berlangsung dalam bentuk bermacam-macam pada saat tingkat penalaran dan ketrampilan berjalan, melalui berbagai sistem pendidikan formal. Dengan demikian, proses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia berjalan dalam dua arah yang berbeda. Di satu pihak, kita menerima pengalihan kebolehan dan ketrampilan dari bangsa-bangsa lain, melalui sistem pendidikan formal —maka, lahirlah tenaga-tenaga profesional untuk mengelolanya. Di pihak lain, pendidikan informal kita justru meno-

lak pendekatan menelan bulat-bulat apa yang datang dari luar.

Dengan demikian, tidaklah heran jika ada dua macam jalur komunikasi dalam kehidupan bangsa kita. Di satu sisi, kita menggunakan jalur komunikasi modern, yang bersandar pada sistem pendapat formal dan media massa. Media massa pun, yang dahulu sangat takut pada kekuasaan pemerintah, kini justru tunduk terhadap kekuasaan uang; dengan kemampuan seleksi yang belum berkembang menjadi proses yang efektif. Di sisi lain, digunakan jalur lain, yaitu komunikasi langsung dengan massa konggregasi jama'ah masjid/surau, gereja, pengajian-pengajian khalayak/majelis ta'lim, kelenteng/vihara, merupakan saluran wahana langsung tersebut. Tentu, penggunaan kedua jalur utama itu yang sangat berbeda satu sama lain, yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Apalagi, jika kemampuan menggunakan kedua jalur itu, oleh pihak yang sama, tentu akan menjadikan sistem politik kita sekarang dan di masa depan menjadi sangat transparan, akan menjadi lahan menarik untuk dapat dipelajari dan diamati dengan seksama. {}

"Tombo Ati" Berbentuk Jazz?

Sebagaimana diketahui "*Tombo Ati*" adalah nama sebuah sajak berbahasa Arab ciptaan Sayyidina Ali, yang oleh KH. Bisri Mustofa dari Rembang (ayah KH. A. Mustofa Bisri) diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan judul tersebut. Dalam sajak itu, disebutkan 5 buah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kelima hal itu dianggap sebagai obat (*tombo*) bagi seorang muslim yang tingkahnya menunjukkan bukan muslim "yang baik". Dengan melaksanakan secara teratur kelima hal yang disebutkan dalam sajak tersebut, dijanjikan orang itu akan menjadi muslim "yang baik", dianggap demikian karena ia melaksanakan amalan agama secara tuntas. Sajak ini sangat populer di kalangan para santri di Pulau Jawa, terutama di lingkungan pesantren.

Karenanya sangatlah penting untuk mengamati, adakah sajak itu tetap digemari oleh kaum muslimin Sunni tradisional? Hal ini menjadi penting karena sebuah faktor, kalau ia tetap dilestarikan, maka hal itu menunjukkan kemampuan muslimin Sunni tradisional menjaga budaya kesantrian mereka di alam serba modern ini. Jadi kemampuan sebuah kelompok melestarikan sebuah sajak bukan sekedar "peristiwa lumrah". Peristiwa itu justru menyentuh sebuah pergulatan dahsyat yang menyangkut budaya kelompok Sunni tradisional melawan proses modernisasi yang dalam hal ini berbentuk *westernisasi*

(pembaratan). Bahwa sajak itu, dalam bentuk sangat tradisional dan memiliki isi kongkret lokal (Jawa), justru membuat pertarungan budaya itu lebih menarik untuk diamati.

Sebuah proses maha besar yang meliputi jutaan jiwa warga masyarakat, sedang terjadi dalam bentuk yang sama sekali tidak terduga. Demikian juga dengan sajak tersebut yang berisi "perintah agama" untuk berdzikir tengah malam, mengerti dan memahami isi kandungan kitab suci al-Qur'ân, bergaul erat dengan para ulama dan berpuasa untuk menjaga hawa nafsu, adalah hal-hal utama dalam asketisme (*khalwah*) yang merupakan pola hidup ideal bagi seorang muslim, yang menempa dirinya menjadi " orang baik dan layak" (*shaleh*). Jika anjuran itu diikuti oleh kaum muslim dalam jumlah besar, tentu saja keseluruhan kaum muslimin akan memperoleh "kebaikan" tertentu dalam hidup mereka. Gambaran itu sangat ideal, namun modernisasi datang untuk menantangnya.

****

Dalam sebuah perhelatan perkawinan di Kota Solo, penulis mengalami sendiri hal itu. Ketika sebuah kelompok band menampilkan permainan lagu "*Tombo Ati*" itu secara modern. Penulis sangat tercengang. Pertama, oleh kenyataan sebuah produk sastra yang sangat kuno (walaupun berupa terjemahan) dapat disajikan dalam irama yang tidak terduga sama sekali. Mungkin irama jazz itu bercampur dengan langgam Jawa, namun ia tetap saja sebuah iringan jazz. Mungkin tidak semodern permainan Sadao Watanabe, namun bentuk jazz dari "*Tombo Ati*" itu tetap tampak dalam sajian sekitar 5 menit itu.

Di sini kita sampai kepada sebuah kenyataan, munculnya berbagai bentuk dan sajian tradisional dengan mempertahankan "hakikat keaslian" di hadapan tantangan modernitas. Tidak hanya penampilan alat-alat musiknya saja, melainkan dalam

perubahan fungsi dari sajak itu sendiri. Kalau semula sajak itu dimaksudkan sebagai pesan moral sangat ideal bagi kaum muslimin, namun dalam pagelaran tersebut berubah peran menjadi sebuah hiburan.

Tentu saja kita tidak dapat menyamakan pagelaran musik yang menggemakan "*Tombo Ati*" dengan Debus dari Banten, yang memperagakan manusia tidak berdarah ketika ditusuk benda tajam. Dengan mudah kita mengatakan "penari" Debus seperti itu, sebagai orang yang belasan tahun lamanya menahan diri dari memakan sejumlah makanan dan membatasi kebiasaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menyadari, sebenarnya untuk melakukan pertunjukan Debus itu, seseorang secara "tirakat" haruslah menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan itu.

Dengan demikian untuk menjalankan pertunjukan itu terdapat keyakinan agama dan mereduksi kebiasaan keseharian menjadi latihan-latihan biasa. Ini memiliki arti perjumpaan serius (*encounter*) antara peradaban tradisional dengan peradaban modern. Ini adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi bukannya dihardik atau disesali (seperti terlihat dari sementara reaksi berlebihan atas pagelaran "ngebor" dari Inul). Sudah tentu ini adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, karena di sinilah letak hubungan langsung antara kesenian dan dunia pariwisata.

*****

Perjumpaan antara yang tradisional dan yang modern itu dimungkinkan oleh kerangka komersial yang bernama pariwisata. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa dalam tradisionalisme ada juga mengandung watak-watak yang tidak komersial, namun harus didorong untuk maju. Contohnya penampilan sajak (*Tombo Ati*) itu dalam sajian jazz adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diamati. Jelas dari proses

penampilan (*Tombo Ati*) itu terjadi sebuah proses yang oleh para pengamat perkembangan masyarakat disebut sebagai "proses tawar menawar" (*trade off*) yang sering terasa aneh, karena menampilkan sesuatu yang tidak tradisional maupun modern. Kemampuan melakukan tawar-menawar seperti itulah, yang sekarang dihadapi kebudayaan kita.

Bahkan hal itu juga terjadi dalam perjumpaan antar agama. Ketika agama Buddha dibawa oleh Dinasti Syailendra ke pulau Jawa dan bertemu dengan agama Hindu yang sudah terlebih dahulu datang, hasilnya adalah agama Hindu-Buddha (*Bhairawa*). Agama Islam yang masuk ke Indonesia juga mengalami hal yang sama. Perjumpaan antara ajaran formal Islam dengan budaya Aceh misalnya melahirkan "seni kaum Sufi" seperti tari Seudati, yang dengan indahnya digambarkan oleh James Siegel dalam *Rope of God*. Berbeda dari model Minangkabau yang mengalami perbenturan dahsyat bidang hukum agama, antara hukum formal Islam dan ketentuan-ketentuan adat. Hasilnya adalah ketidakpastian sikap yang ditutup-tutupi oleh ungkapan "*Adat Basandi Sara*' dan *Sara' Basandi Kitabullah* ." Di Gua (Sumatera Selatan) yang terjadi adalah lain lagi, yaitu ketentuan adat jalan terus sedangkan hal-hal tradisional pra-Islam juga dilakukan. Di pulau Jawa yang terjadi adalah hubungan yang dinamai oleh seorang akademisi sebagai "hubungan multi-keratonik." Dalam hubungan ini kaum santri mengembangkan pola kehidupan sendiri yang tidak dipengaruhi oleh "adat pra Islam" yang datang dari keraton.

Perkembangan keadaan seperti itu, mengharuskan kita menyadari bahwa setiap agama di samping ajaran-ajaran formal yang dimilikinya, juga mempunyai proses saling mengambil dengan aspek-aspek lain dari kehidupan budaya. Di sinilah kita harus selalu menerima adanya perkembangan empirik yang sering dinamakan studi kawasan mengenai Islam. Dalam hal ini, penulis melihat perlunya studi kawasan itu untuk

DICARI: KEUNGGULAN BUDAYA

Ada sebuah prinsip yang selalu dikumandangkan oleh mereka yang meneriakan kebesaran Islam: "Islam itu unggul, dan tidak dapat diungguli" *(al-Islâm ya'lû wala yu'la alahi*). Dengan pemahaman mereka sendiri, lalu mereka menolak apa yang dianggap sebagai "kekerdilan" Islam dan kejayaan orang lain. Mereka lalu menolak peradaban-peradaban lain dengan menyerukan sikap "mengunggulkan " Islam secara doktriner. Pendekatan doktriner seperti itu berbentuk pemujaan Islam terhadap "keunggulan" teknis peradaban-peradaban lain. Dari sinilah lahir semacam klaim kebesaran Islam dan kerendahan peradaban lain, karena memandang Islam secara berlebihan dan memandang peradaban lain lebih rendah.

Dari "keangkuhan budaya" seperti itu, lahirlah sikap otoriter yang hanya membenarkan diri sendiri dan menggangap orang atau peradaban lain sebagai yang bersalah atas kemunduran peradaban lain. Akibat dari pandangan itu, segala macam cara dapat dipergunakan kaum muslim untuk mempertahankan keunggulan Islam. Kemudian lahir semacam sikap yang melihat kekerasan sebagai satu-satunya cara "mempertahankan Islam". Dan lahirlah terorisme dan sikap radikal demi "kepentingan" Islam.

Mereka tidak mengenal ketentuan hukum Islam/*fiqh* bahwa orang Islam diperkenankan menggunakan kekerasan hanya jika

diusir dari kediaman mereka (*idza ukhriju min diyarihim*). Selain alasan tersebut itu tidak diperkenankan menggunakan kekerasan terhadap siapapun, walau atas dasar keunggulan pandangan Islam. Sesuai dengan ungkapan di atas maka jelas mereka salah memahami Islam, yang dipahami bahwa kaum muslimin diperkenankan menggunakan kekerasan atas kaum lain. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci al-Qur'ân dengan ungkapan "Tiap kelompok bersikap bangga atas milik sendiri" (*kullu hizbin bimâ ladaihim farihûn*) (QS al-Mu'minûn (23): 54). Kalau sikap itu dicerca oleh al-Qur'ân sendiri, berarti juga dicerca oleh Rasul-Nya.

*****

Jelaslah sikap Islam dalam hal ini, yaitu tidak menggangap rendah peradaban orang lain. Bahkan Islam mengajukan untuk mencari keunggulan dari orang lain sebagai bagian dari pengembangannya. Untuk mencapai keunggulan itu Nabi bersabda "*carilah ilmu hingga ke tanah Tiongkok*" (*utlubû al-ilmâ walau bî al-shîn*), bukankah hingga saat ini pun ilmu-ilmu kajian keagamaan Islam telah berkembang luas di kawasan tersebut? Dengan demikian, Nabi mengharuskan kita mencarinya ke mana-mana. Ini berarti kita tidak boleh apriori terhadap siapapun, karena ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang terdapat di mana-mana. Bahkan teknologi maju yang kita gunakan adalah hasil ikutan (*spend off*) dari teknologi ruang angkasa yang dirintis dan dibuat di bumi ini. Dengan demikian, teknologi antariksa juga menghasilkan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Pengertian "longgar" seperi inilah yang dikehendaki kitab suci al-Qur'ân dan Hadits.

Lalu adakah "kelebihan teknis" orang-orang lain atas kaum muslimin yang dapat dianggap sebagai "kekalahan" umat Islam? Tidak, karena amal perbuatan kaum muslimin yang ikhlas kepada agama mereka memiliki sebuah nilai lebih dalam pandangan Islam. Hal itu dinyatakan sendiri oleh Al-Quran: "Dan

orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama, tak akan diterima amal perbuatannya di akhirat. Dan ia adalah orang yang merugi " *(wa man yabtaghi qhaira al-Islâm dînan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-âkhirati min al-khâsirîn)* (QS Ali Imran (3): 75). Dari kitab suci ini dapat diartikan Allah tidak akan menerima amal perbuatan seseorang non-muslim, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh memandang rendah kerja siapapun.

Sebenarnya pengertian kata "diterima di akhirat" berkaitan dengan keyakinan agama dan dengan demikian memiliki kualitas tersendiri. Sedangkan pada tataran duniawi perbuatan itu tidak tersangkut dengan keyakinan agama, melainkan "secara teknis" membawa manfaat bagi manusia lain. Jadi manfaat "secara teknis" dari setiap perbuatan dilepaskan oleh Islam dari keyakinan agama dan sesuatu yang secara teknis memiliki kegunaan bagi manusia diakui oleh Islam. Namun, dimensi "penerimaan" dari sudut keyakinan agama memiliki nilainya sendiri. Peng-Islaman perbuatan kita justru tidak tergantung dari nilai "perbuatan teknis" semata, karena antara dunia dan akhirat memiliki dua dimensi yang berbeda satu dari yang lain.

*****

Dengan demikian, jelas peradaban Islam memiliki keunggulan budaya dari sudut penglihatan Islam sendiri, karena ada kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Kita diharuskan mengembangkan dua sikap hidup yang berlainan. Di satu pihak, kaum muslimin harus mengusahakan agar supaya Islam -sebagai agama langit yang terakhir- tidak tertinggal, minimal secara teoritik. Tetapi di pihak lain kaum muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri. Dengan demikian keunggulan atau ketertinggalan budaya Islam tidak terkait dengan penguasaan "kekuatan politis", melainkan dari kemampuan budaya sebuah masyarakat muslim untuk memelihara kekuatan pendorong ke arah kemajuan, tek-

nologi dan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, kita tidak perlu berkecil hati melihat "kelebihan" orang lain, karena hal itu hanya akibat belaka dari kemampuan budaya untuk mendorong munculnya hal-hal yang bersifat "teknis" seperti dikemukakan di atas. Ini juga berarti penolakan Islam atas tindak kekerasan untuk mengejar ketertinggalan "teknis" tadi. Walaupun kita menggunakan kekerasan berlipat-lipat kalau memang secara budaya kita tidak memiliki pendorong ke arah kemajuan, kaum muslimin akan tetap tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah letak pentingnya dari apa yang oleh Samuel Huntington sebut sebagai "perbenturan budaya" (*clash of civilizations*)". Perbenturan ini secara positif harus dilihat sebagai perlombaan antar budaya, jadi bukanlah sesuatu yang harus dihindari.

*****

Beberapa tahun lalu penulis diminta oleh *Yomiuri Shimbun*, harian berbahasa Jepang terbitan Tokyo dan terbesar di dunia dengan oplah 11 juta lembar tiap hari, untuk berdiskusi dengan Profesor Huntington, bersama-sama dengan Chan Heng Chee (dulu Direktur Lembaga Kajian Asia-Tenggara di Singapura dan sekarang Dubes negeri itu untuk Amerika Serikat) dan Profesor Aoki dari Universitas Osaka. Dalam diskusi di Tokyo itu, penulis menyatakan kenyataan yang terjadi justru bertentangan dengan teori "perbenturan budaya" yang dikemukakan Huntington. Justru sebaliknya ratusan ribu warga muslimin dari seluruh dunia belajar ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri-negeri Barat tiap tahunnya, yang berarti di kedua bidang itu kaum muslim saat ini tengah mengadopsi (mengambil) dari budaya Barat.

Nah, keyakinan agama Islam mengarahkan mereka agar menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mereka kembangkan dari negeri-negeri Barat untuk kepentingan kemanusiaan, bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Pada

waktunya nanti, sikap ini akan melahirkan kelebihan budaya Islam yang mungkin tidak dimiliki orang lain “kebudayaan yang tetap berorientasi melestarikan perikemanusiaan, dan tetap melanjutkan misi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kalau perlu harus kita tambahkan pelestarian akhlak yang sekarang merupakan kesulitan terbesar yang dihadapi umat manusia di masa depan, seperti terbukti dengan penyebaran AIDS di seluruh dunia, termasuk di negeri-negeri muslim. {}

Keraton dan Perjalanan Budayanya

Dalam minggu keempat bulan Desember 2002, penulis atas undangan Susuhunan Pakubuwono XII dari Solo, melancong ke Kuala Lumpur untuk dua malam. Penulis memperoleh undangan itu, karena Sri Susuhunan juga diundang oleh sejumlah petinggi Malaysia guna merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Ini menunjukkan, bahwa pengaruh Keraton Solo Hadiningrat masih kuat hingga ke Negeri Jiran, seperti Malaysia. Sudah tentu pengaruh tersebut bersifat budaya/kultural saja karena pengaruh politisnya sudah diambil alih pemerintah negeri kita. Inilah yang harus disadari, karena kalau yang diinginkan adalah pengaruh politik tentu akan kecewa, karena tidak dapat meraihnya.

Kunjungan tersebut penulis lakukan tanpa memberitahukan pihak Pemerintah Malaysia, terutama Kantor Perdana Menteri Mahathir Muhammad, karena kunjungan tersebut tentu akan diambil alih oleh pihak pemerintah federal, yang kalau di Malaysia disebut kerajaan. Pihak protokol akan membuat susah teman-teman Malaysia yang ingin menjumpai penulis, yang akan membuat penulis tidak merdeka karena memberitahukan kedatangan terlebih dahulu. Tentu, ini juga merupakan pertanda bahwa kunjungan itu sendiri tidak mempunyai arti politis apapun. Dengan demikian, penulis juga merasa tidak perlu

memberitahukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur atas kunjungan tersebut. Karena penulis tidak ingin diganggu siapapun dalam melakukan kunjungan tersebut.

Pada hari kedua, penulis melakukan perjalanan selama tujuh jam (pulang-pergi) untuk melakukan ziarah ke makam Hang Tuah, di Tanjung Keling, negara bagian Malaka. Di tempat itu, kepada penulis dibacakan serangkaian tulisan yang menyertai beberapa buah gambaran/lukisan tentang beliau. Katakanlah semacam diorama tentang kehidupan Hang Tuah, yang sejak masih muda sudah mengabdi kepada Raja/Sultan Malaka. Bahkan, oleh intrik istana ia diharuskan membunuh saudara seperguruan dan senasib sepenanggungan yaitu, Hang Jebat. Harga inilah yang harus dibayar oleh Hang Tuah untuk pengabdiannya kepada Sultan. Ia adalah *prototype* "Korpri sempurna", —seperti halnya Habib Abdurrahman Al-Basyaibani, yang dikuburkan di Segarapura, Kemantrenjero (sekarang terletak di Kecamatan Rejoso, Pasuruan). Ia adalah nenek moyang penulis yang menjadi *abdi dalem* Sultan Trenggono dari Demak.

*****

Penulis mengemukakan bahwa Susuhunan Pakubuwono XII masih memainkan peranan penting dalam rangkaian ikatan budaya/kultural yang merekatkan kedua bangsa serumpun, Indonesia dan Malaysia. Apapun perbedaan antara keduanya, namun persamaan yang ada haruslah dipupuk terus, agar menghasilkan ikatan yang semakin kuat di hadapan tantangan modernisasi kehidupan, yang sering mengambil bentuk *westernisasi* (pembaratan). Di kala perkembangan politik justru mengarahkan Indonesia dan Malaysia untuk saling bersaing, maka persaingan itu sendiri haruslah diimbangi oleh ikatan-ikatan budaya/kultural yang sangat kuat. Seperti halnya Kanada, yang secara politis lebih terikat kepada Kerajaan Inggris, yang terletak 9000 km di seberang lautan, namun secara kultural lebih dekat

kepada Amerika Serikat yang secara geografis adalah negara jiran/tetangga.

Ikatan seperti ini, yaitu berdasarkan persamaan budaya antara dua negara, masih mempunyai kekuatan sendiri, tidak dapat dibantah lagi. Bagaimanapun juga, negara jiran Australia justru merasa lebih dekat kepada Kerajaan Inggris atau Amerika Serikat, yang memiliki ikatannya sendiri satu dengan yang lain dari sisi budaya. Inilah "kodrat alami" yang intensitasnya tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun. Karena itu, kemauan pihak Keraton Solo sangatlah memiliki arti penting; ia menunjang kedekatan hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

Karena itulah, penulis tidak mengerti mengapa ada pejabat Indonesia yang mengatakan bahwa Keraton Solo tidak penting artinya bila dibandingkan dengan keraton lain di Jawa. Ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti duduk masalah peranan budaya sebuah keraton. Yang dimengerti orang itu hanyalah peranan politisnya belaka, yang belum tentu memiliki arti kelanggengan dalam hubungan antara kedua bangsa. Karena itu, setiap kali kita memperhatikan hubungan antara dua bangsa serumpun, seperti Indonesia dan Malaysia, tentulah menjadi sangat penting untuk mengetahui peranan politik atau peranan budaya yang dimaksudkan. Kerancuan dalam melihat hal ini hanya akan membuat kita kepada keadaan tidak menguntungkan: ditertawakan orang baik di Indonesia maupun di Malaysia.

*****

Dalam jamuan makan malam untuk menghormati ulang tahun ke-80 Susuhunan Pakubuwono XII di Kuala Lumpur itu, penulis juga mengemukakan sebuah arti lain dari peranan budaya itu. Pada saat ini, Malaysia dan Thailand sedang mengutamakan pengembangan wilayah sebelah utara dari kawasan ASEAN –yaitu, Myanmar, Vietnam, Laos dan Kamboja. Secara politis, ini berarti Malaysia dan Thailand mengambil peranan

politik lebih besar di wilayah utara kawasan ASEAN tersebut. Ini tentu dapat dimengerti, karena dua negara di wilayah selatan dari perhimpunan kawasan ASEAN itu, yaitu Singapura dan Indonesia sedang dilanda krisis masing-masing. Dalam hal ini, Malaysia dan Thailand melakukan sebuah hal yang alami dan wajar, yaitu mengisi sebuah kekosongan politik.

Lain halnya dengan wilayah selatan kawasan tersebut. ASEAN belum dapat menerima Papua Nugini, Timor Lorosae dan negeri-negeri pasifik sebelah barat (*western pacific states*). Maka dengan sendirinya, lebih sulit bagi Indonesia untuk mendukung mereka secara kongkret di bidang politik, sedangkan hubungan budaya dengan wilayah tersebut masih belum berkembang secara pesat. Keeratan hubungan budaya antara Indonesia dengan wilayah pasifik barat tersebut, akan sangat ditentukan oleh kerjasama ekonomi dan komersial. Peran Malaysia di wilayah sebelah utara di kawasan ASEAN itu berjalan sangat cepat, tidak seperti peran politik Indonesia di wilayah selatan di kawasan tersebut, yang terasa tidak bertambah sama sekali.

Sudah tentu, antara peran budaya Indonesia dan peran budaya Malaysia di wilayah masing-masing itu, harus disambungkan secara baik. Dalam hal ini, keraton Surakarta Hadiningrat mempunyai peluang sangat besar mengembangkan peranan kedua bangsa serumpun itu. Inilah yang harus senantiasa menjadi pegangan dalam meninjau posisi keraton dalam hubungan itu. Dan ini adalah peran alami, yang bagaimanapun juga tidak akan dapat diimbangi oleh hubungan yang direkayasa dan berlangsung tidak alami. Dalam hal ini, kita tidak memerlukan intervensi khusus. {}

Akan Jadi Apakah Para Raja?

Kata "Raja" di Maluku, terutama Ambon, berarti kepala kampung/desa. Ada yang perempuan, ada pula yang laki-laki; berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan sangat berpengaruh secara adat di lingkungan masyarakat mereka. Pergaulan mereka dengan rakyat yang dipimpin sangatlah erat, dan boleh dikata merekalah yang menjadi penentu (*decision maker*). Kalau para Raja dan berbagai dusun/desa setuju tentang sesuatu, biasanya itulah yang menjadi konsensus bersama yang diikuti rakyat. Salah satu cara yang ditempuh untuk mencari penyelesaian bagi kasus konflik antar agama dan antar etnis pada saat-saat seperti sekarang ini adalah dengan cara *Baku Bae*. Dalam konsep adat mereka berfungsi seperti ini, hingga pemerintah daerah/pusat sangat terbantu oleh para pemuka adat tersebut, seperti Raja dan sebagainya.

Konsep seperti ini mengharuskan pemerintah daerah dan pusat untuk bersikap rendah hati dalam memberikan tempat bagi pelaksanaan peran mereka, dan bahkan kalau perlu seolah-olah hanya mereka-lah yang berperan. Pemerintah pusat dan daerah hanya bersifat membantu, terutama dalam konseptualisasi cara-cara yang diperlukan untuk mengatasi konflik yang terjadi. Dalam hal ini peran para pemimpin agama dalam proses tersebut juga menjadi sangat penting. Baik para pemuka agama

maupun adat, merupakan pihak-pihak yang dipercayai oleh para warga masyarakat. Karenanya, kerjasama erat antara para pemimpin informal seperti mereka itu, dan para pemimpin formal (pejabat daerah dan pusat), sangat diperlukan dan merupakan sarat utama bagi penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Apalagi, kalau dalam konflik-konflik tersebut terjadi pengambilan peran oleh sebagian sangat kecil orang-orang yang mengaku menjadi pemimpin masyarakat, atas nama agama atau kelompok etnis yang ada. Inilah apa yang sebenarnya terjadi, baik di Ambon maupun di Poso (Sulawesi Tengah) dan mungkin juga daerah-daerah lain. Melakukan identifikasi para pelaku tidaklah mudah, dan karenanya sering diambil tindakan pintas dengan mencari persetujuan atas penyelesaian antara kelompok-kelompok yang ada, melalui perjanjian-perjanjian seperti Malino, yang meliputi berbagai pihak resmi maupun tidak resmi di kalangan bangsa kita, dengan disaksikan oleh pihak negara-negara lain. Diharapkan, dengan penandatanganan perjanjian Malino yang sudah berusia setahun itu, dapat dicapai sendi-sendi bagi perdamaian antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agama maupun etnis di berbagai kawasan Indonesia Timur itu.

*****

Ini adalah kesimpulan pertemuan penulis dengan Barroness Cox di Majelis Tinggi (*House of Lords*) London, Inggris, pertengahan November 2002. Pertemuan itu sendiri berjalan sangat sederhana di sebuah restoran dalam Gedung Parlemen Inggris, sambil santap malam. Namun, kesederhanaan itu tidak menutup kenyataan akan pentingnya arti pertemuan tersebut. Barroness Cox sedang mempersiapkan sebuah pertemuan antara para pemimpin agama bagi kedua daerah itu, sedangkan penulis dalam hal ini ditunjuk sebagai Presiden Kehormatan

(*Honorary President*) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional yang didirikan oleh tokoh itu yang bekerja khusus untuk mencari penyelesaian bagi konflik berdasarkan agama maupun etnisitas di kawasan-kawasaan Indonesia. Dalam pemikiran penulis, bahwa bukan hanya para pemuka agama saja yang mempunyai peranan sangat menentukan dalam mencari penyelesaian bagi konflik-konflik tersebut, namun juga para pemuka adat, ternyata dapat diterima.

Dengan dasar yang disetujui itu, dalam waktu tidak terlalu lama lagi, pertemuan antar pemuka agama dan adat itu akan diselenggarakan, dan ini akan merupakan sumbangan besar bagi penyelesaian krisis yang terjadi di kedua kawasan tersebut. Tentu saja, dalam pertemuan tersebut para pejabat pemerintah pusat dan daerah yang bersangkutan dengan masalah itu akan diundang sebagai peserta atau pemberi makalah. Ini adalah hal yang normal-normal saja, karena kerja mencari penyelesaian bagi konflik berdasarkan agama dan etnisitas tersebut memang merupakan kerja kolektif yang harus diselesaikan dengan baik.

Karenanya, prinsip-prinsip penyelesaian berbagai konflik di kedua kawasan itu merupakan kerja awal yang harus ditangani dengan tuntas. Penulis sendiri meminta kepada Barroness Cox supaya penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan secara alami (*natural*).

Putri sulung penulis, Alissa Munawarah, yang tinggal di Yogyakarta terlibat sangat mendalam pada proses penciptaan gagasan *Baku Bae* itu. Beberapa orang pemimpin adat telah menemui penulis, dalam kedudukan sebagai presiden. Ternyata perkembangan keadaan selama lebih setahun ini sangat menggembirakan, walaupun di sana-sini masih ada upaya berbagai kelompok sangat kecil yang berusaha "memanaskan" situasi dan mencegah terjadinya proses penyelesaian yang diharapkan tersebut.

*****

Dengan sendirinya, gagasan penulis tentang peranan para pemuka adat itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai kedudukan mereka dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa depan. Karena agama Islam juga mengembangkan nilai-nilai (*values*) yang penting bagi pembangunan dan perubahan sosial, dengan sendirinya lalu timbul pertanyaan; nilai Islam apakah yang paling tepat dikembangkan dalam hal ini? Juga ada sebuah pertanyaan lain: dalam perkembangan sosial seperti itu, adakah tempat bagi pelaksanaan nilai-nilai Islam tersebut? Dari kedua pertanyaan pokok tersebut di atas, tentu juga muncul banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak akan dijawab di sini. Panjangnya ruangan untuk tulisan ini membatasi hal tersebut.

Sebuah nilai Islam (*Islamic value*) tepat untuk dipakai bagi peranan para pemuka adat tersebut, yaitu; "tiada agama tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa adanya sang pemimpin" (*lâ dîna illâ bi jamâ'atin wa lâ jamâ'ata illâ bi imâmatin, wa lâ imâmata illâ bi imâmin*). Ini berarti, pemuka adat dapat menjadi pemimpin, karena sebuah ungkapan lain juga mengatakan: "hukum adat dapat saja digunakan sebagai pedoman agama" (*al 'âdatu muhakkamah*), yang menunjukkan pertalian antara hukum adat dan Islam, hingga benar adanya anggapan bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan dengan adat.

Tetapi kedua ungkapan di atas, harus diletakkan dalam sebuah kerangka yang jelas, yang dalam pengertian Islam harus diberikan prioritas kepada kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum itu adalah tindakan-tindakan yang dalam literatur agama Islam diberi nama *maslahah 'âmmah*, yang dalam pandangan Islam harus tercermin dalam kebijakan yang harus diambil maupun tindakan yang dilaksanakan bagi kepentingan masyarakat/orang banyak oleh para pemimpin. Hal ini dengan

jelas tergambar dalam adagium "kebijakan- kebijakan/ tindakan-tindakan seorang pemimpin harus terkait sepenuhnya dengan kepentingan mereka" (*tasharruf al-lmâm 'alâ al ra'îyyah manûthun bi al-mashlahah*). Jadi jelas, prinsip kegunaan (asas manfaat) dan bukan sekedar berkuasa, menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Para pemuka agama dan para pemimpin adat harus benar-benar menjadi pemimpin masyarakat dalam arti selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya kelangsungan lembaga-lembaga yang mereka pimpin. Jelas bagi kita, bahwa para pemuka adat dan pemuka agama itu di masa depan harus mengambil peran lebih banyak sebagai pemimpin masyarakat. {}

ISLAM DAN MARSHALL MCLUHAN DI SURABAYA

Penulis diundang oleh harian *Memorandum* untuk memberikan ceramah Maulid Nabi Muhammad Saw, beberapa waktu yang lalu, yang dihadiri ribuan massa, diantaranya para *habaib* yang datang dari berbagai penjuru Jawa Timur. Penulis sendiri disertai Prof. Dr. Mona Abaza dari Mesir, Maria Pakpahan dan dr. Sugiat (DPP PKB Jakarta). Sementara H. Moh. Aqiel Ali, selaku pemimpin umum harian ini, menyatakan peredaran *oplaag* harian tersebut kini sudah mencapai 120 ribu *exemplar* per hari, yang menjadikannya koran besar dengan pembaca yang rata di Jawa Timur.

Maksud penulis mengajak Prof. Dr. Mona Abaza dan Maria Pakpahan tercapai yaitu melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan. Hal itu adalah digelarnya pembacaan shalawat Nabi dari Habib Al-Haddad dan sajak burdah dari Imam Al-Busyairi. Ketika memberikan ceramah, penulis mempertanyakan adakah para peraga kedua jenis peragaan agama itu berlatih atas kehendak sendiri sepanjang tahun, ataukah ada yang membiayai? Terdengar jawaban gemuruh; tidak! Ini artinya mereka tidak pernah mengkaitkan latihan sepanjang tahun dengan pembiayaan acara. Dengan kata lain, mereka berlatih atas inisiatif sendiri dan dibiayai oleh keinginan keras mengabdi pada agama.

Inisiatif sendiri tanpa ada yang menyuruh inilah yang oleh Marshall McLuhan, seorang pakar komunikasi, sebagai "*happening*" (kejadian). Dicontohkan penulis dalam ceramah itu –seperti yang terjadi di Masjid Raya Pasuruan, setiap tahun dua kali. Para pemain rebana datang dari seluruh penjuru Jawa Timur, setiap kelompok bermain sekitar 5-10 menit. Mereka datang sendiri dengan menyewa truk, memakai pakaian dan tanda pengenal serta makanan sendiri. Begitu juga kendaraan yang mereka pakai, umumnya truk, disewa sendiri oleh tiap kelompok.

*****

Apa yang disebutkan sebagai *happening* oleh McLuhan itu, juga terjadi pada acara haul/peringatan upacara kematian Sunan Bonang di Tuban. Acara itu tidak memerlukan undangan dari panitia, kecuali hanya berupa pemberitahuan yang sangat terbatas, tidak lebih dari 300 orang saja, untuk mereka yang disediakan tempat duduk. Sedangkan untuk puluhan ribu pengunjung lainnya, mereka membawa sendiri tikar/koran bekas sebagai alas duduk serta botol air untuk mereka minum sendiri, tanpa mendapat undangan untuk hadir. Selama 43 tahun, muballigh kondang alm. KH. Yasin Yusuf dari Blitar, berpidato dalam acara haul tersebut, tanpa mendapatkan undangan dari panitia. Yang penting, ia dan rakyat pengunjung tahu hari dan tanggal acara haul tersebut, dan mereka datang atas dasar kesadaran mereka sendiri.

Ternyata, dalam hal-hal yang terjadi tanpa disiapkan matang-matang terlebih dahulu, pengamatan Marshall McLuhan itu terjadi. *Happening* itu terdapat di seluruh dunia dalam bentuk dan ragam yang beraneka warna. Apakah implikasi dari hal tersebut? Mudah saja pertanyaan itu untuk dapat dijawab: selama hal-hal itu dapat dianggap membawa berkah Tuhan, dan hal itu dibuktikan oleh hal-hal di atas, maka selama itu pula kesukarelaan akan menjadi pendorongnya. Ini terjadi, dalam banyak

bidang kehidupan yang memperagakan kekayaan kultural suatu kelompok, tanpa ada yang dapat melarangnya.

Dengan kata lain, kesukarelaan atas dasar keagamaan itu, adalah sesuatu yang menghidupi masyarakat kita. Apa yang tidak diuraikan penulis dalam acara peringatan maulid Nabi Saw itu, karena keterbatasan waktu, adalah keharusan bagi kita untuk menerapkan secara lebih luas prinsip kesukarelaan di atas. Terutama dalam kehidupan politik kita, perlu dipikirkan adanya sebuah sistem politik yang sesuai dengan ajaran agama tentang keikhlasan, kejujuran/ketulusan dan keterbukaan. Menjadi nyata bagi kita, bahwa pembentukan sebuah sistem politik yang memiliki kandungan sangat beragam, benar-benar diperlukan saat ini.

Jelaslah bahwa, aspek kesuka-relaan dan keterbukaan sistem politik itu sangat diperlukan dalam sikap dan landasan kehidupan kita sebagai bangsa. Sementara itu, *happening* sebagaimana yang diajarkan McLuhan itu ternyata memiliki arti yang mendalam bagi peneropongan akan fungsi ajaran agama tersebut. Pengingkaran terhadap kesukarelaan di bidang politik, hanya akan menghasilkan sistem politik yang memungkinkan seseorang berbohong kepada rakyat. {}

Diperlukan Spiritualitas Baru

Pada minggu terakhir bulan September 2002, penulis diminta hadir pada sebuah pertemuan untuk membentuk sebuah Dewan Agama, yang akan menjadi organisasi penasehat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Penulis yang seharusnya tidak berangkat, karena situasi di tanah air yang sangat sensitif, menganggap pertemuan tersebut sangat penting, hingga penulis datang ke New York untuk hadir, walaupun tidak untuk seluruh pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, penulis mendapat peluang waktu untuk berbicara selama tujuh menit saja, di hadapan begitu banyak negarawan, orang pandai dan para pemimpin berbagai negara serta bermacam-macam corak organisasi.

Waktu tujuh menit yang disediakan untuk penulis pun tidak seluruhnya dipakai, karena penulis hanya berbicara lima menit saja. Namun, pembicaraan selama lima menit itu ternyata mengubah jalannya pertemuan dan hampir oleh seluruh peserta dijadikan rujukan dalam pembicaraan dua hari berikutnya. Dalam pertemuan tersebut, sebenarnya yang dikemukakan penulis sangatlah sederhana saja, yakni: spiritualitas harus kembali berbicara dalam arena politik. Hal ini sebelumnya pernah dikemukakan penulis sewaktu menerima gelar Doctor Honoris Causa di bidang Humaniora dari Universitas Soka Gakkai di Tokyo, pada bulan April 2002.

Apa yang penulis kemukakan baik di Tokyo maupun di New York, adalah sebuah kenyataan bahwa berbagai organisasi keagamaan yang besar di dunia ternyata menyokong partai-partai politik tertentu. Soka Gakkai selaku organisasi Buddha terbesar di dunia sejak tiga dasawarsa terakhir ini telah mendukung partai Komeito (partai bersih), yang sekarang menjadi mitra junior bagi Partai Demokratik Liberal yang memerintah Jepang saat ini. Di samping itu, RSS (*Rastriya Swayamsevak Sangha*), sebuah organisasi keagamaan Hindu terbesar yang didirikan pada tahun 1925, mendukung *Bharatya Janatha Party* (BJP), di bawah pimpinan Atal Behari Vajpayee yang memerintah India sekarang ini, merupakan bukti tak terbantahkan tentang hal di atas. Demikian juga, *jam'iyyah al-taqrib baina al-madzâhib* (di bawah pimpinan orang-orang seperti Ayatullah Wa'iz Zadeh) mendukung Presiden Iran Mohammad Khatami, dan sejumlah organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia yang mendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

*****

Apakah artinya semua ini? Karena agama memiliki sudut pandang tertentu, yang berdasarkan pada etika dan moralitas sesuatu bangsa, yang sudah hampir hilang dari kehidupan politik berbagai bangsa. Karena itu timbul reaksi yang muncul dalam berbagai bentuk. Di kalangan gerakan-gerakan Kristiani, baik dari kaum Katolik maupun Protestan, timbul apa yang dinamakan sebagai "tanda-tanda zaman" ataupun pembebasan manusia dari keterkungkungan pandangan sekuler yang tidak mengacu pada etika dan moralitas. Maka, lahirlah sejumlah "alternatif-alternatif", seperti Teologi Pembebasan (*liberation theology*) yang dibawakan oleh Leonardo Bof dan kawan-kawan di Amerika Latin dalam paruh kedua abad lalu. Ini membawa gaungnya sendiri yang dipenuhi dengan perdebatan sengit di hampir semua pemikir keagamaan dari berbagai keyakinan yang ada saat ini.

Dari "alternatif-alternatif" seperti inilah lahir kesadaran bahwa harus dilakukan berbagai tindakan untuk menghidupkan kembali berbagai peranan agama pada bidang-bidang yang strategis untuk kehidupan bersama seluruh umat manusia.

Namun, perkembangan yang demikian hiruk-pikuk di berbagai bidang, ternyata tidaklah bergema di bidang politik. Para politisi tetap saja sibuk dengan kepentingan-kepentingan mereka, dan hampir-hampir tidak mau melihat etika, moral, dan kehidupan umat manusia, kecuali secara manipulatif. lnilah yang merupakan hidangan sehari-hari yang kita sajikan saat ini, mulai dari berbagai skandal seksual, finansial maupun kultural yang melibatkan para pemimpin dari berbagai negara. Kenyataan paling jelas dari hal ini dapat dilihat pada bagaimana usaha banyak politisi untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

*****

Dekadensi moral itu, dalam artiannya yang luas, dapat dilihat pada lembaga PBB saat ini. Bahwa ada Dewan Keamanan (DK) dengan wewenang lima buah negara anggota untuk menjatuhkan veto, menunjukkan dengan jelas bahwa wawasan moral dan etika telah hilang dari badan politik tertinggi dunia saat ini. Dan, jika diperlukan, maka sebuah negara adi kuasa yang juga menjadi anggota tetap DK-PBB, yaitu Amerika Serikat (AS) dapat memaksakan kehendak untuk menyerbu Irak dan Afghanistan di luar kerangka PBB sendiri. Ketidakseimbangan ini jelas merupakan hal yang memerlukan koreksi, untuk menyehatkan proses di dalamnya. Diantaranya, melalui penyadaran semua pihak akan pentingnya arti spiritualitas yang baru dalam perpolitikan tingkat dunia.

Dalam hal ini, penulis menerima penuh ketentuan dari adagium geopolitik "tak ada hegemoni dalam hubungan internasional" seperti yang diajarkan oleh para pemimpin Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bawah kekuasaan Mao Zedong atas

atas Partai Komunis Tiongkok. Kebijakan tanpa hegemoni itu, merupakan sebuah ukuran penting dari pemikiran politis, yang dapat diaplikasikan dalam membentuk sebuah spiritualitas baru dalam hubungan internasional. Namun, pemikiran yang demikian menarik ini sering juga dilanggar oleh para penganutnya sendiri. Itu semua, terjadi karena dia ditetapkan tanpa ada spiritualitas tersendiri di dalamnya. Adagium geopolitik tersebut, apabila dilepaskan dari spiritualitas hubungan internasional, akan membuatnya menjadi alat belaka bagi sikap hidup materialistik yang dikembangkan di luar ketentuan etis dan moral.

Dalam kaitan inilah harus dilihat dan selalu dipertimbangkan sebuah tindakan yang akan diambil oleh sebuah negara, akankah memenuhi kriteria keadilan dan kemakmuran bersama? Memang, pertanyaan ini kedengarannya sangat naif, namun bukankah kita sekarang sudah melihat akibat-akibat terjauh dari politik kepentingan *(interest politics)* dalam hubungan internasional? Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra menyebarkan gagasan, agar ada transaksi barter (*counter trade*), dalam hubungan antar negara-negara berkembang guna menghemat devisa antara mereka. Bukankah ini berarti sebagai sikap protes atas ketergantungan negara-negara berkembang kepada sebuah negara saja, yaitu AS, dalam masalah devisa? Bukankah ketergantungan ini sekarang juga terdapat dalam penggunaan mata uang *Euro* dan *Yen*? Belum lagi diingat kekuatan *Renminbi* dari RRC, yang diperkirakan akan turut menguasai pasaran uang dunia sepuluh tahun lagi? Bukankah dengan demikian menjadi nyata bagi kita, keperluan akan sebuah spiritualitas baru, bukan? {}

DOKTRIN DAN TEMBANG

Dalam budaya Jawa, dikenal tembang anak-anak "Lir-ilir". Demikian terkenalnya tembang anak-anak itu, sehingga ia sering terdengar dibawakan *bocah angon* di atas punggung kerbau pada sebuah sawah yang sedang kering kerontang di musim kemarau. Apa yang istimewa dari tembang tersebut, hingga perlu di ketengahkan melalui tulisan ini? Apakah penulis kehabisan bahan untuk dibahas, hingga barang sekecil itu di ketengahkan kembali dalam forum mulia ini? Bukankah itu sebuah tanda, bahwa penulis hanya mengada-ada, dan membahas sesuatu yang tidak ada artinya?

Sebenarnya, tidak demikian benar halnya. Justru dengan mengungkapkan adanya hubungan antara aqidah Islam dan tembang anak-anak di atas, penulis ingin mengemukakan sebuah pendekatan strategis yang ditempuh para pejuang muslim di kawasan budaya tersebut di masa lampau. Penulis ingin mempertanyakan pendekatan strategis itu, benarkah memiliki validitas di masa lampau, di waktu sekarang dan di masa depan? Kalau penulis dapat mengajak para pembaca tulisan ini untuk turut memikirkannya, tercapailah sudah tujuan penulis membahas masalah ini. Sebuah kerja sederhana, yang menyangkut masa depan umat Islam di negeri ini. Adakah sesuatu yang lebih mulia dari maksud di atas?

Terus terang saja, artikel ini diilhami oleh beberapa tindak kekerasan atas nama Islam yang terjadi di berbagai kawasan negara kita dalam masa setahun dua terakhir ini. Seolah-olah strategi yang ditempuh melalui pendekatan sistematik itu, harus dilaksanakan dengan menggunakan kekerasan. Mungkin, karena pemahaman bergaris keras dan bersifat militan dalam membela agama Islam, di hadapan berbagai macam tantangan dewasa ini yang mengakibatkan jawaban militan dan "bernada keras" tersebut, bersamaan waktunya dengan berbagai macam *sweeping* dan sejenisnya, maka perlawanan militan disamakan dengan penggunaan kekerasan.

*****

Tembang anak-anak berjudul *"ilir-ilir"* di atas, sebenarnya sudah berusia ratusan tahun, ia menjadi bagian *inheren* dari sebuah pendekatan strategis yang dibawakan Sunan Ampel di akhir masa kejayaan Majapahit. Dalam tembang itu tergambar jelas pendekatan beliau dan rekan-rekan terhadap kekuasaan, sebuah model perjuangan yang menurut penulis, baik untuk dijadikan kaca pembanding saat ini. Ketika itu, para Wali Sembilan (*Wali Songo*) di Pulau Jawa sedang mengembangkan dengan sangat baik sistem kekuasaan yang ada. Gerakan Islam di waktu itu dengan sengaja mengusahakan hak bagi para penganut agama tersebut untuk bisa hidup di hadapan raja-raja yang sedang berkuasa di Pulau Jawa. Cara mengusahakan agar hak hidup itu diperoleh, adalah dengan rnengajarkan bahwa kaum muslimin dapat saja mempunyai raja/penguasa non-muslim, seperti Sunan Ampel mengakui keabsahan Brawijaya yang beragama Hindu-Buddha (*Bhairawa*) tersebut. Inilah yang akhirnya membuat Brawijaya V beragama Islam pada masa akhir hayatnya dengan gelar Sunan Lawu. Nah, strateginya untuk memperkenalkan agama Islam kepada sistem kekuasaan yang ada, sangat jelas memberikan arti pendekatan budaya daripada pendekatan ideologis

yang sangat berbau politik. Dalam kerangka "membudayakan" sebuah doktrin kalangan *ahlus sunnah* tradisional itulah, sebuah doktrin sentral dikemukakan melalui sebuah tembang anak-anak.

Doktrin yang dimaksud adalah pandangan kaum Sunni tradisional itu ialah yaitu adanya kewajiban tunduk kepada pemerintah oleh semua kaum muslimin tanpa pandang bulu. Di kalangan mereka ada ungkapan "para penguasa lalim untuk masa 60 tahun, masih lebih baik dari pada anarki sesaat" (*imâmun fâjirun siththîna âmman khairun min faudhâ sâ 'atin*). Ketundukan kepada penguasa ini sebenarnya adalah doktrin kaum Sunni tradisional, yang sudah tentu sangat berlawanan dengan berbagai ajaran dan orang-orang seperti Imam Ayatullah Khomenei dan Ali Syariati. Ketundukan itu, sama sekali tidak memperhitungkan penggunaan kekuasaan secara salah. Tentu saja strategi kaum Sunni tradisional ini sangat berbeda dengan kecenderungan perjuangan politik dan ideologis banyak kalangan, yang lebih mementingkan pendekatan politik.

*****

Doktrin di atas oleh Sunan Ampel dimasukkan dalam tembang "Lir-ilir", dalam ungkapan yang sesuai dengan budaya penguasa Jawa di Majapahit. *Blimbing* untuk mencuci pakaian yang sobek pinggirnya, perlambang rakyat yang tidak mempunyai kekuasaan apapun. Baju sobek itu dipakai untuk menghadap raja (*seba*), karena lingkaran menghadap raja masih lebar, dan sinar rembulan menyinari lingkaran *(pumpung jembar kalangane, pumpung padang rembulane)*. Tampak di situ bagaimana Sunan Ampel menggunakan simbol-simbol budaya Jawa dalam hubungan masyarakat dengan penguasa, yang sama sekali tidak ideologis.

Dalam kasus ini terlihat, kedua pendekatan budaya dan ideologis saling bertentangan. Dalam pendekatan yang menggunakan strategi budaya tadi, kaum muslimin tidak diseyogyakan menggunakan ideologi untuk merubah kultur masyarakat atas

nama agama. Biarlah struktur itu, berubah dengan sendirinya melalui pranata-pranata lain, sejarah jualah yang akan menunjukkan kepada kita perubahan-perubahan yang akan terjadi. Karenanya, strategi semacam ini selalu berjangka sangat panjang, dan meliputi masa yang sangat panjang pula, yaitu berubah dari generasi ke generasi.

Berbeda dengan strategi budaya itu, strategi ideologis senantiasa menekankan diri pada pentingnya merubah struktur masyarakat, dan mengganti sistem kekuasaan yang ada, guna menjamin berlangsungnya perubahan politik dalam sistem kekuasaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, sering dilupakan pilihan-pilihan rakyat akan sistem kekuasaan yang mereka ingini. Yang penting, sang pemimpin dan teman-teman se-ideologi nya memegang tampuk kepemimpinan dan merubah struktur masyarakat yang dimaksudkan. Di sini berlakulah apa yang dikatakan Vladimir Illyich Lenin dalam pamfletnya "penyakit kiri kekanak-kanakan kaum revolusioner"(*The Infantile Disease of 'Leftism' in Communism*), yaitu perjuangan yang selalu menekankan keharusan sukses akan dicapai semasa sang aku masih hidup. Ini terjadi, kaum komunis di bawah Lenin- Mao Zedong, di kalangan kaum nasionalis di bawah Soekarno, dan gerakan Islam di bawah pimpinan Imam Khomenei dan kawan-kawan yang sekarang menguasai Dewan Ulama *(Khubrigan),* yang oleh pers Barat disebut sebagai ulama konservatif. Herankah kita jika orang-orang seperti Presiden Iran, Mohammad Khatami, lalu berha-dapan dengan mereka, karena strategi budaya yang dianutnya? {}



BAB VI

ISLAM TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME


Democracy
www.abad-de
Perpusta

Terorisme Harus Dilawan

Tiga buah bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan di Denpasar, Bali. Lebih dari 180 orang menjadi korban, termasuk sangat banyak orang yang mati seketika. Jelas ini adalah bagian mengerikan dari tindakan teror yang selama belasan bulan ini menggetarkan perasaan kita sebagai warga masyarakat. Penulis berkali-kali meminta agar pihak keamanan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghindarkan terjadinya hal itu. Termasuk mengambil langkah-langkah preventif, antara lain menahan orang-orang yang keluyuran di negeri kita membawa senjata tajam, membuat bom-bom rakitan, memproduksi senjata-senjata yang banyak ragamnya.

Namun pihak keamanan merasa tidak punya bukti-bukti legal yang cukup untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Mungkin di sinilah terletak pokok permasalahan yang kita hadapi. Kita masih menganut kebijakan-kebijakan punitif dan kurang memberikan perhatian pada tindakan-tindakan preventif, kalau belum ada bukti legal yang cukup tidak dilakukan penangkapan. Ini jelas kekeliruan yang menyebabkan hilangnya rasa hormat pada aparat negara. Hal lainnya adalah, dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak pelanggaran hukum dilakukan oleh aparat keamanan, sehingga mereka pun tidak dapat melakukan tindakan efektif untuk mencegah tindakan teror yang

dilakukan orang. Itupun tidak bisa dibenahi oleh sistem politik kita yang sekarang, karena banyak sekali pelanggaran politik dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah.

Sikap menutup mata oleh aparat keamanan kita terhadap hal-hal yang tidak benar, juga terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila akan diambil tindakan hukum terhadap aparat, banyak pihak lalu melakukan sesuatu untuk "menetralisir" tindakan itu. Kasus bentroknya Batalyon Linud (Lintas Udara) Angkatan Darat dengan aparat kepolisian di Binjai, Sumatra Utara, dapat dijadikan contoh. Mereka melakukan tindakan "netralisasi" terhadap langkah-langkah hukum, karena para anggota batalyon itu menyaksikan sendiri bagaimana para perwira AD dan Polri melakukan dukungan (*backing*) bagi kelompok-kelompok pelaksana perjudian dan pengedar narkoba, tanpa ada tindakan hukum apapun terhadap orang-orang itu.

Masalah yang timbul kemudian, adalah bagaimana mereka dapat mencegah kelompok-kelompok lain untuk mempersiapkan tindakan teror terhadap masyarakat, termasuk warga asing. Sikap tutup mata itu sudah menjadi demikian luas sehingga tidak ada pihak keamanan yang berani bertindak terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Kalaupun ada aparat keamanan yang bersih, dapat dimengerti keengganan mereka melakukan tindakan preventif, karena akan berarti kemungkinan berhadapan dengan atasan atau teman sejawatnya sendiri. Dalam hal ini berlakulah pepatah "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari". Inilah apa yang terjadi di pulau Bali itu, jadi tidak usah heran jika hal itu terjadi, bahkan yang harus diherankan, mengapakah hal ini baru terjadi sekarang.

Salah satu tanda dari "*paralyse*" (kelumpuhan) tadi, adalah hubungan sangat baik antara aparat keamanan dengan pihak-pihak teroris dan preman sendiri. Seolah-olah mereka mendapatkan kedudukan terhormat dalam masyarakat, karena kemanapun ke-premanan mereka ditutupi. Bahkan ada *benggolan* preman yang berpidato di depan agamawan, seolah-olah dia

lepas dari hukum-hukum sebab-akibat. Herankah kita jika orang tidak merasa ada gunanya melakukan tindakan preventif? Padahal hakikat tindakan itu adalah mencegah dilakukannya langkah-langkah melanggar hukum, dengan terciptanya rasa malu pada diri calon-calon pelanggar kedaulatan hukum.

Kalau orang merasa terjerumus menjadi preman atau teroris, herankah kita jika ada pihak keamanan yang justru takut dan bukannya melawan mereka? Apalagi kalau Wakil Presidennya menerima para teroris di kantor dan memperlakukan seolah-olah pahlawan? Bukankah ini berarti pelecehan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat kita, kesalahan sikap ini ditutup-tutupi pula oleh anggapan bahwa Amerika Serikat-lah yang bersekongkol dengan TNI untuk menimbulkan hal-hal di atas guna melaksanakan "rencana jahat" dari CIA (Central Inteligence Agency)? Teori ini harus diselidiki secara mendalam, namun masing-masing pihak tidak perlu saling menunggu. Inilah prinsip yang harus dilakukan.

Memang setelah bertahun-tahun, hal semacam ini baru dapat diketahui sebagai kebijakan baru di bidang keamanan, guna memungkinkan tercapainya ketenangan yang benar-benar tangguh. Sudah tentu, sebuah kebijakan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada, dalam hal ini keperluan akan tindakan-tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian seperti di Bali itu. Karenanya tindakan preventif harus diutamakan, guna menghindarkan vakum kekuasaan keamanan terlalu lama. Kebutuhan itu megharuskan kita segera mencapai kesepakatan, mengatasi kekosongan kekuasaan keamanan yang terlalu lama dapat berakibat semakin beraninya pihak-pihak yang melakukan *destabilisasi* di negeri kita.

Untuk itu diperlukan beberapa tindakan yang dilakukan secara simultan (bersama-sama). Pertama, harus dilakukan upaya nyata untuk menghentikan KKN oleh birokrasi negara. Dengan adanya KKN, birokrasi pemerintah tidak akan dapat menjalankan

tugas secara adil, jujur dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Kedua, persamaan perlakuan bagi semua warga negara di muka undang-undang tidak akan dapat terlaksana jika KKN masih ada. Dengan demikian, menciptakan kebersihan di lingkungan sipil dan militer merupakan persyaratan utama bagi penegakan demokrasi di negeri kita.

Syarat ketiga yang tidak kalah penting adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada. Kita tidak dapat membuat istana di awang-awang, melainkan atas kenyataan yang ada di bumi Indoesia. Karena itulah, dalam sebuah surat kepada mantan Presiden HM. Soeharto, penulis mengatakan bahwa kita harus siap untuk memaafkan dalam masalah perdata para konglomerat yang tidak mengembalikan pinjaman mereka pada bank-bank pemerintah, asalkan uang hasil pinjaman itu dikonversikan menjadi kredit murah bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Soal-soal pidana menjadi tanggung jawab aparat hukum yang ada, dan tidak pantas dicampuri baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Resep ini memang terasa terlalu *sumir* dan *elitis,* tetapi memberikan harapan cukup untuk tetap menciptakan keamanan dan dalam menopang kebangkitan kembali ekonomi nasional kita. {}

Terorisme Di Negeri Kita

Terorisme memang merajalela di negeri kita, tanpa ada tindakan yang jelas dari pemerintah dalam waktu setahun terakhir ini. Seharusnya, ada tindakan yang jelas dari pemerintah untuk memberantas dan mengikis habis terorisme ini. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Para teroris semakin lama semakin merajalela, dan mendorong masyarakat untuk menganggapnya sebagai buatan luar negeri yang tidak dapat diatasi. Akhirnya, terorisme ini mengalami eskalasi luar biasa, dan terjadilan peledakan 3 buah bom berkekuatan sangat tinggi di Bali. Korban yang berjatuhan sangat besar, berjumlah di atas 200 jiwa, ini menurut laporan media massa sendiri.

Pemerintah sendiri tidak siap menghadapinya, terbukti dari usulan-usulan yang saling bertentangan antar pejabat pemerintahan di tingkat pusat. Ada usul agar supaya kegiatan-kegiatan intelejen dikoordinir oleh sebuah badan baru, sedangkan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menganggap hal itu tidak perlu. Menhan Matori Abdul Djalil menganggap ada gerakan Islam internasional di belakang peristiwa pengeboman itu, sedangkan Kapolri sendiri menyatakan belum ada bukti-bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kalau di lingkungan pemerintahan saja terjadi perbedaan pendapat seperti itu, berarti itu menunjukkan ketidaksiapan menghadapi

kejadian ini, dan dapat digambarkan betapa banyak pendapat saling bertentangan dalam masyarakat.

Secara internasional, ketidaksiapan pemerintah atas kejadian itu dilontarkan oleh berbagai pihak atau negara. Ini juga berakibat parah terhadap ekonomi kita yang sedang dilanda krisis. Bagaikan orang yang jatuh ditimpa tangga pula, bukan hanya menurunnya jumlah wisatawan asing yang ke Bali melainkan juga jumlah ekspor-impor kita ke negara lain terkena pukulan hebat. Jumlah penggangur semakin membengkak dan tak terbatas hanya pada daerah Bali saja. Gubernur Jatim menyatakan kepada penulis, ekspor daerah itu melalui Bali yang telah lalu mencapai jumlah 1 milyar rupiah. Jelas Jatim mengalami pukulan hebat akibat peristiwa pemboman itu. Penulis menambahkan, para wisatawan asing itu banyak juga yang kemudian berselancar di selatan Banyuwangi dan menyaksikan matahari terbit di puncak Gunung Bromo. Kalau mereka tidak datang ke Bali, maka mereka tidak akan datang ke Jatim.

*****

Secara matematis ekspor-impor kita mengalami pukulan hebat akibat peristiwa di balik ini. Demikian juga, usaha di bidang pariwisata kita mengalami pukulan berat. Tapi hitungan matematis ini tidak berlaku bagi kehidupan perikemanusiaan, akibat hilangnya nyawa orang sedemikian banyak itu. Inilah yang harus diingat dalam memperhatikan akibat-akibat dari peristiwa tersebut. Hilangnya kepercayaan negara-negara lain akan kemampuan kita sebagai bangsa untuk memelihara keamanan siapa pun, juga mengalami pukulan berat. Kita juga tidak tahu, harus bersedih hati kah? Atau justru menjadi marah oleh kejadian tersebut. Hanya pernyataan, bahwa apa yang telah terjadi itu adalah sebuah *force majeur* –hal yang tidak dapat kita tanggulangi secara tuntas-, membuat kita sedikit tenang.

Yang tidak kita mengerti, mengapa pihak keamanan sama

sekali tidak tanggap terhadap kekerasan, bersiap siaga terhadap kemungkinan yang ditimbulkannya. Kesimpulannya, pihak keamanan memang kekurangan tenaga, atau mereka cerminan dari sistem politik kita yang kacau balau. Itu semua terjadi karena adanya perintah tak tertulis "dari atas" yang saling bertentangan. Di satu pihak, ada yang menyatakan diam-diam bahwa kaum teroris merajalela di negeri kita, karena itu kita harus siaga sepenuhnya. Di pihak lain, ada "bisikan" agar kelompok-kelompok teroris di negara kita jangan ditindak kalau belum terbukti melanggar hukum. Ini berarti, tidak ada tindakan antisipatif apapun terhadap kemungkinan tindakan yang ditimbulkan oleh para teroris yang ada. Makna dari hal ini adalah, pihak keamanan menerima perintah saling bertentangan, dan wajar saja kalau mereka lalu dibuat bingung oleh kebijakan itu yang berakibat pada ketidakpastian dalam penyelenggaraan keamanan. Justru inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh para teroris, yang masih harus dibuktikan secara hukum melalui kerjasama dengan unsur-unsur aparat keamanan luar negeri.

Tidak heranlah jika negara-negara lain lalu menganggap kita tidak memiliki kesanggupan menjaga keamanan dan meneliti pelanggaran-pelanggaran atasnya. Tawaran yang oleh Kapolri dinyatakan datang dari berbagai negara, pada hakikatnya adalah kritikan terhadap kemampuan kita di bidang keamanan dalam negeri. Jadi tidak tepatlah kebanggaan sementara kalangan akan datangnya tawaran membantu itu. Ini adalah akibat belaka dari kelalaian kita di masa-masa lampau, termasuk ketika penulis menjadi Kepala Pemerintahan.

Yang sebenarnya mengejutkan kita adalah sikap Wapres Hamzah Haz. Pertama, ia tidak pernah mengutuk tindakan teroris tersebut. Kedua, ia justru mengunjungi para tahanan seperti Ja'far Umar Thalib, mengunjungi tempat-tempat yang selama ini diduga dipakai sebagai pangkalan teroris di negara kita. Paling tidak, ia seharusnya menahan diri dan tidak melakukan kunjungan tersebut, sampai dibuktikan oleh pengadilan bahwa mereka

tidak bersalah. Tundalah melakukan kunjungan demi kunjungan itu sampai masalahnya menjadi terang. Kesimpulan kita, ia perlu mendekati kelompok garis keras gerakan Islam, untuk kepentingan politik, mencari dukungan bagi partainya dalam pemilu mendatang. Berarti ia melakukan kunjungan demi kunjungan itu untuk kepentingan politik pribadinya.

Ini dapat dimengerti sebagai kebutuhan politik yang wajar. Tapi tindakannya menerima orang-orang yang diduga melanggar hukum atau undang-undang di Istana (kantor) Wapres, adalah tindakan politik gegabah. Ia tidak bisa membedakan kedudukan sebagai ketua umum sebuah parpol dari jabatan Wapres. Hal ini langsung atau tidak langsung memberikan dorongan bagi kaum teroris untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar undang-undang. Melihat langkah-langkah yang diambilnya, demikian jauh ia dari rakyat pada umumnya. Ini sebagai sesuatu yang mengherankan. Di sinilah ia akan dinilai, mampukah ia membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum.

Seorang pejabat negara tidak boleh mencampuradukkan kepentingan jabatan dengan kelompok yang dipimpinnya. Kalau ia ingin melaksanakan sebuah garis perjuangan partainya dalam jangka panjang, umpamanya saja dengan mendekati kelompok-kelompok garis keras, untuk memperoleh suara mereka dalam pemilu yang akan datang, maka pertemuan itu harus dilakukan di tempat mereka atau di kalangan partai yang dipimpinnya. Tidaklah layak mengundang mereka yang dituduh sebagai teroris oleh banyak pihak untuk makan siang di Kantor Wakil Presiden. Perbedaan utama fungsi resmi jabatan atas pemerintahan dari fungsi politik kepartaian harus selalu diperhatikan, agar -baik pemerintah maupun partai politiknya tidak saling mengalami kerugian. Karena itu, upaya memerangi terorisme memerlukan ketegasan sikap yang ditujukan untuk mereka, ini harus benar-benar diperhatikan. {}

Bersumber dari Pendangkalan

Pada sebuah diskusi beberapa tahun yang lalu di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, penulis dikritik oleh Dr.Yusril Ihza Mahendra, sekarang Menteri Kehakiman dan HAM. Kata bang Yusril, ia kecewa dengan penulis karena bergaul terlalu erat dengan umat Yahudi dan Nasrani. Bukankah kitab suci al-Qur'ân menyatakan salah satu tanda-tanda seorang muslim yang baik adalah "bersikap keras terhadap orang kafir dan bersikap lembut terhadap sesama muslim" (*asyiddâ'u 'alâ al-kuffâr ruhamâ baynahum*) (QS al-Fath(48):29). Menanggapi hal itu, penulis menjawab, sebaiknya bang Yusril mempelajari kembali ajaran Islam, dengan mondok di pesantren. Karena ia tidak tahu, bahwa yang dimaksud al-Qur'ân dalam kata "*kafir*" atau "*kuffar*" adalah orang-orang musyrik (*polytheis*) yang ada di Mekkah, waktu itu. Kalau hal ini saja bang Yusril tidak tahu, bagaimana ia berani menjadi mubaligh?

Berdasar kenyataan itu, penulis tidak begitu heran dengan terjadinya kekerasan di Maluku, Poso, Aceh dan Sampit. Penulis mengutuk peledakan bom di Legian, Bali, karena itu berarti pembunuhan atas begitu banyak orang yang tidak bersalah. Tetapi kutukan itu, tidak berarti penulis heran atas terjadinya peledakan bom itu. Karena dalam pandangan penulis, hal itu terjadi akibat para pelakunya tidak mengerti, bahwa Islam tidak membenarkan tindak kekerasan dan diskriminatif. Satu-satunya pembenaran

bagi tindakan kekerasan secara individual adalah, jika kaum muslimin diusir dari rumahnya (*idzâ ukhrijû min diyârihim*). Karena itulah, ketika harus meninggalkan Istana Merdeka, penulis meminta Luhut Panjaitan mencari surat perintah dari Lurah sekalipun. Sebabnya, karena ada perintah lain dalam Sunni tradisional yang diyakini penulis, untuk taat pada pemerintah. Berdasar ayat kitab suci itu, "taatlah kalian pada Allah, pada utusan-Nya dan pada pemegang kekuasaan pemerintahan" (*athî'u allaha waathi'u al-rasûl wa ulî al-amri minkum*)(QS al Nisa(4):59). Pak Luhut Panjaitan mencarikan surat perintah itu dari seorang Lurah, dan penulis sebagai warga negara dan rakyat biasa –karena lengser dari jabatan kepresidenan- mengikuti perintah tersebut.

Soal bersedianya penulis lengser dari jabatan kepresidenan, karena penulis menganggap tidak layak jabatan setinggi apapun di negeri ini, dipertahankan dengan pertumpahan darah. Padahal waktu itu, sudah ada pernyataan yang ditandatangani 300.000 orang akan mendukung penulis mempertahankan jabatan kepresidenan, kalau perlu mengorbankan nyawa.

*****

Tindak kekerasan -walaupun atas nama agama- dinyatakan oleh siapapun dan dimanapun sebagai terorisme. Beberapa tahun sebelum menjabat sebagai presiden, penulis merencanakan berkunjung ke Israel untuk menghadiri pertemuan para pendiri Pusat Perdamaian Shimon Peres di Tel Aviv. Sebelum keberangkatan ke Tel Aviv, penulis menerima rancangan pernyataan bersama, yang disampaikan oleh Rabi Kepala Sevaflim Eli Bakshiloron. Dalam rancangan pernyataan itu, terdapat pernyataan penulis dan Rabi yang menyatakan "berdasarkan keyakinan agama Islam dan Yahudi, menolak penggunaan kekerasan yang berakibat pada matinya orang-orang yang tidak berdosa". Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengutus Wakil Rois 'Am, KH Sahal Mahfudz untuk memeriksa rancangan pernyataan itu. KH Sahal

Mahfudz meminta kata-kata “tidak berdosa” diubah menjadi “tidak bersalah”.

Mengapa demikian? Karena, yang menentukan seseorang itu berdosa atau tidak adalah Allah Swt. Sedangkan salah atau tidaknya seseorang oleh hakim atau pengadilan, berarti oleh sesama manusia. Penulis menerima keputusan itu dan perubahan rancangan pernyataan tersebut, juga diterima oleh Rabi Eli Bakshiloron. Ketika tiba di Tel Aviv, penulis bersama Rabi Eli langsung menuju kantornya di Yerusalem. Di tempat itu, penulis dan Rabi Eli menandatangani pernyataan bersama itu di depan publik dan media massa. Ini menunjukkan bahwa, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia –bahkan menurut statistik sebagai organisasi Islam terbesar di dunia- menolak terorisme dan penggunaan kekerasan atas nama agama sekalipun. Karena itu, kita mengutuk peledakan bom di Bali dan menganggapnya sebagai “tindak kejahatan/ kriminal” yang harus dihukum.

Keseluruhan penolakan penulis itu, bersumber pada pendapat agama yang tercantum dalam literatur keagamaan (*al kutub al-mu’tabarah*), jadi bukannya isapan jempol penulis sendiri. Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama hukum, karenanya setiap sengketa seharusnya diselesaikan berdasarkan hukum. Dan karena hukum agama dirumuskan sesuai dengan tujuannya (*al umuru bi maqâshidiha*), maka kita patut menyimak pendapat mantan ketua Mahkamah Agung Mesir, Al Asmawi. Menurutnya, “hukum Barat” dapat dijadikan “hukum Islam”, jika memiliki tujuan yang sama. Hukum pidana Islam (*jarimah*), menurut Al Ashmawi, sama dengan hukum pidana Barat, karena sama berfungsi dan bertujuan menahan (*deterrence*) dan menghukum (*punishment*).

*****

Namun, mengapa terorisme dan tindak kekerasan yang lain masih juga dijalankan oleh sebagian kaum muslimin? Kalau memang benar kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan

tersebut, jelas bahwa mereka telah melanggar ajaran-ajaran agama. Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan sekian banyak jawaban, antara lain rendahnya mutu sumber daya manusia para pelaku tindak kekerasan dan terorisme itu sendiri. Mutu yang rendah di kalangan kaum muslimin, dapat dikembalikan kepada aktifitas imperalisme dan kolonialisme yang begitu lama menguasai kaum muslimin. Ditambah lagi dengan, orientasi pemimpin kaum muslimin yang sekarang menjadi elite politik nasional. Mereka selalu mementingkan kelompoknya sendiri dan membangun masyarakat Islam yang elitis.

Apa pun bentuk dan sebab tindak kekerasan dan terorisme, seluruhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah, termasuk oleh para pelaku kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Penyebab lain dijalankannya tindakan-tindakan yang telah dilarang Islam itu -sesuai dengan ajaran kitab suci al-Qur'ân dan ajaran Nabi Muhammad Saw- adalah proses pendangkalan agama Islam yang berlangsung sangat hebat. Walau kita lihat, adanya praktek imperialisme dan kolonialisme atau kapitalisme klasik di jaman ini terhadap kaum muslim, tidak berarti proses sejarah itu memperkenankan kaum muslimin untuk bertindak kekerasan dan terorisme.

Harus kita pahami, bahwa dalam sejarah Islam yang panjang, kaum muslimin tidak menggunakan kekerasan dan terorisme untuk memaksakan kehendak. Lalu, bagaimanakah cara kaum muslimin dapat mengadakan koreksi terhadap langkah-langkah yang salah, atau melakukan "responsi yang benar" atas tantangan berat yang dihadapi? Jawabannya, yaitu dengan mengadakan penafsiran baru (*reinterpretasi*). Melalui mekanisme inilah, kaum muslimin melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat sebelumnya, maupun memberikan responsi yang memadai atas tantangan yang dihadapi. Jelas, dengan demikian Islam adalah "agama kedamaian" bukannya "agama kekerasan". Proses sejarah berkembangnya Islam di kawasan ini,

adalah bukti nyata akan kedamaian itu, walaupun di kawasan-kawasan lain, masih juga terjadi tindak kekerasan -atas nama Islam- yang tidak diharapkan. {}



NU dan Terorisme Berkedok Islam

Dalam sebuah konferensi internasional, penulis diminta memaparkan pandangannya mengenai terorisme yang terjadi, seperti peledakan bom di Bali dan perbuatan-perbuatan lain yang serupa. Penulis jadi teringat pada penggunaan nama Islam dalam kerusuhan-kerusuhan di Ambon dan Poso, serta peristiwa terbunuhnya para ulama dalam jumlah besar dalam kasus "santet di Banyuwangi". Tentu saja penulis menjadi terperangah oleh banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama Islam di atas.

Tentu saja kita tidak dapat menerima hal itu, seperti halnya kita tolak tindak kekerasan di Irlandia Utara sebagai "pertentangan agama" Protestantisme melawan Katholikisme. Begitu juga perusakan Masjid Babri sebagai pertentangan orang-orang beragama Hindu melawan kaum Muslimin di negeri India, walaupun yang bermusuhan memang jelas orang-orang dari kedua agama itu. Pasalnya, karena mayoritas orang-orang beragama Islam di berbagai negeri tidak terlibat dalam pertikaian dengan tindakan kekerasan seperti di negeri-negeri tersebut.

Dalam jenis-jenis tindakan teroristik itu, para pemuda muslim jelas-jelas terlibat dalam terorisme yang dipersiapkan. Mereka mendapatkan bantuan keuangan dan latihan-latihan guna melakukan tindakan-tindakan tersebut. Belasan bulan persiapan

teknis dan finansial dilakukan, sehingga tidak dapat ia disebut sebagai sesuatu yang bersifat spontanitas belaka. Jika tidak terjadi secara spontan, sudah pasti hal itu merupakan tindakan teror yang memerlukan waktu lama untuk direncanakan dan dilaksanakan. Para pelaksana kegiatan teror itu menganggap diri mereka bertindak atas nama Islam. Dengan demikian, menjadi jelaslah arti hukum Islam bagi kehidupan mereka , yang terkadang hanya dianggap sebagai kegiatan ilmiah guna membahas kecilnya deskripsi yang dilakukan.

Suatu hal yang harus selalu diperhatikan, yaitu gerakan Islam apa pun dan di mana pun senantiasa terkait dengan pilihan berikut: gerakan mereka sebagai kultur atau sebagai lembaga/ institusi. Yang mementingkan kultur, tidak begitu memperhatikan lembaga yang mereka dukung. Ambil NU (Nahlatul Ulama) sebagai contoh: dengan para anggota/ pengikutnya, perhatikan dengan seksama "budaya NU" seperti *tahlil*, *halal bil halal*, dan mengikuti *rukyah* (melihat bulan) untuk menetapkan permulaan hari raya. Mereka tidak peduli dengan keadaan lembaga-organisasi yang mereka dukung, dipimpin oleh orang yang tepatkah atau tidak.

Karena itulah, ketika para aktivis muda Islam yang belakangan dikenal sebagai "muslim radikal", dan kemudian lagi dikenal sebagai para teroris yang memulai konflik di Ambon dan Poso, dan sebagian lagi meledakkan bom di Bali, mereka pun menghadapi pilihan yang sama, mementingkan budaya atau lembaga (institusi). Sebagian dari mereka memilih institusi, dengan melupakan "warisan Islam" -berupa proses penafsiran kembali (*reinterpretasi*)- yang sudah dipakai kaum muslimin ratusan tahun lamanya, guna memasukkan perkembangan zaman ke dalam ajaran agama mereka. Sebagai akibat, mereka mengembangkan "cara hidup Islam" serba keras dan memusuhi cara-cara hidup lain, dan dengan demikian membuat Islam berbeda dari yang lain. Ini tampak ketika penulis suatu ketika memberikan ceramah kepada para calon dokter di sebuah fakultas kedokteran. Para

calon dokter lelaki dipisah tempat duduk mereka dari para calon dokter perempuan, dan pemisahan mereka itu "dijaga" oleh seorang bertubuh kekar yang lalu lalang di tengahnya. Pertemuan NU pun tidak sampai sedemikian keadaannya, karena di tengah-tengah tidak ada "penjaga" yang bertubuh kekar dan bersifat galak terhadap pelanggaran halangan yang mereka lakukan.

*****

Sikap mementingkan lembaga (institusi) inilah, -setidak-tidaknya lebih mementingkan institusi dari kultur- seperti diperlihatkan contoh di atas, menurut pendapat penulis adalah sumber dari terorisme yang berkedok Islam. Jika institusi atau lembaga ke-Islaman ditantang oleh sebuah cara hidup, seperti halnya sekarang cara hidup orang Islam ditantang oleh cara hidup "Barat", maka mereka pun merasa terancam dan bersikap ketakutan. Perasaan dan sikap itu ditutupi oleh tindakan garang kepada "sang penantang", dan menganggap "budaya sendiri" sebagai lebih dari segala-galanya dari "sang penantang".

Karena tidak dapat membuktikannya secara pasti dan masuk akal, maka lalu diambil sikap keras, yang kemudian berujung pada terorisme, seperti meledakkan bom (di Bali) dan membajak para turis (seperti dilakukan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan). Mereka lalu menggunakan kekerasan, sesuatu yang tidak diminta atau diperintahkan oleh Islam. Agama mereka menentukan hanya kalau diusir dari rumah-rumah mereka, baru diperkenankan melakukan tindak kekerasan untuk membela diri *(idzâ ukhrijû min diyârihim)*.

Karena pendekatan institusional yang mereka pergunakan, maka mereka merasa "dikalahkan" oleh peradaban-budaya lain, yaitu "kebudayaan barat modern". Dilupakan umpamanya saja, bagaimana Saladin sebagai Sultan Mamalik 'mengalahkan' Richard Berhati Singa (*The Lion Heart*) dengan mengirimkan

dokter pribadinya untuk menyembuhkan anak raja Inggris itu dalam Perang Salib. Dokter tersebut disertai anak Saladin yang dapat saja dibunuh, kalau dokter pribadi itu tidak dapat menyembuhkan anak Richard. Raja Inggris tersebut dengan demikian mengetahui betapa luhur budi Saladin. Dari upaya itu akhirnya ia pulang ke negaranya dan menghentikan Perang Salib.

Demikian pula hubungan antara budaya Islam dan budaya-budaya lain, harus dikembangkan dalam pola menghargai mereka, dengan demikian akan tampak keluhuran Islam yang dipeluk saat ini paling tidak oleh 1/6 jumlah umat manusia. Karena itu, sejak dahulu penulis menolak penggunaan terorisme untuk "mempertahankan Islam". Tindakan seperti itu justru merendahkan Islam di mata budaya-budaya lain, termasuk budaya modern di Barat yang telah membawakan keunggulan organisasi, pengetahuan, dan teknologi. Islam hanya dapat "mengejar ketertinggalan' itu, jika ia menggunakan rasionalitas dan sikap ilmiah. Memang, rasionalitas Islam sangat jauh berbeda dari rasionalitas lain, karena kuatnya unsur identitas Islam itu. Rasionalitas Islam yang harus dibuktikan dalam kehidupan bersama tersebut, berintikan penggunaan unsur-unsur manusiawi dengan segala pertimbangannya, yang harus ditunjukkan kepada "sumber-sumber tertulis" (*adillah naqliyyah*) dari Allah, seperti ungkapan-ungkapan resmi Tuhan dalam al-Qur'ân dan ucapan Nabi (*al-Hadits*). Karena itu, pengenalan tersebut tidak memerlukan tindak kekerasan apa pun, yang hanya akan membuktikan "kelemahan" Islam saja. Karena itulah, kita harus memiliki sikap jelas mengutuk terorisme, siapa pun yang melakukannya. Apalagi kalau hal itu dilakukan oleh mereka yang tidak mengerti perkembangan Islam yang sebenarnya.

Diketahui kaum muslimin sejak dahulu terbagi dua, yaitu yang menjadi warga berbagai gerakan Islam (*al-munadzammah al-Islamiyyah*) dan orang-orang Islam kebanyakan (*'awâm* atau *laymen*). Kalau mayoritas warga berbagai gerakan Islam saja tidak menyetujui penggunaan kekerasan (terorisme), apalagi kaum

muslimin awam. Inilah yang sering dilupakan para teroris itu dan harus diingat oleh mereka yang ingin melakukan tindak kekerasan, apalagi terorisme, di kalangan para aktivis muslimin. Kalau hal ini tidak diingat, maka tentu saja mereka akan lambat-laun berhadapan dengan "kaum awam" tersebut. Para teroris peledak bom di Bali pada akhirnya berhadapan dengan Undang-Undang Anti- Terorisme, yang merupakan produk mayoritas kaum muslimin awam di negeri ini.

*****

Dari semula, NU bersikap tidak menyetujui tindak terorisme. Dalam Muktamar tahun 1935 di Banjarmasin, ada pertanyaan dalam "*bahtsul masâ'il*"; wajibkah kaum muslimin di kawasan Hindia Belanda mempertahankan kawasan itu, sedangkan mereka diperintah oleh kaum non-muslimin (para kolonialis Belanda)? Jawab Muktamar; wajib, karena kawasan itu dahulunya memiliki kerajaan-kerajaan Islam, dan kini kaum muslimin dapat menerapkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan bebas. Diktum pertama (mengenai kerajaan-kerajaan Islam di kawasan ini) diambilkan dari sebuah teks kuno, *Bughyah al-Mustarsyidîn*, sedangkan diktum kedua hasil pemikiran (*reinterpretasi*) para ulama Indonesia sendiri, tetapi sebenarnya pernah diungkapkan sarjana muslim kenamaan Ibn Taimiyyah, yang di negeri ini kemudian dikenal karena menjadi subjek disertasi doktor Nurcholish Madjid.

Keputusan Muktamar NU sepuluh tahun sebelum proklamasi kemerdekaan itu, meratakan jalan bagi pencabutan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945 oleh para wakil organisasi-organisasi Islam di negeri kita, seperti Muhammadiyah dan NU. Kalau pemimpin dari gerakan-gerakan Islam tidak mewajibkan, berarti negara yang didirikan itu tidaklah harus menjadi negara Islam. Kalau demikian, Islam tidak didekati secara kelembagaan atau institusional, melainkan dari sudut budaya. Selama "budaya"

Islam masih ada di negeri ini, maka Islam tidak mengalami kekalahan dan tidak harus "dipertahankan" dengan tindak kekerasan, seperti terorisme.

Islam memiliki cara hidupnya sendiri, yang tidak perlu dipertahankan dengan kekerasan, karena cukup dikembangkan dalam bentuk budaya. Dan inilah yang terjadi, seperti adanya MTQ, penerbitan-penerbitan Islam yang berjumlah sangat banyak, dan berbagai manifestasi ke-Islaman lain. Bahkan sekarang, wajah "kesenian Islam" sudah menonjol demikian rupa sehingga layar televisi pun menampung sekian banyak dari berbagai wajah seni Islam yang kita miliki. Karena itu, Islam tidak perlu dipertahankan dari ancaman siapa pun karena ia memiliki dinamika tersendiri. Sebagai responsi atas "tekanan-tekanan" modernisasi, terutama dari "proses pem-Barat-an" yang terjadi, kaum muslimin di negeri ini dapat mengambil atau menolak pilihan-pilihan mereka sendiri dari proses tersebut, mana yang mereka anut dan mana yang mereka buang. Karena itu, hasilnya juga akan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain dan dari satu kelompok ke kelompok lain. Penerimaan beragam atas proses itu akan membuat variasi sangat tinggi dari responsi tersebut, yang sesuai dengan firman Allah: "dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa untuk dapat saling mengenal" (*wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâ'ila li ta'ârafû*) (QS al Hujurât(49): 13). Ayat itu jelas memerintahkan adanya ke-bhinekaan dan melarang eksklusifisme dari kalangan kaum muslimin manapun.

Sebenarnya di antara "kalangan teroris" itu, terdapat juga mereka yang melakukan tindak kekerasan atas perintah-pesanan dari mereka yang tadinya memegang kekuasaan. Karena mereka masih ingin berkuasa, mereka menggunakan orang-orang itu atas nama Islam, untuk menghalangi proses-proses munculnya rakyat ke jenjang kekuasaan. Dengan demikian, kalangan-kalangan itu memiliki tujuan menghadang proses demokratisasi dan untuk itu sebuah kelompok kaum muslimin digunakan untuk membela kepentingan orang-orang tersebut atas nama Islam. Sungguh

sayang jika maksud itu berhasil dilakukan, walaupun berbagai tindakan teror telah dilakukan. Rasa-rasanya, NU berkewajiban menggagalkan rencana tersebut, dan karenannya bersikap konsisten untuk menolak tindak kekerasan dalam memperjuangkan "kepentingan Islam".

Islam tidak perlu dibela sebagaimana juga halnya Allah. Kedua-duanya dapat mempertahankan diri terhadap gangguan siapa pun. Inilah yang dimaksudkan firman Allah; "hari ini Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Ku-sempurnakan bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku, dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama" (*al-yauma akmaltu lakum dînakum wa atmamtu 'alaikum nikmatî wa radlîtû lakum al-Islâma dînan*) (QS al-Maidah (5): 3), menunjuk dengan tepat mengapa Islam tidak perlu dipertahankan dengan tindakan apa pun, kecuali dengan melaksanakan cara hidup Islam itu sendiri. Sangat indah untuk diucapkan, namun sulit dilaksanakan, bukan? {}

Bom di Bali dan Islam

Peledakan bom di Denpasar, semakin hari semakin banyak mendapat sorotan. Salah satu hal terpenting, adalah mengetahui siapa yang melakukan, dan mengapa mereka melakukannya. Dikatakan "mereka", karena jelas sekali peristiwa seperti itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang diri belaka, sehingga digunakan kata tersebut untuk menunjuk para pelakunya. Sayangnya, hingga hari ini belum dapat disebutkan siapa-siapa pelaku sebenarnya. Jangan-jangan, hasil pemeriksaan tidak akan diumumkan secara jujur, karena menyangkut pejabat yang berada dalam sistem kekuasaan. Bukankah banyak hal di Indonesia selama ini tidak pernah dibongkar sampai tuntas, melainkan ditutup-tutupi dari mata masyarakat?.

Banyak pihak ditunjuk oleh orang yang berbeda-beda sebagai para pelaku kejadian itu, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Juga karena adanya hal-hal yang dapat ditunjuk sebagai persambungan dari peristiwa pemboman yang pernah terjadi. Begitu juga, demikian banyak konspirasi/komplotan yang dapat ditunjuk sebagai biang keladi, sehingga hal yang sebenarnya terjadi menjadi tertutup olehnya. Penulis khawatir, jangan-jangan peristiwa yang sebenarnya, justru malah dikaburkan oleh sekian banyak gambaran adanya konspirasi/komplotan yang terjadi di Bali tersebut.

Yang tampak jelas hanyalah beberapa hal saja. Pertama, peledakan bom itu terjadi di Pulau Dewata Bali, kedua, bahwa korbannya adalah orang-orang Australia, yang berjumlah sangat besar dan menerbitkan amarah dunia internasional. Masih menjadi pertanyaan lagi, mungkinkah pemerintah kita sendiri dapat dan bersedia melakukan pelacakan atas kejadian tersebut dengan tuntas? Mungkin pertanyaan ini terdengar agak sinis, tapi bukankah demikian banyak peristiwa yang telah terjadi di negeri kita tanpa ada pemeriksaan sampai tuntas, hingga kita patut bertanya-tanya, benarkah pemerintah kita nanti akan menangani segala sesuatunya secara serius? Buktinya, penulis telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri —sewaktu menjabat sebagai Presiden, untuk melakukan penangkapan-penangkapan. Namun, mereka tidak melaksanakan perintah tersebut, bahkan sampai hari inipun pihak Mahkamah Agung (MA) belum mau menjawab pertanyaan penulis, apakah terjadi tindakan insubordinatif oleh kedua pejabat tersebut, dengan menolak mengerjakannya? Kalau MA saja tidak memiliki keberanian untuk memberikan jawaban terhadap keadaan yang demikian jelas tadi, juga dengan pihak ekskutif-pemerintah dan legislatif-juga tidak mau mempertanyakan hal itu, bukankah hal sejelas itu menunjukkan adanya kebuntuan pemerintahan? Dan bukankah kebuntuan itu juga yang dapat menghentikan pemerintah untuk mencari tahu siapa saja yang menjadi para pelaku peledakan bom di Denpasar itu?

*****

Terjadilah simpang-siur pendapat karenanya. Ada yang mengatakan pelakunya adalah pihak luar negeri, dalam hal ini adalah orang-orang Amerika Serikat (AS). Di pihak lain, ada yang beranggapan bahwa hanya pihak dalam negeri saja yang terlibat dalam kejadian ini. Ada yang berpendapat lagi, bahwa pihak luar negeri bekerjasama dengan unsur-unsur yang ada di dalam negeri

sendiri yang menjadi para pelaku. Demikian juga terjadi perbedaan yang cukup tajam antara mereka yang berpendapat adakah jaringan Islam ekstrim/garis keras terlibat dalam kejadian tersebut.

Jika jalan pikiran ini terus diikuti, tentu timbul pertanyaan siapa saja atau organisasi mana yang membiarkan diri terlibat dalam kejadian tersebut? Laskar Jihad-*kah*, yang merupakan cabang dari organisasi dengan nama serupa di Saudi Arabia. Lalu, mengapakah mereka "buru-buru" membubarkan diri begitu terjadi peristiwa di Bali tersebut? Adakah hubungan antara kejadian tersebut di satu pihak, dengan masa depan organisasi itu? Bukankah bubarnya organisasi itu di Saudi Arabia dan Indonesia —pada waktu yang hampir bersamaan, justru menunjukkan adanya jaringan *(networking)* dalam tubuh sebagian gerakan Islam di dalam dan luar negeri? Bukankah ini menunjukkan adanya jaringan internasional di kalangan mereka, yang oleh pihak lain dianggap sebagai bukti hadirnya jaringan internasional untuk mempromosikan versi mereka tentang hubungan gerakan Islam dan non-Islam secara keseluruhan?

Demikian kacaunya perkembangan yang terjadi, hingga ada pihak yang menganggap Abu Bakar Ba'asyir —seorang Kyai pesantren dari Solo, sebagai salah seorang pelaku, sedangkan yang lain menganggap ia tidak terkait sama sekali dengan peristiwa itu. Lalu, mengapakah ia sampai pingsan di rumah sakit, begitu mengetahui dirinya akan diekstradisikan ke AS? Ini lagi-lagi menunjukkan ketidakjelasan yang kita hadapi. Hanya penelitian yang mendalam dan kejujuranlah yang dapat mengungkapkan hal ini secara terbuka kepada masyarakat. Rasanya, kalau tidak ada tim khusus untuk melakukan hal itu, kita tetap tidak akan tahu mengenai latar belakang maupun hal-hal lain dalam peristiwa itu.

*****

Dapat digambarkan di sini, betapa marahnya pihak-pihak lain secara internasional maupun domestik terhadap hal itu. Penulis yang menggunakan rasio dengan tenang, dalam hal ini tidak dapat mengemukakan secara menyeluruh dengan jujur apa yang ada dalam pikirannya tentang kemungkinan siapa yang memerintahkan para pelaku sebenarnya yang melaksanakan pemboman tersebut. Mengapa? Karena benak penulis penuh dengan nama orang-orang yang mungkin melakukan hal itu, dan juga nama orang-orang yang "patut diduga" (untuk meminjam istilah pelanggaran konstitusi yang dilakukan para pemimpin partai politik di DPR/MPR, beberapa waktu yang lalu) terlibat dalam kasus ini.

Sementara, hal yang paling memilukan hati, adalah bahwa nama Islam dibawa-bawa dalam hal ini. Seolah-olah kaum muslimin seluruhnya turut serta melakukan hal tersebut, apalagi apa yang terjadi di Pulau Dewata itu mayoritas penduduknya non-muslim. Demikian juga korban orang asing —yang keseluruhannya beragama lain. Padahal kita tahu kalaupun ada orang yang beragama Islam terlibat dalam kasus ini, motif mereka bukanlah faktor agama, melainkan uang, jabatan ataupun pengaruh. Kalau orang yang benar-benar cinta terhadap Islam, mereka akan tahu bahwa agama tersebut melarang tindak kekerasan, dan hanya mengijinkannya untuk mempertahankan diri jika mereka diusir dari rumah mereka *(idzâ ukhrijû min diyârihim)*. Kalaupun ada seorang muslim melakukan tindakan seperti itu guna membela Islam dari "ancaman pihak lain" itu berarti ada penafsiran salah yang dilakukan dalam memahami agama tersebut.

Demikianlah, Islam dan Indonesia menjadi korban dari perbuatan yang tidak bertujuan mulia, jika versi di atas dipakai dalam hal ini. Jika yang digunakan adalah perebutan kekuasaan satu sama lain, dengan korban rakyat biasa dan para wisatawan mancanegara yang tak mengerti apa-apa, kiranya dapat dipakai gambaran rekonstruksi bermacam-macam di awal tulisan ini. Kesemua itu akan menjadi terang, jika pemerintah membentuk

tim independen yang diisi oleh orang-orang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas). Tetapi, bukankah itu justru dianggap sebagai sikap tidak percaya terhadap pemerintah, walaupun sebenarnya kecurigaan seperti itu tidak pernah ada. Tragis, bukan? {}



Benarkah Mereka Terlibat Terorisme?

Beberapa waktu yang lalu, penulis diwawancarai oleh wartawan dari Televisi SBS (*Special Broadcasting System*) dari Melbourne, Australia di lapangan terbang Cengkareng, sekitar jam 5.30 Wib. Ada tiga buah pertanyaan mendasar yang diajukan pada penulis. Pertanyaan pertama berkisar pada masalah mengapa penulis menganggap Abu Bakar Ba'asyir sebagai teroris? Penulis menjawab, bahwa laporan intelijen dari lima negara menyebutkan hal tersebut. Termasuk di dalamnya intelijen Malaysia dan Amerika Serikat, yang sejak dahulu tidak pernah ada kecocokan antara keduanya. Karena itu penulis mengacu hadits Nabi Saw menyatakan: "Kalau suatu masalah tidak diserahkan pada ahlinya, tunggulah datangnya kiamat" *(idzâ wushida al 'amru ilâ ghairi ahlihî fa intadziri al-sâ'ah).* Jadi, sikap penulis itu sudah benar menurut ketentuan agama, dan kalau terbukti ada masalah lain akan diperiksa di kemudian hari.

Beberapa hari sebelum itu, budayawan Emha Ainun Nadjib menyatakan dalam salah satu wawancara di Radio Ramako, bahwa keterangan mengenai keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir dalam terorisme, didasarkan pada pengakuan Umar Farouq pada pihak Amerika Serikat (AS). Menurut Emha, pengakuan Umar Farouq tidak dapat diterima kebenarannya, karena ia berasal dari Ambon. Umar Farouq, demikian Emha menyimpulkan, adalah lawan Abu

Bakar Ba'asyir. Seolah-olah Emha mengikuti pendapat Al-Isfarayini bahwa pendapat seseorang tentang musuh atau lawannya tidak dapat diterima (*la yuqbalu qaulu mujtahid 'an-khashmihi*). Benarkah pendapat Emha ini? Penulis mengusulkan dalam sebuah konperensi pers sehari setelah itu, agar dibuat komisi independen yang terdiri dari para ahli hukum dan wakil-wakil masyarakat, untuk meneliti mana yang benar: pengakuan CIA (*Central Intelligence Agency*) ataukah Emha?

Sedangkan pendapat Wakil Presiden Hamzah Haz agar Umar Farouq dibawa ke negeri ini untuk ditanyai, tidak sesuai dengan kenyataan. CIA tidak akan mau mengirimkannya ke negeri ini, karena khawatir jika tidak dilakukan penyelidikan dengan benar. Sedangkan kalau dia diadili di sini (Indonesia), kemungkinan mafia peradilan akan membebaskannya dari tuduhan tersebut. Bukankah segala hal dapat dibeli di negeri ini? Demikian burukkah citra kita di dunia internasional, hingga harapan seorang tokoh -seperti seorang Wakil Presiden Republik Indonesia (RI)- disepelekan oleh pihak luar negeri? Tentu saja kita tidak akan marah melihat kenyataan ini, karena hal itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai bangsa, yakni dengan membiarkan semua hal itu tanpa koreksi.

Lain halnya dengan Robert Gelbard, mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. Ia menyatakan kepada pers Australia, bahwa ia kecewa karena telah memberitahukan kepada pemerintah RI, ada gerakan-gerakan yang mencurigakan di Indonesia. Tetapi tidak ada upaya sungguh-sungguh yang memperhatikan hal ini, dan menangkal kemungkinan terjadinya terorisme di negeri ini. Penulis sendiri sebagai Presiden pada waktu itu, tidak pernah mendapat peringatan seperti itu secara langsung dari Gelbard. Ini berarti ada pihak pemerintahan yang menutupi keterangan itu dari pengetahuan penulis.

Hal ini tidak mengherankan dan penulis menyatakan pada TV SBS, pada waktu itu —baik Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Widodo AS maupun Kepala Kepolisian

Republik Indonesia (Kapoiri) Jenderal Polisi S. Bimantoro tidak mau melaksanakan perintah Presiden. Ketika lengser dari kursi kepresidenan, penulis menanyakan kepada Mahkamah Agung (MA), adakah tindakan kedua orang itu merupakan *insubordinasi*?

Sampai hari inipun, MA tidak pernah menjawab pertanyaan penulis, yang berarti juga bahwa lembaga itu telah melanggar hukum dan undang-undang dasar. Keterangan Gelbard pada pers Australia tersebut, menunjukkan bahwa dalam tubuh TNI, Polri maupun aparat pemerintahan kita memang terdapat perbedaan pendapat yang tajam. Ada pihak yang mencoba menutup-nutupi informasi hingga pemerintahan tidak berjalan secara obyektif. Herankah kita, jika akhirnya kebijakan pemerintah menjadi sulit dirumuskan? Apalagi kalau Presidennya tidak mau aktif menyusun kebijakannya sendiri, melainkan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada aparat di bawahnya. Ditambah Presiden berbeda paham dengan Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dan sebagainya.

Juga, tidak ada kejelasan mengenai sikap yang diambil Megawati Soekarnoputri dalam pemerintahannya. Umpamanya, mengenai orientasi pejabat di bawahnya. Ia mengangkat Bambang Kesowo, seorang *etatis* (paham serba negara). Dan kombinasinya adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebelum bulan puasa telah memutuskan harus terkumpul uang sebanyak lima trilyun rupiah untuk menghadapi Pemilihan Umum 2004 mendatang. Dari manakah akan diperoleh dana sejumlah itu? Apakah dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara)? Tetapi, Megawati juga mengangkat Dorodjatun Kuntjorojakti dan Budiono sebagai Menteri Koordinator (Menko) Ekuin dan Menteri Keuangan, -keduanya orang *teknokrat* yang percaya pada privatisasi/swastanisasi. Lalu, kemanakah orientasi ekonomi yang diikutinya? Tidak pernah jelas sampai sekarang, karena ia berdiam diri saja tentang pilihan yang diambilnya. Ironis memang!

Penulis tertarik pada ucapan Habib Husein Al-Habsyi dari Pasuruan, yang menyatakan peristiwa ledakan bom atas Candi Borobudur adalah rekayasa Ali Murtopo yang kemudian di dakwakan pada dia sebagai pelakunya. Ketika TV SBS menanyakan hal itu penulis langsung menjawab, Habib tersebut adalah pembohong. Mengapa? Karena ia sudah dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri, dan ia pun di penjara di Lowok Waru, Malang. Walaupun melalui seorang perwira tinggi TNI, penulis berhasil membebaskan dia dari penjara, tapi apa yang didapatkan penulis? Ternyata ia menyatakan di mana-mana bahwa penulis tersangkut dengan kasus Bruneigate dan Bulogate, di samping hal-hal lain. Itu semua adalah isapan jempol belaka, karena sampai hari ini baik melalui pembentukan Pansus DPR ataupun jalan lain, penulis tidak pernah terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan. Bukankah dengan demikian ia menjadi pembohong?

Kalau seseorang berbohong tentang sesuatu hal, dapatkah keterangannya bisa dipercaya? Karenanya, kita harus hati-hati menerima keterangan orang tersebut, bahwa ada rekayasa Ali Murtopo yang membuat Habib tersebut mendapatkan hukuman seumur hidup. Ini tidak berarti, bahwa penulis pembela Ali Murtopo. Tetapi kita harus berhati-hati dalam menerima keterangan orang tentang diri pejabat berbintang tiga (Letjen TNI) itu. Hanya dengan sikap obyektif seperti itulah kita dapat mempertahankan integritas pribadi di masa-masa sulit ini. Sebab jika tidak kita akan kehilangan obyektifitas atau takut mengemukakannya dengan banyak orang tidak akan percaya lagi pada kita.

Itulah kira-kira reaksi/jawaban penulis atas deretan pertanyaan yang dikemukakan oleh wartawan TV SBS. Mudah-mudahan dengan demikian, publik internasional akan mengetahui keadaan sebenarnya di negeri kita, yang terkait dengan hal-hal yang ditanyakan kepada penulis di lapangan terbang Juanda, Surabaya ini dan jawabannya disiarkan malam harinya di Australia. Namun, tentu akan ada yang bertanya, bijaksanakah

hal ini? Jawaban penulis terhadap pertanyaan tersebut adalah kejujuran merupakan kunci pemecahan masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dewasa ini. Dengan kejujuran inilah kita akan mengatasi krisis multidimensional. Ukuran kejujuran inilah yang akan menentukan kualitas kita sebagai bangsa. Kedengarannya sederhana tapi sulit dilaksanakan, bukan? {}



BENARKAH BA'ASYIR TERORIS?

Laporan dari berbagai pihak, baik intelejen maupun bukan, menunjukkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir termasuk pimpinan Jama'ah Islamiah (JI) di kawasan Asia Tenggara. Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasukkan JI tersebut ke dalam daftar organisasi terorisme intemasional sebagai perkumpulan ke-88. Tetapi kesimpulan tersebut disanggah oleh berbagai kalangan, termasuk para pengamat yang menulis sebuah analisis tentang keputusan DK-PBB itu. Manakah yang benar antara kedua pandangan tersebut? Kita perlu berhati-hati, walaupun pihak Departemen Luar Negeri-Departemen Pertahanan-Kepolisian Negara telah mencapai kesimpulan dan mendukung Resolusi DK PBB itu.

Sekali lagi, manakah yang benar antara kedua pandangan tersebut? Ketika dibacakan laporan dari berbagai pihak —diantaranya intelejen dari lima negara, yang menyebutkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir sebagai teroris, penulis dengan sederhana menerima laporan tersebut. Diapun menganggap Abu Bakar Ba'asyir dan kelompok Islam garis keras lainnya sebagai teroris, yang dalam sebuah konperensi pers pernah penulis sebut sebagai teroris domestik, karena kelakuan mereka yang membawa senjata tajam di tempat umum membuat orang lain ketakutan. Walaupun ada laporan banyak pihak bahwa Wakil Presiden

Hamzah Haz mengundang makan siang Ja'far Umar Thalib dan kawan-kawan ke Istana Wapres, dan mereka mengaku bukan teroris. Dari jawaban itu Hamzah Haz menyatakan kepada dua orang Senator Amerika Serikat bahwa di Indonesia tidak ada ada teroris. Dan, sehari kemudian terjadilah ledakan bom di Bali itu.

Penulis menyebutkan dalam sebuah kolomnya, bahwa Hamzah Haz mencampur-adukan antara Wakil Presiden Repulik Indonesia, sebagai sebuah jabatan pemerintahan, dengan fungsinya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Undangan makan siang kepada orang-orang yang disangka sebagai teroris oleh masyarakat, ke Kantor Wakil Presiden RI, seharusnya dilakukannya di luar kantor pemerintahan dan dalam kedudukan sebagai Ketua Umum PPP. Karenanya, kita lalu jadi serba salah, mempercayai atau tidak keterangan Hamzah Haz itu. Keinginannya untuk memperoleh dukungan dari gerakan-gerakan Islam radikal dalam pemilu yang akan datang, tampak sekali dalam tindakan itu, yang jelas sangat kita sayangkan.

*****

Kembali kepada tuduhan Abu Bakar Ba'asyir adalah teroris, kita tetap tidak tahu. Dalam rapat para penanggungjawab keamanan di kota Solo hari Minggu malam (27 Oktober 2002), diambil keputusan membawa orang itu dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, ke Jakarta. Tentu ini adalah untuk pemeriksaan/klarifikasi atas persangkaan bahwa ia adalah seorang teroris. Kita tidak tahu, apakah pendapat para dokter yang merawatnya di rumah sakit tersebut selama sembilan hari. Sedangkan para pendukungnya, baik dari Pondok Pesantren al-Mukmin, Ngruki di kawasan Solo dan lain-lainnya, meminta agar ia diijinkan beristirahat di pondok pesantren tersebut untuk dua sampai tiga hari.

Warga masyarakat seperti kita, tidak mengetahui secara

lebih mendalam hal-hal yang bersangkutan dengan tokoh tersebut. Sedangkan selama ini pihak keamanan seringkali menunjukkan sikap berat sebelah dan melanggar asas praduga tak bersalah (*pressumption of innocent*) dalam langkah-langkah mereka, karenanya kita juga tidak merasa pas betul untuk percaya begitu saja kepada keterangan pihak keamanan. Menurut hemat penulis, sebenarnya harus ada sebuah komisi independen dari masyarakat guna memastikan hal ini. Namun, apa boleh buat kita harus percaya kepada aparat keamanan dengan harapan semoga hal itu diberikan dengan jujur dan apa adanya.

Kita mengharapkan adanya kata pasti dalam kasus ini, yang hanya dapat diperoleh kalau ada kejujuran. Sementara itu, langkah-langkah memerangi terorisme domestik maupun internasional, harus tetap dilanjutkan. Dengan demikian, kredibilitas kita dapat segara dipulihkan walaupun kata "segera" bagi pihak-pihak yang berbeda, memiliki arti yang berlainan. Keputusan kelompok yang dipimpin oleh Menko Kesra Jusuf Kalla yang telah menganggap ringan akibat pemboman di Bali atas arus datangnya para wisatawan ke pulau tersebut, tampak gegabah alias terlalu optimis. Sikap inilah yang penulis harapkan tidak dilakukan oleh pihak keamanan dalam memeriksa keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir dalam tindakan-tindakan terorisme.

*****

Jika alasan satu-satunya bagi kaum muslimin untuk melakukan tindakan kekerasan adalah, "jika mereka di usir dari tempat tinggal mereka" (*idzâ ukhrijû min diyârihim)*, sehingga tidak ada alasan lain untuk melakukan tindak terorisme terhadap para turis asing, yang justru datang untuk membawakan usaha perdagangan bagi masyarakat yang didatangi. Kalaupun mereka melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syariah Islamiyah, merekapun tidak terkena sanksi pidana Islam, karena

mereka bukan orang yang terkena (*mukallaf*) hukum Islam. Ini adalah ketentuan Islam, dan berlaku hanya bagi kaum muslimin saja, dan tidak berlaku bagi orang-orang beragama lain.

Karena itulah, penulis menjadi pengikut Mahatma Gandhi, walaupun penulis adalah seorang muslim. Mengapa? Bukankah tidak layak bagi seorang muslim untuk menjadi pengikut siapa pun selain Nabi Muhammad Saw? Jawabannya sederhana saja, yaitu untuk memudahkan penulis sendiri. Memang penolakan terhadap kekerasan, telah ada dalam ajaran Islam kalau kita sungguh-sungguh menggalinya. Prinsip yang dikemukakan penulis di atas, jelas merupakan penolakan Islam terhadap tindak kekerasan. Tapi dengan melakukan identifikasi terhadap ajaran Gandhi, penulis langsung menjadi teman seiring pula bagi ratusan juta pengikut Gandhi, yang tersebar di seluruh dunia. Inilah maksud penulis dengan menjadi pengikut Gandhi, bukannya karena penulis menganggap ia memiliki ajaran lebih baik dari pada ajaran Islam, tapi penulis hanya ingin melakukan kerja sama dengan ratusan juta pengikutnya, sehingga penulis dalam memperjuangkan cita-cita Islam dibantu oleh orang-orang lain.

Kuncinya, bagaimana memperjuangkan cita-cita Islam, dengan mencari persamaan dengan paham-paham lain di dunia tanpa menentang dan berbeda dari cita-cita Islam sendiri. Prinsip ini yang harus dipahami oleh para pejuang Islam, jika ingin beriringan dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Yang harus ditakuti adalah ketakutan itu sendiri, kata Franklyn D. Rosevelt. Karena itu para pejuang Islam tidak boleh takut beriringan dan bergandengan tangan dengan pejuang lain. Sederhana saja, bukan? {}

SIKAP YANG BENAR DALAM KASUS BALI

Pada saat tulisan ini dibuat, terjadi perbedaan pendapat tajam mengenai kasus peledakan bom di Bali. Adakah itu ulah Abu Bakar Ba'asyir atau tidak. Yang terlibat perbedaan ini adalah para pejabat pemerintah melawan "orang luar" seperti Emha Ainun Nadjib dan Dr. Adnan Buyung Nasution, SH. Pemerintah beralasan penangkapan Abu Bakar Ba'asyir, adalah usaha mencari bukti hukum adakah orang itu terlibat dengan peledakan bom tersebut atau tidak. Karena itulah, Abu Bakar Ba'asyir diambil dari Rumah Sakit PKU di Solo, dan dipindahkan ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta. Diharapkan dengan demikian, penyelidikan dapat segera dimulai oleh aparat kepolisian, dengan harapan persoalannya akan segera diketahui dan orang itu akan dibawa ke pengadilan kalau ada bukti ia bersalah.

Di Australia, hari minggu 20 Oktober 2002 menjadi hari berduka. Gereja-gereja dan tempat-tempat beribadah lainnya melakukan kebaktian duka bagi para korban peledakan bom di Bali itu. Semenjak Perang Dunia II lebih dari 50 tahun yang lalu, jumlah orang Australia yang meninggal dunia akibat tindak kekerasan belum pernah sebesar itu, karena itu dapat dimengerti kemarahan orang-orang Australia yang menuntut segera dibuktikannya para pelaku tindak kekerasan peledakan bom di Bali tersebut. Dapat dimengerti, walaupun juga harus disesalkan tindakan

pengerusakan masjid oleh sementara orang yang marah di benua Kangguru itu. Juga dapat dimengerti pengiriman para penyelidik Australia dan Amerika Serikat untuk mengetahui para pelaku kasus itu, karena hilangnya kepercayaan, apakah benar pemerintah Indonesia akan menyelidiki secara tuntas kasus tersebut.

Kecenderungan menyalahkan Abu Bakar Ba'asyir dan kawan-kawannya dari "gerakan Islam garis keras", dilawan oleh sementara kalangan dalam negeri sendiri. Emha Ainun Nadjib menyatakan di Radio Ramako, Jakarta, bahwa Abu Bakar Ba'asyir tidak akan melakukan hal itu. Walaupun ia menyesalkan sikap Abu Bakar Ba'asyir yang tidak kooperatif dengan siapapun dalam hal ini. Tetapi, Abu Bakar Ba'asyir telah siap menerima akibat sikap non-kooperatifnya. Menurut Emha Ainun Nadjib, Ba'asyir termasuk menjadi "martir-syahid" bagi agama Islam. Dr. Adnan Buyung Nasution SH menyatakan di media massa, adanya anggapan dari luar negeri, bahwa Abu Bakar Ba'asyir menjadi aktor intelektual kejadian pengeboman tersebut, karena itu ia bersedia menjadi pembela tokoh tersebut. Benarkah sikap itu? Tidak, kalau ia berpendapat Abu Bakar Ba'asyir tidak bersalah. Proses pengadilanlah yang akan membuktikan hal itu benar atau tidaknya. Bukan karena tokoh seperti dirinya, dan juga bukan karena hakim yang kita belum tahu termasuk mafia pengadilan atau tidak.

Karena kita mudah menjadi partisan dalam perbedaan pendapat yang terjadi, lalu kita mudah memihak kepada pendirian yang kita anut. Juga dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir ini, yang jika disarikan berbunyi: "Benarkah ia terlibat dengan kejadian peledakan bom di Bali itu?" "Tidakkah ia menjadi korban baru konspirasi asing/komplotan untuk memburukkan nama Indonesia dan Islam?" Inilah yang harus diperiksa dengan teliti, dan sebuah jawaban yang salah akan berakibat buruk bagi Indonesia, maupun pihak-pihak asing itu. Kejadian ini mengingatkan kita pada sikap Senator Robert E. Taft dari negeri bagian Ohio,

Amerika Serikat. Ia dalam tahun 1948 mengajukan kritik atas pengadilan terhadap diri para pemimpin Nazi di Jerman, dan menghukum mati mereka di tiang gantungan. Menurut Taft, tindakan itu melanggar Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Dan untuk sikapnya membela kebenaran itu, ia kehilangan pencalonan untuk menjadi Presiden Amerika Serikat.

Dalam kasus pengeboman di Bali itu, sikap Emha Ainun Nadjib dan Dr. Adnan Buyung Nasution SH itu jelas menimbulkan keberpihakan kepada Abu Bakar Ba'asyir. Dari situ muncul penilaian, sikap mereka itu memiliki landasan empirik dan semangat orang-orang asing yang menggangap Ba'asyir terlibat dalam kasus ini, tidak memiliki landasan empirik. Tentu saja kita tidak boleh gegabah menyimpulkan demikian, karena kita adalah negara besar dan memiliki Undang-Undang Dasar (UUD), yang dalam pembukaan UUD disebutkan untuk mendirikan negara yang adil dan makmur. Kalau kita menyimpang dari hal itu, berarti kita tidak setia kepada UUD itu, yang kita buat sendiri dan seharusnya kita pertahankan habis-habisan.

Tetapi, sikap sama tengah seperti ini, memang tidak populer. Lebih mudah untuk mengikuti salah satu dari dua buah pendapat tersebut: "Abu Bakar Ba'asyir memang terlibat dengan kasus pengeboman di atas, atau sebaliknya ia tidak bersalah sama sekali." Sikap tidak populer ini jarang diambil orang, karena menampilkan pendapat pertama maupun pendapat kedua. Dengan kata lain, sikap ini memang tidak populer, tetapi harus kita ambil, kalau kita cinta kepada undang-undang sendiri. Penilaian dini, baik yang pro dan kontra, mengenai keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir dalam kasus peledakan bom di Denpasar itu, sama artinya dengan mengkhianati UUD kita sendiri. Karenanya, mau tidak mau kita harus mengambil sikap tegas, yaitu melakukan tindakan berdasarkan hukum yang tuntas tentang hal itu. Sikap lain kita tidak terima karena kita sudah terlalu lama menderita akibat penyimpangan-penyimpangan serius atas UUD kita sendiri.

Emha Ainun Nadjib, dalam wawancara Radio Ramako, menyatakan bahwa Umar Farouq yang kini ditahan CIA di Amerika Serikat adalah pria kelahiran Ambon dan dengan demikian seorang warga negara asli Indonesia. Dengan demikian, pengakuan bahwa Abu Bakar Ba'asyir adalah bagian dari jaringan internasional Al-Qaeda, tidak dapat diterima. Ini tentu saja bertentangan dengan versi pihak Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Umar Farouq adalah pria Kuwait yang beroperasi dan kawin lagi di Tanah Air kita. Salah seorang anak buahnya adalah Abu Bakar Ba'asyir. Manakah di antara dua versi itu yang dapat diterima? Tentu saja hanya kenyataan empirik mengenai Umar Farouq itu yang dapat dibenarkan. Berarti, harus ada orang dari pihak ketiga untuk memberikan kesaksian tentang mana yang benar dari kedua versi di atas.

Karena itu, penulis mengusulkan agar dibentuk sebuah komisi independen yang harus meneliti kenyataan empirik mengenai Umar Farouq itu. Orang Ambon, bagaimanapun juga tentu berbeda dari orang kelahiran Kuwait, sehingga dengan pertemuan langsung, antara satu-dua orang anggota komisi independen itu dengan Umar Farouq, akan memungkinkan mereka menetapkan adakah pria tersebut memang orang Ambon atau orang Kuwait. Kalau ia ternyata orang kelahiran Ambon berarti pengakuannya akan Abu Bakar Ba'asyir seorang teroris internasional otomatis gugur, dan ia haruslah dihukum karena menuduh dengan cara fitnah, seorang warga negara Indonesia bernama Abu Bakar Ba'asyir. Kalau yang terjadi justru sebaliknya, pengakuan Umar Farouq mempunyai nilai yang sangat tinggi, dan pemeriksaan lebih mendalam harus dilanjutkan, atau klaim bahwa Ba'asyir tidak berdosa harus diragukan.

Demikianlah, usul jalan tengah dari penulis melalui tulisan ini, yang sangat berbeda dari apa yang dikemukakan Emha Ainun Nadjib, Dr. Adnan Buyung Nasution dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Mereka melihat masalahnya dari sudut pro dan kontra sehingga mereka lupa akan perlunya verifikasi empirik,

yaitu dengan membentuk sebuah komisi independen. Usul pembentukan komisi tersebut semata-mata didasarkan pada obyektifitas sikap dan pandangan, sehingga memiliki kredibilitas yang cukup tinggi. Obyektifitas ini sangat diperlukan untuk menilai sikap dan pandangan kita dalam menentukan secara hukum formal, mana yang benar antara dua versi yang bertentangan mengenai sebuah kejadian. {}



Kepala Sama Berbulu, Pendapat Berlain-lain

Pepatah di atas sudah sangat terkenal dalam bahasa kita, karena demikian banyak ia dilakukan dalam praktek kehidupan. Maksudnya adalah, kita sama-sama mempunyai rambut, tetapi pemikiran tetap berbeda. Jadi dalam ajaran Islam, satu ke lain orangpun terdapat pluralitas/kemajemukan pendapat, ini diterima sebagai prinsip pengaturan hidup bermasyarakat: "perbedaan para pemimpin adalah rahmat bagi umat" (*ikhtilâf al-'immah rahmat al-ummah*). Prinsip ini sangat dipegang teguh dalam kehidupan kaum muslimin, sehingga kita lihat perbedaan pandangan sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, karenanya kaum muslimin hanya dapat dipersatukan dalam masalah-masalah dasar belaka, seperti keharusan adanya keadilan dan sebagainya.

Keluarga penulis sendiri merupakan contoh yang tepat akan pluralitas pandangan. Penulis sendiri menjadi Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB, adik penulis menjadi ketua umum organisasi kaum ibu Al-Hidayah (yang oleh sementara orang dianggap mendukung Partai Golkar), dan adik penulis mengikuti sebuah partai politik sempalan (serta sekarang menjadi Wakil Ketua Tanfidziyah PBNU). Tiga orang yang lain tidak mau memasuki parpol ataupun organisasi non-profesional. Ada semacam kesepakatan antara penulis dan adik-adiknya, kami berenam tidak akan

membicarakan aspirasi, partai politik atau organisasi apapun. Dengan demikian terhindarlah kami dari perdebatan pendapat, yang biasanya berjalan cukup tajam.

*****

Habib Rizieq, pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Dalam pandangannya, proses penangkapan itu tidak berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, karenanya menjadi cacat hukum dan ilegal. Ketika protesnya itu tidak didengarkan oleh aparat keamanan, ia pun meminta para pengacaranya untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Karena gugatanya itu, maka Polda Metro Jaya segera mengirimkan utusan untuk berunding. Hasil perundingan itu seperti tersirat dalam pemberitaan media massa, akhirnya membuahkan sebuah cara penyelesaian yang unik: ia mencabut tuntutanya dari pengadilan, tetapi oleh pihak kepolisian ia diberi status yang lebih ringan yaitu dirubah dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah (*house arrest*).

Kejadian itu menunjukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu bahwa Habib Rizieq masih menggangap kepolisian sebagai penyelenggara keamanan dan pemeriksa hukum dalam negeri yang memiliki wewenang memeriksa dirinya. Ini berarti, ia masih mengakui sistem hukum yang berlaku di negeri kita, dengan demikian ia mengakui wujud negara yang ada, yang oleh sementara kalangan disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, apapun yang ia lakukan, masih dalam kerangka yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ia tidak menyimpang dari pengakuan akan adanya negara, berarti juga kepada sistem hukumnya. Berarti, ia tetap berada dalam kerangka legal yang ada, dan dilindungi oleh kerangka tersebut.

Dengan demikian, Habib Rizieq melindungi dirinya secara legal, betapa jauhnya sekalipun pandangan yang dianutnya dari pandangan lembaga kenegaraan dan lembaga hukum yang ada.

Dengan demikian, ia menjaga dirinya dari tindakan apapun yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, boleh jadi ia melanggar hukum, tetapi justru hukum itulah yang melindunginya dari tindakan apapun oleh negara atas dirinya. Secara teoritis ia terlindung dari tindakan yang tidak berdasarkan hukum, siapapun yang melakukannya. Dengan kata lain, ia memiliki hak asasinya sebagai manusia, yang sekaligus diperolehnya dari kedudukan sebagai warga negara sebuah bangsa yang berdaulat.

Prinsip inilah yang paling penting untuk dipegang oleh seseorang dalam negara ini, yang katanya memiliki kedaulatan hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang dasar-lah yang memberikan perlindungan hukum tersebut, yang membedakannya dari subyek politik. Sebagai seorang penduduk biasa, Habib Rizieq memperoleh perlindungan politik dari tindakan apapun, namun justru secara politik pula ia sering menganggu hak-hak warga negara yang lain, seperti ketika ia memerintahkan *sweeping*. Tindakan untuk mengatasi hal itu adalah tindakan hukum, yang secara teoritis dapat dikenakan atas dirinya. Namun, ia juga memperoleh perlindungan hukum, untuk tidak terkena tindakan hukum lebih jauh dari itu. Prinsip inilah yang melindungi sekaligus mengekang langkah-langkahnya, agar tidak melanggar hukum dan merugikan orang lain. Namun, perlindungan hukum itu juga mencegahnya dari tindakan politik yang tentu merugikan dirinya, dengan kata lain ia masih bergerak dalam koridor hukum yang berlaku di negeri ini.

*****

Lain halnya dengan Abu Bakar Ba'asyir, yang sejauh ini menolak memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, terlepas dari kenyataan pihak kepolisian "mengambilnya" dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Solo dengan cara yang prosedural salah dan memenuhi ketentuan hukum. Namun,

penolakannya untuk memberikan keterangan hukum, menempatkan tokoh ini dalam kedudukan yang tidak sama dengan Habib Rizieq. Ini tentu akan membawakan konsekuensi-konsekuensinya sendiri. Dengan demikian menjadi nyata, dua orang yang dalam status hukum berkedudukan sama, ternyata dapat mengalami perlakuan yang sangat berbeda satu dari yang lain. Benarlah kata pepatah di atas, "kepala orang sama-sama berbulu pendapat berlain lain" artinya sama-sama memiliki rambut, tapi pemikiran dapat berbeda.

Dengan menolak memberikan keterangan hukum, untuk kepentingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Abu Bakar Ba'asyir menempatkan diri di luar wewenang hukum. Dengan demikian, ia menjadi orang yang tidak menganggap negara dan hukum memiliki wujud/eksistensi, dan sudah tentu juga ia tidak dapat bersikap terus demikian, maka negara harus menghindarkan adanya dua buah eksistensi yang berlainan: wujud negara di satu sisi, dan keadilan atas tokoh tersebut di sisi lain. Negara memiliki hak hukum untuk menganggapnya sebagai pemberontak yang melanggar Undang-Undang Dasar, dan dengan demikian dapat memilih salah satu dari dua alternatif berikut: mengusir atau menghukum mati tokoh tersebut. Ini adalah konsekuensi logis dan legal dari tindakan yang dilakukannya sendiri dan Islam-pun dapat membenarkan hal tersebut.

Ketegasan pihak pemerintah diperlukan, dalam hal ini untuk mencegah anarkhi hukum. Ini juga pernah terjadi di masa pemerintahan Bung Karno dan Panglima Besar Soedirman sebagai panglima angkatan perangnya, yang memerintahkan Sekarmadji Kartosuwiryo untuk mendirikan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat. Dasar perintah itu adalah ketentuan Perjanjian Renville, bahwa TNI harus ditarik dari kawasan tersebut ke Jawa Tengah. Untuk menghindarkan *vacuum* di kawasan itu, yang akan dimanfaatkan oleh pasukan-pasukan Belanda, maka dibentuklah DI/TII, sudah tentu perintah itu diketahui oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara.

Namun, Sekarmadji Kartosuwiryo terus menggunakan DI/TII untuk membunuh rakyat, melakukan pembakaran dan merampok setelah kemerdekaan tercapai dan penyerahan kedaulatan berlangsung. Ini berarti pemberontakan, dan pemerintah menumpas pemberontakan itu yang berakhir tahun 1962. Di saat itu, Presiden Soekarno yang juga menjadi kepala pemerintahan, memerintahkan Sekarmadji Kartosuwiryo diadili oleh Mahkamah Militer yang kemudian menjatuhkan hukuman mati, atas diri tokoh dan teman dekat Bung Karno itu. Bung Karno tidak memberikan grasi/pengampunan kepadanya, karena Kartosuwiryo telah memerintahkan pembunuhan rakyat dan perampokan. Bung Karno bahkan memerintahkan pelaksanaan hukum mati atas diri tokoh itu, dan menghilangkan jejak penguburannya di Kepulauan Seribu. Persoalannya tidak rumit kalau kita memiliki keberanian, bukan? {}

TAK CUKUP DENGAN PENAMAAN

Dr. Djohan Effendi menulis dalam sebuah harian nasional, bahwa baik Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba'asyir dilaporkan sebagai pendiri gerakan Jama'ah Islamiyah, baik di Malaysia maupun Singapura. Organisasi inilah yang oleh intelijen Amerika Serikat (AS) maupun Australia, dianggap sebagai gerakan teroris internasional. Bahkan, oleh pihak intelijen Malaysia dan Singapura, organisasi itu dilaporkan telah merencanakan tindak kekerasan di kedua negara tersebut. Pers internasional menyebutkan, baik Sungkar maupun Ba'asyir, sebagai pemimpin spiritual organisasi tersebut. Benarkah organisasi itu merupakan persambungan gerakan teroris Al-Qaeda seperti yang disangkakan AS, yang berpangkalan di Afghanistan di masa pra-pemboman atas AS? Sejarahlah yang akan menjawab pertanyaan itu, setelah pemeriksaan teliti selama bertahun-tahun.

Tulisan Dr. Djohan Effendi itu segera dijawab dalam harian yang sama, oleh Fauzan Al-Anshori, Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia, beberapa hari kemudian. Namun, jawaban itu tidak menyangkal keterangan Dr. Djohan Effendi akan kebenaran ungkapan, maupun penyebutan oleh pers internasional bahwa Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir sebagai pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah. Yang dilakukan Fauzan Al-Anshori dalam jawaban tertulis itu, adalah penamaan Dr.

Djohan Effendi selaku salah seorang yang disebutnya sebagai kaum pemikir muslim neo-modernis. Kelompok terakhir ini disebut-sebut dalam disertasi Greg Barton dari Deakin University, Australia, sebagai pihak yang meneliti dan menggunakan warisan budaya Islam lama untuk menafsirkan secara kontemporer tempat Islam dalam kebudayaan modern.

Greg Barton menyebutkan, Dr. Djohan Effendi, Dr. Nucholish Madjid, almarhum Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo, dan diri penulis sendiri, sebagai pemuka pendekatan neo-modernis itu. Orang boleh saja suka atau tidak suka terhadap kelompok pemikir tersebut, bahkan juga dapat menerima atau menolaknya sebagai cara berpikir yang absah dalam Islam. Tetapi faktanya, pemikiran dan kelompok pemikir seperti itu memang ada dalam dunia Islam, jadi tidak dapat ditolak secara empirik. Demikian pula, reaksi atasnya adalah sesuatu yang wajar-wajar saja, seperti yang diperlihatkan oleh tokoh gerakan Majelis Mujahidin yang membuat jawaban tertulis atas pendapat Dr. Djohan Effendi itu.

*****

Lagi-lagi terbukti adanya pendapat yang berbeda dalam gerakan Islam mengenai sesuatu yang dianggap penting. Tidakkah ini menunjukkan perbedaan antara mereka di saat-saat yang sangat menentukan seperti di masa kini? Jawabannya, persoalan itu tergantung dari sikap kaum muslimin sendiri. Sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin dapat dibagi dua, dalam pendekatan mereka kepada perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Di satu pihak, ada kaum muslimin yang merasakan tidak ada keharusan bergabung dalam gerakan-gerakan Islam tersebut. Di lain pihak, ada pengikut gerakan-gerakan Islam modernis dan tradisional, dan di samping mereka yang mengikuti strategi budaya atau strategi ideologis. Inilah yang senantiasa harus diingat, kalau kita berbicara tentang Islam Indonesia saat ini.

Seringkali, orang berbicara tentang Islam tanpa

memperhatikan kenyataan tersebut, terjadilah klaim yang sangat berani, bahwa orang yang mengemukakan pendapat tersebut berbicara atas nama Islam secara keseluruhan. Padahal, ia sebenarnya hanya berbicara atas nama kelompok atau pemikirannya sendiri yang dalam bahasa teori hukum Islam (*ushûl fiqh*) disebutkan sebagai langkah menyebutkan hal-hal umum, dan dimaksudkan untuk hal-hal khusus (*ithlâqu al-'âm wa yurâdu bihi al-khâs*). Di sini, terjadi perpindahan dari seorang pengamat yang seharusnya bersikap obyektif, menjadi seorang aktivis perjuangan yang harus sering bersikap subyektif.

Selama kaum muslimin belum dapat menghilangkan klaim-klaim tersebut di atas, selalu akan terjadi kerancuan berpikir, apalagi kalau hal itu disampaikan melalui media massa. Pantaslah kalau kaum muslimin pada umumnya dibuat kebingungan, mungkin termasuk oleh penulis sendiri. Ini karena posisi penulis, yang sering dikacaukan (dan juga mengacaukan) antara peranan sebagai pengamat dan peranan sebagai aktivis perjuangan gerakan Islam. Lima belas tahun penulis menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan sekarang pun masih menjadi Mustasyar (penasehat-nya). Warga Nahdlatul Ulama (NU) saja sering kebingungan akan hal itu, apalagi orang lain.

*****

Dalam sebuah pendekatan, yaitu ilmiah atau tidak subyektif adalah persyaratan mutlak bagi sebuah pandangan/pendapat yang baik. Karena itu, dalam pendekatan sesulit apapun, emosi tidak boleh digunakan, walaupun kita berada dalam keadaan terjepit/tersudut. Argumentasi yang baik harus kering dari emosi untuk mencapai obyektivitas yang dimaksudkan. Kalau ini tidak diperhatikan, maka pendapat itu akan ditertawakan orang dan tidak diterima sebagai sesuatu yang rasional oleh publik, sebuah pendapat/pandangan yang dianggap sebagai sesuatu yang me-

malukan. Salah-salah, pandangan atau pendapat subyektif dan penuh emosi seperti itu akan ditertawakan oleh masyarakat, dianggap sebagai lelucon yang tidak lucu.

Demikian pula, sanggahan saudara Fauzan atas keterangan Dr. Djohan Effendi itu, yaitu pernyataan yang berisi "tuduhan" bahwa Dr. Djohan Effendi adalah anggota kelompok kaum neo-modernis Islam di negeri kita. Kalau Dr. Djohan Effendi menggunakan rekaman atas keterangan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, mengenai peranan mereka dalam pembentukan Jamaah Islamiyah, sehingga berani mengambil kesimpulan yang dikemukakannya, sanggahan saudara Fauzan justru tidaklah demikian. Yang dilakukan, hanyalah penamaan atas Dr. Djohan Effendi sebagai anggota kelompok neo-modernis Islam di negeri kita. Tentu orang bertanya, manakah obyektivitas sanggahan tersebut? Ternyata, yang dilakukan hanyalah penamaan di atas belaka, tanpa memberikan argumentasi apa-apa. Tidakkah langkah ini justru akan ditertawakan? Tentu saja hal itu akan dilakukan penulis, jika tidak menyangkut sesuatu yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia, seperti tragedi terorisme.

Dari kritikan di atas, menjadi jelas bahwa sanggahan tersebut sangat memalukan, karena tidak disertai argumentasi apapun. Bahwa keterlibatan Dr. Djohan Effendi dalam kelompok neo-modernis Islam di Tanah Air kita adalah informasi yang benar. Dr. Djohan Effendi, dan juga penulis, tidak perlu merasa malu dengan penamaan itu. Selama kita menghormati dan bersikap benar terhadap sebuah fakta, selama itu pula kita tidak perlu merasa malu atau takut kepada siapapun. Sedangkan sanggahan terhadap sikap itu, kalau hendak dibantah atau ditolak, hendaknya berdasarkan argumentasi yang kuat dan rasional. Bukannya dengan penamaan belaka bahwa si fulan anggota kelompok ini atau warga kalangan itu. {}

Memandang Masalah dengan Jernih

Dalam keterangannya yang dimuat *Far Eastern Economic Review* (FEER) edisi 12 Desember 2002, Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew, menyatakan dia telah bertanya kepada orang-orang muslim gerakan radikal dari Asia Tenggara. Pertanyaannya, apa sebab mereka mengubah citra moderat kaum muslimin di Asia Tenggara menjadi radikalisme berlebihan? Bagi penulis, pendapat Lee Kuan Yew tidak dapat diperhitungkan dalam pandangannya mengenai Islam di Indonesia. Karena itu dia mengajukan pertanyaan yang salah, seperti yang diajukannya kepada gerakan Islam radikal: Mengapakah Anda membuat citra Islam di Asia Tenggara menjadi begitu buruk dengan meledakkan bom? Sedangkan tadinya citra agama Islam di kawasan ini begitu moderat? Mengapa penulis menganggap pertanyaan itu salah, dan karena itu menilainya naif? Bukankah ini sebuah "tuduhan berat" terhadap seorang pengamat sekaliber Lee yang kawakan menguasai dunia perpolitikan di Singapura?

Tentu saja penulis mempunyai dasar yang cukup bagi "tuduhannya" itu. Pertama, karena hal itu di kemukakan oleh tokoh tersebut, dengan sendirinya didengarkan oleh banyak pihak, terutama pengambil keputusan di Barat. Karena itu, kalau memang benar pernyataan Lee Kuan Yew itu salah atau naif, maka harus segera dikoreksi. Koreksi itu harus segera dilakukan sebe-

lum pernyataan itu disimpulkan sebagai "kebenaran" oleh para pengambil keputusan di Barat. Demikian juga sebelum "kebenaran" tersebut dipakai sebagai landasan berpikir oleh para pengamat di seluruh dunia.

Walhasil, pendapat dari seorang tokoh seperti pimpinan Singapura itu haruslah kita bedah dan koreksi bilamana perlu. Kegagalan melakukan hal ini amat sangat merugikan bagi perkembangan Islam di seluruh dunia. Karenanya tulisan ini dibuat sebagai referensi atas ucapannya tersebut.

Kedua, agama Islam selama ini telah menjadi korban dari sekian banyak anggapan. Karenanya diperlukan "keberanian moral" untuk memulai langkah koreksi atas kesalahan demi kesalahan yang telah terjadi, guna menghindari terulangnya hal itu di masa depan. Bukankah tidak ada yang lebih baik untuk "memulai" deretan responsi, selain menerangkan masalah sebenarnya dari pernyataan Lee Kuan Yew itu? Sebuah responsi yang sehat, yaitu dengan mempertanyakan dasar-dasar apa yang digunakan Lee Kuan Yew untuk menyusun pernyataannya itu. Begitu juga tinjauan "dari dalam" Islam sendiri, adalah sesuatu yang sangat penting guna "membaca" kebenaran sebuah pernyataan "orang luar." Tulisan ini justru dikemukakan dengan tujuan memperoleh pandangan yang tepat tentang gerakan radikal Islam di negeri kita.

Dalam mengajukan pernyataan di atas, Lee Kuan Yew nampak mempersamakan kekuatan gerakan Islam radikal dengan gerakan Islam moderat di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah kesalahpandangan di kalangan "para pengamat." Tetapi, bagaimanapun juga Lee Kuan Yew harus disanggah, jika ia tidak mengemukakan kebenaran. Kenyataannya, gerakan Islam radikal itu tidaklah besar, tetapi sanggup melakukan kekerasan. Hal itu terjadi karena "kesalahan" prinsipil yang dilakukan pemerintah/eksekutif di negeri kita. Hal ini juga terjadi karena kebanyakan pengamat menganggap berbagai gerakan Islam radikal sebagai sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya, muslim yang "terlibat"

gerakan radikal itu, tidaklah banyak. Katakanlah, mereka hanya berjumlah 50.000-an orang, namun jumlah itu tidak ada artinya di hadapan 200 juta umat muslim yang moderat. Hanya saja, "kelompok" moderat ini tidak mempunyai dukungan materiil yang kuat dan minimnya *skill*/kecakapan, lain halnya dengan gerakan Islam radikal. Selain itu, gerakan Islam moderat belum memiliki kohesi organisatoris, yang diperlukannya untuk maju ke depan.

Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi ketakutan berlebihan peradaban "Islam" yang merasa dikalahkan oleh peradaban "Barat". Padahal kalau dilihat secara budaya, persoalannya akan jauh berlainan dari pandangan tersebut. Kalaupun "Islam" dikalahkan "Barat", itu mungkin hanya mencakup teknologi, jaringan perdagangan dan komunikasi. Namun di bidang-bidang peradaban kultural lainnya, secara relatif sangat kuat kedudukannya. Karenanya, kita tidak sah merasa "kalah" oleh keadaan itu. Kita tidak perlu "membuktikan" kehebatan kita melalui penggunaan kekerasan (termasuk terorisme), yang berakibat kematian orang-orang yang tidak bersalah.

Salah satu tanda pendangkalan agama yang terjadi di kalangan gerakan radikal Islam adalah upaya memandang hal-hal yang berbau kelembagaan/institusional sebagai satu-satunya ukuran "keberhasilan" kaum muslimin. Padahal kultur Islam lainnya, seperti, rebana, sufisme dan sebagainya, cukup menonjol, bahkan kaum muslimin berhasil menolak pengaruh "Barat."

Lihat saja siaran televisi, yang semakin lama, semakin menunjukkan warna Islam. Di sini kita melihat, tampak kebangkitan kultural Islam dalam perpaduan yang lama dan yang baru, seperti artis yang sudah tidak malu lagi *mejeng* membawakan acara keagamaan pada bulan Ramadhan. Jadi, kebesaran Islam tidak ditentukan oleh pakaian jubah yang dikenakan, atau jenggot, sorban dan cadar yang dikenakan, yang menutup seluruh badan dan wajah perempuan. Seorang perempuan yang menggunakan kerudung "biasa" sama Islamnya dengan yang menggunakan

cadar. Karena itu, pandangan yang membedakan antara mereka, adalah pandangan yang tidak mengenal kaum muslimin dan hakikat Islam.

Dalam perdebatan dengan Samuel Huntington, dengan teori perbenturan budaya (*clash of civilization*), penulis menyatakan, bahwa dalam teori perbenturan budaya Islam dan Barat itu, Huntington hanya melihat pohon, tanpa mengenal hutannya. Memang ada pohon dalam jumlah kecil yang berbeda dari yang lainnya, tetapi keseluruhan hutannya justru memperlihatkan pohon yang sama dengan jumlahnya lebih besar. Maksudnya, puluhan ribu kaum muslimin, tiap tahun belajar di Barat dalam berbagai bidang, tentu saja kalau ada yang radikal di antara mereka jumlahnya sangat kecil, dan tidak dapat dijadikan ukuran bahwa mereka mewakili Islam. Arus belajar "ke Barat" sangat besar, sehinga pertentangan Islam melawan Barat, tidak usah dikhawatirkan, apalagi dijadikan momok.

Karena itu ungkapan Lee Kuan Yew yang memandang gerakan Islam radikal, secara berlebih-lebihan, sebagai representasi umat Islam tersebut, jelas tidak berada pada tempat sebenarnya. Inilah yang harus diubah, yaitu penggunaan kelompok Islam radikal sebagai ukuran bagi Islam dan kaum muslimin yang mayoritas justru bersikap moderat dalam hampir semua hal. Untuk perubahan itu, kita harus bersabar sedikit, untuk menunggu hasil pemilihan umum yang akan datang, yang menurut penulis akan menunjukkan keunggulan yang sangat besar dari gerakan moderat dalam Islam. Penulis dapat mengatakan hal ini, karena dalam sehari dapat melakukan tiga sampai empat kali komunikasi langsung dengan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Ini karena penulis dan partai politik yang dipimpinnya, tidak dapat bersandar pada media domestik yang masih "lintang pukang" keadaannya.

Juga harus ada faktor lain yang harus diperhitungkan, yaitu peranan pemerintah/eksekutif yang sangat menentukan. Kalau

pihak itu takut kepada gerakan Islam radikal, seperti yang terjadi dewasa ini di Indonesia, maka gerakan tersebut akan menjadi berani dan melanggar undang-undang. Karena itu diperlukan keberanian bersikap tegas (kalau perlu bertindak keras), terhadap unsur-unsur garis keras yang mengacaukan keamanan.

Penulis tidak setuju dengan RUU Antiterorisme, tetapi diperlukan juga keberanian secara fisik berhadapan dengan para pelaku kekerasan itu. Hal-hal inilah yang harus dimengerti oleh orang-orang seperti Lee Kuan Yew. Sederhana dalam konsep, tapi sulit dilaksanakan bukan? {}

KEKURANGAN INFORMASI

Pertemuan itu diadakan di sebuah kuil/gereja milik sebuah agama baru di Jepang, pecahan dari agama Buddha. Dari pihak penulis, hadir Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen Rl) untuk daerah Kansai, Hupudio Supaidi. Dari pihak Jepang datang berpuluh-puluh agamawan dari berbagai agama, termasuk tokoh-tokoh Kristen Protestan-Katolik serta seorang peserta wanita dari Partai Komunis Jepang. Ia juga termasuk seorang legislator lokal yang menjadi anggota dewan kota *(town consellor*) dari Sakai, yang berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa. Sakai adalah kota satelit di Osaka, Jepang, yang sekarang sedang berusaha menjadi sebuah provinsi/*prefectures* sendiri, lepas dari Osaka.

Dalam pertemuan itu, penulis juga ditemani oleh Mr. Hitoshi Kato, seorang politisi lokal yang mengundang penulis ke Sakai dan sang keponakan Hisanori Kato, seorang ahli tentang negara kita dan dapat berbahasa Indonesia. Ia bekerja di Manila dan kembali ke Sakai hanya untuk menemani penulis. Hitoshi Kato datang ke Indonesia pada bulan Juli lalu, dan mencoba melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta dengan Universitas Hagoromo yang memiliki mahasiswa 2000 orang, padahal baru didirikan beberapa bulan yang lalu di Sakai. Ia mempunyai persepsi yang

'salah' tentang Islam dan kaum muslimin, sebagai kaum penjarah dan teroris, akibat pemberitaan media massa di Jepang tentang peledakan bom di Bali. la menyadari, ratusan ribu warga daerah Kansai, di mana Osaka dan Sakai terletak, memandang Bali sebagai tujuan pariwisata yang harus didatangi berkali-kali.

Ternyata, kesan mereka itu salah sama sekali, begitu ia sampai di Jakarta, ia bertemu dengan orang-orang yang ramah, dan banyak di antaranya yang dapat dijadikan kawan. Ia bertemu penulis, dan meminta keterangan tentang Islam dan kaum muslimin. Tentu saja, penulis menyatakan tindakan para teroris itu —kalau benar dilakukan oleh gerakan Islam- adalah sebuah penyimpangan kecil dari gerakan Islam sendiri, yang terutama banyak dikuasai oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jadi tidak benar, anggapan bahwa mayoritas kaum muslimin di negeri ini menyetujui peledakan bom di Bali yang dilakukan oleh gerakan Islam. Karena tindakan itu akan dianggap diskriminatif oleh pemeluk-pemeluk agama Hindu, yang justru karena penduduk Bali mayoritas beragama Hindu. Jelas gerakan Islam tidak menyetujuinya, dan ini jelas bertentangan dengan agama Islam yang memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan terhadap kaum minoritas.

Perubahan pandangan itu, membuat Hitoshi Kato menganggap perlu mengundang penulis ke Sakai. la ingin agar penulis menjelaskan sendiri kepada penduduk Jepang di Sakai, bahwa apa yang digambarkan tentang Islam oleh media massa Jepang selama ini adalah sesuatu yang salah, bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Tentu saja, penulis menyambut baik ajakan itu, dan menyediakan waktu untuk itu pada minggu pertama bulan November 2002. Berbagai acara digelar, termasuk kunjungan kepada Walikota Sakai dan pertemuan di Tokyo dengan *Ambassador* Noburo Matsunaga dan Pendeta Niwano, keduanya teman penulis yang akrab sejak beberapa tahun yang lalu. Sayang sekali, penulis tidak bertemu dengan Daisaku Ikeda,

pendiri gerakan Buddhis Soka Gakkai, yang memiliki sebuah Universitas —tempat penulis menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang humaniora pada bulan April yang lalu.

Dalam rangkaian pertemuan-pertemuan di Sakai itu -yang, juga diliput oleh koran Mainichi Shimbun (yang memiliki edisi Jepang dan Inggris), penulis menjelaskan hakekat Islam sebagai agama perdamaian, yang disalah-mengerti oleh sebagian kecil kaum muslimin sendiri, dengan tindakan-tindakan penuh kekerasan yang mereka lakukan. Menurut penulis, hal ini mereka lakukan karena dua hal. Di satu sisi, mereka hanya mementingkan institusi (kelembagaan) dalam Islam, yang sekarang tengah terancam di mana-mana dalam masyarakat yang berteknologi maju. Mereka lupa, bahwa Islam juga membawakan kultur/ budaya kesantrian, yang justru sekarang semakin berkembang sebagai pertahanan kaum muslimin dalam menghadapi "serangan teknologi maju" itu. Di sisi kedua, mereka yang melakukan terorisme itu tidak pernah mendalami Islam sebagai bidang kajian, karena itu mereka tidak mengenal kultur/ budaya santri itu. Sebagai akibatnya, lalu mereka langsung mengambil dari sumber-sumber tertulis Islam (*al-adillah al-naqliyyah*), tanpa mengetahui deretan penafsiran yang sudah berjalan berabad-abad, untuk memahami kitab suci al-Qur'ân dan Hadits Nabi Muhammad Saw melalui perubahan-perubahan penafsirannya. Inilah yang membuat mengapa Islam memahami toleransi dan menerima pluralitas, yang berujung pada penerimaan mayoritas muslim di negeri ini akan Pancasila dan penolakan mereka atas negara Islam melalui penghapusan Piagam Jakarta dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam keterangannya, penulis menyatakan bahwa di Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok kecil dalam gerakan Islam yang masih menginginkan adanya negara Islam. Namun, mereka selalu dikalahkan dalam setiap upaya formal dalam melakukan hal itu. Penulis tambahkan, ia memiliki keyakinan bahwa upaya-upaya tersebut tidak akan pernah mencapai hasil karena

tradisi kesantrian tersebut justru semakin berkembang, kini dan di masa depan, dalam bentuk kultural dan bukan dalam bentuk politik. Ini rupanya ditangkap oleh mereka yang bertemu dengan penulis dan, mudah-mudahan, membuat mereka merasa aman dengan Islam.

*****

Sisi lain yang juga disinggung penulis, adalah kekhususan Islam —khususnya, di kawasan Asia Tenggara, yang mengembangkan pendidikan pesantren dengan nama bermacam-macam, seperti pondok di Malaysia-Thailand-Kamboja serta Madrasah di Philipina Selatan. Lembaga tersebut membuat prioritasnya sendiri, yang berbeda dari prioritas pendidikan yang di negara kita dikenal sebagai pendidikan umum. Pendidikan umum itu tidak memberikan tempat penting kepada etika/akhlak, dan sama sekali tidak menghiraukan pendidikan agama. Hal itu berakibat hilangnya pertimbangan moral dari pendidikan dan hanya mementingkan penguasaan ketrampilan dan pengetahuan belaka.

Sebenarnya, kalau ditinjau secara mendalam, sikap "garang" yang ditunjukkan berbagai gerakan-gerakan Islam yang kecil, dan sikap menggunakan kekerasan yang diperlihatkan berbagai elemen teroris di negara kita, bersumber pada kurangnya pengetahuan akan Islam itu sendiri. Dengan mencuatnya manifestasi lahiriyah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi "Barat", mereka lalu menjadi ketakutan akan kekalahan Islam dari peradaban yang berteknologi maju. Ini tentu saja salah, karena peradaban adalah milik manusia secara keseluruhan, hingga akan terjadi proses perpindahan pengetahuan dan teknologi "Barat" itu ke seluruh peradaban-peradaban lain, termasuk peradaban Islam. Proses pergulatan antara kultur/budaya Islam dengan pengetahuan dan teknologi "Barat" itu, tentu akan mengalami perubahan bentuk di lingkungan masyarakat muslim. Inilah yang tidak pernah ditangkap mereka, hingga mereka melakukan

perlawanan yang acapkali berbentuk kekerasan dan tindakan teror.

Ini semua, juga pernah dikemukakan penulis dalam ceramah Maulid Nabi Saw di halaman kantor harian umum Memorandum di Surabaya, beberapa waktu yang lalu. Bahwa, perubahan sosial yang terjadi di Mesir, misalnya, dibawakan atau justru didorong oleh perubahan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa dan sastra nasional. Tanpa perubahan bahasa dan sastra Arab sebagai bahasa nasional, perubahan sosial di negeri itu tidak mungkin terjadi. Inilah jasa Dr. Thaha Husein dan murid-muridnya. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan bahasa dan sastra nasional, seperti dapat dilihat dalam perdebatan antara Sutan Takdir Alisyahbana dengan Sanusi Pane menjelang Perang Dunia II, walaupun tidak membawa perubahan apa-apa pada bahasa dan sastra Arab di Indonesia. Ia tetap menjadi bahasa dan sastra tradisional yang dibawakan dalam tembang/sya'ir Arab yang demikian banyak ditampilkan di Indonesia kini, dengan iringan musik campuran antara yang lama dan yang baru. Ini terjadi, karena bahasa dan sastra Arab di negeri ini dianggap sebagai "bahasa dan sastra Islam", karena memang tidak menjadi bahasa nasional. Sebab, bahasa dan sastra nasional kita berasal dari bahasa Melayu, seperti kita ketahui selama ini. Proses yang sangat menarik, bukan? {}

GANDHI, ISLAM DAN KEKERASAN

Ulang tahun ke-101 Mahatma Gandhi, bulan Oktober yang lalu dirayakan secara sederhana. Tokoh pejuang berkebangsaan India ini terkenal dengan ajaran yang menentang kekerasan (*ahimsa* dan *satyagraha*), yang digunakannya dalam perjuangan menuntut kemerdekaan secara damai bagi India dari tangan Inggris. Untuk itu, ia meninggalkan praktek hukum yang sangat menguntungkan di Afrika Selatan, dan kembali ke India untuk memimpin perjuangan kemerdekaan. Karena hal itu dilakukannya tanpa kekerasaan, maka kita yang melakukan peperangan melawan Belanda dalam menuntut kemerdekaan, cenderung untuk meremehkan arti perjuangan damai yang mereka lakukan. Ini adalah wajar saja, yang tidak wajar adalah kecenderungan memandang rendah perjuangan kemerdekaan di India itu. Sikap inilah yang perlu kita ubah, agar tidak mewarnai hubungan kita dengan negeri-negeri lain.

India, setelah perang kemerdekaan usai, ternyata menumbuhkan dua hal yang sangat penting, yaitu ketundukan kepada hukum dan berani mengembangkan identitas bangsa tersebut. Ketundukan kepada hukum itu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika seorang tamtama polisi mencatat dalam buku catatannya hal-hal yang membuat ia menahan/menangkap seseorang. Setelah keterangan tertulis itu dibacakan kepada si

tertangkap, maka ia diminta menandatangani "pra/berita acara polisi" itu, maka dokumen yang bertanda tangan warga itu, dijadikan pegangan untuk memeriksanya dengan teliti dan mengadilinya di pengadilan, kalau memang ia pantas dihukum. Dengan kata lain, hanya orang yang memang ada indikasi kuat secara obyektiflah yang dapat ditahan, bukannya keterangan oknum polisi tersebut. Karenanya warga negara India lebih banyak dilindungi oleh hukum, dibandingkan warga negara kita di negeri sendiri.

Namun, ini tidak berarti undang-undang (*law*) di India sudah mencerminkan keadilan, karena memang tidak demikian halnya. Banyak undang-undang yang dihasilkan *Lok Sabha* (Majelis Rendah Parlemen India), tidak menyelesaikan masalah hak-hak anak dan perempuan, dan juga perlindungan kepada kerja paksa (*bounded labour*). Kedudukan pekerja paksa itu sangat rendah secara sosial, hal ini karena diperkuat oleh agama Hindu dengan sistem kastanya. Datanglah Gandhi dengan ajakan menciptakan masyarakat tanpa kasta, dan memandang mereka dari kasta terbawah (*sudra*) sebagai *harijan* (anak Tuhan). Ternyata, penolakannya atas kekerasan menumbuhkan rasa perikemanusiaan yang sangat dalam pada diri Gandhi. Dan ini pula, yang membuat orang-orang Hindu fundamentalis/ekstrim membunuhnya pada tahun 1948.

*****

Islam juga mengajarkan hidup tanpa kekerasan. Satu-satunya alasan untuk menggunakan kekerasan, adalah jika kaum muslimin diusir dari tempat tinggal mereka *(idzâ ukhirijû min diyârihim)*. Itupun masih diperdebatkan, bolehkah kaum muslimin membunuh orang lain, jika jiwanya sendiri tidak terancam? Demikianlah Islam berjalan berabad-abad lamanya tanpa kekerasan, termasuk penyebaran agama tersebut di negeri ini. Alangkah jauh bedanya dengan sikap sementara fundamentalis/

teroris muslim di mana-mana dewasa ini. Terjadi pergolakan berdarah di sementara daerah, seperti Poso, Sulawesi Tengah dan Ambon/Maluku. Begitu juga, mereka yang berhaluan "garis keras" di kalangan berbagai gerakan Islam di sini, berlalu-lalang kian-kemari membawa pedang, clurit, bom, granat serta senapan rakitan. Perbuatan itu jelas melanggar undang-undang, tetapi tanpa ada tindakan apapun dari pemerintah.

Bahkan beberapa jenis gerakan memberlakukan pembersihan (*sweeping*) dan memberhentikan kendaraan untuk diperiksa sesuka hati. Pernah juga terjadi, dilakukan *sweeping* atas coffee house di Kemang, Jakarta, demi untuk menegakkan syari'ah Islamiah di negeri ini. Anehnya, botol-botol *sandy* dipecahkan dibuang ke lantai, karena berharga murah, sebaliknya *wishky* dan *vodka* yang berharga mahal dibawa pulang dalam keadan utuh, mungkin untuk dijual lagi. Sikap mendua yang materialistik ini memperkuat dugaan bahwa di antara para fundamentalis itu ada orang-orang bayaran dari luar. Masalahnya, mengapakah para pemimpin berbagai gerakan tersebut tidak dapat mengendalikan anak buah mereka ?

Sikap menggunakan kekerasan itu, juga tidak sedikit didorong oleh berbagai produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD I dan DPRD II) di berbagai kawasan, seperti di Sumatra Barat, Garut, Cianjur, Tasikmalaya dan Pemekasan yang berkecenderungan untuk memberlakukan syari'ah Islamiyah secara formal. Umpamanya saja dalam bentuk peraturan daerah, mereka ingin melambangkan kuatnya semangat untuk menolak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syari'ah Islamiyah saat masa Orde Baru. Jadi, sebenarnya sikap itu tidak berbeda jauh dengan orang-orang fundamentalis itu. Karenanya, sidang kabinet di waktu penulis masih menjadi Presiden memutuskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dianggap tidak berlaku. Penulis beranggapan, keputusan para pendiri negara ini termasuk 7 (tujuh) orang pemimpin berbagai gerakan Islam, untuk memisahkan

agama dan negara, masih berlaku dan belum dicabut oleh siapapun.

*****

Lalu, mengapakah ada orang-orang fundamentalis itu yang umumnya terdiri dari orang-orang muda yang terampil yang cakap secara teknis, namun tidak pernah jelas diri mereka secara psikologis? Jawabnya sebenarnya sederhana saja. Pertama karena orang-orang itu melihat kaum muslimin tertinggal jauh di belakang dari orang-orang lain. Nah, "ketertinggalan" itu mereka kejar secara fisik, yaitu menggunakan kekerasan untuk menghalangi kemajuan materialistik dan duniawi itu. Mereka lebih mementingkan berbagai institusi kaum muslimin, dan tidak percaya bahwa budaya kaum muslimin dapat mendorong mereka untuk meninggalkan kelompok-kelompok lain. Jika sudah mengutamakan budaya, maka nantinya "mengejar ketertinggalan" dengan cara penolakan atas "budaya Barat" akan dilupakan, karena kecakapan yang mereka miliki juga berasal dari "dunia Barat".

Aspek kedua dari munculnya gerakan-gerakan fundamentalistik ini adalah proses pendangkalan agama yang menghinggapi kaum muda muslimin sendiri. Mereka kebanyakan adalah ahli matematika dan ilmu-ilmu eksakta lainnya, para ahli ekonomi yang penuh dengan hitungan-hitungan rasional dan para dokter yang selalu bekerja secara empirik. Maka dengan sendirinya tidak ada waktu bagi mereka untuk mempelajari agama Islam dengan mendalam. Karenanya, mereka mencari jalan pintas dengan kembali kepada sumber-sumber teksual Islam seperti al-Qur'ân dan Hadits, tanpa mempelajari berbagai penafsiran dan pendapat-pendapat hukum *(akhwâlul hukmi)* yang sudah berjalan berabad-abad lamanya.

Karena itulah, mereka mencukupkan diri dengan sumber-sumber tekstual yang ada. Karena mereka biasa menghafal *vademecum* berbagai nama obat-obatan dan benda-benda lain,

maka dengan mudah mereka menghafal ayat-ayat dan hadits-hadits dalam jumlah besar yang menimbulkan kekaguman orang. Karena sumber-sumber tertulis itu diturunkan dalam abad ke-7 sampai ke-8 masehi di Jazirah Arab, tentu dibutuhkan penafsiran yang kontemporer dan bertanggung jawab untuk memahami kedua sumber tertulis di atas. Tetapi karena pengetahuan mereka yang sangat terbatas tentang Islam membuat mereka fundamentalis. Akibatnya bagi kaum muslimin lainnya dan bagi seluruh dunia pula sangat drastis. Tindak kekerasan yang sudah biasa mewarnai langkah-langkah mereka, dianggap oleh masyarakat dunia sebagai ciri khas gerakan Islam. {}

BERBEDA TETAPI TIDAK BERTENTANGAN

Dalam sebuah diskusi yang diselengarakan FES (*Friedrich Ebert Stiftung*) di Singapura baru-baru ini, dalam sessi pertama para peserta membicarakan konsep Samuel Huntington tentang perbenturan antar budaya (*clash of civilizations*). Yang menggemparkan, beberapa peserta membicarakan konsep itu sebagai landasan pembenaran bagi pendapat adanya para teroris dari kelompok Islam, walaupun sebenarnya Islam sebagai jalan hidup (*syari'ah*) menolak penggunaan kekerasan termasuk terorisme dalam menentang modernitas. Mengemukakan Islam sebagai jalan hidup adalah sesuatu yang wajar, karena perbedaan pandangan dalam cara hidup itu diperkenankan, yang tidak dapat diterima adalah perpecahan/pertentangan yang timbul karenanya. Dengan demikian penggunaan kekerasan (terorisme) harus ditolak.

Seorang peserta mengemukakan, bahwa di sini terjadi sebuah proses sangat menarik. Sebagai upaya pemberagaman, bukankah universalitas konsep Huntington justru harus ditolak? Bukankah yang kita inginkan, justru konsep Huntington itu hanya merupakan kekhususan? Dimanakah batasan antara yang umum dan yang khusus sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai konsep Huntington itu? Penulis menanggapi pernyataan itu dengan mengemukakan, bahwa tidak ada pertentangan antara

yang khusus dan yang umum. Dua-duanya berjalan seiring, tapi pemaksaan yang umum dengan menghilangkan yang khusus itulah yang justru harus ditolak. Dengan demikian kita menolak konsep Huntington itu dengan tidak mengingkari hak kita untuk menyatakan konsep-konsep.

Di sinilah sebenarnya terletak kepemimpinan yang diharapkan, yaitu yang dapat menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa penolakan suatu konsep adalah hal umum, namun dapat menjadi pendapat dominan dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian cara hidup kaum muslimin dapat ditegakkan, dengan tidak usah melanggar hak siapapun. Jadi yang harus ditolak adalah pemaksaan itu sendiri, bukannya sikap memberlakukan sebuah cara hidup. Inilah arti penolakan terhadap penetapan agama sebagai ideologi negara, dan arti ini sangat dalam bagi gagasan pemisahan agama dari negara.

******

Sikap para peserta untuk menolak pemaksaan sesuatu konsep, benar-benar merupakan sebuah hal yang sangat menggembirakan. Dengan sikap para intelektual, politisi, dan jurnalis Timur dan Barat itu, menjadi jelas bahwa konsep Huntington itu diperiksa bersama-sama secara teliti dan terbuka. Diakui bahwa Huntington menggunakan standar ganda dalam menyusun konsep itu. Tetapi ia juga mengingatkan kita kepada perbedaan-perbedaan yang harus dihargai, antara berbagai sistem budaya. Ini justru menimbulkan harapan besar, akan masa depan umat manusia. Berbeda dengan Fukuyama yang mengajukan konsep "Berakhirnya Sejarah" (*The End of History*). Konsep ini membenarkan sikap pemerintah Amerika Serikat memiliki wewenang menjadi "polisi dunia" (*policeman of the world*). Juga berarti ia mempunyai hak untuk campur tangan dalam masalah dalam negeri orang lain.

Sikap yang membenarkan pelanggaran wewenang oleh Amerika Serikat atas negara-negara lain, sangat bertentangan

dengan pendapat Republik Rakyat Cina (RRC). RRC berpendapat pengeboman atas sebuah negara harus diputuskan secara multi-lateral oleh PBB, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Ini dapat diartikan negara itu menolak "hak-hak" Amerika Serikat untuk melakukan pengeboman atas Afghanistan dan Irak sebagai negeri yang berdaulat. Bahkan RRC berpendapat, tindakan Amerika Serikat itu hanya berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan geopolitis yang belum tentu benar.

Sudah tentu, kita sangat berkepentingan dengan konsep Huntington itu. Bukankah di negeri kita juga ada terorisme -untuk "melawan" kebudayaan Barat-, yang dituduh menjadi bagian dari terorisme internasional. Pembenaraan anggapan bahwa budaya Islam ataupun budaya bangsa-bangsa berkembang bertentangan dengan "budaya Barat", adalah pembenaran bagi teroris yang merasa budaya Islam harus lebih unggul dari pada budaya Barat. Mungkin saja pendapat ini di dasarkan pada hadits "Islam harus diunggulkan atas (cara-cara hidup) yang lain" (*al Islâm ya'lu wa lâ yu'lâ 'alaih*). Secara tersamar Huntington menyimpulkan ada keterpisahan antara budaya Islam –budaya non Barat- dengan budaya Barat. Justru itulah yang menjadi keberatan penulis dan teman-teman karena menyiratkan adanya perbenturan.

*****

Asal pandangan yang menganggap Islam sebagai cara hidup memiliki keungulan atas cara-cara hidup lain, sebenarnya tidak salah. Setiap orang tentu menganggap sistemnya sendiri yang benar. Karena itu perbedaan cara hidup adalah sesuatu yang wajar. Ini termasuk dalam apa yang dimaksudkan oleh kitab suci al-Qur'ân : "Dan telah Ku buat kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar kalian saling mengenal "(*wa ja'alnâkum syu'ûban waqabâila li ta'ârafû*) (QS al-Hujurat(49):13). Perbedaan pandangan atau pendapat adalah sesuatu yang wajar bahkan

akan memperkaya kehidupan kolektif kita, sehingga tidak perlu ditakuti. Kenyataan inilah yang mengiringi adanya perbedaan kultural (dan juga politik) antara berbagai kelompok muslimin yang ada kawasan-kawasan dunia.

Yang dilarang oleh agama Islam adalah perpecahan, bukannya perbedaan pendapat. Kitab suci al-Qur'ân menyatakan ; "Berpeganglah kalian pada tali Allah, dan jangan terpecah-pecah" (*wa'tashimû bi hablillâh jamîan wa lâ tafarraqû*)(QS Ali Imran(3):103). Dengan demikian, perbedaan diakui namun perpecahan/keterpecah-belahan ditolak oleh agama Islam. Padahal para teroris yang mengatasnamakan Islam, justru menolak perbedaan pandangan/pendapat itu, disamping perpecahan. Jika pandangan ini diterima, maka artinya akan menjadi, agama Islam memerintahkan terorisme. Padahal agama tersebut memperkenankan pengunaan kekerasannya, hanya jika kaum muslimin diusir dari tempat tinggal mereka, (*idzâ ukhrijû min diyârihim*). Jadi di sini ada pertentangan antara pendirian sebagian sangat kecil kaum muslimin dengan ajaran agama mereka.

Ada sesuatu yang sangat menarik dalam membandingkan ajaran Islam dengan konsep perbenturan budaya dari Huntington itu. Penolakan atas konsep Huntington tersebut, berarti juga penolakan teoritis atas terorisme dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian sangat kecil kaum muslimin. Menurut penulis, baik konsep ataupun pandangan tersebut berasal dari suatu hal yang sama: rasa rendah diri. Ditutupi dengan kecongkakan sikap, konsep dan pandangan tersebut sangat mengganggu saling pengertian antara kekuatan jiwa dari budaya-budaya yang saling berbeda dalam kehidupan umat manusia dewasa ini. {}





BAB VII

ISLAM PERDAMAIAN DAN MASALAH-MASALAH INTERNASIONAL



KITA DAN PERDAMAIAN

Penulis diundang oleh UNESCO ke Paris, pada Mei 2003, untuk menyampaikan pidato pembukaan (*keynote address*) dalam sebuah konferensi mengenai pemerintahan yang baik (*good governance*) dan etika dunia (*global ethics*), yang diadakan antara kaum Buddhis dan Muslimin. Konferensi itu dimaksudkan untuk mencari jembatan pertama antara agama Islam, yang mewakili agama-agama Ibrahim dan Buddhisme (yang menjadi mitra dialog pertama) mewakili agama-agama di luar tradisi Ibrahim.

Dalam kesempatan itu juga, penulis diminta berbicara mengenai asal-usul terorisme bersenjata yang sedang melanda dunia saat ini. Diharapkan pidato pembukaan itu akan mewarnai dialog tersebut, yang juga dihadiri oleh delegasi dari Persekutuan Gereja-Gereja Eropa, wakil dari pimpinan agama Yahudi, Gereja Kristen Orthodox Syria, wakil agama Hindu dan sebagainya. Dari kalangan agama Buddha sendiri, hadir Dharma Master Hsin-Tao dari Taiwan dan Sulak Sivaraksa dari Thailand, di samping David Chappel dari *University of California* di Los Angeles.

Pertemuan tersebut adalah yang ketiga kalinya, antara sebagian kaum Buddhis dan kaum Muslimin (termasuk dari Tunisia, Marokko, Saudi Arabia, Sudan, Tanzania dan sejumlah

pemuka kaum Muslimin lainnya). Pertemuan pertama terjadi tahun lalu di sebuah hotel di Jakarta, disusul pertemuan pertemuan di New York dan disudahi dengan pertemuan di Kuala Lumpur (dengan Dr. Chandra Muzaffar sebagai tuan rumah). Dari pertemuan-pertemuan tersebut, diharapkan kelanjutan hubungan antara kaum Muslimin dan Buddhis, di samping juga akan dilaksanakannya sebuah konferensi besar antar kepala negara-negara berkembang (*developing countries*) di Bandung, untuk merayakan 50 tahun Konferensi Asia-Afrika I (Bandung I) pada tahun 2005 (Bandung II) kelak. Untuk mempersiapkan peringatan itu sendiri di Jawa Barat pada waktunya nanti, maka agenda-agenda Konferensi Bandung II harus ditetapkan tahun ini. Hal ini diperlukan, guna mencari alternatif bagi dominasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam dunia internasional (seperti terbukti dari serangan-serangan atas Afghanistan dan Irak), tanpa harus berkonfrontasi dengan negara adi kuasa tersebut.

Timbulnya sikap konfrontatif itu, karena tidak dipikirkan dengan mendalam dan jika hanya dilakukan oleh sebuah negara saja. Terbukti dengan adanya rencana "politik luar negeri" Indonesia yang konyol –seperti keputusan untuk (pada akhir tahun 2003 ini) keluar dari keanggotaan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Funds, IMF*).

Pada saat menjadi Presiden, penulis bertanya pada seorang ekonom raksasa dari MIT (*Massachusset Institute of Technology*), Paul Krugman soal sikap Indonesia terhadap IMF. Ia menjawab, sebaiknya Indonesia jangan keluar dari keanggotaaan badan internasional tersebut. Paul Krugman yang juga pengkritik terbesar lembaga keuangan dunia itu menyatakan kepada penulis, hanya negara dengan birokrasi kecil dan bersih (*lean and clean bureaucracy*) yang dapat keluar dari IMF secara baik, sedangkan birokrasi Indonesia sangatlah besar dan kotor.

*****

Dalam pidato pembukaan itu, penulis menyatakan bahwa etika global dan pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya akan ada artinya kalau didasarkan pada dua hal: kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasional. Ini berarti, negara adi kuasa manapun harus memperhatikan kedua prinsip ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasional itu harus mendapatkan perhatian utama. Pidato pembukaan itu, mendapatkan jawaban dan tanggapan sangat positif dari berbagai pihak, termasuk Dharma Master Hsin-Tao (Taiwan) yang mewakili para pengikut agama Buddha. Tanggapan yang sama positifnya juga disampaikan oleh Wolfgang Smith dari Persekutuan Gereja-Gereja Eropa dan Rabbi Alon Goshen Gottstein dari Jerusalem.

Penulis menyatakan pentingnya arti kedaulatan hukum, karena di Indonesia dan umumnya negara-negara berkembang, hal ini masih sangat langka. Justru pada umumnya pemerintahan yang bersifat korup mudah sekali melakukan pelanggaran hukum dan di sini konstitusi hampir-hampir diabaikan. Pernyataan kitab suci al-Qur'ân: "Wahai kaum Muslimin, tegakkanlah keadilan dan jadilah saksi bagi Tuhan, walaupun mengenai diri kalian sendiri" (*yâ ayyuha alladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bi al-qisthi syuhadâ'a li allâhi walau 'alâ anfusikum*) (QS al-Nisa (4): 134), ternyata tidak diikuti oleh umat Islam sendiri, yang lebih senang dengan capaian duniawi yang penuh ketidak-adilan, dengan meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh kitab suci agama mereka sendiri.

Pernyataan penulis dalam pidato pembukaan tersebut, agar keadilan menjadi sifat dari etika global dan pemerintahan yang baik (*good governance*) itu, di dasarkan pada pengamatan bahwa sebuah negara adi kuasa, seperti Amerika Serikat dapat saja melaksanakan dominasi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan negara-negara lain. Ini terbukti dari serangannya atas Irak, yang terjadi dengan mengabaikan sikap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Penulis berpendapat jika dalam waktu tiga bulan Saddam Hussein tidak dapat ditangkap, maka tentu rakyat AS akan ribut minta tentara mereka ditarik dari Irak, dan harus ditegakkan perdamaian di negeri Abu Nawas itu melalui perundingan damai. Kalau tidak, pemerintah apapun yang akan menggantikan Saddam Hussein akan dianggap sebagai pemerintahan boneka oleh rakyat Irak sendiri. Dengan demikian, perubahan berbagai sistem (termasuk sistem politik dan pemerintahan) di Irak harus dilakukan tanpa melalui paksaan, melainkan harus dengan perundingan damai. Kenyataan inilah yang harus dipahami oleh semua pihak, termasuk AS. Dengan demikian, apa yang sejak berbulan-bulan ini diusulkan penulis, yaitu perdamaian di Irak harus dikaitkan langsung dengan perdamaian abadi antara Palestina dan Israel, semakin menjadi relevan.

*****

Sebagai bagian dari pembentukan etika global dan pemerintahan baik (*good governance*) itu, tentu diperlukan adanya kampanye besar-besaran untuk membentuk pengertian yang mendalam atas kedua hal tersebut. Di sinilah terletak peranan para agamawan dan moralis dunia, dengan didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO. Karena itu tindakan sendiri-sendiri dalam pembentukan pendapat dunia, mengenai etika global dan pemerintahan baik itu tidak dapat dibenarkan karena diragukan keberhasilannya. Harus ada dialog terus-menerus antara berbagai kalangan bangsa, terutama antara para teoritisi dan para penerap nilai-nilai di lapangan. Di sinilah terasa betapa pentingnya arti dialog seperti yang telah diselenggarakan oleh UNESCO di Paris itu. Minimal, bagi berbagai pihak di luar lingkup negara, dapat melakukan pembicaraan mengenai nilai-nilai global yang ingin kita tegakkan dalam pergaulan internasional. Dengan pertemuan antar berbagai agama tadi, masing-masing pihak akan belajar dan menimba sumber-sumber

spiritual, dalam membentuk pandangan hidup di masa depan.

Kesadaran seperti ini, mulai muncul akibat merajalelanya sinisme yang dibawa oleh "pertimbangan-pertimbangan politik global" (*global political considerations*) dan akhirnya menjadi satu-satunya alat pertimbangan. Pertimbangan itu -dalam kerangka kajian strategis disebut sebagai "*geopolitical considerations*"-, hanya melahirkan perbenturan kepentingan antara negara-negara adi kuasa (*super power*) saja, akibatnya tentu akan melumpuhkan negara-negara yang bukan adi kuasa. Apalagi setelah Uni Soviet berantakan, maka hanya tinggal sebuah negara adi kuasa yang memaksakan kehendak dan menginjak-injak hukum internasional untuk kepentingannya sendiri. Contohnya adalah penyerbuan AS atas Irak, dengan mengesampingkan peranan PBB melalui Dewan Keamanan.

Di masa depan, tentu saja hal ini akan mengakibatkan reaksi berupa sederet tuntutan dari negara-negara berkembang akan sebuah tatanan yang lebih berimbang secara internasional, antara negara industri maju (*developed countries*) dengan negara berkembang (*developing countries*). Dalam penyusunan tatanan baru seperti itu, tentu saja etika global dan pemerintahan yang baik harus memperoleh perhatian khusus, baik untuk acuan kerangka baru yang hendak didirikan maupun untuk mengendalikan perubahan perubahan yang bakal terjadi.

Karena itu dialog terus-menerus akan kedua hal itu harus dilakukan, termasuk dalam pertukaran pikiran mengenai peranan spiritualitas manusia, sangat diperlukan. Dialog antara para pemeluk berbagai agama, seperti yang diselenggarakan di Paris tersebut, tentulah sangat menarik bagi kita. Pemaparan pengalaman pribadi dan pikiran dari para pemimpin agama, seperti Dharma Master Hsin Tao dari Taiwan, tentu saja harus menjadi bagian integral dari dialog semacam itu.

Perdamaian Belum Terwujud di Timur Tengah

Pada akhir Februari hingga awal Maret 2003 ini, penulis berada di Washington DC, Amerika Serikat (AS), guna menghadiri sebuah konferensi perdamaian untuk kawasan Timur Tengah. Undangan sebagai peserta konferensi, diberikan oleh IIFWP (*Interreligious and International Federation for World Peace*, Federasi Internasional Antar Agama untuk Perdamaian Dunia), yang berkedudukan di New York. Mengapakah penulis jauh-jauh mengikuti konferensi tersebut, padahal hampir setiap hari demonstrasi-demonstrasi di tanah air, menuntut turun/lengsernya pasangan Megawati-Hamzah Haz? Penulis memutuskan pergi ke negara Paman Sam itu, karena dua alasan. Pertama, karena perkembangan dalam negeri baru mencapai titik kulminasi setelah minggu kedua bulan Maret 2003. Kedua, karena persiapan-persiapan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris sudah berjalan sangat jauh, -saat tulisan ini dibuat- dengan dikirimnya 198.000 pasukan AS dan 40.000 tentara Inggris ke kawasan tersebut, berarti pencegahan perang lebih terasa urgensinya di kawasan Timur Tengah saat ini.

Tentu ada orang yang berpendapat, sikap gila dalam pendirian penulis, karena menilai saat ini justru saat yang paling baik untuk memulai sebuah inisiatif baru guna mencari titik perdamaian abadi bagi kawasan Timur Tengah. Bukankah persiapan

negara adi kuasa AS dan sekutunya Inggris Raya, merupakan petunjuk tak terbantahkan akan persiapan perang yang sudah berjalan sangat jauh, hingga tidak dapat dihentikan? Bukankah pertimbangan-pertimbangan geopolitik telah memaksa AS dan para sekutunya untuk menggunakan perang sebagai "alat pemaksa" atas Irak? Jawabannya, adalah bahwa dapat dibenarkan ucapan ahli strategi perang Jerman Von Clausewitz, bahwa "perang adalah kelanjutan dari diplomasi/perundingan yang gagal". Dalam pandangan penulis, sikap negara-negara besar seperti Jerman, Perancis, Rusia dan Tiongkok menunjukan, bahwa upaya-upaya diplomatik tetap memiliki relevansi yang besar, dalam mencari solusi damai atas masalah Timur Tengah. Karenanya, dari sekarang sampai dengan terjadinya secara aktual/formal pemboman atas Irak, dapat dikatakan peluang bagi perdamaian di kawasan itu tetap terbuka.

Kitapun sudah terbiasa menghadapai kenyataan, bahwa penyelesaian sebuah konflik didapati hanya pada akhir sebuah proses yang panjang di hadapan persiapan-persiapan "penuh kekerasan", yang dalam bahasa asing disebut "merebut kemenangan dari gigitan musuh di saat-saat terakhir" (*snatch victory from the jaws of defeat*). Namun, hal itu tidak akan tercapai, apabila dua buah tindakan tidak diambil pada waktu yang bersamaan. Pertama, adanya sebuah forum yang untuk kesekian kalinya membicarakan dan kemudian menetapkan upaya terakhir yang harus dijalankan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Kedua, begitu keputusan diambil, harus segera ditunjuk orang yang melaksanakannya, dalam waktu yang begitu sempit.

Dengan dua persyaratan itulah, baru ada harganya untuk "menggunakan kesempatan dalam kesempitan". Kesempatan menegakkan perdamaian abadi di kawasan tersebut, dengan menggunakan kesempitan menghadapi kenyataan pahit di kawasan tersebut.

*****

Penulis mengajukan dalam pidato pembukaan di konferensi itu, bahwa perdamaian abadi di Timur Tengah hanya dapat dicapai, kalau penyelesaian damai atas konflik Israel-Palestina dikaitkan dengan perdamaian di Irak. Perdamaian antara Israel–Palestina dapat saja dicapai dengan dihentikannya persiapan–persiapan untuk melakukan pemboman dan pengiriman pasukan-pasukan ke negeri Abu Nawas itu. Dengan demikian, penyelesaian konflik Israel-Palestina akan membawa perdamaian di Timur Tengah, jika dihentikan persiapan perang dalam skala besar ke Irak.

Demikian pula, upaya perdamaian dapat dilakukan dengan berhentinya pemboman atas Irak, jika ternyata hal itu tidak membawa hasil. Dengan kata lain, ucapan Von Clausewitz di atas harus diteruskan dengan ungkapan "perundingan/negosiasi adalah kelanjutan dari peperangan yang gagal". Kegagalan peperangan atas Irak akan terjadi, jika Presiden AS, George Bush Jr. gagal menangkap Saddam dalam waktu yang cepat. Mengapa? Karena rakyat AS tidak akan bersedia membiayai peperangan untuk jangka waktu yang lama, walaupun negara tersebut telah mencapai kekayaan berlimpah-limpah, atau justru karena persenjataan yang sangat canggih juga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk digunakan. Dikombinasikan dengan demonstrasi di mana-mana, termasuk di AS dan Inggris, untuk tidak menyelesaikan konflik tesebut dengan kekerasan, maka dapatlah diperhitungkan peperangan akan terhenti dengan sendirinya, kalau Saddam Hussein tidak juga segera tertangkap oleh musuh-musuh politiknya.

Maka untuk menolong "muka" AS-Inggris dan Israel, -upaya ini dilakukan agar tidak membuat peperangan berjalan lama-diperlukan langkah-langkah untuk mencapai dua pemecahan (solusi), caranya adalah dengan mencapai kesepakatan antara ke empat pihak (AS, Inggris, Israel dan Irak), yang berlanjut dengan penghentian tindak-tindak militer di kawasan Israel-Palestina dan Irak. Digabungkan dengan melakukan hal-hal berikut ini,

pertama, dengan memperkuat negara Palestina merdeka, melalui pemberian bantuan keuangan berupa kredit murah berjangka panjang bagi negara itu, katakanlah sebesar 1 miliar dolar AS. Karena dengan bantuan seperti itu, kebangkitan industri dan perdagangan Palestina akan menjadi sangat cepat, apabila para pemimpin Palestina mampu menciptakan pemerintahan yang bersih di masa depan. Kedua, untuk menghindari perang, -ini paling pahit dan sulit dilaksanakan- mengusahakan agar Saddam Hussein lengser dari jabatan kepresidenan secara sukarela, untuk memungkinkan tercapainya negara Palestina yang kuat secara industrial/ komersial dalam waktu cepat.

*****

Untuk memungkinkan tercapainya hal tersebut di atas, yaitu "menolong posisi" Israel dan Amerika Serikat-Inggris dalam percaturan politik internasional, maka diperlukan seorang penengah yang bersedia mondar-mandir ke AS, Inggris, Israel, Palestina, Libya, Irak dan negara-negara lain di Timur Tengah. Dengan demikian, sikap untuk menentang atau mendukung posisi Israel dan Amerika Serikat-Inggris dalam kedua hal tersebut, harus dibaca sebagai sikap permulaan (*initial attitudes),* yang dapat saja berubah karena perkembangan keadaan. Sedangkan peran "negosiator" (juru runding) itu, kalau tidak dilakukan oleh seseorang secara pribadi (seperti disebutkan di atas), dapat saja dilakukan oleh sekelompok orang (institusi/group). Hal itu telah dilakukan dalam kasus Aceh oleh *Henry Dunant Center*, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang berkedudukan di Geneva.

Kesungguhan sikap negara-negara yang terlibat, maupun kegigihan sang negosiator sangatlah diperlukan, untuk mencapai perdamaian abadi di kawasan itu. Karenanya, negosiator tersebut haruslah memperoleh dukungan kuat dari siapapun, dalam ben-

tuk bantuan logistik maupun kemudahan-kemudahan yang lain. Kalau tugas itu dibebankan pada seseorang, haruslah dipastikan orang tersebut memiliki stamina yang sangat prima, dibantu oleh dua orang asisten yang bekerja terus-menerus selama beberapa bulan. Tentu saja, peranan seperti itu akan sangat menarik hati siapapun, hingga banyak yang ingin melakukannya. Tetapi, tentu saja tidak setiap orang (termasuk para diplomat dan para negarawan) mampu untuk melaksanakannya. Ada sebuah persyaratan lain yang sangat penting dalam hal ini; negosiator itu haruslah dipercaya oleh semua pihak yang terlibat, yang juga membawa "kelayakan" bagi seorang muslim untuk tugas tersebut.

Itulah sebabnya,mengapa penulis bergairah untuk datang ke Washington DC. Pertama, untuk mengemukakan pendapatnya, bahwa sampai titik terakhir sekalipun, harus diupayakan penyelesaiaan damai (*peaceful settlement*) yang bersifat permanen untuk kawasan Timur Tengah. Kedua, untuk bertemu dan menyampaikan beberapa hasil pemikiran pada negosiator yang dipilih atau ditunjuk oleh konferensi di ibu kota negara tersebut. Konferensi diselenggarakan di sebuah hotel di Washington, yang dari dalam ruangannya masih dapat terlihat bekas-bekas serangan ke gedung Pentagon pada Tragedi 11 September 2001, diharapkan ia menjadi forum dengan kewibawaan sangat tinggi (*prestigious body*) dalam lingkup politik dunia. Di samping itu, penulis juga dapat memenuhi undangan berceramah pada Universitas Michigan di Ann Arbor dan disamping *check up* medis di Boston General Hospital. Perjalanan menarik walaupun sangat melelahkan. {}

Dicari Perdamaian, Perang yang Didapat

Peperangan di Irak telah terjadi, dengan pelemparan ratusan buah peluru kendali dari sejumlah alat perang Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Bagi sementara orang, perang itu disebut sebagai penyerbuan (*invasi*), karena kekuatan militer yang sangat tidak berimbang antara kedua belah pihak. Pada waktu penulis berada di Ann Arbor, di kalangan kampus Universitas Michigan, seorang hadirin bertanya; —mengenai terjadinya penyerbuan AS ke Irak, seorang peserta lain segera melakukan koreksi; —bukan penyerbuan AS, melainkan penyerbuan George W. Bush Junior. Ini menunjukkan bahwa penentangan terhadap perang itu berjumlah sangat besar, termasuk oleh pemerintah kita. Bahkan tiga negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) –yakni, Perancis, Rusia, dan RRT menentangnya. Dan karenanya Bush melakukan penyerbuan dengan tidak ada izin dari DK-PBB, yang membawa krisisnya sendiri -minimal krisis kredibilitas bagi PBB.

Bush selalu menyatakan keinginannya untuk menghilangkan "semangat kejahatan" (*evil spirit*), dengan jalan menurunkan Saddam Hussein dari kursi kepresidenan Irak. Dengan demikian, ia berusaha menegakkan pemerintahan demokratis yang kuat di Irak. Tetapi banyak orang meragukan niatan Bush itu, karena terlihat pertimbangan-pertimbangan geopolitik juga ada dalam

memutuskan penyerangan atas Irak itu. Penyebabnya Saudi Arabia -yang merupakan penghasil minyak terbesar di dunia- dalam kasus Israel-Palestina, telah meninggalkan kebijakan politik luar negeri AS. Dengan demikian, peranan negeri itu haruslah diimbangi dengan negeri penghasil minyak terbesar kedua di dunia, yaitu Irak. Karena Irak masih diperintah oleh Saddam Hussein, dengan sendirinya iapun harus diganti dengan orang lain, yang lebih "terbuka" bagi tekanan-tekanan politik luar negeri AS, berarti Irak harus diserang. Ada pula orang yang menganggap faktor psikologis tidak boleh dilupakan dalam hal ini, yaitu Presiden Bush muda (Junior) harus memenangkan perang terhadap Saddam Hussein, yang telah menggagalkan "kemenangan" Presiden Bush tua (Senior). Rasa-rasanya semua argumentasi tadi cukup beralasan untuk diajukan kepada perdebatan pendapat tentang benar-tidaknya penyerbuan ke Irak itu. Kalau memang benar adanya, maka AS dan sekutunya harus mengakhiri perang.

Jelas Irak harus menemukan jalannya sendiri kepada kemajuan dalam pembangunan ekonomi, maupun dalam penemuan identitas sendiri, sebagaimana diharapkan oleh banyak kalangan pemikir. Sebagaimana halnya dengan Chun Do-Hwan di Korea, yang pada akhirnya menjadi biarawan Buddha, dan dengan demikian tidak dituntut oleh pengadilan di sana, sebagai bagian penting dari rekonsiliasi nasional *ala* Korea, maka tentu Irak-pun akan menemukan caranya sendiri akan rekonsiliasi nasional tanpa campur tangan AS.

*****

Gempuran militer atas Irak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras cukup besar di seluruh dunia. Sebuah negara adikuasa telah memaksakan kehendak kepada dunia, melalui penafsirannya sendiri atas perkembangan yang terjadi di dunia ini, dengan alasan-alasannya sendiri berbeda dari pendapat resmi DK-PBB,

jelas telah membuka lembaran baru dalam tata hubungan internasional.

Banyak juga orang memuji keberanian "moral" Bush dalam hal ini. Tetapi, ada yang menyatakan, hancurnya kredibilitas PBB dan tata hukum internasional yang obyektif. Dampaknya, memungkinkan sebuah negara di Afrika untuk menyerbu tetangganya dengan alasan yang dicari-cari. Jika ini yang terjadi, dapatkah AS mengerahkan kekuatan militer di seluruh dunia pada saat bersamaan? Inilah yang mengkhawatirkan para pengamat itu: hubungan internasional atas dasar penafsiran sepihak, tanpa ada pembenaran formal dari DK-PBB, dapatkah menjamin menetapnya perdamaian dan ketentraman dunia?

Di hari-hari pertama penyerangan atas Irak tersebut, tentu sajian televisi CNN selalu menggambarkan tentang keperkasaan AS. Setelah dua hari "membatasi diri" dalam penyerangan tersebut, di hari ketiga kekuatan militer AS yang demikian dahsyat digelar dengan kekuatan penuh. Sebagian Irak Selatan telah "dibebaskan" dari Saddam Hussein. Pasukan-pasukan Kavaleri AS dari kawasan Kuwait menerobos dengan mudah wilayah Irak Selatan, dan dalam hal ini kecepatan yang luar biasa dari pasukan-pasukan Kavaleri AS dan para Marinir Inggris sangat mengagumkan. Dalam waktu sebentar saja, tanpa perlawanan berarti, pasukan-pasukan Irak dengan mudah begitu saja menyerah tanpa syarat. Karena itulah, dapat saja segera diajukan klaim "kemenangan" AS dan sekutu-sekutunya ditambah dengan pasukan-pasukan AS yang tergabung dalam bala tentara Kurdi di sebelah utara Irak, jelas bahwa Baghdad dijepit dari utara dan selatan. Dengan demikian, kejatuhan Baghdad tinggal menunggu waktu saja.

Benarkah sikap menganggap AS telah memenangkan pertempuran-pertempuran tersebut? Penulis justru menganggapnya sebagai permulaaan dari sebuah proses yang sangat panjang. Jika AS tidak dapat menangkap Saddam Hussein dalam waktu beberapa bulan yang akan datang ini, maka sikap rakyat Irak

akan berubah dengan cepat. Sikap yang selama ini diperlihatkan, paling tidak akan berubah menjadi sikap menolak secara psikologis serangan demi serangan AS itu. Sikap seperti ini, jelas didukung oleh mayoritas bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Jelas yang harus diperbuat oleh Saddam Hussein adalah menghindari penangkapan atas dirinya. Selebihnya, akan "diselesaikan dengan cara damai dan dengan perundingan". Jika Von Clausewitz menyatakan, perang adalah penerusan perundingan yang gagal, maka dapat kita katakan, perundingan damai adalah penerusan dari peperangan yang tidak mencapai maksudnya.

*****

Inilah kemungkinan buruk yang tidak diperhitungkan jauh sebelumnya oleh Bush, yang hanya mengandalkan kemarahan kepada Saddam Hussein saja. Sikap seperti ini memang dapat saja membawa hasil cepat yang menguntungkan, tetapi dapat juga berakibat sebaliknya. Penulis memandang rakyat AS tidak akan mau berperang lama-lama melawan siapapun. Karenanya, sangat riskan untuk mendasarkan sebuah penyerbuan besar-besaran atas negeri lain dalam tatanan dunia sekarang ini. Di sinilah letak arti penting dari peranan sebuah lembaga internasional – seperti PBB. Paling tidak, persetujuan PBB merupakan pembenaran formal atas apapun yang dilakukan oleh seluruh negara atas negara yang lain. Jika kenyataan ini diabaikan, tidaklah menjadi soal jika sukses yang diperoleh. Tapi, jika sebaliknya yang terjadi, akan runtuhlah kewibawaan AS di mata negara-negara lain yang kecil.

Jika AS gagal menangkap Saddam Hussein, dan terpaksa berperang untuk jangka panjang, maka segera tindakan itu harus dihentikan, karena tuntutan rakyat Amerika Serikat sendiri yang tidak mau berperang lama-lama. Jika ini terjadi, maka mau tidak mau harus dicari formula persetujuan damai atas Irak. Banyak

masalah terkait dengan hal itu, tetapi jelas perundingan merupakan penyelesaian terbaik. Dalam hal ini, penulis meminta agar supaya penyelesaian damai di Irak, dikaitkan langsung dengan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Dengan demikian, baik Israel maupun seluruh bangsa-bangsa Arab akan berkepentingan untuk menjaga perdamaian tersebut. Ini adalah persyaratan sangat penting, karena hanya dengan cara demikianlah sebuah perdamaian abadi dapat ditegakkan di kawasan Timur-Tengah. Di sinilah terletak kaitan vital antara penyelesaian sengketa Irak di satu pihak dan sengketa Israel-Palestina di pihak lain.

Perdamaian abadi antara Israel dan Palestina, hanya dapat dicapai manakala negara Palestina dapat diperkuat dengan kemungkinan mengembangkan industri dan perdagangannya. Hal itu hanya dapat dicapai jika ada bantuan ekonomi besar-besaran, dalam bentuk kredit murah bagi mereka. Katakanlah pinjaman lunak selama dua puluh tahun, sebesar satu milyar dollar AS. Sedangkan sebaliknya, jika AS-Inggris tidak dapat menangkap Saddam Hussein, maka pendapat umum dalam negeri maupun internasional akan memaksa penarikan mundur pasukan-pasukan mereka. Dalam hal ini, dapat diminta Saddam Hussein mengundurkan diri untuk kepentingan bangsa Arab secara keseluruhan, khususnya untuk memungkinkan pemberian kredit lunak dalam jumlah demikian besar kepada negara Palestina. Ini karena keyakinan penulis, bahwa Saddam Hussein sangat menghormati sebuah negara Palestina yang merdeka, dan karena ia sendiri telah berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam memimpin Irak yang diserang sebuah negara adikuasa, seperti AS. {}

KITA DAN PEMBOMAN ATAS IRAK

Pada umumnya, kita mengikuti salah satu dari dua pandangan berikut. Pendapat pertama adalah, kita memandang kemungkinan pemboman atas Irak oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sebagai sebuah bagian dari rencana jahat untuk menyerang Irak dan mengganti presidennya, Saddam Hussein. Dilanjutkan dengan pandangan bahwa rencana itu adalah bagian dari Konspirasi Zionisme yang dipelopori Israel. Kita boleh setuju atau tidak dengan pandangan ini, namun penulis menolak teori komplotan/konspirasi seperti itu. Tetapi bagaimana pun pendapat seperti itu ada dan diikuti banyak orang. Karenanya, pendapat seperti itu harus diakui keberadaannya dan untuk itulah diciptakan sebuah disiplin ilmiah yang bernama studi kawasan, yang berjalan seiring dengan teori-teori geopolitik dalam kajian internasional yang berkembang saat ini.

Sebaliknya, ada pihak lain yang memandang Irak di bawah pimpinan Presiden Sadam Hussein sebagai biang kerok tindakan-tindakan teror internasional, karena itu diperlukan pemboman ke Irak, untuk menggulingkan presiden tersebut dari jabatanya. Pemboman itu harus dilakukan secara masif, walaupun memakan korban sangat banyak dari penduduk Irak, belum lagi rusaknya kota-kota besar di Irak sebagai akibatnya, yang kesemuanya

tidak dapat dinilai kerugiannya. Tindakan itu, dalam pandangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya haruslah dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan dunia dari terorisme. Kalau ini tidak dilakukan, terorisme internasional akan berlanjut, dan kehidupan di negara-negara tersebut akan sangat terganggu. Karenanya walaupun menimbulkan banyak korban, langkah itu harus tetap diambil untuk perdamaian dunia.

Memang, kedua hal yang saling bertentangan itu terwujud dalam kenyataan, dan kita tidak dapat menutup mata akan keadaan ini. Berarti, kita harus mengambil sikap: membenarkan atau menolak tindakan pemboman atas Irak itu. Memang, ini pilihan yang sangat sulit, tetapi bagaimanapun juga pilihan harus dilakukan. Pandangan kita harus dirumuskan. Keengganan, ketakutan ataupun emosi kita hanya akan memperpanjang soal itu. Belum lagi akan munculnya sikap pihak-pihak lain terhadap pendirian kita itu. Karenanya, sebaiknya kita bersikap yang jelas, masing-masing dengan akibat-akibatnya sendiri.

****

Sikap itu pun tidak seluruhnya dapat dikemukakan dengan lugas apa adanya. Karena salah satu persyaratan hubungan internasional adalah, kemampuan untuk menyampaikan 'bahasa' yang digunakan antara bangsa atau kelompok yang saling terkait satu dengan yang lain. Penggunaan bahasa yang semakin canggih itu, menutupi ambisi pribadi atau golongan yang ada. Dan segala sesuatunya dirumuskan, supaya sesedikit mungkin membuat orang yang berpandangan lain dengan kita menjadi jengkel atau marah. Karenanya, kita bisa saksikan betapa istilah-istilah yang berubah arti atau bentuk. Ini adalah konsekuensi logis dari tatanan geopolitik yang ada. Akibat penguasaan pendapat umum di sebuah negara, yang ditentukan oleh faktor-faktor yang serba bagai itu, maka penggunaan istilah semakin menyimpang jauh

dari apa yang dimaksudkan semula.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah kata "globalisasi" (penduniaan). Dalam pengertian yang kita gunakan sehari-hari, yang dimaksud globalisasi adalah sikap memberikan arti terhadap dunia atau universal. Tetapi segera terjadi perubahan arti dari kata tersebut, yaitu terjadi pemaksaan kehendak atas pemahaman orang banyak, seperti dikehendaki oleh kelompok-kelompok yang berjumlah kecil. Karenanya oleh perusahaan-perusahaan raksasa, kata globalisasi tersebut lalu berubah arti menjadi dominasi.

Selain itu pengertian dan pemahaman kelompok yang lebih besar atas kata "perdagangan bebas" (*free trade*) yaitu kebebasan berdagang namun menurut pengertian pihak yang kecil, kata itu berarti sistem yang menguntungkan pihak yang mempunyai modal besar. Kata "modern" berarti penggusuran pengertian arti tradisional oleh hal-hal baru, yang dianggap lebih menguntungkan dari pada arti tradisional itu. Dengan demikian, tersembunyilah arti lebih dalam dari tradisional, oleh bentuk-bentuk baru yang dianggap modern.

Kata "tempe" umpamanya, dipakaikan untuk menentukan kekurangan, kelemahan atau ketidakmampuan. Mengemukakan suatu istilah "bangsa tempe", umpamanya, dianggap kalah arti dari bangsa yang kuat. Padahal kata tempe dalam pengunaan di sini, seharusnya sesuai dengan hakikatnya sebagai sesuatu yang memiliki gizi tinggi dan nilai berlebih. Jadi, penggunaan kata itu mencerminkan pandangan salah di masa lampau, bahwa hanya makanan yang menggunakan daging sajalah yang dianggap bergizi.

Demikian pula kata "perdamaian" dalam pergaulan antarbangsa. Sekarang kata itu berarti, tidak adanya peperangan atau penggunaan kekerasan oleh sesuatu pihak atas pihak yang lain, dengan persyaratan dan pengertian dari pihak yang menang. Kata "terorisme" dapat diartikan menurut kepentingan geopolitik negara-negara adi kuasa, sehingga yang menentang pengertian

tersebut dianggap sebagai teroris. Berhasilkah upaya Presiden George W Bush Jr. mengembalikan arti kata teroris, pada pengertian semula, yaitu penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang tidak mau berunding? Kalau ini yang dimaksudkan oleh Presiden Amerika Serikat itu, lalu mengapakah harus jatuh korban puluhan ribu jiwa orang-orang yang tidak bersalah, akibat pemboman itu sendiri? Di sini, kita lihat terjadi perubahan arti kata "perdamaian" dan "terorisme".

*****

Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa tindakan pemboman secara masif atas Irak adalah sesuatu yang juga diperdebatkan secara bahasa/epistemologi, dan tidak hanya berdasarkan "rasa panggilan historis" seperti dirasakan pemerintahan Amerika Serikat saat ini. Di sinilah terletak signifikansi dari filsafat dan moralitas, perdamaian dunia tidak selayaknya hanya dibatasi pengertianya secara geopolitik belaka melainkan harus memasukan moralitas ke dalam dirinya. Dalam hal ini, moralitas harus ditentukan oleh kerangka multilateral seperti PBB, bukan hanya oleh sebuah negara adi kuasa belaka. Mungkin ini terdengar seperti lamunan belaka, namun bukankah cita-cita besar sering berangkat dari lamunan? Lebih jauh lagi, sinisme kekuasaan yang didasari pertimbangan-pertimbangan geopolitik, lalu membuat kita menghadapi jurang pertentangan dan peperangan dalam ukuran yang masif.

Karenanya, marilah kita berupaya menggunakan ukuran-ukuran moral dan etis dalam tata pergaulan internasional, walaupun banyak penguasa lain memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan. Bagaimanapun juga, sejarah kekerasan yang telah demikian lama mengikuti umat manusia, tidak dapat begitu saja dihilangkan, apalagi menggunakan kekerasan dalam berbagai bentuk. Inilah akibat kalau penafsiran diserahkan kepada sebuah negara adikuasa belaka. Dan ini yang sebenarnya menjadi

esensi ajaran Mahatma Gandhi tentang *ahimsa* dan *satya graha*/ dunia tanpa kekerasan. Islam juga menolak penggunaan kekerasan semaunya saja oleh siapapun, dan kekerasan hanya dapat dilakukan oleh kaum muslimin, jika mereka diusir dari rumah-rumah kediaman mereka (*idzâ ukhrijû min diyârihim)*. {}



Saddam Hussein dan Kita

Dalam sebuah wawancara televisi, penulis mengemukakan bahwa banyak hal yang dilupakan Presiden Amerika Serikat, George W Bush Junior, mengenai Presiden Saddam Hussein dari Irak. Bush beberapa kali mengatakan, bahwa tujuan Amerika Serikat melakukan penyerangan berulang kali, untuk menangkap Saddam Hussein yang dianggapnya menjadi penyebab terorisme bersimaharajalela di dunia saat ini. Jadi, ia merasa berkewajiban menangkap Saddam Hussein untuk menegakkan pemerintahan yang kuat dan demokratis di Irak. Untuk tujuan itulah ia menyerang Irak secara besar-besaran. Bukan hanya sekadar bom yang dijatuhkan seperti hujan, melainkan juga dengan serangan seperempat juta orang bala tentara dari utara dan selatan, ditambah 40.000 orang prajurit Inggris. Ini berarti rangkaian serangan dalam ukuran perang sebenarnya.

Dilihat dari rencana semula, serangan itu seharusnya berakhir dengan kemenangan mutlak dalam waktu paling akhir 3 hari. Tetapi ternyata, setelah 13 hari serangan —ketika tulisan ini dibuat-, Saddam Hussein belum juga tertangkap. Sedang jumlah korban jiwa dan harta benda dalam satuan-satuan tempur pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat maupun kerugian material lainnya telah menimpa Amerika Serikat dan sekutunya dalam jumlah sangat besar, termasuk di dalamnya tank-tank dan senjata berat yang terkubur di gurun pasir.

Ini belum lagi termasuk sikap negara-negara Arab lainnya (di luar Kuwait), yang justru cenderung bersikap netral dalam sengketa tersebut. Di satu pihak, Bush Jr, tidak mengindahkan keputusan Dewan Keamanan PBB, sehingga serangan yang dilakukannya seperti tidak memiliki legitimasi internasional, sedang serangan atas Irak, merusak kehormatan nasional yang dimiliki negara-negara Arab lainnya.

Di samping hal-hal di atas, serangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya itu juga dilihat sebagai serangan terhadap Islam. Umat Islam di seluruh dunia menyesalkan hal itu, apapun sebab, alasan dan argumentasi untuk mendukung sikap menolak serangan itu. Megawati Soekarnoputri yang tidak mau mengutuk serangan tersebut, dianggap oleh banyak kalangan gerakan Islam di negeri kita, sebagai tidak membela Islam dari serangan (*invasi*) atas sebuah bangsa muslim seperti Irak. Bahkan banyak demonstrasi yang menuntut agar hubungan diplomatik RI-AS diputuskan saja, sedang produk-produk AS di boikot oleh kaum muslimin. Sebuah sikap konfrontatif yang sebenarnya jarang diperlihatkan oleh gerakan-gerakan Islam, di manapun ia berada.

Sebab utama dari reaksi seperti itu adalah inkonsistensi pernyataan Presiden AS George W Bush Jr, tentang hakikat serangan AS atas Irak. Awalnya ia mengemukakan serangan itu dilakukan guna mencegah malapetaka bagi dunia, karena Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dalam jumlah besar yang ditemukan. Ternyata belakangan diketahui, senjata-senjata itu justru dahulu diberikan AS kepada Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Ini berarti AS ikut membuat senjata-senjata tersebut di masa lampau, dan sekarang cuci tangan dari kesalahan tersebut.

Dalam kesempatan lain, Bush mengatakan bahwa Saddam adalah "tokoh jahat" (*evil figure*)" yang harus dilenyapkan karena melanggar hak-hak asasi manusia. Mengapa hanya Saddam Hussein? Bukankah ada sebuah negeri di Timur Tengah yang setiap tahun menembak mati para warga negaranya, hanya

karena mereka dianggap menjadi oposan politik bagi para penguasa negeri?

Kalau memang Bush benar-benar ingin membela demokrasi, tentunya ia harus mulai dengan Benua Amerika sendiri, masih ada negara-negara otokrasi di benua tersebut, seperti Guatemala. Bahwa ini tidak diperbuat Bush Jr, sangat mengurangi kredibilitas ungkapannya itu, hingga dapat dikatakan sebagai argumentasi kosong, pernyataan tersebut tidak punya arti apa-apa dan dengan demikian tidak menyakinkan siapapun.

Karena itulah terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia, apalagi di kalangan bangsa-bangsa muslim. Walaupun penulis sendiri dianggap sebagai "moderat", namun penulis tidak dapat menerima serbuan itu sebagai sebuah langkah yang tepat. Baik secara militer maupun menurut diplomasi, langkah itu adalah sebuah tindakan gegabah dari sebuah negara adi kuasa atas negara lain yang lemah.

Lebih-lebih lagi, Bush Jr sama sekali "melalaikan" perhitungan tujuan perangnya, yaitu menangkap Presiden Irak, Saddam Hussein. Maka jika dalam waktu tiga bulan Saddam Hussein tidak tertangkap, haruslah dilakukan penyelesaian damai. Sangat sulit untuk menangkap Saddam Hussein, karena hubungan yang sangat baik dengan suku-suku Arab yang berpindah-pindah tempat (*nomaden*) di Irak, Jordania, dan Syria. Mungkin Saddam Hussein akan mengulangi tindakannya dalam pertengahan abad lampau, ketika ia melarikan diri karena diancam hukuman mati di Irak. Dengan hubungannya yang sangat baik itu, Saddam dilindungi oleh suku-suku (*qabilah*) dari berbagai negara, sehingga ia sanggup berjalan kaki dan naik unta sejauh lebih dari 2.000 km untuk mencapai Mesir di bawah pahlawan Gamal Abdul Nasser.

Karena itulah, penulis mengatakan dalam wawancara dengan TV7, bahwa jangan-jangan diktum Von Clausewitz: "perang adalah penerusan perundingan damai yang gagal" harus dilaksanakan secara terbalik dalam kasus Irak. Yaitu, perundingan

damai adalah kelanjutan dari perang yang tidak mencapai tujuannya. Ini akan terjadi kalau dalam tiga bulan pasukan-pasukan AS-Inggris tidak berhasil menangkap Saddam Hussein. Karena rakyat AS tentu menuntut melalui demonstrasi besar-besaran agar pasukan AS ditarik dari Irak. Perundingan tersebut diperlukan untuk "menolong muka" AS. Hal ini juga penulis sampaikan kepada Duta Besar Australia di sebuah tempat lima hari setelah itu, di depan para stafnya.

Menjadi jelas dari uraian di atas, bahwa pengenalan mendalam atas sebuah kawasan sangat diperlukan jika ingin diambil tindakan militer atasnya. Dan pengenalan kawasan itu harus disertai pertimbangan objektif yang justru sangat diabaikan oleh Presiden Bush Jr. Arogansinya yang timbul dari pengetahuan, bahwa AS adalah satu-satunya negara adi kuasa yang dapat "mengalahkan" negara manapun, menutupi kenyataan serangan militer itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan geopolitis, bukan pertimbangan moral. Menurut "ketentuan" geopolitis Bush Jr, Irak sebagai penghasil minyak kedua terbesar di dunia, dengan 116 miliar barel atau sekitar separuh dari produksi Saudi Arabia sebagai penghasil minyak terbesar di dunia, haruslah "dikembangkan" sebagai imbangan, karena Saudi Arabia dewasa ini menyimpang dari kebijaksanaan luar negeri AS. Ditambah lagi, karena Irak saat ini mulai menggunakan mata uang masyarakat Eropa, *Euro* dalam menyelesaikan transaksi minyaknya.

Keterusterangan pihak AS dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan ekonomis ini, haruslah disampaikan oleh Bush Jr, setidak-tidaknya melalui berbagai lembaga-lembaga non-pemerintahan di negeri Paman Sam itu. Tindakan menutup-nutupi berbagai pertimbangan geopolitis dan finansial itu hanya akan mengurangi kredibilitas AS saja. Hilangnya kredibilitas itu akan memaksa negara tersebut, menggunakan kekuatan militer dalam hubungan dengan negeri-negeri lain. Menjadi teladan bagi kita, bahwa mengendalikan sebuah negara adi kuasa tidaklah

mudah, melainkan membutuhkan kemampuan bersabar dan sikap tidak memandang rendah orang lain. Apalagi hanya mendengarkan suara kelompok-kelompok garis keras belaka. Tidak mudah menjadi pemimpin dunia, bukan? {}



ADAKAH PERDAMAIAN DI IRAK?

Amerika Serikat (AS) telah menyerbu Irak dengan sekutu-sekutunya, melalui peralatan militer yang sangat canggih dan personel tentara yang tangguh dibantu oleh sistem komunikasi mutakhir. Dalam waktu tiga minggu, ibu kota Baghdad jatuh ke tangan pasukan AS, dan patung Saddam Hussein setinggi belasan meter itu dirobohkan. Anehnya, Saddam sendiri bersama keluarga dan menteri-menterinya tidak juga tertangkap. Hal ini sangat mengherankan, dan menimbulkan tanda tanya besar, apakah gerangan yang terjadi. Kalau tadinya diproyeksikan Saddam akan tertangkap dan ia digantikan oleh seorang pemimpin lewat pemilu demokratis, maka sampai tulisan ini dibuat hal itu belum terjadi.

Karenannya kita perkirakan hanya satu dari kedua proyeksi di atas akan terwujud, yaitu mengganti pemerintahan Saddam dengan pemerintah yang baru, itu pun belum tentu dapat diterima rakyat Irak. Pemerintahan yang baru itu akan melaksanakan pemilu dalam waktu dekat, guna mendirikan legitimasi bagi dirinya. Dan tanpa legitimasi itu, pemerintah yang didirikan, tidak akan menjadi pemerintahan yang kuat. Klaim Presiden Bush akan menjadi suatu yang kosong dan seluruh dunia akan bertanya mengapa Irak harus diserang? Jawabannya adalah, AS menyerbu Irak untuk kepentingan minyak bumi, alias hanya berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan geopolitis: "Menciptakan imbangan bagi Saudi Arabia yang merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia (dengan cadangan 260 milyar barel minyak mentah (*crude oil*), yang sekarang saja sudah mulai menyimpang dari kebijakan luar negeri AS dalam soal Israel."

Dalam waktu sekitar tiga bulan atau 100 hari, jika AS tidak berhasil menangkap Saddam Hussein maka rakyat AS tentu akan menuntut pasukan-pasukan mereka ditarik dari Irak. Jika ini terjadi, maka di samping adanya pemerintah yang lemah (dan belum tentu demokratis), maka mau tidak mau perdamaian di Irak menjadi opsi yang harus diperhitungkan? Di sinilah letak "kelalaian" dari serangan AS atas Irak itu. Sebuah serangan yang tidak memperhitungkan kemungkinan Saddam tidak tertangkap tentulah membawa resiko tersendiri, jalan selanjutnya melalui perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Irak.

*****

Kemungkinan penyelesaian damai di Irak, apalagi kalau PBB diserahi tugas "mengamankan" negeri itu, haruslah memperhitungkan hal lain, yaitu perlunya menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah. Karena itulah, penulis mengusulkan perdamaian di Irak harus terkait langsung dengan perdamaian abadi antara Palestina dan Israel. Dengan demikian, selanjutnya tidak ada "pengaruh-pengaruh negatif" perkembangan konflik antara Israel dan Palestina dengan perkembangan di Irak. Kalau kita berpikir secara rasional dan obyektif, tentu akan sampai ke tingkat itu. Dalam hal ini, apa yang dilontarkan penulis itu bukanlah sesuatu yang utopis dan dalam angan-angan saja.

Untuk mencapai perdamaian abadi antara Palestina dan Israel harus ada negara Palestina yang kuat, terutama industri dan perdagangannya. Hal itu hanya mungkin terjadi kalau ada pemerintahan yang kuat dan tangguh dalam negara Palestina *(State of Palestina).* Jika Israel memiliki industri dan perdagangan

yang tangguh, itu tidak lain pada masa permulaanya negeri itu mengenal sistem *Kibutz* (koperasi pertanian yang sangat tangguh). Sebagai tandingannya negara Palestina harus mengembangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang tangguh, guna melakukan pembangunan industri dan perdagangan yang tangguh pula. Untuk hal tersebut, disamping pemerintahan yang moderat dan kuat, juga diperlukan bantuan ekonomi secara besar-besaran dalam bentuk kredit murah bagi negeri Palestina.

Israel dan Palestina yang kuat, merupakan persyaratan utama bagi perdamaian dunia kawasan Timur Tengah, sedangkan perdamaian seperti itu sangat tergantung kepada kemampuan dunia untuk menciptakan perdamaian abadi di Irak. Inilah sebabnya mengapa penulis mengusulkan kaitan langsung antara perdamaian di Irak dengan antara Israel-Palestina. Sebagai orang luar yang memperhatikan perkembangan di kawasan Timur Tengah -karena merupakan bagian dari dunia Islam yang digelutinya-, maka usul itu tentunya memiliki unsur kemungkinan gagal yang cukup besar, tetapi ini tidak menghilangkan keharusan kita terus berupaya menciptakan perdamaian di manapun juga.

*****

Usul diatas penulis kemukakan dalam berbagai forum, antaranya pada ujung bulan Maret 2003, dalam sebuah konferensi penciptaan perdamaian di seluruh dunia di selenggarakan oleh IIFWP (*Interreligius and International Federation for World Peace*) di Washington DC. Begitu juga hal itu penulis kemukakan dalam rangkaian ceramah di Michigan University, Ann Arbor, pada akhir Maret 2003. Penulis lagi-lagi mengemukakan hal itu dalam seminar yang diselenggarakan Strategic Dialogue Centre Universitas Netanya, Israel di New York awal Februari 2003 lalu, berjudul “Mencari Kerangka Perdamaian di Timur Tengah”.

Dalam seminar di New York itu, penulis juga mengemukakan pentingnya mengenal sebab-sebab terorisme yang dilakukan sebagian sangat kecil kaum muslimin, dengan atas nama agama mereka, seperti peledakan bom di Bali

Di antara sebab-sebab yang dikemukakan penulis adalah kelalaian sebagian kecil kalangan pemuda muslimin untuk membedakan antara institusi (lembaga) dan budaya (kultur) Islam. Jika ada yang melupakan budaya (kultur) itu, tentu ada ketakutan bahwa institusi (kelembagaan) ke-Islaman sedang diancam oleh peradaban Barat dalam bentuk modernisasi . Dengan sendirinya, mereka merasa tantangan modernisasi dan ke barat-baratan sulit untuk dihadapi, maka mereka menggunakan segala macam cara (termasuk penggunaan kekerasan) dalam "mempertahankan" agama yang mereka cintai.

Dalam hal itu, mereka tidak memperhitungkan nyawa para korban yang berjatuhan, yang terpenting "rasa puas" karena telah dapat membela agama. Sikap mental yang demikian ini tentu saja negatif dan perlu diganti dengan tindakan lain yang lebih positif. Tentu hal itu akan terjadi jika pemikiran yang ada diarahkan kepada penciptaan kondisi damai di manapun kaum muslimin berada, termasuk di kawasan Timur Tengah.

Kalau kita palingkan perhatian dari kawasan tersebut, maka akan tampak betapa besar keragaman cara hidup di kalangan kaum muslimin yang berbeda etnis, bahasa, agama dan budaya yang mereka miliki. Kalau kita sadari hal ini dengan mendalam, maka tampak nyata bagi kita bahwa ragam dan jenis kaum muslim pun sangat banyak jumlahnya. Kewajiban kita untuk melestarikan hal itu. {}

Dapatkah Kita Hindarkan Perang Dunia Ke Tiga?

Judul dan sekaligus pertanyaan di atas, dapat dijawab dengan berbagai cara. Secara historis, perang dunia kedua berakhir dengan kalahnya Adolf Hitler dan Jenderal Tojo (Jepang) pada tahun 1945. Peperangan yang terjadi setelah itu secara umum dapat dianggap sebagai perang kemerdekaan, setidak-tidaknya dari kaca mata negara-negara yang memerdekakan diri dari penjajahan. Namun anehnya, perang Arab-Israel dalam tahun 1948, hanya oleh orang-orang Israel saja dianggap sebagai perang kemerdekaan. Karena orang-orang Israel melihat gerakan-gerakan *Hagana*, yang dipimpin Menachem Begin sebagai upaya mencapai kemerdekaan, sedangkan sejarah dunia tidak mau mencatatnya demikian.

Setelah terorisme berkembang, baik dalam bentuk "gerakan pembebasan" yang berdasarkan marxisme-leninisme, seperti di Kuba dan beberapa negara Amerika Latin, maupun yang berdasarkan ideologi keagamaan tertentu, seperti Pan-Islamisme dari Al-Afghani hingga ke Abu al-A'la Al Maududi di Pakistan, semuanya menunjuk kepada sebuah upaya bersenjata untuk merebut kekuasaan dan memaksakan visi masing-masing atas bangsa yang sebenarnya tidak mengikuti pikiran mereka. Dari sejarah berbagai gerakan Islam berwajah ideologis di Turki, gerakan di bawah pimpinan Nejmetin Erbakan kemudian "terpaksa"

mengadopsi pikiran-pikiran sekuler dalam partai politiknya Partai Keadilan dan Pembangunan, dan baru-baru ini memenangkan 2/3 lebih kursi parlemen negeri itu. Dengan kata lain, ketidakpuasan bangsa Turki atas pendekatan politis anti-agama dan pendekatan teknokratis dalam pembangunan oleh partai–partai politik yang berkuasa, akhirnya membawakan sesuatu yang baru: Islam membawa akhlak agama yang dirindukan, tetapi tidak membawa negara-agama yang penuh dengan segala macam keruwetan.

Hal ini juga secara terselubung merupakan persoalan yang melatarbelakangi tumbuhnya afilitas berbagai agama dunia kepada sejumlah partai politik tertentu. Soka Gakkai, sebagai organisasi Buddha terbesar di dunia, berada di belakang Partai Komeito, (partai bersih), yang sekarang menjadi partner junior dalam pemerintahan Jepang; begitu juga RSS (*Rashtriya Swayamsevak Sangh*), sebagai organisasi Hindu terbesar di India, berada di belakang BJP (*Barathiya Janata Party*) yang dipimpin Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee. Sementara itu, di Iran, *Jam'iya al-Taqrib bain al-Madzahib* (asosiasi pendekatan antar madzhab) pimpinan Ayatullah Wa'iz Zadeh mendukung tokoh moderat Mohammad Al-Khatami –yang kini menjadì Presiden Iran. Semuanya itu menunjukkan bangkitnya kembali paham keagamaan "non-legalis dan non-ideologis" di negara-negara itu.

Dari sudut sosiologis, munculnya elit baru yang sepenuhnya menggunakan "acuan-acuan Barat" yang positivistik dan teknokratik, yang didahului oleh sejarah moral yang panjang dari "bangsa-bangsa Barat", telah membawa ketegangan-ketegangan baru dalam hubungan antar kelompok di negara-negara sedang berkembang. Baik di dalam negeri masing-masing, maupun di kalangan anak-anak mereka yang belajar di "negeri-negeri Barat", dengan segera muncul semacam kesadaran harus melakukan sesuatu untuk melaksanakan -dalam beberapa hal tertentu memaksakan- moralitas baru dalam kehidupan masyarakat yang mereka kenal. Kesadaran seperti itu, dikombinasikan dengan sedikitnya pengenalan mereka akan sejarah Islam yang panjang -yang

senantiasa bersandar pada proses reinterpretasi ajaran agama-, akhirnya menumbuhkan "kebutuhan" akan tindak kekerasan, yang menjadi pangkal bagi munculnya terorisme dalam kalangan gerakan-gerakan Islam.

Dangkalnya pengetahuan agama para teroris itu, karena tidak mengenal proses penafsiran kembali ajaran Islam, juga diperparah dengan langkanya pengenalan akan kondisi berbagai masyarakat muslim. Tradisi Asia Tenggara yang menganggap LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai partner pemerintah dalam pembangunan, jelas tidak terdapat di Timur Tengah, di mana para rektor dan ketua gerakan palang merah, juga harus ditunjuk oleh Presiden, Raja atau Amir. Mereka yang tidak setuju dengan peranan pemerintah yang demikian besar, dengan sendirinya harus bergerak di bawah tanah untuk tidak melawan pemerintah. Karena itu pula mereka harus meniadakan perlawanan politis kepada pemerintah sendiri, namun melawan "materialisme Barat" dengan tindak-tindak kekerasan. Barulah setelah mereka mencapai kecanggihan finansial dan militer tertentu, mereka lalu membantu "orang-orang dangkal" di berbagai bilangan dunia, termasuk di negara-negara Asia Tenggara yang tadinya tidak mengenal terorisme terorganisir seperti itu. Yang dalam abad-abad yang lalu, adalah gerakan spontan yang tidak berumur panjang dalam "pembelaan terhadap Islam", yang bersifat mesianistik.

Hal yang bersifat antropologis, yang menandai munculnya berbagai usaha teroris di kalangan kaum muslimin, adalah hilangnya pembedaan antara institusi dan kultur. Namun gerakan-gerakan Islam tradisional tetap menekankan diri pada upaya-upaya kultural, -seperti pendidikan agama, pengelolaan harta benda-benda kaum muslimin (*wakaf*), pemunculan berbagai manifestasi kultural, seperti ziarah ke makam-makam suci dan penggunaan simbol-simbol agama seperti *shalawat* dan kegiatan seremonial kaum sufi dan reformulasi peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat-, dengan tidak memberikan tempat

kepada upaya-upaya institusionalisasi yang dibawakan oleh "kaum pembaharu" itu.

****

Dilihat dari berbagai sudut pandangan muslim Sunni tradisional di atas, jelas pendekatan terhadap berbagai manifestasi tindakan-tindakan kaum muslimin di seluruh dunia tidak dapat dianggap sebagai "berlatar belakang terorisme" belaka. Ada berbagai reaksi berlainan antara bermacam-macam masyarakat Islam, sehingga tidak dapat dicari pola umum tunggal dalam hal ini. Umpamanya saja, pandangan terhadap upaya demokratisasi dengan tumpuan pada kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara di muka undang-undang, bagi beberapa kaum muslimin Sunni tradisional tidak dianggap sebagai langkah menuju "pem-Barat-an". Dengan demikian, tidak setiap tindakan menyimpang dari demokrasi liberal harus dianggap sebagai sikap anti-Barat, melainkan pertanda sebuah pencarian antara sesama "gerakan Islam". Jelas upaya mereka itu tidak menggunakan kekerasan seperti beberapa partai–partai Islam di Indonesia, PAS di semenanjung Malaysia dan berbagai wilayah kaum muslimin yang lain. Karenanya, kita harus bersikap hati-hati dalam hal ini, dan tidak menganggap setiap upaya non-liberal sebagai musuh dari lingkungan anti-demokrasi.

Tidak semua keinginan berbagai gerakan Islam harus diwujudkan dalam kehidupan, karena sifatnya yang khusus bagi masyarakat Islam saja. Contohnya, adalah penghormatan sangat tinggi kepada para ulama–dalam masyarakat Islam. Mereka adalah penentu pendapat umum masyarakat, sehingga perlu dicari formulasi peranan para birokrat dan pengusaha kaya dalam masyarakat muslim yang semakin lama semakin canggih. Kegagalan menemukan rumusan yang baik dalam hal ini, akan membuat masyarakat muslim di mana-mana menjadi korban kepentingan kelompok-kelompok birokrat maupun pengusaha kaya yang ada

di kalangan masyarakat muslim itu. Sementara itu mereka tidak mengenal warisan tradisi yang ada, dalam bentuk penafsiran kembali ajaran–ajaran Islam sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Dengan sendirinya penafsiran mereka hanya bertujuan mencapai kebutuhan jangka pendek mereka sendiri akan sangat dominan.

Apa yang diperbuat mantan Presiden Soeharto dari Indonesia antara akhir 1989 hingga pertengahan 1999, dapat digunakan sebagai contoh dalam hal ini. Soeharto, yang tidak memiliki pengetahuan mendalam akan sejarah Islam, menganggap penguatan institusional bagi kaum muslimin di negaranya, sebagai cara terbaik untuk memperoleh dukungan masyarakat muslimin di Indonesia bagi pemerintahannya, yang semula didukung oleh ABRI/birokrasi/Golongaan Karya sebagai "partai pemerintah". Ia menambahkan unsur keempat untuk menopang pemerintahannya yang semakin melemah, dalam bentuk dukungan kongkrit kepada kaum muslim modernis, khususnya kepada Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ia melupakan NU sebagai kelompok muslim Sunni tradisional yang sibuk dengan manifestasi kultural Islam, dan melupakan kebutuhan institusional golongan itu. Sebagai seorang muslim dari lingkungan perwira yang dididik secara Barat, ia mengabaikan aspek-aspek kultural itu dan memusatkan diri pada penguatan institusional kaum muslimin modernis itu. Sebagai akibat, ia terasing dari dua kelompok masyarakat luas yang sangat berpengaruh: kaum muslim Sunni tradisional (yang diwakili NU) dan mereka yang terdidik oleh "sistem Barat" dan tidak mementingkan gerakan-gerakan Islam lagi, seperti kaum profesional, pengusaha, intelektual dan mahasiswa. Akibat lainnya, Soeharto tidak kuat menghadapi tekanan demokratisasi, apalagi ketika para politisi "mencuri" isu demokratisiasi dan reformasi di Indonesia, maka Soeharto tidak memiliki pilihan selain *lengser*. Ini menunjukkan, betapa salahnya menganggap Soeharto sebagai wakil golongan Islam. Dia hanyalah seorang pemimpin yang mencoba memanfaatkan sekian banyak institusi keagamaan bagi kepen-

tingan memelihara kekuasaan, namun ia gagal dalam hal ini.

Demikianlah salah satu contoh dari "manipulasi" kekuatan gerakan-gerakan Islam. Sekali manipulasi itu tidak lagi dinilai sebagai satu-satunya kebutuhan menjaga kepentingan golongan -sebagaimana dirasakan para ulama di Indonesia-, maka upaya menegakkan demokrasi dan memperluas otonomi daerah di negeri itu, dianggap sebagai "memenuhi kebutuhan kaum muslimin" di negeri itu. Inilah yang membuat mengapa PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) memiliki prospek sangat cerah sebagai pemenang mayoritas tunggal dalam pemilu Indonesia tahun depan. Ini tampak jelas bagi orang yang mengikuti dan mengamati komunikasi langsung antara PKB dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Kalangan Kristen, kelompok-kelompok minoritas etnis (seperti kaum Tionghoa) yang mencapai 15% seluruh bangsa, kaum profesional-intelektual-mahasiswa mendukung partai itu, karena melalui dukungan itu mereka mengharapkan bentuk-bentuk demokratisasi akan terwujud di negeri khatulistiwa ini. Dengan melakukan fungsionalisasi Islam, disamping mempelopori proses demokratisasi, PKB berhasil menetralisir dampak-dampak negatif di dalam negeri dari terorisme kaum muslimin radikal. Hasil dari upaya ini tidak akan lama lagi, jika negeri ini menjalankan dua hal.

Hal pertama, haruslah dikembangkan pendapat yang mencoba melakukan identifikasi upaya-upaya redefinisi fungsi-fungsi Islam dalam kehidupan masyarakat, dengan berbagai tindakan demokratisasi. Dan kedua, adalah penegakkan demokrasi di negeri berpenduduk puluhan juta manusia yang menginginkan kehidupan demokratis bagi bangsa tersebut, yang berintikan penegakan kedaulatan hukum.

****

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan,

untuk memerangi terorisme yang dilakukaan oleh golongan-golongan muslimin radikal di Indonesia, dengan ujung peledakan bom di Bali, diperlukan langkah-langkah berikut.

Pertama, diperlukan kemampuan membedakan secara tajam antara kelompok kultural dan kelompok institusional, di antara berbagai kelompok–kelompok kaum muslimin di negeri itu. Kedua, dilakukan pengenalan mendalam dan penyebaran konsep-konsep memajukan warga masyarakat muslim di negeri itu, dari kemiskinan yang masih melatarbelakangi prosentasi sangat besar dari penduduk secara keseluruhan. Ketiga, meng-optimalkan kembali kemampuan bangsa Indonesia menekan pertumbuhan penduduk, -hingga pertengahan 1995 pertumbuhan penduduk hanya 1,6% tiap tahun, berarti penambahan penduduk sekitar 3,5 juta jiwa, tapi sejak beberapa tahun terakhir ini kembali menjadi 3,5%-. Pemerintah yang sekarang ini berkuasa, tidak mampu menekan kenaikan absolut jumlah warga negara yang justru dirugikan oleh program-program pembangunan yang tidak memiliki wawasan kependudukan. Keempat, sikap arogan mereka yang merasa "berjuang secara fisik untuk Islam", haruslah diatasi paling tidak oleh pemerintah. Tindakan menghukum mereka itu haruslah diusahakan, karena sebenarnya bertujuan menghilangkan sikap arogan yang selalu merasa benar dan menganggap pihak-pihak lain salah. Karenannya tindakan kepala team Polri yang menangkap mereka yang disangka melakukan terorisme dengan meledakkan bom di Bali (Imam Samudra, Amrozy dan sejumlah teman lainnya) dengan memasukkan I Made Pastika dan Edy Darnadi ke dalam team tersebut, jelas merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberlakukan keinginan menghukum itu.

Terserah kepada bukti-bukti legal yang diperoleh, memiliki kekuatan untuk itu atau tidak, namun jelas merupakan langkah pertama untuk menindak terorisme yang berbaju agama itu. Di sini berlaku apa yang dikatakan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Mesir, Al-Ashmawi, bahwa selama tiap tindakan

hukum di bidang pidana memiliki unsur hukuman dan cegahan (*punishment and deterrence*), selama itu pula ia dapat disamakan dengan hukum pidana kanonik yang terdapat dalam hukum Islam (*fiqh*). Dengan demikian, salah satu keberatan para teroris yang diadili itu, melalui para pengacara mereka, bahwa mereka tidak dapat dikenakan tindakan legal berdasarkan "Hukum Barat", seperti hukum Pidana Indonesia saat ini yang dikodifikasikan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), tertolak dengan sendirinya.

Di samping upaya hukum itu, diperlukan pengamatan ketat dari pihak intelijen, guna menangkal upaya-upaya teroristik yang mereka lakukan, sebelum hal itu terjadi. Ini sangat diperlukan karena letak geografis Indonesia yang sangat memudahkan langkah-langkah mempersiapkan terorisme internasional di dalam negeri, dengan bantuan keuangan dan latihan-latihan dari luar kawasan Asia Tenggara. Jumlah pulau Indonesia sebanyak 17.000 buah, dengan 4000 buah diantaranya tanpa penghuni, adalah sesuatu yang sangat mudah bagi gerakan-gerakan teroris internasional untuk menciptakan kondisi matang bagi terorisme. Apa yang dilakukan gerakan Abu Sayyaf di Filipina Selatan, merupakan bukti adanya watak internasionalistik dari tindakan-tindakan teror yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Tidak menjadi soal apakah gerakan tersebut punya kaitan dengan MILF (Moro Islamic Liberation Front) atau MNLF (Moro National Liberation Front), jelas watak internasional dari gerakan tersebut menunjuk kepada penanganan lebih menyeluruh dari pihak internasional di bawah koordinasi Pemerintah Filipina.

Kegagalan untuk menciptakan mekanisme yang diperlukan untuk menangani terorisme itu, akan membawa konsekuensi-konsekuensinya sendiri, seperti perkembangan di Australia dan Jepang serta reaksi-reaksi balik dari "negeri-negeri sosialistik" di kawasan pasifik selatan. Belum lagi kalau dilihat kemungkinan bersambungnya gerakan tersebut dengan terorisme "bertopeng" agama Islam yang berkembang secara domestik di Indonesia.

Tindakan-tindakan hukumlah yang akan membuktikan, apakah yang terjadi di Indonesia juga merupakan sesuatu yang berwatak internasional. Memang ada oknum-oknum dari berbagai gerakan Isalam di Indonesia yang tampak memiliki hubungan dengan MILF dan MNLF di Filipina Selatan, tetapi masih terlalu dini untuk melihatnya sebagai jaringan terorisme internasional.

*****

Hal kelima yang harus dilakukan, adalah memberikan informasi yang benar tentang jalannya sejarah Islam kepada generasi muda kaum muslimin sendiri. Kepada mereka tidak jemu-jemunya harus diberikan keterangan, bahwa dalam perkembangannya, Islam mendasarkan diri kepada proses penafsiran kembali, dan tidak merujuk kepada perlawanan keras (apalagi fisik) kepada proses modernisasi. Sabda Nabi Muhammad Saw, umpamanya, "*Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di muka umat-umat lain pada hari kiamat*", seharusnya maksud sabda itu bersifat kualitatif, bukannya kuantitatif seperti yang banyak diartikan oleh mayoritas kaum muslimin sekarang. Karenanya tidak ada alasan untuk menolak gagasan keluarga berencana selama tidak menghilangkan wewenang reproduktif yang ada di tangan Tuhan atas umat manusia, dengan melaksanakan kontrasepsi yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Di samping itu diperlukan pula pengembangan pemikiran kaum muda bangsa ini, dengan memaparkan bahwa kawasan Timur Tengah tidak memiliki tradisi LSM yang kuat, sehingga kritik-kritik terhadap pemerintahan mereka harus dilaksanakan di bawah tanah, maka kritik-kritik terbuka itu diarahkan bukan kepada pemerintah sendiri, melainkan kepada "cara hidup Barat". Inilah yang kemudian masuk ke dalam pola pemikiran Samuel Huntington dengan teori perbenturan budayanya (*Clash of Civilization*) yang terkenal itu. Huntington lupa bahwa tiap tahun,

puluhan kalau tidak ratusan ribu pemuda muslim belajar "teknologi Barat", yang berarti juga terjadinya akomodasi budaya antara Islam dan Barat.

Proses saling belajar seperti itu, jika tidak dijelaskan dengan baik, justru akan membuat para pemuda muslim cenderung menganggap Barat sebagai musuh, dan dengan demikian membuat mereka menggunakan kekerasan melawan apa yang mereka anggap sebagai "musuh" itu. Perbedaan persepsi dari proses besar itu, justru digunakan oleh tokoh-tokoh Islam yang melihat "bahaya" dari perjumpaan akomodatif antara Islam dan Barat itu. Apalagi, jika di dunia Barat sendiri lahir kelompok-kelompok yang "benci" kepada peradaban Barat itu sendiri, seperti Louis Farrakhan di Amerika Serikat.

Dalam hal ini, studi kawasan Islam (*Islamic Area Studies*) sangat diperlukan, karena dengan demikian akan nampak perbedaan cara hidup kaum muslimin dari sebuah kawasan ke kawasan lain dengan jelas. Penulis pernah mengemukakan kepada Universitas PBB di Tokyo dalam tahun-tahun 80-an, dunia Islam sebaiknya dibagi menjadi enam buah studi kawasan: masyarakat-masyarakat muslim di kawasan Afrika hitam, kawasan Afrika utara dan dunia Arab, kawasan budaya Turki-Persia-Afghan, kawasan Asia Selatan (Bangladesh, Nepal, Pakistan, India dan Srilangka), kawasan Asia Tenggara dan kawasan minoritas muslim di negeri-negeri berteknologi maju. Sekarang ini kita cenderung melakukan studi kawasan nasional, padahal yang diperlukan adalah studi kawasan regional. Ini saja sudah menunjukkan betapa jauhnya jarak antara kerja intelijen dengan kerja dunia akademik. Herankah kita jika lalu para politisi banyak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan? Ini tentu berimbas pada sikap bersama kita terhadap tindakan-tindakan para teroris. {}

HARUSKAH ADA KESEPAKATAN?

Sewaktu penulis berkunjung ke Boston, kota pelajar di Amerika Serikat (AS), bulan September 2002, penulis diminta memberikan ceramah bagi sejumlah mahasiswa asing di Kennedy School of Government Universitas Harvard. Penulis diminta para mahasiswa tersebut melalui anak penulis Zannuba Arifah Chafsoh yang belajar di situ untuk program setahun lamanya. Saat itu minggu sore hari, penulis diminta berbicara mengenai situasi global saat ini, bagaimana responsi gerakan-gerakan dan negara-negara muslim di dunia atas perkembangan tersebut, dan apa akibatnya bagi Indonesia.

Sungguh sebuah tema yang besar —yang tentunya tidak akan dapat dikemukakan hanya dalam waktu dua jam saja, dan itupun termasuk dengan tanya jawabnya sekalian. Demikian pula, melihat komposisi mahasiswanya yang datang dari berbagai negara, kiranya tidak memungkinkan untuk mengupas satu-persatu tema di atas. Sebab, bagi mahasiswa-mahasiswa Amerika Latin —misalnya, tentu tidak tahu persoalan Asia Tenggara. Dan begitupun mahasiswa non-muslim tentu juga tidak mengerti masalah-masalah yang dihadapi kaum muslimin. Karena itu, penulis harus memilih masalah paling utama yang sedang aktual dibicarakan di mana-mana, yaitu rencana penyerangan dan pemboman AS atas Irak. Dari hal itulah baru dikernukakan hal-hal

mendasar yang menyangkut ketiga tema di atas.

Penulis beranggapan, penyerangan dan pemboman AS atas Irak dapat dipastikan akan mencapai semua hasil yang diharapkan. Mungkin, karena masalah produksi dan penyediaan bahan bakar minyak bumi yang melimpah-ruah dapat diubah melalui penyerangan tersebut, atau Saddam Husein digulingkan dari pemerintahannya. Tetapi bahwa Irak akan menjadi negara penurut bagi AS, rasanya jauh dari kenyataan. Para pemimpin oposisi Irak yang menentang Saddam Husein dan baru-baru ini berkumpul di Gedung Putih—setelah memegang tampuk pemerintahan dukungan AS, belum tentu nantinya akan mengikuti kehendak negara Paman Sam itu. Untuk dapat bertahan, mereka harus pandai-pandai menampung perasaan rakyat Irak yang benci terhadap campur tangan asing, dalam hal ini adalah AS. Ini semua, merupakan sebuah aspek saja yang harus diperhitungkan dalam melihat permasalahan di atas.

*****

Sekali lagi, menjadi nyatalah bagi kita bahwa kekuatan saja belum tentu dapat mengubah perasaan orang banyak. Ada residu perasaan tidak senang, apabila kekuatan dan kekuasaan digunakan secara berlebihan. Dalam jangka panjang, hanya kerugian bagi semua pihak saja yang terjadi akibat pertimbangan-pertimbangan geopolitik yang digunakan AS saat ini. Karenanya, kita harus berhati-hati dengan berbagai pertimbangan tersebut, apalagi kalau tindakan yang diambil sangat dipengaruhi oleh emosi para pengambil keputusan.

Tampaknya, Presiden AS George W. Bush Jr, merencanakan serangan dan pemboman atas Irak itu dengan pertimbangan mencari popularitas, karena ketidakmampuan memecahkan krisis ekonomi AS yang sedang terjadi. Tetapi bahayanya, kalau serangan dan pemboman besar-besaran itu tidak menghasilkan sikap Irak untuk mengikuti kehendak AS -katakanlah di bidang minyak

bumi, ditambah dengan jumlah besar penduduk sipil yang menjadi korban serta banyaknya serdadu AS yang gugur atau menderita luka-luka di kawasan tersebut, bisa jadi pendapat umum di AS dapat berbalik menyalahkan Presiden tersebut. Dan kemungkinan untuk itu tampaknya cukup besar, karena Saddam Husein menarik pasukan-pasukannya ke kawasan perkotaan, yang berati akan jatuh lebih banyak korban, apalagi kalau ia berhasil menggerakkan perlawanan gerilya kota terhadap serangan AS. Sementara itu, bagi kaum muslimin di seluruh dunia, serangan dan pemboman itu akan menimbulkan kemarahan luar biasa terhadap Pemerintah AS sendiri. Karena ketidakberdayaan menghentikan serangan dan pemboman itu, dengan sendirinya peradaban yang melahirkannya yaitu peradaban Barat, ditolak sebagai mitra peradaban Islam ke arah kemajuan. Dengan demikian, kemelut psikologis yang menghinggapi diri kaum muslimin di seluruh dunia, akan semakin menjadi-jadi, minimal bagi para warga gerakan-gerakan Islam. Sikap keras sebagian mereka, dengan sendirinya semakin sulit untuk dilerai, dan perlawanan gila-gilaan seperti bom bunuh diri di Israel-Palestina akan semakin banyak. Kalaupun tidak bertambah jumlahnya, reaksi psikologis yang menghinggapi para warga gerakan-gerakan Islam itu akan menjadi keras dan bertambah kompleks. Apalagi ditambah dengan sikap Perdana Menteri Ariel Sharon dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Jenderal Allon yang semakin keras terhadap kaum pejuang Palestina, maka rasa tidak berdaya itu akan berubah secara kualitatif dan kuantitatif menjadi kebencian semakin besar terhadap "peradaban Barat".

*****

Bagi Indonesia, atau lebih tepatnya bagi gerakan-gerakan Islam moderat di negeri ini, tantangan yang dihadapi juga akan semakin besar. Di tengah-tengah sikap moderat kebanyakan kaum muslimin di negeri ini, terdapat kelompok-kelompok

"muslim garis keras" yang tentu saja akan merasakan tekanan-tekanan psikologis yang dirasakan kaum muslimin di seluruh dunia sebagai akibat dari serangan dan pemboman AS atas Irak itu. Rasa tidak berdaya itu tentu akan membawa akibat-akibatnya sendiri yang serius bagi keadaan umat manusia dewasa ini, yaitu membuat lebih tipis keinginan mencari langkah-langkah akomodatif antara peradaban Islam dan peradaban-peradaban lain.

Rasa tidak berdaya itu, tentu lebih terasa di kalangan kaum muda dan kaum miskin perkotaan (*urban poor*), suatu hal yang sama sekali tidak dilihat oleh Presiden George Bush Jr, yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya, dari kualitas pertimbangan-pertimbangan geopolitis yang digunakan olehnya. Di sinilah sebenarnya terletak pangkal masalah yang dihadapi umat manusia dewasa ini.

Di satu pihak, negara-negara yang berindustri maju, sering disebut sebagai negara-negara makmur *(affluent countries)*, tidak penah menyadari parahnya keadaan di negara-negara berkembang dan lebarnya kesenjangan antara kaum kaya dan miskin di kawasan-kawasan tersebut. Memang, meski peperangan terhadap terorisme internasional dan penegakan demokrasi telah dilakukan, tetapi AS bukanlah contoh yang baik tentang bagaimana upaya menegakkan demokrasi dan menghilangkan kesenjangan kaya-miskin serta pembelaan terhadap negara-negara berkembang yang lemah. Bahkan, AS sendiri lebih sering dianggap sebagai pendukung para penguasa lalim di seluruh dunia. Kalau demikian, berhakkah dia berbicara tentang moral dan etika? Padahal perjuangan melawan terorisme internasional dan domestik, haruslah didasarkan pada acuan moral dan etika. Karena, banyak yang mempertanyakan hak AS untuk memberantas terorisme internasional, yang akan membunuh sangat banyak penduduk sipil yang dibom dan diserang dengan sebuah keputusan yang bersifat unilateral.

Dengan dasar etis dan moral yang masih dipertanyakan,

herankah kita jika banyak kaum muslimin lalu mengambil sikap mempertanyakan sendi-sendi peradaban yang tidak seimbang antara yang terjadi dengan yang dibawakan AS sebagai negara adikuasa dan negara-negara berteknologi maju? Karena tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup, herankah jika mereka melihat sikap moderat mayoritas kaum muslimin, sebagai langkah menyerah bulat pada peradaban sekuler yang melahirkan arogansi sikap itu? Sikap Presiden Bush itu membebani kaum muslimin moderat dengan tugas yang tidak ringan, yaitu mengatasi sikap utopis di kalangan kaum "muslimin garis keras". Adilkah yang demikian itu? {}

PERTENTANGAN BUKANLAH PERMUSUHAN

Ketika penulis memberikan ceramah di KSG (Kennedy School of Government) bagi sejumlah orang mahasiswa Universitas Harvard, akhir September 2002 ini, ada pertanyaan dari seorang mahasiswa pascasarjana asal Singapura: mengapakah penulis memusuhi Singapura? Penulis menjawab, bahwa ia memang menolak arogansi sementara para pemimpin Singapura, yang *sok tahu* tentang perkembangan Islam di Tanah Air kita. Bahkan dua orang pejabat tinggi Singapura menyatakan bahwa "muslim garis keras" akan memerintah Indonesia dalam waktu 50 tahun lagi. Penulis menyatakan melalui jawaban tulisan —ia menjawab melalui beberapa buah media massa Indonesia yang masih mau memuat pernyataannya, bahwa kita tidak perlu mendengarkan pendapat kedua orang pemimpin Singapura tentang Islam di negeri ini, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang agama tersebut.

Jawaban penulis ini, menunjuk pada sebuah perkembangan penting di negeri kita. Karena para pemimpin kita di masa lampau menerima suapan dari sejumlah tokoh Singapura, lalu mereka berada pada posisi bergantung pada ekonomi Singapura. Karena itu, timbulah arogansi di kalangan sementara tokoh negeri itu. Bahwa Indonesia kini tidak berdaya, tapi dapat memperbaiki hidupnya sendiri tanpa pertolongan mereka. Dari arogansi ini, lalu timbul sikap mementingkan pihak yang tidak penting, dan memberikan penilaian yang terlalu tinggi terhadap mereka.

Termasuk dalam sikap ini, pandangan sangat merendahkan terhadap kaum Sunni tradisional seperti yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama sendiri. Selain itu, karena penulis tidak mau menggunakan kekerasan untuk mempertahankan jabatan negara, sebagai presiden yang berfungsi menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sikap itu dianggap mereka sebagai kelemahan. Mereka tidak ada percaya, bahwa demokrasi melalui pemilihan umum akan memberikan penilaiannya sendiri. Apalagi karena memang para tokoh Singapura itu tidak percaya pada demokrasi dan memperlakukannya secara manipulatif.

Begitulah pandangan seorang tokoh Singapura yang dianggap sudah mendunia, padahal postulat-postulat yang digunakannya hanya berasal dari kalangan elit belaka. Kelompok tersebut, tidak pernah menyadari bahwa dunia baru sedang menggeliat, bangun dari tidurnya selama berabad-abad. Dunia baru itu mengembangkan postulat-postulat dan premis-premisnya sendiri, yang harus ditangkap dengan jitu oleh semua pihak, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak. Termasuk di dalamnya, kaum muslimin moderat yang sanggup mempertahankan keyakinan agama mereka, sambil menyerap hal-hal baik dari kemajuan pengetahuan dan teknologi modern.

Jelaslah dari uraian di atas, penulis tetap menganggap penting kemajuan pengetahuan dan teknologi Singapura, namun penulis tetap beranggapan bahwa Singapura juga memiliki keterbatasannya sendiri. Ini berarti, sikap arogan dari sejumlah tokoh mereka terhadap Indonesia dan Islam harus dihilangkan, jika diinginkan tetap ada hubungan baik antara kedua negara. Penulis sendiri sangat menghargai kemampuan bangsa Singapura untuk maju dengan cepat, walaupun terkadang dicapai atas kerugian bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bagaimana mempertahankan kemajuan yang dicapai, sambil menghargai dengan sungguh-sungguh upaya bangsa-bangsa sekitar untuk maju dengan cara mereka sendiri.

Sikap memandang rendah bangsa dan negara lain —betapa

canggihnya sekalipun ia dibungkus-, tetap akan tampak dalam jangka panjang. Inilah yang membuat orang-orang seperti penulis berbeda pandangan dari tokoh-tokoh arogan Singapura itu. Walaupun penulis berbeda pandangan dari tokoh-tokoh tersebut, namun ia tidak memusuhi bangsa Singapura. Sebagai penganut paham non-hegemonik hubungan internasional, penulis sangat menghargai bangsa Singapura. Tetapi ini tidak berarti penulis menganggap Singapura patut menjadi contoh bangsa dan negara kita. Tentu saja persoalan-persoalan yang dihadapi negara-kota (*city state*) -yang sangat kecil seperti Singapura-, tidak sama dengan masalah-masalah yang dihadapi negara-bangsa (*nation state*) seperti Indonesia, yang memiliki lebih dari 200 juta penduduk dan memiliki wilayah ribuan kilometer.

Dengan sendirinya, para pemimpin negara kita harus memiliki wawasan dan kebijakan (*policy*) sendiri, yang akan melahirkan kebijaksanaan (*wisdom*) dalam menangani berbagai masalah dalam menghadapi bermacam-macam sikap, termasuk arogansi tokoh-tokoh negara lain sekecil Singapura itu.

Jelaslah dengan demikian, apa yang baik bagi Singapura, belum tentu baik bagi Indonesia. Penulis teringat ungkapan CEO *(Chief Excutive Officer)*, pejabat ekskutif tertinggi General Motors, beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu Charlie "Engine" Wilson, bahwa apa yang baik bagi perusahaan tersebut, juga baik bagi Amerika Serikat, tidak berlaku dalam hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura. Sekarang saja, ketika komplek serba ada seperti ITC di Mangga Dua sudah berfungsi, Singapura sudah kewalahan menarik para pembeli kita. Demikian juga, hotel-hotel mereka yang dahulu memanfaatkan konsumen dari negara kita, sekarang juga dibuat pusing oleh sulitnya menarik para pembeli bangsa kita.

Bangsa Singapura harus menyadari, pola hubungan berketergantungan antara negara mereka dengan Indonesia-Malaysia-Thailand-Brunei Darussalam, adalah pola hubungan tidak normal, yang pada suatu ketika akan berfungsi kontraproduktif

dan merugikan Singapura sendiri. Ini berarti, sikap arogan terhadap bangsa-bangsa dan negara-negara sekitar, haruslah diakhiri. Hubungan baru harus segera dibuat atas dasar saling penghormatan dan kesadaran masa depan bersama yang akan penuh rintangan. Sekarang saja, tekanan kegiatan ekonomi ASEAN sudah berpindah dari kawasan selatan ke kawasan utara persekutuan tersebut. Proyek Delta Mekong yang melibatkan Thailand-Kambodia-Vietnam-Laos dan Myanmar merupakan titik baru ekonomi regional, walaupun proyek jalan raya, pelayaran maupun penerbangan BIMP-EAGA (Filipina–Brunei–Malaysia-Indonesia dan kawasan pengembangan ASEAN Timur) masih tersendat-sendat.

Kesadaran bersama ini mengambil bentuk bermacam-macam. Indonesia, umpamanya, lebih mementingkan pelabuhan samudera. Sementara upaya mengatasi kebakaran hutan yang mengganggu negara-negara tetangga, adalah antara lain dengan mempertimbangkan usulan Ir. Erna Witoelar agar kelompok-kelompok masyarakat memiliki dan mengelola daerah-daerah pinggiran hutan, agar mereka turut bertanggungjawab dalam memelihara kelebatan hutan, karena ditakutkan akan merembet ke kawasan yang mereka miliki. Juga, kelestarian sumber-sumber alam, seperti batu-bara, minyak bumi, gas alam serta barang tambang lainnya, akan membawa perubahan besar-besaran dalam mengelola ekonomi di masa depan. Di sini yang dipentingkan adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat kebanyakan, agar mereka turut bertangungjawab atas kelestarian sumber-sumber alam tersebut.

Ini semua berarti, Indonesia akan membuka diri terhadap investasi masuknya modal asing. Kalau ini yang selalu diingat, hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya, atas dasar prinsip saling menghormati, akan menjadi lancar dan mendorong stabilitas kawasan. Dan, hal itu berarti harus ada penyeimbangan kepentingan nasional masing-masing negara, di satu sisi dan kepentingan bersama bagi kawasan yang memiliki kolektifitasnya sendiri, di sisi lain. {}

INDONESIA-MUANGTHAI: SEBUAH KEMUNGKINAN MEMPERLUAS KERJASAMA

Seorang yang dekat dengan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra (dibaca,Cinawat) mengatakan pada penulis tentang ketidakmengertian orang-orang Thai tentang tidak terlaksananya dua buah masalah pokok yang telah disepakati antara Muangthai dan Indonesia. Yang pernah dicapai antara Perdana Menteri Thaksin dengan penulis, dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanpa pelaksanaan kedua hal itu, yang terjadi adalah keraguan dari pihak Muangthai, benarkah orang Indonesia serius dalam melaksanakan hal-hal yang telah disepakati? Jika dapat berjalan dengan lancar, maka sekaligus akan merupakan terobosan.

Kedua hal itu adalah kesepakatan untuk memproses minyak mentah Indonesia di berbagai kilang minyak Muangthai, tujuannya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada kilang-kilang minyak Singapura. Tampaknya, para pejabat Pertamina tidak mau bersusah payah dalam hal ini, karena hanya bersedia bersandar pada keinginan pemerintah Singapura saja. Dalam pembicaraan itu penulis menyatakan bahwa mungkin pihak pemilik kilang di Singapura telah memberikan sesuatu sebagai sogokan kepada para pejabat Indonesia.

Hal kedua adalah menciptakan keseimbangan perdagangan (*balance trade account*) dalam perdagangan antara Indonesia-

Muangthai. Dasar dari pemikiran itu, adalah apa yang dialami oleh negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II. Waktu itu, negara-negara Eropa tidak memiliki jumlah uang yang besar, sehingga mereka tidak menggunakan uang sama sekali dalam perdagangan antar negara di Benua Eropa. Jika hampir tutup buku, mereka cukup membandingkan neraca pembayaran antara dua negara. Dari situ akan tampak, berapa tanggungan sebuah negara pada negara yang lain sebagai hasil penyeimbangan. Hanya jumlah berlebih itulah yang harus dibayar dalam valuta asing oleh sebuah negara dalam sistem penyeimbangan itu. Hal ini dilakukan, oleh negara-negara yang kekurangan valuta asing.

*****

Bagi negara-negara berkembang, yang selalu kekurangan devisa, sebaiknya menerapkan cara ini di antara mereka. Dengan demikian, keseimbangan neraca perdagangan dapat dipelihara, tanpa menghilangkan kewajiban menyelesaikan jumlah-jumlah selisih antara mereka dalam neraca pembayaran. Hanya dengan cara inilah dapat dilakukan kerjasama untuk melawan kekuasaan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Namun, keinginan mulia Muangthai justru tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia sekarang yang sedang mengalami krisis multidimensional. Ini adalah hal yang sangat mengherankan Muangthai sendiri.

Penulis menyatakan, tidak usah heran dengan sikap tersebut. Karena Indonesia sangat tergantung kepada mitranya dari negara-negara berteknologi maju, dan kurang memperhatikan sesama negara melarat. Ini tentu disebabkan oleh kecenderungan para penguasa negara untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, baru setelah itu memikirkan kepentingan negara. Mentalitas inilah yang diketahui para pengusaha negara-negara berteknologi maju, hingga upeti tertentu dapat dibayarkan untuk kepentingan kalangan pejabat di negeri ini.

Keheranan teman-teman di Muangthai itu segera terjawab karena sebab-sebab tadi. Nyata benar, sikap para penyelenggara pemerintahan, dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi negeri ini. Karenanya, patutlah pertimbangan Paul Krugman, seorang maha guru ekonomi dari MIT (*Massachusset Institute of Technology*) bahwa selama birokrasi pemerintah di Indonesia berjumlah terlalu besar dan belum bersih betul dari korupsi, selama itu pula jangan diharapkan untuk bisa sukses ketika keluar dari IMF (*International Monetary Fund*). Selama kebersihan birokrasi pemerintah tidak diperhatikan, maka jangan diharapkan akan tumbuh sikap yang memandang perlu memelihara kepentingan orang banyak.

*****

Jelas dari uraian diatas, hubungan sehat dalam perdagangan antar negara sangat tergantung pada kesehatan birokrasinya. Sikap inilah yang tidak pernah mendapatkan perhatian serius kita dalam peyelenggaraan kemitraan dengan sesama negara berkembang, baik dalam lingkungan ASEAN maupun di luarnya.

Karena itu, kita tidak perlu heran dengan pertanyaan orang-orang Muangthai yang menanyakan keseriusan untuk bermitra antara sesama Negara ASEAN, maupun antara sesama negara berkembang. Dan jangan heran dengan keluhan para pengamat luar dan dalam negeri, karena sebenarnya kita juga tahu akibat yang ditimbulkan penyelenggara pemerintahan, bersumber dari pemahaman mereka atas situasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi masing-masing.

Dengan menelaah apa yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan tadi, tentu saja keinginan penulis untuk mewujudkan sebuah prinsip bekerjasama antara sesama negara berkembang seringkali diabaikan, seperti halnya bagaimana kita menyambut sebuah investasi yang akan menguntungkan daerah. Keinginan penulis untuk mewujudkan segala sesuatu yang

produktif, antara para pejabat Muangthai dengan pejabat Indonesia ternyata masih harus ditunda lagi, hingga entah kapan terwujudnya. Jadi tidak heranlah jika kepentingan negara-negara berteknologi maju lebih diutamakan oleh para penyelenggara pemerintahan kita saat ini. {}



PEMBENTUKAN SEBUAH FORUM DI BANGKOK

Pada pertengahan Juni 2002, penulis pergi ke Bangkok, Thailand. Di kota tersebut, penulis menghadiri pembentukan sebuah lembaga pertimbangan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bernama *World Council for Religious Leaders* (Dewan Dunia Pemimpin-pemimpin Agama). Dalam anggaran dasar lembaga pertimbangan itu, dikemukakan bahwa lembaga itu mengacu kepada perdamaian dunia tanpa kekerasan, dan harus berbicara mengenai cara-cara mencapai perjuangan perdamaian dunia sebagai kenyataan yang paling diperlukan di dunia ini. Lembaga ini adalah hasil dan Konferensi Dunia untuk Agama dan Perdamaian (*World Conference on Religion and Peace*), yang dibuka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu, Bill Clinton, tahun 2001. Penulis sendiri dan Presiden Khatami dari Iran, ketika itu, tidak dapat datang karena kesibukan masing-masing di dalam negeri. Namun, ia diwakili oleh Ayatullah Taskhiri dan *Diwan Al-Taqrib Baina Al-Madzâhib* (Dewan Pendekatan Antar Sekte). Dihadiri oleh para agamawan dari berbagai agama, pembentukan lembaga tersebut merupakan sebuah kejadian penting, karena para agamawan itu mewakili para agamawan se-dunia untuk memberikan pertimbangan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Walaupun fungsi badan ini hanyalah memberikan pertimbangan belaka, yang dapat dipakai atau dibuang oleh organisasi tingkat dunia itu, namun pertimbangan yang diberikan memiliki bobot tersendiri. Karenanya, lembaga baru ini tidak dapat begitu saja diabaikan, sebab ia merupakan langkah baru untuk memperkuat badan tingkat dunia seperti PBB itu.

*****

Dalam pidato pembukaan, penulis mengemukakan tiga hal yang harus menjadi kerangka lembaga baru tersebut. Pertama, harus disadari bahwa pertimbangan yang diberikan akan memiliki spiritualitasnya sendiri, di tengah-tengah orientasi PBB sendiri yang bersandarkan filsafat materialisme dalam segenap teori pembangunan yang sekuler yang jauh dari ukuran-ukuran keagamaan. Kedua, pertimbangan yang diberikan memiliki latar belakang dinamika masing-masing agama yang penuh dengan perubahan, yang berarti ia adalah hasil dan sebuah proses yang belum selesai. Ketiga, proses yang menghasilkan pertimbangan-pertimbangan itu harus dilihat dari sudut pandangan dialog antar agama, bukannya konfrontasi antara agama dan materialisme.

Mengenai hal pertama, sudah jelas bahwa acuan materialistik sekarang merupakan bahan pertimbangan satu-satunya bagi organisasi tingkat dunia tersebut. Dasar-dasar pertimbangan geopolitik yang benar-benar materialistik dalam orientasi, merupakan satu-satunya nafas dalam mengambil keputusan. Ini terjadi, karena lembaga tertinggi dunia itu meneruskan proses pengambilan keputusan-keputusan nasional yang hampir seluruhnya didasarkan pada pemikiran materialistik masing-masing negara. Akibatnya, terjadilah perbenturan kepentingan, antara negara-negara besar yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

Dalam lingkup pikiran materialistik yang dominan, pertim-

bangan-pertimbangan spiritual yang dibawakan oleh berbagai agama tentu dirasa tidak diperlukan bagi PBB. Tetapi, kemacetan-kemacetan dalam pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh sederetan pertentangan yang ada kini, membuat setiap pertimbangan keagamaan menjadi kebutuhan tersendiri yang dapat membawa pemecahan, melalui pendekatan spiritual yang holistik. Di sinilah nantinya akan terasa adanya keperluan membentuk dewan baru itu.

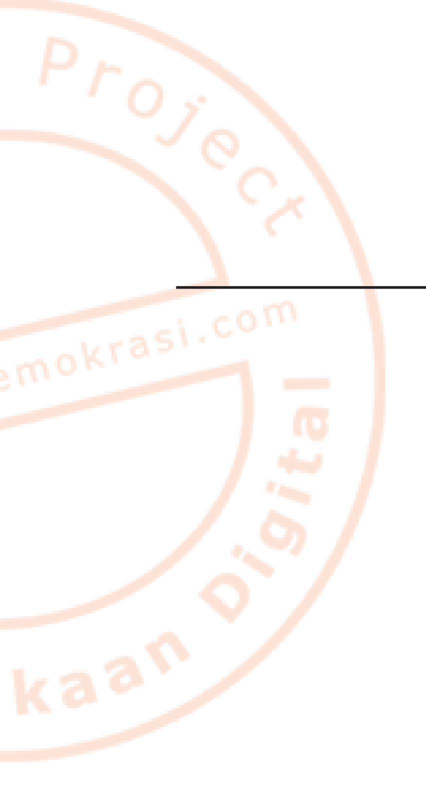
*****

Sedangkan pertimbangan-pertimbangan spiritual itu hanya pencerminan belaka dan dinamika yang terjadi di masing-masing agama. Aspek-aspek tradisionalisme dan pembaharuan dalam masing-masing agama terjadi dalam skala yang sangat luas, dan merupakan proses yang memberikan bekas mendalam atas perilaku perorangan maupun kelompok dalam masing-masing agama. Ini berarti, lembaga baru itu harus memperhitungkan aspek-aspek tradisional yang dipelihara dan langkah-langkah pembaharuan yang diambil oleh tiap agama, dan dari pengalaman tersebut baru dapat diperoleh pertimbangan yang matang untuk dibawakan kepada lembaga tertinggi dunia tersebut. Hanya dengan cara inilah, sebuah pertimbangan akan memiliki kematangan spiritual yang diperlukan, guna menghadapi dasar-dasar materialistik dari keputusan yang diambil oleh masing-masing negara.

Sedangkan aspek ketiga yang dikemukakan penulis, yaitu watak saling melengkapi dan tidak konfrontatif antara berbagai peradaban dunia, merupakan sebuah latar belakang yang diperlukan di masa-masa yang akan datang, sedangkan hal itu telah melatar belakangi keputusan-keputusan bersama berbagai cabang dan anak cabang dari lembaga tertinggi dunia itu. Produk-produk UNESCO, Komisariat Tinggi PBB untuk HAM, konferensi antar bangsa mengenai lingkungan di Rio de Janeiro beberapa

tahun lalu dan kegiatan-kegiatan sejenis, seluruhnya membawa produk-produk saling melengkapi dan bukannya pendekatan persaingan antara berbagai peradaban.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa PBB memiliki dua jenis produk saat ini yang harus dipahami apabila kita menginginkan ia menjadi lebih kuat di masa depan. Kemacetan dalam pengambilan keputusan, baik kegagalan dalam memutuskan maupun kegagalan dalam melaksanakan keputusan, tampak jelas sekali akibat perbedaan kepentingan negara-negara besar. Sebaliknya, dibutuhkan pelestarian dunia dan isinya, berdasarkan pada sikap yang mengacu kepada kepentingan bersama semua negara di masa depan. Di sinilah PBB dapat menyampaikan keputusan-keputusan yang membuatnya menjadi badan tertinggi dunia yang diperlukan di masa depan, dan bukannya lembaga yang terpaku pada kemacetan-kemacetan di masa kini belaka. {}



Lampiran


Democracy
www.abad-de
Perpusta

LAMPIRAN

BAB I ISLAM DALAM DISKURSUS IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN

Adakah Sistem Islami?	Memorandum	22-Jul-2002
Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran	Tidak Terlacak	
Islam: Pokok dan Rincian	Kedaulatan Rakyat	14-Feb-2003
Islam dan Deskripsinya	Tidak Terlacak	
Islam dan Formalisme Ajarannya	Duta Masyarakat	8-Jul-2002
Islam: Pribadi dan Masyarakat	Duta Masyarakat	14-Feb-2003
Islam: Sebuah Ajaran Kemasyarakatan	Duta Masyarakat	24-May-2002
Islam: Agama Populer Ataukah Elitis?	Kompas	2-Jun-2002
Islam: Apakah Bentuk Perlawanannya?	Kompas	16-May-2002
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (1)	Kedaulatan Rakyat	4-Mar-2002
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (2)	Kedaulatan Rakyat	5-Apr-2002
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (3)	Kedaulatan Rakyat	7-Apr-2002
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (4)	Kompas	4-Apr-2002
Islam: Ideologis Ataukah kultural? (5)	Suara Pembaruan	
Islam: Gerakan Ataukah Kultur?	Tidak Terlacak	
Islam ku, Islam Anda, Islam Kita	Kedaulatan Rakyat	29-Apr-2003
Kaum Muslimin dan Cita-Cita	Kedaulatan Rakyat	29-Apr-2003
Islam dan Orientasi Bangsa	Kedaulatan Rakyat	18-Aug-2002

BAB II ISLAM NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT

Negara Islam, Adakah Konsepnya?	Kompas	18-Apr-2002
Islam dan Perjuangan Negara Islam	Memorandum	22-Jun-2002
Negara Berideologi Satu Bukan Dua	Tidak Terlacak	
Islam, Negara dan Rasa Keadilan	Duta Masyarakat	31-Jul-2002
Negara dan Kepemimpinan Dalam Islam	Kedaulatan Rakyat	21-Dec-2002
NU dan Negara Islam (1)	Duta Masyarakat	1-Mar-2003
NU dan Negara Islam (2)	Duta Masyarakat	29-Mar-2003
Islam: Perjuangan Etis Ataukah Ideologis?	Kedaulatan Rakyat	30-Apr-2002
Yang Terbaik Ada Di Tengah	Kedaulatan Rakyat	28-Feb-2002

BAB III ISLAM KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Islam dan Hak Asasi Manusia	Duta Masyarakat	23-May-2002
Penafsiran Kembali Kebenaran Relatif	Kedaulatan Rakyat	7-Feb-2003
Islam dan Kepemimpinan Wanita	Suara Pembaruan	27-May-2002
Islam dan Dialog Antar Agama	Duta Masyarakat	26-Aug-2002
Umat Buddha dan Kesadaran Berbangsa	Pidato Hari Raya Nyepi	1-May-2003
Islam dan Idiosinkrasi Penguasa	Kedaulatan Rakyat	3-May-2002
Ulil Dengan Liberalismenya	Duta Masyarakat	28-Jan-2003
Haruskah Inul Diberangus?	Memorandum	10-May-2003
Inul, Rhoma dan Saya	Duta Masyarakat	15-May-2003
Aceh, Kekerasan dan Rasa Kebangsaan	Suara Pembaruan	13-Apr-2003
Ras dan Diskriminasi Di Negara Ini	Memorandum	15-Feb-2003
Keadilan dan Rekonsiliasi	Kompas	14-Feb-2004

BAB IV ISLAM DAN EKONOMI KERAKYATAN

Islam dan Orientasi Ekonomi	Sinar Harapan	21-Feb-2003
Islam, Moralitas dan Ekonomi	Tidak Terlacak	
Islam dan Keadilan Sosial	Memorandum	20-May-2003
Islam dan Masalah Kecukupan	Duta Masyarakat	23-Aug-2003
Islam dan Kesejahteraan Rakyat	Duta Masyarakat	1-Jun-2002
Islam: Antara Birokrasi dan Pasar Bebas	Kedaulatan Rakyat	19-May-2002
Islam dan Teori Pembangunan Nasional	Memorandum	30-Jun-2003
Islam dan Globalisasi Ekonomi	Tidak Terlacak	
Syari'atisasi dan Bank Syari'ah	Memorandum	28-Nov-2003
Ekonomi Rakyat Ataukah Ekonomi Islam?	Kedaulatan Rakyat	6-Jul-2003
Apakah Itu Ekonomi Rakyat?	Kata Pengantar Buku Hendi K	
Ekonomi Ditata Dari Orientasinya	Memorandum	3-Jan-2003
Benarkah Harus Ada Konsepnya?	Media Indonesia	5-Jan-2003
Kemiskinan, Kaum Muslimin dan Parpol	Media Indonesia	16-Jul-2002
Menyelesaikan Krisis Mengubah Keadaan	Kedaulatan Rakyat	20-Dec-2002

BAB V ISLAM PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA

Pendidikan Islam Harus Beragam	Kedaulatan Rakyat	21-Dec-2002
Bersabar dan Memberi Maaf	Memorandum	20-Feb-2003
Berkuasa dan Harus Memimpin	Sinar Harapan	7-Nov-2002
Tata Krama dan 'Ummatan Wahidatan	Majalah Tempo	5-Dec-2002
Agama Di TV dan Dalam Kehidupan	Kedaulatan Rakyat	2-Apr-2002
Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?		
Penyesuaian Ataukah Pembaharuan Terbatas?	Suara Pembaruan	16-Dec-2002
Pentingnya Sebuah Arti	Memorandum	22-Feb-2002

Sistem Budaya Daerah Kita dan Modernisasi	Suara Pembaruan	Tidak Terlacak
"Tombo Ati" Berbentuk Jazz?	Kedaulatan Rakyat	6-Jun-2003
Dicari: Keunggulan Budaya	Duta Masyarakat	5-Jul-2003
Keraton dan Perjalanan Budayanya	Kedaulatan Rakyat	1-Jan-2003
Akan Jadi Apakah Para Raja?	Suara Pembaruan	Tidak Terlacak
Islam dan Marshall McLuhan Di Surabaya	Memorandum	13-Jun-2002
Diperlukan Spiritualitas Baru	Memorandum	4-Apr-2002
Doktrin dan Tembang	Sinar Harapan	Tidak Terlacak

BAB VI ISLAM TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME

Terorisme Harus Dilawan	Tidak Terlacak	
Terorisme Di Negeri Kita	Memorandum	12-Oct-2002
Bersumber Dari Pendangkalan	Duta Masyarakat	8-Feb-2003
NU dan Terorisme Berkedok Islam	Duta Masyarakat	12-Apr-2003
Bom Di Bali dan Islam	Memorandum	Tidak Terlacak
Benarkah Mereka Terlibat Terorisme?	Kedaulatan Rakyat	27-Oct-2002
Benarkah Ba'asyir Teroris?	Duta Masyarakat	
Sikap Yang Benar Dalam Kasus Bali	Duta Masyarakat	Tidak Terlacak
Kepala Sama Berbulu, Pendapat Berlain-lain	Duta Masyarakat	12-Nov-2002
Tak Cukup Dengan Penamaan	Tidak Terlacak	
Memandang Masalah Dengan Jernih	Tidak Terlacak	
Kekurangan Informasi	Memorandum	Tidak Terlacak
Gandhi, Islam dan Kekerasan	Kedaulatan Rakyat	1-Nov-2002
Berbeda Tetapi Tidak Bertentangan	Tidak Terlacak	22-Nov-2002

BAB VII ISLAM PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL

Kita dan Perdamaian	Kedaulatan Rakyat	23-May-2003
Perdamaian Belum Terwujud Di Timur Tengah	Memorandum	8-Mar-2003
Dicari Perdamaian Perang Yang Didapat	Suara Pembaruan	Tidak Terlacak
Kita dan Pemboman Atas Irak	Memorandum	10-Nov-2002
Saddam Hussein dan Kita	Kedaulatan Rakyat	4-Apr-2003
Adakah Perdamaian Di Irak?	Memorandum	20-Apr-2003
Dapatkah Kita Hindarkan Perang Dunia Ke Tiga?	The Jakarta Post	14-Apr-2003
Haruskah Ada Kesepakatan?	Memorandum	Tidak Terlacak
Pertentangan Bukanlah Permusuhan	Tidak Terlacak	
Indonesia-Muangthai: Sebuah Kemungkinan Memperluas Kerjasama	Sinar Harapan	17-Jun-2002
Pembentukan Sebuah Forum Di Bangkok	Memorandum	Tidak Terlacak

Credit:

Edisi cetak buku ini diterbitkan pertama kali oleh The Wahid Institute, Agustus 2006. ISBN: 979-98737-0-3

Halaman buku pada Edisi Digital ini tidak sama dengan halaman edisi cetak. Untuk merujuk buku edisi digital ini, Anda harus menyebutkan "Edisi Digital" dan atau menuliskan *link*-nya. Juga disarankan mengunduh dan menyimpan file buku ini dalam bentuk pdf.





Yayasan Abad Demokrasi adalah lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk pemajuan demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan tradisi keberagamaan yang menghargai nilai-nilai demokrasi, pluralisme, perdamaian, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Lembaga ini berupaya menyebarkan seluas-luasnya ide-ide pencerahan dan demokrasi ke khalayak publik, melalui publikasi, penelitian, dan inisiatif-inisiatif lain terkait dengan isu tersebut.

Juga berupaya memfasilitasi transfer pengetahuan dan pembelajaran demokrasi dari berbagai belahan dunia. Lembaga ini juga *concern* terhadap upaya membangun tradisi akademik dan intelektual, sehingga proses demokratisasi Indonesia berjalan dalam fundamen yang kokoh dan visioner.

Lembaga ini juga akan mengembangkan kader-kader pendukung proses pemajuan demokratisasi di Indonesia.

www.abad-demokrasi.com

redaksi@abad-demokrasi.com